



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 AUDITED

LAK

,

└

O

\$

NERACA

LPE

-

LPSAL

%

A
R

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



BUPATI GUNUNGKIDUL

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan HidayahNya, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul berbasis akrual untuk Tahun Anggaran 2018 dapat kami selesaikan tepat waktu.

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penyisihan Piutang dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2018, Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2015.

Tujuan umum dari pembuatan LKPD menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 15 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 disusun dengan cara menggabungkan 46 (empat puluh enam) Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 menjadi LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp1.861.299.324.079,01 realisasinya mencapai sebesar Rp1.850.894.408.120,73 atau sebesar 99,44%.
- b. Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp 2.008.179.845.827,09 realisasinya mencapai sebesar Rp1.772.307.326.605,65 atau sebesar 88,25%.
- c. Surplus/Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan defisit sebesar (Rp146.880.521.748,08) dengan realisasi surplus sebesar Rp78.587.081.515,08.
- d. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp146.418.167.281,08 dengan realisasi sebesar Rp Rp146.418.167.281,08.
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp225.467.603.263,16.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL merupakan akumulasi SILPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp168.418.167.281,08.
- b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp168.418.167.281,08.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp225.467.603.263,16.
- d. Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari Pendapatan, Beban Operasi dan Beban Transfer serta Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan – LO sebesar Rp1.871.353.367.244,79 terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp222.937.347.870,23;
 - 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp1.477.767.470.295,46;
 - 3) Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp171.648.549.079,10.
- b. Beban – LO sebesar Rp1.648.114.652.691,52 terdiri dari :
 - 1) Beban Pegawai sebesar Rp821.759.507.450,00;
 - 2) Beban Persediaan sebesar Rp128.773.194.253,00;
 - 3) Beban Jasa sebesar Rp257.928.312.898,00;
 - 4) Beban Pemeliharaan sebesar Rp 21.063.582.479,00;
 - 5) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp40.838.292.362,00;
 - 6) Beban Bunga sebesar Rp0,00;
 - 7) Beban Hibah sebesar Rp0,00;
 - 8) Beban Bantuan Sosial Rp762.100.000,00;

- 9) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp138.103.249.996,69;
- 10) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp8.617.264.328,83;
- 11) Beban Transfer sebesar Rp230.269.158.925,00;
- c. Surplus dari Operasi sebesar Rp223.238.714.552,27.
- d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp584.419.095,00;
- e. Pos Luar Biasa sebesar Rp4.918.073.465,00
- f. Surplus LO sebesar Rp217.736.221.992,27.

4. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2018 mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2018.

- a. Jumlah Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.846.345.700.156,11 yang terdiri dari :
 - 1) Aset Lancar sebesar Rp320.711.459.920,78;
 - 2) Investasi Jangka Panjang sebesar Rp233.631.137.892,47;
 - 3) Aset Tetap sebesar Rp2.111.987.984.090,81;
 - 4) Dana Cadangan sebesar Rp0,00;
 - 5) Aset Lainnya sebesar Rp180.015.118.882,05.
- b. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.964.073.548,55 yang terdiri dari :
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp17.964.073.548,55;
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00.
- c. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.828.387.626.607,56.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2018 sebesar Rp2.828.381.626.607,56.

6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara selama T.A 2018. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018 berubah menjadi sebesar Rp226.758.354.207,16 dari saldo kas akhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp169.708.918.225,08.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

CaLK mengurai mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos keuangan dan informasi non keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

CaLK meliputi penjelasan atau rincian angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian, LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 berbasis akrual ini disusun, agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iv
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	x
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. Laporan Realisasi Anggaran	xi
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	xiii
3. Neraca	xiv
4. Laporan Perubahan Ekuitas	xvi
5. Laporan Operasional	xvii
6. Laporan Arus Kas	xix
7. Catatan atas Laporan Keuangan	
Bab I Pendahuluan	1
Bab II EKonomi Makro dan Kebijakan Keuangan APBD	5
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	87
Bab IV Kebijakan Akuntansi	100
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	124
Bab VI Informasi Tambahan Atas Laporan Keuangan.....	246
Bab VII Penutup	280
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Uraian
1.	REKENING KORAN
2.	SURAT BUKTI KEPEMILIKAN DEPOSITO BERJANGKA
3.	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah : a. PDAM Tirta Handayani b. PD BPR Bank Daerah Gunungkidul
4.	Laporan Realisasi Dana Keistimewaan
5.	Ikhtisar Laporan APBDes
6.	Daftar Saldo Piutang Pajak
7.	Daftar Saldo Piutang Retribusi
8.	Daftar Saldo Piutang Bunga
9.	Daftar Saldo Piutang Denda
10.	Daftar Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
11.	Daftar Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Dipisahkan
12.	Daftar Mutasi Piutang Lainnya
13.	Daftar Penyisihan Piutang
14.	Daftar Saldo Piutang Ekstra Komptabel
15.	Daftar Penyertaan Modal Kepada BUMD
16.	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan
17.	Daftar Aset Tetap Ekstra Komptabel Berdasarkan Kelompok Rekening
18.	Daftar Aset Tetap Dalam Penguasaan Berdasarkan Kelompok Rekening
19.	Daftar Aset lainnya
20.	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
21.	Daftar Kewajiban Jangka Panjang

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi D.I Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013—2017	7
Tabel 2.2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013—2017	17
Tabel 2.3	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul, 2015 dan 2017	19
Tabel 2.4	Hasil Penghitungan ICOR Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	20
Tabel 2.5	Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Menurut Pendapatan (ribu rupiah) Tahun 2013-2017	21
Tabel 2.6	Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Gunungkidul dengan Wilayah Referensi Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017	31
Tabel 2.7	Hasil Analisis <i>Tipologi Klassen</i> Kabupaten Gunungkidul dengan Wilayah Referensi D.I. Yogyakarta Tahun 2017	32
Tabel 2.8	Hasil Analisis Overlay Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017	33
Tabel 2.9	Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018	40
Tabel 2.10	Matrik Prioritas Pembangunan	41
Tabel 2.11	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018	50
Tabel 2.12	Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018	55
Tabel 2.13	Proyeksi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2018	56

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013—2017 (persen)	8
Gambar 2.2	PDRB Per Kapita Provinsi D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013—2017 (Juta rupiah)	9
Gambar 2.3	Inflasi Tahunan Provinsi D.I Yogyakarta, 2013—2017 (persen)	10
Gambar 2.4	Realisasi Pendapatan Pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) 2013-2017	11
Gambar 2.5	Garis Kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta (rupiah), Tahun 2013-2017	12
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi D.I.Yogyakarta, Tahun 2013-2017	13
Gambar 2.7	Rasio Gini Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2013-2017	14
Gambar 2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2017	15
Gambar 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul ADHB dan ADHK Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)	16
Gambar 2.10	Inflasi Kota Wonosari, Tahun 2013—2017 (persen)	18
Gambar 2.11	Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017	20
Gambar 2.12	Garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul (rupiah) Tahun 2013-2017	22
Gambar 2.13	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul (rupiah) Tahun 2013-2017	23
Gambar 2.14	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul (rupiah) Tahun 2013-2017	23
Gambar 2.15	Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	24
Gambar 2.16	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	25
Gambar 2.17	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	26
Gambar 2.18	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	27

Gambar 2.19	Pengeluaran Per Kapita yang di sesuaikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	28
Gambar 2.20	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	28
Gambar 2.21	Hasil Penghitungan Analisis LQ Kabupaten Gunungkidul dengan Wilayah Referensi D.I. Yogyakarta Tahun 2017	29
Gambar 2.22	Hasil Analisis MRP Kabupaten Gunungkidul dengan Wilayah Referensi Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017	30
Gambar 2.23	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019	36



BUPATI GUNUNGKIDUL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, berbasis AkruaI yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2015.

Wonosari, 31 Desember 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL, 





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah		47.137.026.586,00	51.299.015.171,00	108,83	43.686.045.795,82
Pendapatan Retribusi Daerah		36.747.368.399,00	34.184.023.146,00	93,02	34.783.664.615,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		14.370.184.563,64	14.373.326.016,87	100,02	13.088.999.290,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		119.138.811.822,44	127.128.093.762,31	106,71	179.811.333.687,56
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		217.393.391.371,08	226.984.458.096,18	104,41	271.370.043.388,71
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak		26.533.927.777,00	20.375.691.123,00	76,79	26.468.644.452,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.658.072.431,00	2.330.959.941,00	87,69	2.344.005.472,00
Dana Alokasi Umum		938.221.136.000,00	938.221.136.000,00	100,00	938.221.136.000,00
Dana Alokasi Khusus		322.400.947.000,00	303.863.880.056,00	94,25	283.708.648.102,00
Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan		1.289.814.083.208,00	1.264.791.667.120,00	98,06	1.250.742.434.026,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian		117.574.520.000,00	117.574.520.000,00	100,00	160.667.997.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		117.574.520.000,00	117.574.520.000,00	100,00	160.667.997.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		87.521.058.475,93	95.691.354.387,93	109,34	89.029.917.919,39
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		87.521.058.475,93	95.691.354.387,93	109,34	89.029.917.919,39
Bantuan Keuangan Provinsi					
Bantuan Keuangan khusus		1.967.352.000,00	1.729.852.000,00	87,93	18.240.217.899,00
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi		1.967.352.000,00	1.729.852.000,00	87,93	18.240.217.899,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.496.877.013.683,93	1.479.787.393.507,93	98,86	1.518.680.566.844,39
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah		138.028.919.024,00	135.122.556.516,62	97,89	5.170.592.350,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00	51.884.216.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		147.028.919.024,00	144.122.556.516,62	98,02	57.054.808.350,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.861.299.324.079,01	1.850.894.408.120,73	99,44	1.847.105.418.583,10
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		896.819.323.607,42	862.800.267.530,00	96,21	845.856.903.059,50
Belanja Barang		404.724.197.884,00	348.479.175.300,00	86,10	347.304.478.779,88
Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah		23.364.375.000,00	19.599.136.700,00	83,88	22.234.698.095,00
Bantuan Sosial		907.900.000,00	762.100.000,00	83,94	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		1.325.815.796.491,42	1.231.640.679.530,00	92,90	1.215.396.079.934,38

Uraian	Catatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		44.041.500.000,00	43.883.631.085,00	99,64	37.594.740.572,00
Belanja Peralatan dan Mesin		60.487.953.147,00	54.343.833.841,50	89,84	66.558.569.367,92
Belanja Gedung dan Bangunan		99.958.092.170,00	88.672.482.347,21	88,71	113.023.915.402,60
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		189.049.705.880,00	116.825.871.316,94	61,80	164.806.828.414,86
Belanja Aset Tetap Lainnya		482.824.500,00	460.603.120,00	95,40	14.861.190.157,25
Belanja Aset Lainnya		912.600.000,00	649.495.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		394.932.675.697,00	304.835.916.710,65	77,19	396.845.243.914,63
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga		55.885.878.088,67	4.918.073.465,00	8,80	2.636.676.819,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		55.885.878.088,67	4.918.073.465,00	8,80	2.636.676.819,00
JUMLAH BELANJA		1.776.634.350.277,09	1.541.394.669.705,65	86,76	1.614.878.000.668,01
TRANSFER					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan					
Bagi Hasil Pajak		5.517.308.000,00	5.517.308.000,00	100,00	4.119.172.000,00
Bagi Hasil Retribusi		6.087.971.400,00	5.558.072.750,00	0,00	5.378.424.225,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer/ Bagi Hasil ke Desa		11.605.279.400,00	11.075.380.750,00	95,43	9.497.596.225,00
Transfer Bantuan Keuangan					
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		218.657.785.150,00	218.654.845.150,00	100,00	234.767.610.400,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.082.431.000,00	1.082.431.000,00	100,00	1.082.431.000,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		219.940.216.150,00	219.837.276.150,00	99,95	235.850.041.400,00
JUMLAH BELANJA DAERAH DAN BELANJA TRANSFER		2.008.179.845.827,09	1.772.307.326.605,65	88,25	1.860.225.638.293,01
SURPLUS/DEFISIT		(146.880.521.748,08)	78.587.081.515,08	(53,50)	(13.120.219.709,91)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA		168.418.167.281,08	168.418.167.281,08	100,00	201.053.229.432,99
Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	0,00	0,00	91.743,00
Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan		168.418.167.281,08	168.418.167.281,08	100,00	201.053.321.175,99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	100,00	18.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		37.645.533,00	37.645.533,00	100,00	1.014.934.185,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran		21.537.645.533,00	21.537.645.533,00	100,00	19.514.934.185,00
PEMBIAYAAN NETTO		146.880.521.748,08	146.880.521.748,08	100,00	181.538.386.990,99
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			225.467.603.263,16	0,00	168.418.167.281,08

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

No.	Uraian	Catatan	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		168.418.167.281,08	201.023.229.432,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		168.418.167.281,08	201.023.229.432,00
	Sub Total		0,00	0,00
3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran		225.467.603.263,16	168.418.167.281,00
	Sub Total		225.467.603.263,16	168.418.167.281,00
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
5	Lain-lain		0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir		225.467.603.263,16	168.418.167.281,00





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2018 AUDITED DAN AUDITED 2017

Uraian	31 Desember 2018 Audited	31 Desember 2017 Audited
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	153.790.941.119,71	19.976.601.919,92
Setara Kas	50.000.000.000,00	134.000.000.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	280.073.825,47	10.609.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	319.934.981,00	503.886.498,00
Kas di BLUD	17.566.347.717,98	12.298.400.566,78
Kas Lainnya	4.800.897.563,00	2.919.261.240,38
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	18.186.311.561,00	14.875.355.689,00
<i>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</i>	<i>(8.480.309.234,48)</i>	<i>(6.953.634.936,57)</i>
Piutang Pajak Netto	9.706.002.326,52	7.921.720.752,43
Piutang Retribusi	547.515.511,00	819.924.896,00
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	<i>(132.611.151,15)</i>	<i>(182.987.765,32)</i>
Piutang Retribusi Netto	414.904.359,85	636.937.130,68
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.101.758.354,06	3.924.305.823,80
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	<i>(75.508.791,77)</i>	<i>(19.621.529,12)</i>
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	15.026.249.562,29	3.904.684.294,68
Piutang Lain-lain PAD yang sah	4.011.447.086,00	12.610.226.416,00
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah</i>	<i>(20.057.235,43)</i>	<i>(572.688.490,33)</i>
Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto	3.991.389.850,57	12.037.537.925,67
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.019.923.212,47
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>	<i>0,00</i>	<i>(10.099.616,06)</i>
Piutang Transfer Netto	0,00	2.009.823.596,41
Piutang Lainnya	0,00	0,00
<i>Penyisihan Piutang Lainnya</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Piutang Lainnya Netto	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	4.750.000,00	4.750.000,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Persediaan	64.809.967.984,39	82.671.909.890,78
Jumlah Aset Lancar	320.711.459.290,78	278.896.122.815,73
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	233.631.137.892,47	185.373.780.924,60
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	233.631.137.892,47	185.373.780.924,60
Jumlah Investasi Jangka Panjang	233.631.137.892,47	185.373.780.924,60
ASET TETAP		
Tanah	506.090.279.852,00	472.212.848.897,00
Peralatan dan Mesin	412.633.372.049,46	412.125.188.148,77
Gedung dan Bangunan	938.306.581.939,24	892.508.452.987,16
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.064.501.902.606,67	941.425.899.584,73
Aset Tetap Lainnya	29.734.512.374,48	28.311.958.374,89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.109.294.000,00	27.455.752.383,54
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(841.387.958.731,04)</i>	<i>(859.595.794.939,12)</i>
Jumlah Aset Tetap	2.111.987.984.090,81	1.914.444.305.436,97

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017 Audited
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Kerjasama Pemanfaatan	188.750.000,00	188.750.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	28.343.642.230,32	24.519.085.689,32
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(11.813.778.405,55)	(8.854.406.121,31)
Aset Tak Berwujud Netto	16.529.863.824,77	15.664.679.568,01
Aset Lain-lain	163.296.505.057,28	19.563.527.112,37
Jumlah Aset Lainnya	180.015.118.882,05	35.416.956.680,38
JUMLAH ASET	2.846.345.700.156,11	2.414.131.165.857,68
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.290.750.944,00	1.290.750.944,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.234.346.588,55	1.389.248.916,42
Utang Belanja	14.864.485.591,00	8.008.559.359,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	574.490.425,00	1.217.988.400,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	17.964.073.548,55	11.906.547.619,42
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	17.964.073.548,55	11.906.547.619,42
EKUITAS		
Ekuitas	2.828.381.626.607,56	2.402.224.618.238,26
JUMLAH EKUITAS	2.828.381.626.607,56	2.402.224.618.238,26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.846.345.700.156,11	2.414.131.165.857,68

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	2018 (Audited)	2017 (Audited)
EKUITAS AWAL	2.402.224.618.238,26	2.402.224.618.238,26
Surplus/Defisit - LO	217.736.221.992,27	
Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar	208.420.786.377,03	
JUMLAH EKUITAS AKHIR	2.828.381.626.607,56	2.402.224.618.238,26

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
1	KEGIATAN OPERASIONAL		
2	PENDAPATAN		
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4	Pendapatan Pajak Daerah	54.650.246.793,00	45.931.565.362,82
5	Pendapatan Retribusi Daerah	33.932.642.817,34	35.207.683.239,66
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.108.750.327,05	3.924.304.941,99
7	Lain-lain PAD Yang Sah	118.245.707.932,84	191.681.782.382,27
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 S.D 7)	221.937.347.870,23	276.745.335.926,74
9	PENDAPATAN TRANSFER		
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN		
11	Dana Bagi Hasil Pajak	20.375.691.123,00	26.468.644.452,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.330.959.941,00	2.344.005.472,00
13	Dana Alokasi Umum	938.221.136.000,00	938.221.136.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	303.863.880.056,00	283.708.648.102,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	1.264.791.667.120,00	1.250.742.434.026,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		
17	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
18	Dana Penyesuaian	117.574.520.000,00	160.667.997.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (17 + 18)	117.574.520.000,00	160.667.997.000,00
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	93.671.431.175,46	90.265.756.113,76
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	1.729.852.000,00	18.240.217.899,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (21 + 23)	95.401.283.175,46	108.505.974.012,76
25	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 19 + 24)	1.477.767.470.295,46	1.519.916.405.038,76
26	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
27	Pendapatan Hibah	162.648.549.079,10	107.823.876.086,65
28	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
29	Pendapatan Lainnya	9.000.000.000,00	51.884.216.000,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (27 S.D 29)	171.648.549.079,10	159.708.092.086,65
31	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 25 + 30)	1.871.353.367.244,79	1.956.369.833.052,15
32	BEBAN		
33	Beban Pegawai	821.759.507.450,00	810.009.133.516,50
34	Beban Persediaan	128.773.184.253,00	202.811.570.790,91
35	Beban Jasa	257.928.312.898,00	236.648.023.589,33
36	Beban Pemeliharaan	21.063.582.479,00	22.904.211.715,00
37	Beban Perjalanan Dinas	40.838.292.362,00	41.709.840.776,00
38	Beban Bunga	0,00	0,00
39	Beban Subsidi	0,00	0,00
40	Beban Hibah	0,00	22.234.698.095,00
41	Beban Bantuan Sosial	762.100.000,00	0,00
42	Beban Penyusutan dan Amortisasi	138.103.249.996,69	128.110.909.275,82
43	Beban Penyisihan Piutang	8.617.264.328,83	1.743.825.078,69
44	Beban Transfer	230.269.158.925,00	246.565.626.025,00
45	Beban Lain-lain	0,00	0,00
46	JUMLAH BEBAN (33 sd 45)	1.648.114.652.692,52	1.712.737.838.862,25
47	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (31 - 46)	223.238.714.552,27	243.631.994.189,90

No	Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
48	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
49	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	364.848.461,00	1.135.817.000,00
50	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
51	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	(949.267.556,00)	(2.786.470.483,88)
52	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
53	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
54	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (49 S.D 53)	(584.419.095,00)	(1.650.653.483,88)
55	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (47 - 54)	222.654.295.457,27	241.981.340.706,02
56	POS LUAR BIASA		
57	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
58	Beban Luar Biasa	4.918.073.465,00	0,00
59	JUMLAH POS LUAR BIASA (57 sd 58)	4.918.073.465,00	0,00
60	SURPLUS/DEFISIT- LO (55-60)	217.736.221.992,27	241.981.340.706,02





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas :			
Penerimaan Pajak Daerah		51.139.136.488,00	43.686.045.795,82
Penerimaan Retribusi Daerah		34.040.470.491,00	34.279.779.242,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		14.373.326.016,87	13.088.999.290,33
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		126.216.607.458,31	178.288.424.562,56
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		20.375.691.123,00	26.468.644.452,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.330.959.941,00	2.344.005.472,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		938.221.136.000,00	938.221.136.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		303.863.880.056,00	283.708.648.102,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		117.574.520.000,00	160.667.997.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil pajak		95.691.354.387,93	89.029.917.919,39
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		1.729.852.000,00	18.240.217.899,00
Penerimaan Hibah		135.122.556.516,62	5.170.592.350,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		9.000.000.000,00	51.884.216.000,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.849.679.490.478,73	1.845.078.624.085,10
Arus Keluar Kas :			
Pembayaran Pegawai		862.800.267.530,00	845.856.903.059,50
Pembayaran Barang		348.479.175.300,00	347.304.478.779,88
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		19.599.136.700,00	22.234.698.095,00
Pembayaran Bantuan Sosial		762.100.000,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		219.837.276.150,00	235.850.041.400,00
Pembayaran Tak Terduga		4.918.073.465,00	2.636.676.819,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5.517.308.000,00	4.119.172.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		5.558.072.750,00	5.378.424.225,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.467.471.409.895,00	1.463.380.394.378,38
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		382.208.080.583,73	381.698.229.706,72

Uraian	Catatan	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas :			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	757.927.000,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		149.555.798,00	27.000.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		745.426.863,00	737.981.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		894.982.661,00	1.522.908.000,00
Arus Keluar Kas :			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		43.883.631.085,00	37.594.740.572,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		54.993.328.841,50	66.558.569.367,92
Perolehan Gedung dan Bangunan		88.672.482.347,21	113.023.915.402,60
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		116.825.871.316,94	164.806.828.414,86
Perolehan Aset Tetap Lainnya		460.603.120,00	14.861.190.157,25
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		21.500.000.000,00	18.500.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		326.335.916.710,65	415.345.243.914,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(325.440.934.049,65)	(413.822.335.914,63)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas :			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		0,00	91.743,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	91.743,00
Arus Keluar Kas :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		37.645.533,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pengembalian Dana Transfer kepada Pemerintah Pusat		0,00	1.014.934.185,00
Jumlah Arus Keluar Kas		37.645.533,00	1.014.934.185,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(37.645.533,00)	(1.014.842.442,00)

Uraian	Catatan	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas :			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		155.110.486.985,87	154.200.250.109,15
BOSNAS		0,00	0,00
BOSNAS Sekolah Swasta dan SLB		0,00	9.134.360.000,00
Hibah Pihak Ketiga (CSR)		0,00	161.625.000,00
Hibah APBN untuk Sekolah Negeri dan Swasta		0,00	9.335.020.800,00
Uang Persediaan		7.769.000.000,00	6.854.822.600,00
Jumlah Arus Masuk Kas		162.879.486.985,87	179.686.078.509,15
Arus Keluar Kas :			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		155.110.486.985,87	152.993.350.140,15
BOSNAS		0,00	0,00
BOSNAS Sekolah Swasta dan SLB		0,00	9.134.360.000,00
Hibah Pihak Ketiga (CSR)		0,00	161.625.000,00
Hibah APBN untuk Sekolah Negeri dan Swasta		0,00	9.335.020.800,00
Uang Persediaan		7.769.000.000,00	6.854.822.600,00
Jumlah Arus Keluar Kas		162.879.486.985,87	178.479.178.540,15
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	1.206.899.969,00
Kenaikan (Penurunan) Kas		56.729.501.001,08	(31.932.048.680,91)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		169.708.918.225,08	201.137.080.407,99
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		226.438.419.226,16	169.205.031.727,08
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		319.934.981,00	503.886.498,00
Saldo Akhir Kas		226.758.354.207,16	169.708.918.225,08

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama satu periode Tahun Anggaran 2018.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyampaikan informasi yang transparan dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan di Tahun Anggaran 2018 yaitu membandingkan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, dengan anggaran yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui sisa perhitungan tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 18);
- r. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- s. Peraturan Bupati Gunungkidul. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2015;
- t. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018;
- u. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2018 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, yang menjelaskan tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Bab IV Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana, dan pos komponen Laporan Arus Kas.
- Bab VI Informasi Tambahan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Bab VII Penutup.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN APBD

2. Latar Belakang

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak $\pm$ 39 km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan, 144 Desa dan 1.431 Padukuhan.

Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ($\pm$ 90 %) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa : batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa.

Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai garis pantai yang cukup panjang terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo, serta memiliki pulau. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan.

Kabupaten Gunungkidul juga masuk kedalam situs Geopark Gunung Sewu yang terletak antara Yogyakarta dan Pacitan. Kawasan ini memanjang arah barat - timur melintasi 3 wilayah kabupaten (Gunungkidul, Wonogiri dan Pacitan) dan 3 wilayah yaitu DIY, Jateng, Jatim. Luas 1.802 km². Geopark Gunung Sewu telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tanggal 13 Mei 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

yang didukung oleh UNESCO pada tanggal 19 September 2015 di Tottori, Jepang. Pada bulan Nopember 2015 Geopark Gunung Sewu menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Geopark Gunung Sewu terdiri dari 33 situs yang tersebar di 3 Geo Area, yaitu Geo Area Gunungkidul sebanyak 13 geo tapak, Geo Area Wonogiri sebanyak 7 geo tapak, dan Geo Area Pacitan sebanyak 13 geo tapak.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan melanjutkan pembangunan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021. Mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.

Untuk mencapai visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkan Misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
- 3) Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional
- 4) Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah
- 5) Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif
- 6) Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul sudah sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi yaitu serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, serta mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun sektor tersier.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pembangunan Daerah di Era Otonomi, telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri untuk lebih memajukan dan melakukan pembangunan di daerah masing-masing, maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan proses pembangunan daerahnya. Antara lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Maka setiap daerah harus mampu berkreasi dan mengoptimalkan outputnya guna meningkatkan kemajuan dan kemandirian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Output pemerintahan (baik pusat maupun daerah) yang paling utama adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari sisi sosial maupun ekonomi. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terarah sehingga kebijakan yang diterapkan tepat sasaran. Pengambilan kebijakan dalam pencapaian tujuan pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan, potensi wilayah dan kondisi perekonomian daerah.

2.1 Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro daerah disusun berdasar pada keadaan perekonomian Kabupaten Gunungkidul terkini dan proyeksi pada tahun 2018. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 tersebut diharapkan akan dapat dicapai melalui berbagai program kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas serta kebijakan pembangunan daerah tahun 2018.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 menggambarkan kondisi perekonomian yang diharapkan berdasarkan analisis data statistik dan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 serta perkiraan prospek perekonomian tahun 2017 dan tahun 2018.

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi ekonomi makro suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator yang diakui secara nasional untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah melalui data



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB secara nasional bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perekonomian suatu wilayah, PDRB juga dapat digunakan untuk menelaah kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi pembentuk PDRB. Peran PDRB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.

Sektor-sektor yang menunjukkan peningkatan kontribusi pada PDRB dari tahun sebelumnya dibandingkan tahun pelaksanaan merupakan sektor yang perlu diprioritaskan untuk didorong agar lebih signifikan dalam meningkatkan PDRB. Sebaliknya pada sektor-sektor yang mengalami stagnasi atau justru menurun perlu dilihat secara lebih mendalam apa penyebabnya, untuk kemudian dirumuskan kebijakan yang tepat sehingga akan lebih meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

2.2. Gambaran Umum Makro Ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDB)

Untuk menyusun kebijakan ekonomi makro daerah tahun 2018 perlu dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan dengan tema pembangunan nasional 2018 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Tema pembangunan tahun 2018 adalah: “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Disamping itu, perlu juga dilakukan analisis terhadap kondisi perekonomian terkini sebagai pijakan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk, serta diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari nilai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PDRB tersebut dapat diturunkan indikator penting yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan inflasi.

Perkembangan ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir, menunjukkan perkembangan yang baik dan selalu mengalami peningkatan. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang dihasilkan dalam perekonomian Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2013 mencapai 84,93 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2014 mampu mencapai 92,84 triliun rupiah. Pada tahun 2017 Nilai tambah ini kembali meningkat mencapai 119,17 triliun rupiah.

**Tabel 2.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi D.I Yogyakarta
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017**

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,13	10,52	10,64	10,41	10,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,58	0,58	0,54	0,52
C	Industri Pengolahan	13,62	13,59	13,11	13,22	13,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,12	0,13	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
F	Konstruksi	9,49	9,40	9,37	9,35	9,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,17	8,27	8,22	8,48	8,59
H	Transportasi dan Pergudangan	5,63	5,72	5,68	5,68	5,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,75	10,04	10,24	10,23	10,32
J	Informasi dan Komunikasi	8,92	8,51	8,13	8,14	8,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	3,88	3,97	3,94	3,89
L	Real Estat	6,85	7,00	7,02	7,10	7,03
M,N	Jasa Perusahaan	1,01	1,03	1,03	1,01	1,01



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,89	8,07	8,26	8,38	8,57
P	Jasa Pendidikan	8,03	8,19	8,48	8,19	8,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,47	2,45	2,52	2,51	2,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,53	2,53	2,55	2,57	2,61
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi D.I Yogyakarta padatahun 2017 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan. Sumbangan kategori ini mencapai 13,12 persen (angka ini sedikit menurun dari 13,22 persen di tahun 2016).

Selanjutnya kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mempunyai peranan mencapai 10,32 persen. Berikutnya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai peranan mencapai 10,01 persen.

Jika diamati dengan seksama, pada tabel 2.1. terlihat bahwa peranan kategori primer dalam lima tahun terakhir cenderung menurun, seperti kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari 11,13 persen pada tahun 2013 menurun hingga 10,01 persen pada tahun 2017, begitu juga dengan kategori Pertambangan dan Penggalan peranannya juga mengalami penurunan dari 0,58 persen di tahun 2013 menjadi 0,52 persen di tahun 2017. Peranan kategori sekunder juga perlahan-lahan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Kategori yang termasuk kedalam kategori sekunder pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 22,86 persen, mengalami sedikit peningkatan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya yang mempunyai peranan sebesar 22,80 persen. Sedangkan kategori tersier selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Tahun 2013 sektor ini hanya memberikan kontribusi 64,98 persen, dan pada tahun 2017 kontribusinya menjadi 66,59.

Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir struktur perekonomian Provinsi D.I Yogyakarta di dominasi oleh kategori yang termasuk kedalam kategori perekonomian tersier dan jasa yang menjadi penopang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

perekonomian D.I Yogyakarta, tentu saja hal ini tidak lepas dari predikat Provinsi D.I Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil), karena hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu sebab pengaruh Pergeseran harga telah ditiadakan.

**Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013–2017 (persen)**



Sumber : BPS Provinsi D.I Yogyakarta

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 kondisi perekonomian Provinsi D.I Yogyakarta dapat dikatakan stabil, walaupun berfluktuatif akan tetapi nilainya masih disekitar 5 persen setiap tahunnya. Hal ini jelas terlihat dari gambar 4.2, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,47 persen pada tahun 2013, sempat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

turun hingga menjadi 4,95 persen pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 5,26 persen pada akhir periode pelaporan.

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB Per Kapita)

PDRB nominal tahun berjalan apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka didapat PDRB perkapita. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain secara makro. Tetapi masih perlu diingat bahwa tidak semua faktor produksi yang dapat menimbulkan nilai tambah bagi daerah dimiliki oleh penduduk setempat, dan juga masih ada penduduk setempat yang mempunyai faktor produksi di daerah lain. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya Pergeseran kemakmuran.

Nilai PDRB Per kapita D.I. Yogyakarta selama periode 2013-2017 mengalami trend yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita Provinsi D.I Yogyakarta tercatat 23,62 juta Rupiah, secara nominal nilai ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 31,68 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB perkapita pada tahun 2017 tercatat sebesar 7,05 persen, nilai ini sedikit menurun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,31 persen.

Gambar 2.2. PDRB Per Kapita Provinsi D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013—2017 (Juta rupiah)



Sumber : BPS Provinsi D.I Yogyakarta



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.2.3. Inflasi.

Inflasi (untuk daerah perkotaan) merupakan salah satu indikator makro yang perkembangannya dimonitor secara ketat oleh pemerintah, karena besaran agregat inflasi secara langsung akan berdampak terhadap daya beli masyarakat berpendapatan tetap seperti pegawai negeri dan buruh/pekerja swasta. Inflasi terjadi akibat ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran pasar barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi oleh berbagai faktor seperti nilai tukar/kurs, volume uang beredar, bahkan dampak dari ekspektasi masyarakat. Dimensi lain yang terkena dampak negatif dari tingginya inflasi adalah meningkatnya nominal garis kemiskinan dan melemahnya *purchasing power parity* yang pada akhirnya akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

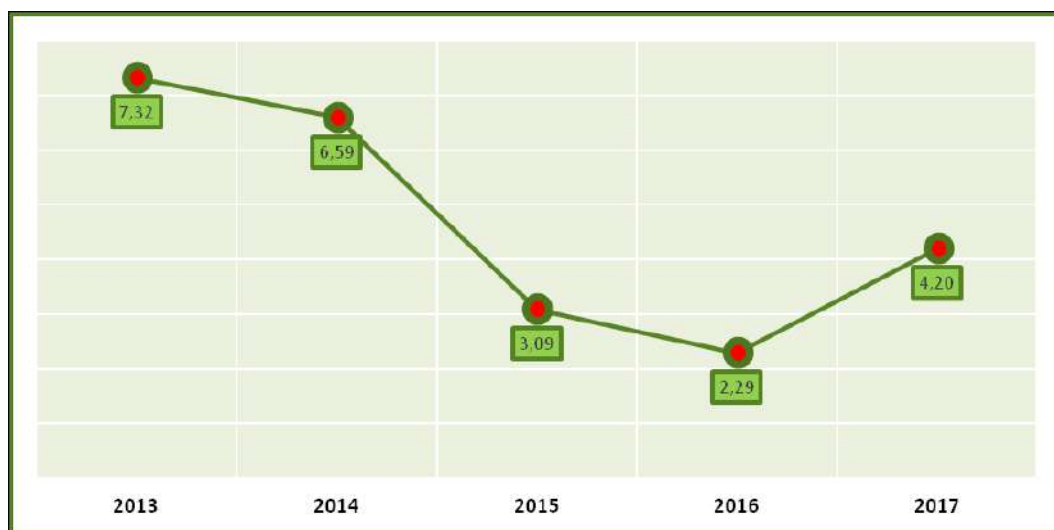
Pola yang menarik ditemukan pada data inflasi di Provinsi D.I Yogyakarta, dimana pola Pergeseran inflasi pada umumnya sama dengan pola inflasi di tingkat nasional. Inflasi tertinggi pada periode 2013 hingga 2017 terjadi pada tahun 2013, hal ini sama dengan pola inflasi Indonesia pada periode yang sama. Pada tahun 2013 inflasi tahunan Provinsi D.I Yogyakarta cukup tinggi mencapai 7,32 persen kemudian berangsur-angsur turun hingga mencapai 2,29 persen pada tahun 2016 dan di tahun 2017 kembali mengalami sedikit kenaikan inflasi menjadi 4,20 persen.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gambar 2.3. Inflasi Tahunan Provinsi D.I Yogyakarta, 2013–2017 (persen)



Sumber : BPS Provinsi D.I Yogyakarta

2.2.4 Keuangan Daerah

Salah satu indikator yang juga dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan pemangku kepentingan pada tingkat daerah adalah keuangan daerah. Di Provinsi D.I.Yogyakarta, kondisi keuangan daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan selama periode 2013-2017.

Gambar diatas menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017, PAD Provinsi D.I.Yogyakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, kenaikan PAD sebesar 20,43%, tahun 2015 sebesar 8,77%, tahun 2016 sebesar 5,06 % dan 10,65% pada tahun 2017.

Walaupun pendapatan asli daerah setiap tahun meningkat, dana perimbangan Provinsi D.I Yogyakarta ternyata juga ikut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan persentase peningkatannya selama periode 2013-2017 lebih cepat dibandingkan dengan PAD Provinsi D.I Yogyakarta.

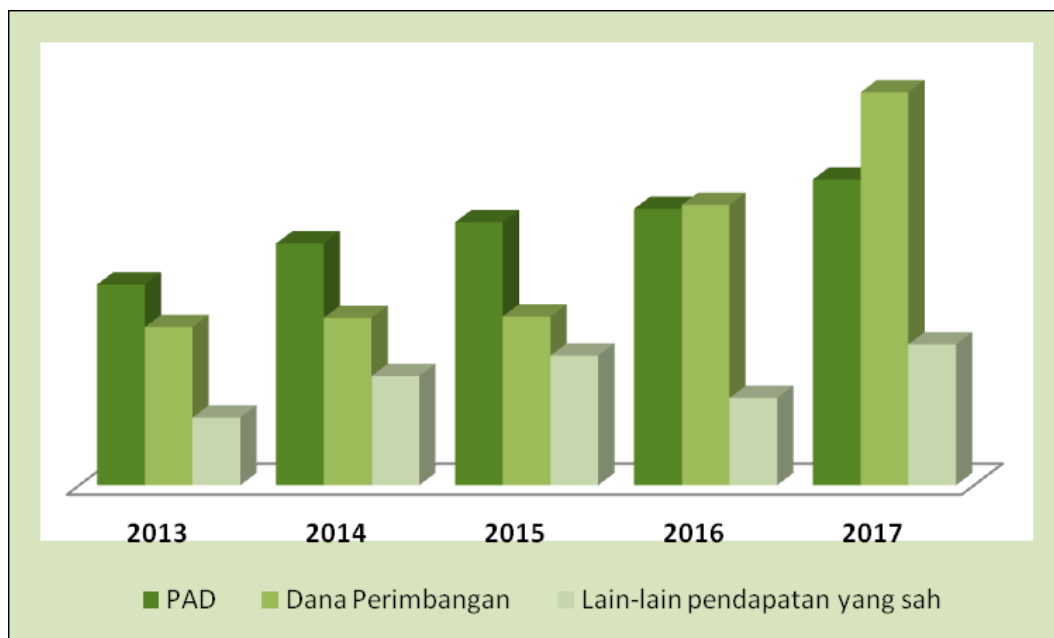
Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi D.I Yogyakarta belum menuju kearah kemandirian dimana antara dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 masih lebih besar dana perimbangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**Gambar 2.4. Realisasi Pendapatan Pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta
Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) 2013-2017**



Sumber : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka, 2018

2.2.5. Ketenagakerjaan.

Aspek ketenagakerjaan merupakan aspek pokok dalam pembahasan kesejahteraan penduduk. Dalam pembahasan ketenagakerjaan berkaitan dengan pengertiannya maka tidak bisa terlepas dari konsep Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja. TPAK Provinsi D.I Yogyakarta dari tahun 2013-2017 berfluktuatif. TPAK tahun 2013 mencapai 69,29 persen naik menjadi 71,05 persen pada tahun 2014 kemudian turun lagi menjadi 68,38 persen pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 71,96 persen di tahun 2016 sebelum akhirnya turun lagi menjadi 71,52 persen di tahun 2017.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017 sebesar 71,52 persen, yang berarti bahwa diantara 100 orang penduduk usia kerja



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

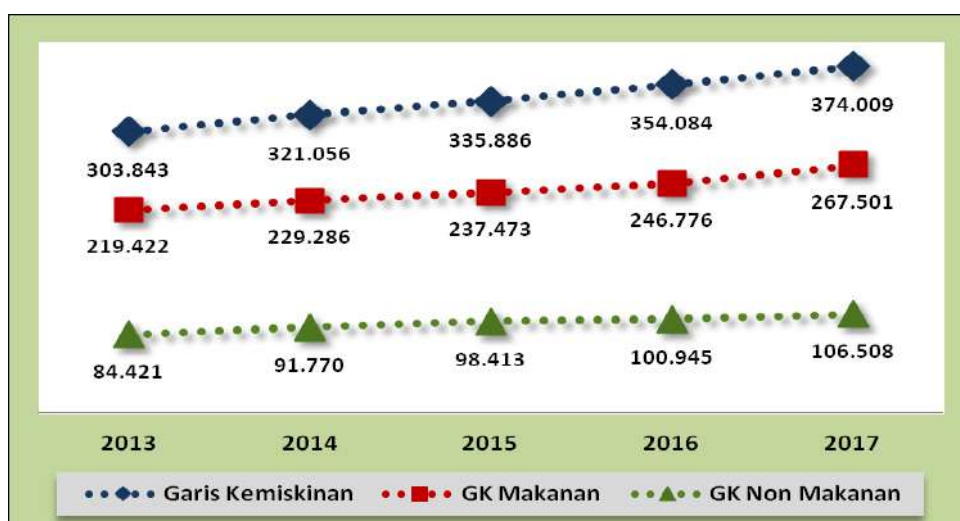
di Provinsi D.I. Yogyakarta terdapat sekitar 71-72 orang yang termasuk kedalam angkatan kerja.

Semakin rendah angka TPT berarti daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Angka TPT Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017 adalah 3,02 persen, yang berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja sebanyak 3-4 orang diantaranya termasuk pengangguran. Dengan demikian maka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi D.I Yogyakarta mencapai 96,98 persen. Jika dilihat dari trend, TPT Provinsi D.I Yogyakarta 2017 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini karena jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2013 TPT mencapai 3,24 persen kemudian meningkat terus sampai tahun 2015 menjadi 4,07 persen dan kembali turun menjadi 2,72 persen di tahun 2016.

2.2.6 Kemiskinan.

Garis kemiskinan adalah garis batas yang membedakan antara kelompok penduduk miskin dan tidak miskin. Garis ini menunjukkan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh individu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun non makanan (BPS DIY, 2018). Penduduk dengan nilai pengeluaran di bawah garis kemiskinan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sebaliknya penduduk dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar dari nilai garis kemiskinan dikategorikan sebagai bukan penduduk miskin.

Gambar 2.5. Garis Kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta (rupiah), Tahun 2013-2017





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gambar diatas menunjukkan perkembangan garis kemiskinan untuk wilayah D.I.Yogyakarta tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Garis Kemiskinan pada tahun 2013, tercatat 303.843 rupiah per kapita per bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa seseorang di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari 303.843 rupiah.

Garis Kemiskinan pada tahun 2014 mencapai 321.056 rupiah per kapita per bulan dan terus mengalami peningkatan untuk tahun selanjutnya. Pada tahun 2017 garis kemiskinan tercatat 374.009 rupiah per kapita per bulan. Secara rata-rata laju peningkatan garis kemiskinan selama tahun 2013 – 2017 adalah sebesar 5,33 persen per tahun.

Berdasarkan komponen pembentuknya, garis kemiskinan makanan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan total garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan memberikan sumbangan secara rata-rata sebesar 71,11persen terhadap total garis kemiskinan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun garis kemiskinan bukan makanan, secara rata-rata hanya memberikan sumbangan sebesar 28,53 persen pada kurun waktu yang sama

**Gambar 2.6. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2013-2017**





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gambar diatas memperlihatkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di D.I. Yogyakarta tahun 2013 – 2017. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat bahwa penduduk miskin D.I. Yogyakarta menunjukkan perkembangan sedikit berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kondisi tersebut tidak hanya berlaku untuk jumlah penduduk miskin secara absolut, namun juga untuk persentase penduduk miskin (P0).

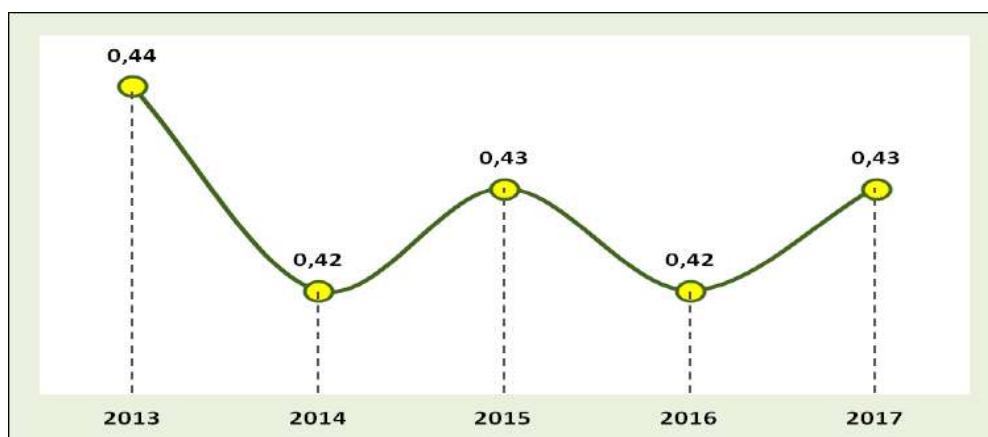
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 53,42 ribu jiwa. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin tercatat masih sebanyak 541, 95 ribu jiwa. Namun pada tahun 2017, angka penduduk miskin tersebut berkurang menjadi 488,53 ribu jiwa. Pencapaian tersebut berjalan cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta justru sempat menyentuh angka 550,23 ribu jiwa.

Setahun kemudian, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 494,94 ribu jiwa. Penurunan penduduk miskin pada periode 2015 – 2016 ini merupakan tingkat penurunan penduduk miskin yang tertinggi selama rentang waktu 2013 – 2017.

2.2.7 Rasio Gini.

Alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan lainnya adalah menggunakan koefisien gini (*gini ratio*). Koefisien semakin mendekati nol maka pendapatan semakin merata. Nilai 0,5-0,7 menggambarkan ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami ketidakmerataan rendah.

Gambar 2.7. Rasio Gini Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2013-2017





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Selama periode 2013-2017, *gini ratio* Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 nilai *gini ratio* D.I. Yogyakarta sebesar 0,44 kemudian turun menjadi 0,42 pada tahun 2014 dan kembali naik pada tahun 2015 menjadi 0,43. Di tahun 2016 nilai *gini ratio* D.I. Yogyakarta sebesar 0,42 dan kembali naik menjadi 0,43 di tahun 2017. Berdasarkan pengelompokkannya berarti tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang.

2.2.8 Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2014, IPM dihitung menggunakan metode baru. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Alasan kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik sudah tidak sesuai dalam penghitungan IPM karena capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Keuntungannya adalah terdapat indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan Pergeseran yang terjadi.

PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

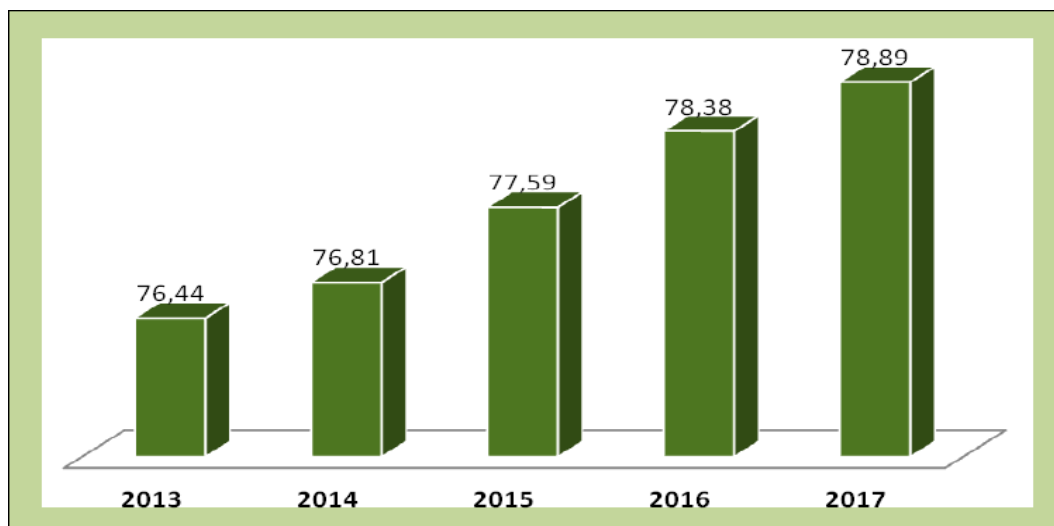


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gambar 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013-2017



Secara umum besarnya capaian IPM Provinsi D.I Yogyakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan capaian nilai IPM menandakan usaha-usaha pembangunan manusia telah berjalan, meskipun ada indikator yang mengalami kemajuan yang pesat dan ada juga yang lambat berkembang.

IPM Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2013 sebesar 76,44 poin, kondisi ini mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 76,81 poin atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,43 poin selama setahun. Di tahun 2015 IPM Provinsi D.I. Yogyakarta kembali mengalami peningkatan sebesar 0,78 poin dibandingkan dengan tahun 2014 menjadi 77,59 poin. Capaian IPM tahun 2016 pertumbuhannya palingtinggi dibandingkan tahun yang lain selama periode 2013-2017.

2.3. Gambaran Umum Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul.

2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto.

Nilai PDRB Gunungkidul atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 16,21 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,22 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang

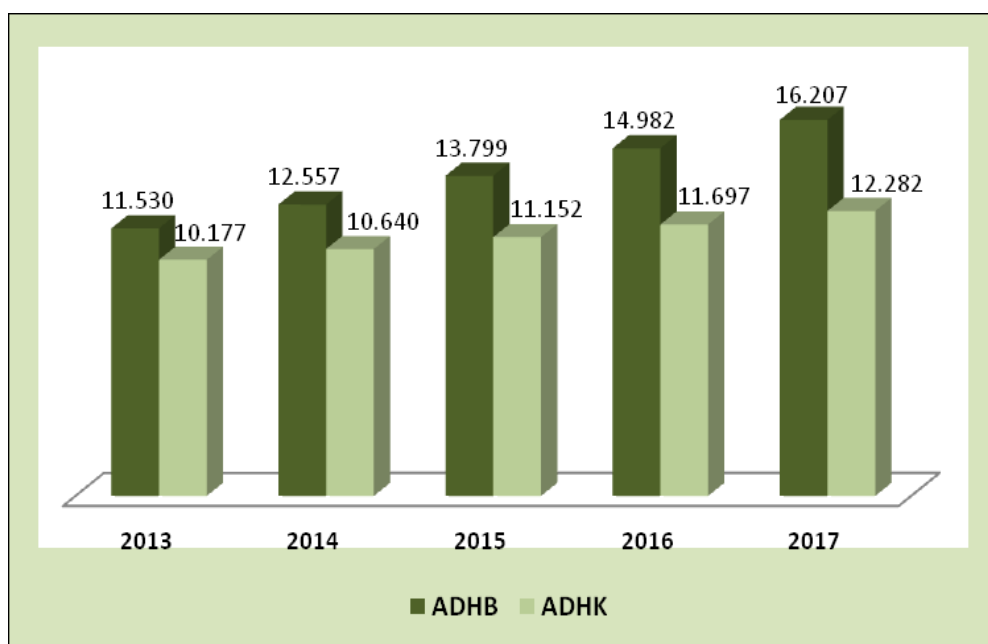


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

mencapai 14,98 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

**Gambar 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul
ADHB dan ADHK Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)**



Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 11,70 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 12,28 triliun rupiah pada tahun 2017.

Hal ini menunjukkan selama tahun 2017 Gunungkidul mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,00 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Gunungkidul didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Gunungkidul.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Gunungkidul pada tahun 2017 dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sumbangan kategori ini masih mencapai sekitar seperempat dari nilai PDRB yaitu mencapai 24,48 persen (angka ini menurun dari 25,28 persen di tahun 2016). Selanjutnya kategori Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mempunyai peranan yang sama yaitu mencapai 9,65 persen. Berikutnya kategori Industri Pengolahan sebesar 9,47 persen serta yang terakhir kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,38 persen. Kategori lain yang menyumbang lebih dari 5 persen adalah kategori informasi komunikasi; kategori jasa pendidikan; kategori penyediaan akomodasi dan makan minum; serta kategori transportasi dan pergudangan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

**Tabel 2.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013–2017**

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,48	1,42	1,37	1,31	1,25
B	Pertambangan dan Penggalian	26,43	25,09	25,62	25,28	24,48
C	Industri Pengolahan	9,42	9,59	9,31	9,38	9,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,18	0,17	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,62	9,54	9,41	9,40	9,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,69	8,97	8,83	9,22	9,38
H	Transportasi dan Pergudangan	5,23	5,25	5,13	5,05	4,97



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,45	5,78	5,90	5,90	5,92
J	Informasi dan Komunikasi	7,42	7,30	6,98	7,02	7,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,11	2,27	2,34	2,32	2,23
L	Real Estat	3,35	3,43	3,44	3,53	3,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,44	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,10	9,29	9,34	9,42	9,65
P	Jasa Pendidikan	5,89	6,15	6,35	6,15	6,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,97	1,97	2,01	2,00	2,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,18	3,26	3,28	3,35	3,43
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/Preliminary figures

** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Perekonomian Gunungkidul pada tahun 2017 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Gunungkidul tahun 2017 mencapai 5,00 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 4,89 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori konstruksi sebesar 7,71 persen. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2017 mencatat pertumbuhan yang positif.

Adapun kategori tersebut berturut-turut mencatat pertumbuhan sebagai berikut, kategori konstruksi mencapai 7,71 persen; kategori industri pengolahan sebesar 6,77 persen; informasi dan komunikasi 6,74 persen; kategori jasa lainnya 6,50 persen; kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,13 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,12 persen, kategori jasa perusahaan 6,08 persen, Kategori jasa pendidikan sebesar 6,07 persen diikuti kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,60 persen; kategori real estat sebesar 5,37 persen dan kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,12 persen.

Adapun kategori yang pertumbuhannya kurang dari lima persen adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,62



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

persen; kategori Transportasi dan Pergudangan 3,89 persen; kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,72 persen; kategori Pertambangan dan Penggalian 2,70 persen; kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,98 persen dan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,84 persen.

2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB Per Kapita).

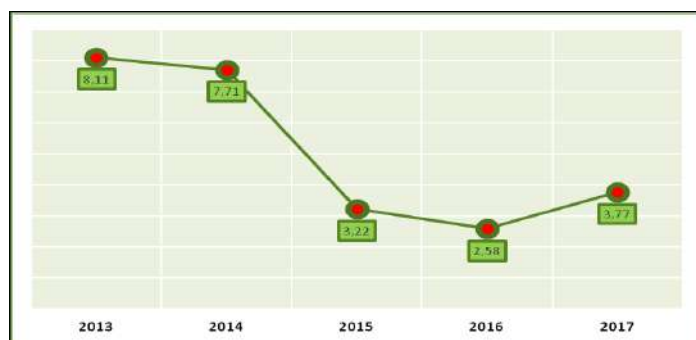
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2017, PDRB per kapita Gunungkidul mencapai 22,22 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 7,16 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita ini sedikit menurun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,49 persen.

2.3.3. Inflasi.

Inflasi di Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai pola/trend yang sama dengan inflasi di D.I Yogyakarta. Pada tahun 2013 inflasi tahunan Kabupaten Gunungkidul cukup tinggi mencapai 8,11 persen kemudian berangsur-angsur turun hingga mencapai 2,58 persen pada tahun 2016 dan di tahun 2017 kembali mengalami sedikit kenaikan inflasi menjadi 3,77 persen.

Gambar 2.10 Inflasi Kota Wonosari, Tahun 2013—2017 (persen)





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.3.4. Tingkat Kesempatan Kerja dan Pengangguran.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah.

TKK mencerminkan daya serap tenaga kerja pada suatu angkatan kerja. Artinya seberapa banyak angkatan kerja yang terserap masuk dalam lapangan kerja. Sementara angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan tergolong sebagai pengangguran terbuka. Perbandingan antara banyaknya pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Besarnya daya serap angkatan kerja yang masuk dalam lapangan kerja berbanding terbalik dengan besarnya pengangguran terbuka. Semakin tinggi daya serap angkatan kerja maka proporsi pengangguran terbuka semakin kecil nilainya dan sebaliknya.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) tingkat kesempatan kerja perempuan cenderung lebih tinggi dari tingkat kesempatan kerja laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja perempuan lebih banyak terserap pada pasar kerja dibandingkan angkatan kerja laki-laki.

Tabel 2.3 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul, 2015 dan 2017

Indikator	Tahun	
	2015	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,77	74,50
✓ TPAK Laki-laki	85,81	86,17
✓ TPAK Perempuan	57,19	63,96
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,90	1,65
✓ TPT Laki-laki	2,65	2,14
✓ TPT Perempuan	3,23	1,05
Tingkat Kesempatan Kerja	97,10	98,35
✓ TKK Laki-laki	97,35	97,86
✓ TKK Perempuan	96,77	98,95



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunungkidul mencapai 1,65 persen, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,90 persen. Angka pengangguran 1,65 persen berarti bahwa diantara 100 orang yang termasuk kedalam angkatan kerja sekitar 1-2 orang merupakan pengangguran.

2.3.5. Penghitungan ICOR.

Dengan menggunakan rasio kapital dan output, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Adapun hasil penghitungan ICOR tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4. Hasil Penghitungan ICOR Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
PDRB(ADHK 2010) (miliar Rp)	10 177,43	10 639,79	11 152,36	11 697,45	12 282,49
Pergeseran (miliar Rp)	481,45	462,36	512,57	545,08	585,05
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	2. 474,18	2 590,68	2 706,37	2 861,81	3 019,91
ICOR	5,14	5,60	5,28	5,25	5,16

Data di atas menunjukkan besaran ICOR yang cukup stabil dari sebesar 5,14 (2013); 5,60 (2014); 5,28 (2015); 5,25 (2016) dan menjadi 5,16 (2017). Mengalami kenaikan pada tahun 2014, pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan dan turun lagi hingga tahun 2017.

2.3.6. Keuangan Daerah.

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap pemerintah daerah memiliki peran serta tanggung jawab untuk mengelola pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran dan tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan mengelola secara efektif dan efisien sumber pendanaan, baik melalui penyerahan kewenangan perpajakan dan retribusi daerah dan skema transfer.

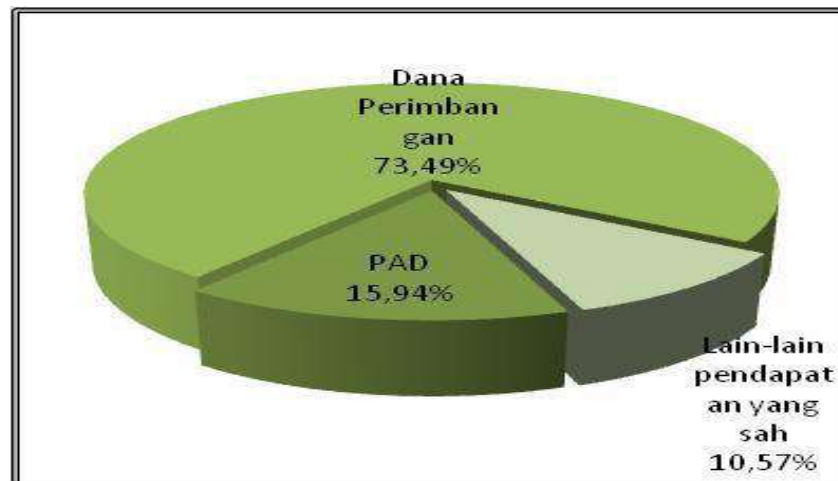


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pemerintah daerah selanjutnya mengelola dana dalam APBD. Pengelolaan dana tersebut secara simultan dijadikan instrumen kunci bagi pelaksanaan kebijakan keuangan public dengan persetujuan DPRD.

Gambar 2.11 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017



2.3.7. Derajat Desentralisasi.

PAD Kabupaten Gunungkidul, secara rata-rata untuk periode 2013-2017, hanya menyumbang sebesar 11,80 persen terhadap total pendapatan Kabupaten Gunungkidul. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Gunungkidul belum sepenuhnya mampu membiayai pengeluarannya sendiri secara menyeluruh.

Kemampuan Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan desentralisasi masih kurang. Jika dilihat per tahun, pada tahun 2017 derajat desentralisasi Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kategori rendah karena nilai 15,94 persen berada pada derajat desentralisasi kategori rendah, yakni 10,01%-21%. Namun demikian, tren derajat desentralisasi Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.3.8. Rasio Ketergantungan Daerah.

Selama periode 2013-2017, pendapatan Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh pendapatan yang berasal dari dana perimbangan (dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi).

Secara rata-rata, pada periode 2013- 2017 dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 69,51 persen dari total pendapatannya. Dengan posisi seperti ini maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Dalam matriks ketergantungan keuangan daerah, Kabupaten Gunungkidul dengan angka sebesar 69,51 persen berada dalam kategori sangat tinggi, artinya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.

**Tabel 2.5. Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul
Menurut Pendapatan (ribu rupiah) Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PAD	83.427.448	159.304.338	196.099.244	206.278.866	271.370.043
Dana Perimbangan	877.414.789	923.974.088	978.310.012	1.239.624.999	1.250.742.434
Lain-lain pendapatan yang sah	281.250.438	289.567.870	424.596.738	208.440.972	179.811.333
Jumlah	1.242.092.675	1.372.846.296	1.599.005.994	1.654.344.837	1.701.923.810
Derajat Desentralisasi	6,72	11,60	12,26	12,47	15,94
Rasio Ketergantungan	70,64	67,30	61,18	74,93	73,49

2.3.9. Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang bersifat mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, strategis, dan komprehensif. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran dengan metodologi yang valid dan dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah.

Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, metode penghitungan jumlah penduduk miskin yang digunakan oleh BPS dilakukan dengan pendekatan benchmark garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan dasar makanan maupun non makanan.

Seseorang dikatakan miskin bila berada dibawah garis kemiskinan. Pendekatan garis kemiskinan makanan digunakan standar kebutuhan hidup minimum 2100 Kilokalori didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan GK non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa.

Gambar 2.12 Garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul (rupiah) Tahun 2013-2017



Gambar tersebut diatas menunjukkan perkembangan garis kemiskinan untuk wilayah Gunungkidul tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Garis Kemiskinan pada tahun 2013, tercatat Rp238.438,00 per kapita per bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa seseorang di wilayah Kabupaten Gunungkidul akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari Rp238.438,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Garis Kemiskinan pada tahun 2014 mencapai Rp243.847 per kapita per bulan dan terus mengalami peningkatan untuk tahun selanjutnya. Pada tahun 2017 garis kemiskinan tercatat Rp277.261 perkapita per bulan. Secara rata-rata laju peningkatan garis kemiskinan selama tahun 2013 – 2017 adalah sebesar 3,93 persen.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami tren yang berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin tercatat masih sebanyak 152,37 ribu jiwa. Namun pada tahun 2017, angka penduduk miskin tersebut berkurang menjadi 135,74 ribu jiwa. Pencapaian tersebut berjalan cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Gunungkidul justru sempat menyentuh angka 155,00 ribu jiwa. Setahun kemudian, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 139,15 ribu jiwa.

Penurunan penduduk miskin pada periode 2015 – 2016 ini merupakan tingkat penurunan penduduk miskin yang tertinggi selama rentang waktu 2013 – 2017. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kab/kota lain di Provinsi D.I. Yogyakarta menempati peringkat kedua terbawah setelah Kabupaten Bantul.

Gambar perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin disajikan dalam Gambar dibawah ini.

**Gambar 2.13 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Gunungkidul (rupiah) Tahun 2013-2017**





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Selaras dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul selama periode 2013-2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Gunungkidul 2017 menurun dibandingkan kondisi tahun 2015 dan 2016. Penurunan P1 terjadi dari 2,93 menjadi 2,30 di tahun 2016 dan turun lagi menjadi 2,19 di tahun 2017. Hal serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan. Secara umum Indeks P2 Gunungkidul juga mengalami penurunan yaitu dari 0,59 pada kondisi 2016 menjadi 0,55 untuk keadaan tahun 2017. Nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Gunungkidul bisa dilihat di gambar 4.20.

Penurunan kedua nilai indeks (Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan) dari kurun waktu 2013-2017 ini mengandung makna bahwa kondisi kemiskinan di Gunungkidul menjadi semakin membaik. Artinya rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat dan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin semakin rendah. Jumlah dan persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan untuk daerah pedesaan telah berhasil turun.

**Gambar 2.14 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Gunungkidul (rupiah) Tahun 2013-2017**





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

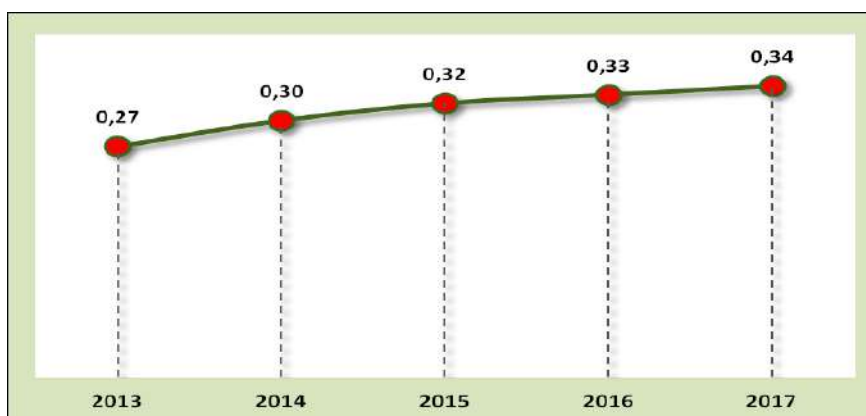
2.3.10. Rasio Gini.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak akan berdampak pada masyarakat bawah karena sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat „elit“ sedangkan sebagian masyarakat lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam keadaan miskin. Seperti sudah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yakni dengan menggunakan rasio gini.

Selama periode 2013-2017, *gini ratio* Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013 nilai *gini ratio* Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,27 kemudian naik menjadi 0,30 pada tahun 2014 dan kembali naik pada tahun 2015 menjadi 0,32. Di tahun 2016 nilai *gini ratio* Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,33 dan kembali naik menjadi 0,34 di tahun 2017.

Berdasarkan pengelompokkannya berarti tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Gunungkidul termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, nilai rasio gini di Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,34 masih lebih baik.

Gambar 2.15 Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.3.11. Indeks Pembangunan Manusia.

IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli).

Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Di tahun 2015, IPM dihitung menggunakan metode baru. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Alasan kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik sudah tidak sesuai dalam penghitungan IPM karena capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Keuntungannya adalah terdapat indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan Pergeseran yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

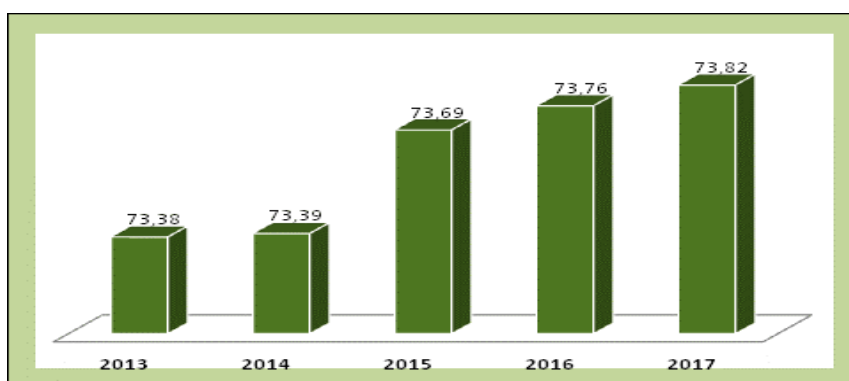
2.3.12. Perkembangan Indeks Kesehatan.

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

Secara umum angka harapan hidup di masing-masing daerah selalu mengalami kemajuan. Di tahun 2017, angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul mencapai 73,82 tahun artinya rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul dapat menjalani hidup kurang lebih selama 73 tahun. Kemajuan angka harapan hidup dapat digambarkan dengan membandingkannya antar tahun.

Perkembangan angka harapan hidup tahun 2013-2017 Gunungkidul tercatat mengalami peningkatan 0,44 per tahun.

**Gambar 2.16 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017**



2.3.13. Perkembangan Indeks Pendidikan.

Perkembangan komponen pendidikan direpresentasikan oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk untuk



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

menempuh pendidikan formal. Bobot kedua indikator ini masing-masing sebesar setengah dalam membentuk komponen pendidikan.

➤ **Perkembangan Harapan Lama Sekolah**

Harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 mencapai 12,94 tahun atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 12,92 tahun dan 12,93 tahun. Selama tahun 2013 - 2017, harapan lama sekolah Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan 0,45 tahun. Gambar dibawah ini menunjukkan harapan lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013-2017.

**Gambar 2.17 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017**



➤ **Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah.**

Indikator rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Bila angka partisipasi sekolah di Kabupaten Gunungkidul rendah maka kemungkinan besar angka rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul bergerak sangat lambat. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunungkidul mencapai 6,99 tahun atau mengalami peningkatan sebesar 0,37 tahun dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sedangkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

bila dibandingkan dengan tahun 2013, angka rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,77 tahun dalam kurun waktu lima tahun.

Angka rata-rata lama sekolah sebesar 6,99 tahun mengandung arti rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul hanya mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 6 SD atau putus sekolah pada kelas 1 SMP. Kondisi ini bahkan hampir dapat dikatakan hanya terjadi sedikit Pergeseran selama kurun waktu lima tahun yaitu periode tahun 2013-2017.

Idealnya harapan lama sekolah tidak berbeda jauh dengan rata-rata lama sekolah. Namun kenyataannya Kabupaten Gunungkidul memiliki gap yang cukup tinggi antara kedua indikator tersebut yaitu sebesar 5,95 tahun antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah.

Gambar 2.18 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017



2.3.14. Perkembangan Indeks Pendapatan.

Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah indeks pendapatan yaitu kemampuan untuk hidup layak. Komponen ini digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

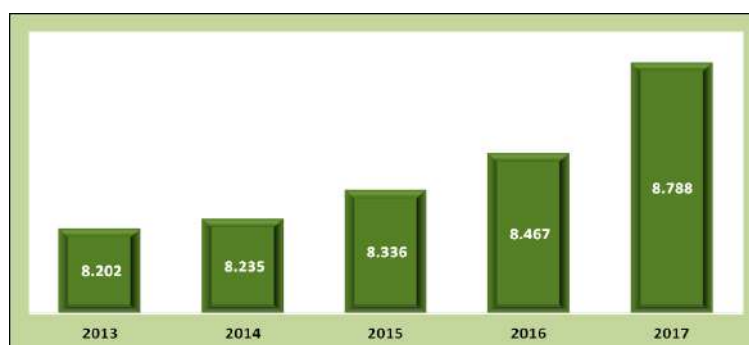
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam penghitungan pengeluaran per kapita disesuaikan, rata-rata pengeluaran per kapita dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Paritas daya beli telah menggunakan harga yang telah distandarkan dengan kondisi Jakarta Selatan sebagai rujukannya. Penggunaan standar harga ini untuk mengeliminasi perbedaan harga antar wilayah sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat diperbandingkan.

Pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 adalah sebesar 8,78 juta rupiah meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 8,467 juta rupiah. Kondisi tersebut juga meningkat dibandingkan dengan situasi pada tahun 2013 yang mempunyai paritas daya beli masyarakat sebesar 8,202 juta rupiah. Kenaikan paritas daya beli ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk dengan adanya kenaikan pendapatan.

Hal ini mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik.

**Gambar 2.19 Pengeluaran Per Kapita yang di sesuaikan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017**



2.3.15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.

Secara umum besarnya capaian IPM Kabupaten Gunungkidul selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan capaian nilai IPM menandakan usaha-usaha pembangunan manusia telah berjalan, meskipun ada



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

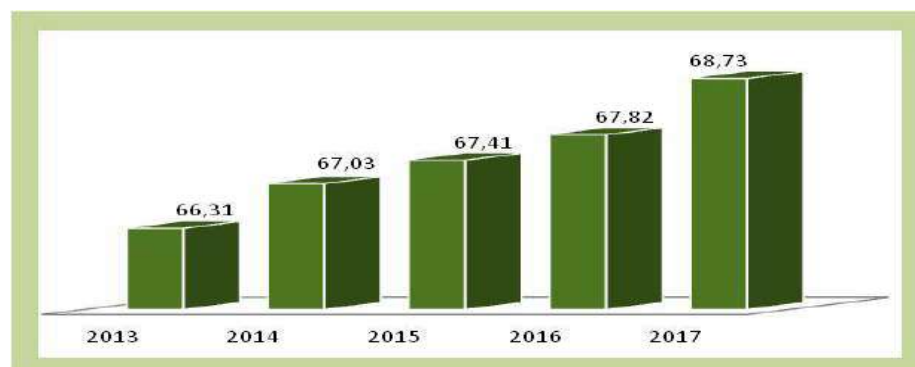
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

indikator yang mengalami kemajuan yang pesat dan ada juga yang lambat berkembang.

Hasil capaian IPM setiap kabupaten/kota setiap tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan capaian IPM bervariasi setiap daerah. Beberapa daerah memiliki pertumbuhan yang pesat, sementara beberapa daerah lainnya pertumbuhan capaian IPM-nya masih relatif lambat.

Kecenderungan pencapaian komponen-komponen penyusun IPM menunjukkan bahwa komponen yang capaiannya masih cukup rendah mempunyai peluang untuk lebih cepat berkembang atau meningkat dalam capaian yang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang telah memiliki komponen yang sudah tinggi atau mendekati nilai maksimum.

Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017



IPM Gunungkidul mengalami peningkatan setiap tahunnya dari periode 2013-2017 yaitu dari 66,31 di tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 67,03 di tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan menjadi 68,73 di tahun 2017. Selama kurun waktu 2013-2017, IPM Gunungkidul selalu berada pada kategori capaian sedang.

2.4 Analisis – analisis,

2.4.1. Location Quotient (LQ).

Penghitungan dengan teknik LQ adalah membandingkan persentase kontribusi tiap kategori dalam PDRB Kabupaten Gunungkidul dengan persentase kontribusi kategori yang sama dalam PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kriteria hasil penghitungan teknik LQ adalah :



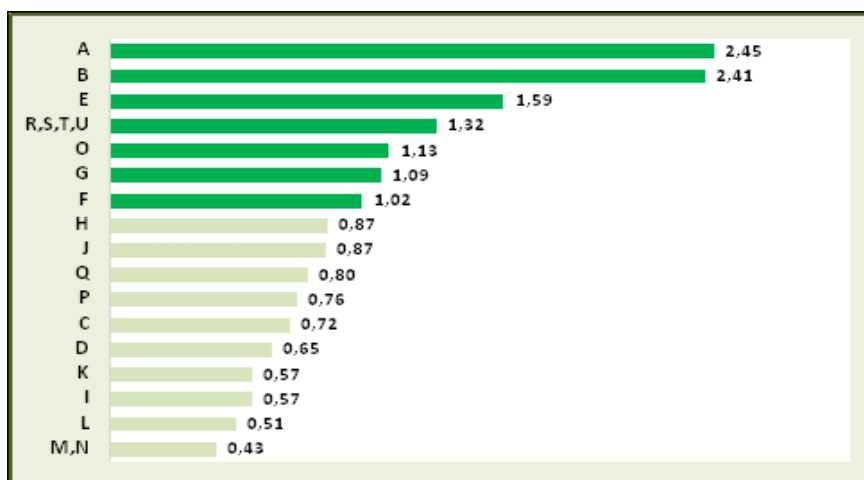
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Bila $LQ > 1$ menunjukkan kategori tersebut tergolong kategori basis di suatu daerah dan memiliki potensi untuk dikembangkan, karena dianggap memiliki kelebihan dan keuntungan di daerah yang bersangkutan.
2. Bila $LQ < 1$ menunjukkan kategori tersebut tergolong kategori non basis di suatu daerah dan menandakan kategori tersebut tidak berpotensi untuk dikembangkan, karena kategori tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan ada kecenderungan mengimpor dari daerah lain.
3. Bila $LQ = 1$ menunjukkan keswasembadaan (*self-sufficiency*) kategori tersebut di suatu daerah.

Adapun hasil olah analisis LQ dengan wilayah referensi Provinsi D.I Yogyakarta tersajikan dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 2.21 Hasil Penghitungan Analisis LQ Kabupaten Gunungkidul dengan Wilayah Referensi D.I. Yogyakarta Tahun 2017



Hasil Analisis LQ yang dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki 7 (tujuh) kategori yang memiliki keunggulan komparatif di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta. Kategori tersebut antara lain: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A); Pertambangan dan Penggalian (B); Jasa Lainnya (R,S,T,U); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G) dan Konstruksi (F).



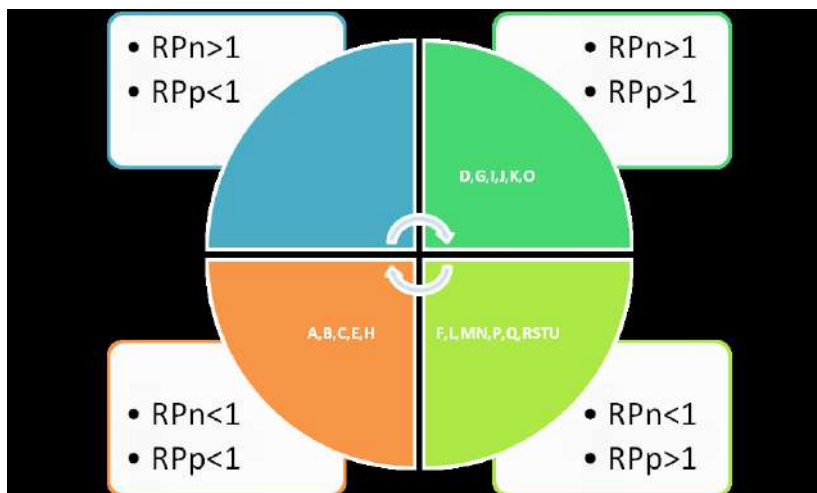
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.4.2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

Tujuan analisis MRP adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). Adapun hasil olah analisis MRP dengan wilayah referensi D.I. Yogyakarta tersajikan dalam Gambar dibawah ini.

**Gambar 2.22 Hasil Analisis MRP Kabupaten Gunungkidul
dengan Wilayah Referensi Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017**



Hasil Analisis MRP yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 6 kategori lapangan usaha yang memiliki nilai $RPp > 1$ dan $Rpn > 1$. Dengan kata lain, terdapat 6 kategori lapangan usaha yang memiliki keunggulan dari sisi pertumbuhan ekonominya, baik di level Kabupaten Gunungkidul maupun level wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta. Kategori tersebut antara lain: Pengadaan Listrik dan Gas (D); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); Informasi dan Komunikasi (J); Aktivitas Keuangan dan Asuransi (K) dan Administrasi Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O).

Selain itu, juga terdapat 6 kategori lapangan usaha dengan nilai $RPp > 1$, tetapi $RPn < 1$ yakni Konstruksi (F); Real Estat (L); Jasa Perusahaan (M,N); Jasa Pendidikan (P); Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Q) dan Jasa Lainnya (R,S,T,U). Dari hasil ini, keenam kategori tersebut diindikasikan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

memiliki keunggulan komparatif di level Kabupaten Gunungkidul, tetapi tidak secara global di level wilayah D.I. Yogyakarta.

Terdapat 5 kategori lapangan usaha yang tidak memiliki keunggulan komparatif, baik khusus di level Kabupaten Gunungkidul maupun di level wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Lapangan usaha tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A); Pertambangan dan Energi (B); Industri Pengolahan (C); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E) dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini ditandai oleh nilai RPP maupun RPN yang kurang dari 1.

2.4.3. Analisis *Shift Share*.

Hasil Analisis Shift Share dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Jika $M_{ij} > 0$ tumbuh lebih cepat dari sektor yang sama di daerah lain /daerah referensi (secara umum);
- Jika $C_{ij} > 0$ tumbuh lebih cepat dari sektor yang lain di daerah analisis (daya saing yang tinggi dibanding sektor lain);
- Jika $M_{ij} > 0$ dan $C_{ij} > 0$, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat pesat;
- Jika $M_{ij} < 0$ dan $C_{ij} > 0$, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat tetapi berkembang;
- Jika $M_{ij} > 0$ dan $C_{ij} < 0$, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi;
- Jika $M_{ij} < 0$ dan $C_{ij} < 0$, artinya wilayah/sektor dengan daya saing rendah dan peranan terhadap wilayah juga rendah

Adapun hasil Analisis *Shift Share* di Kabupaten Gunungkidul dengan wilayah referensi Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.6. Hasil Analisis *Shift Share* Kabupaten Gunungkidul dengan Wilayah Referensi Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017

Kategori	Nij (Regional Share/RS)	Mij (Proportional Shi ft Share/PS)	Nij (Regional Share/RS)	Dij (Shi ft Share/SS)	Kesimpulan dari tanda Mi j dan Ci j
A	125850,44	-103566,39	5844,46	+	28128,51
B	7382,93	-4541,75	-119,57		2721,61
C	46420,14	-21004,49	3017,58	+	28433,23
D	422,39	58,55	44,67	+	525,62
E	845,32	-547,08	4,15	+	302,39
F	43016,69	-8238,54	1381,32	+	36159,47
G	40444,31	35391,85	-34527,17		41308,98
H	26097,14	-3607,96	-9245,67		13243,51
I	24364,26	28403,94	-28096,75		24671,46
J	35192,36	3661,07	11896,03	+	50749,45
K	7913,04	11238,96	-8833,35		10318,65
L	15247,40	-2414,59	2550,73	+	15383,54
M,N	2141,54	-828,45	945,61	+	2258,70
O	39648,09	3017,58	-8867,45		33798,22
P	28284,62	-6841,02	6695,57	+	28139,16
Q	8586,76	-812,23	2555,68	+	10330,21
R,S,T,U	15313,93	-4728,10	6385,82	+	16971,65
Jumlah	467171,36	0,00	-123727,00		343444,36

Terlihat dari tabel tersebut diatas , terdapat 2 (dua) kategori lapangan usaha yang memiliki *Mij* dan *Cij* yang bernilai positif atau $Mij > 0$ dan $Cij > 0$. Hasil ini mengindikasikan bahwa 2 kategori tersebut merupakan kategori dengan pertumbuhan sangat pesat. Dengan demikian, berdasarkan Analisis *Shift Share* (SS), terdapat 2 kategori yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul. Adapun kedua kategori tersebut yakni Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (D) serta Kategori Informasi dan Komunikasi (J).

2.3.4. Analisis *Tipologi Klassen*.

Adapun hasil dari Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Gunungkidul dengan wilayah acuan Provinsi D.I. Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.7. Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Gunungkidul dengan Wilayah Referensi D.I. Yogyakarta Tahun 2017

Kategori	Pertumbuhan PDRB			Kontribusi PDRB 2017			Kesimpulan
	Gunungkidul	Yogyakarta		Gunungkidul	Yogyakarta		
A	11,80	9,35	✓	24,48	10,01	✓	+
B	19,46	20,32	*	1,25	0,52	✓	
C	32,34	28,91	✓	9,47	13,12	*	
D	65,70	60,12	✓	0,10	0,15	*	
E	18,89	18,63	✓	0,16	0,10	✓	+
F	44,38	42,69	✓	9,65	9,49	✓	+
G	53,93	99,00	*	9,38	8,59	✓	
H	26,79	45,50	*	4,97	5,69	*	
I	53,47	114,35	*	5,92	10,32	*	
J	76,14	58,29	*	7,14	8,21	*	
K	68,85	127,79	*	2,23	3,89	*	
L	53,27	44,44	✓	3,57	7,03	*	
M,N	55,69	32,37	✓	0,43	1,01	*	
O	45,01	56,82	*	9,65	8,57	✓	
P	52,53	40,03	✓	6,16	8,15	*	
Q	63,52	47,81	✓	2,00	2,52	*	
R,S,T,U	58,51	36,50	✓	3,43	2,61	✓	+
Jumlah	38,82	52,80		100,00	100,00		

Analisis Tipologi Klassen yang dilakukan menunjukkan terdapat 4 (empat) kategori lapangan usaha berada pada Kuadran I. Kategori tersebut yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E), Konstruksi (F) dan Jasa Lainnya (R,S,T,U).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hal ini dapat diartikan bahwa keempat kategori tersebut merupakan lapangan usaha yang maju dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten Gunungkidul. Kesimpulan ini didukung oleh tidak hanya laju pertumbuhan keempat kategori tersebut di Gunungkidul yang melebihi laju pertumbuhan ketiga kategori tersebut di level D.I Yogyakarta, tetapi kontribusi keempat kategori tersebut terhadap PDRB Gunungkidul juga lebih besar dibandingkan kontribusi kategori ini terhadap perekonomian D.I. Yogyakarta secara global. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E), dan Jasa Lainnya (R,S,T,U) merupakan lapangan usaha yang potensial di D.I. Yogyakarta.

Disamping itu, Kabupaten Gunungkidul memiliki kategori-kategori lain yang berpotensi untuk dikembangkan baik karena memiliki kelebihan dari sisi laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan kategori yang sama di wilayah D.I. Yogyakarta (Kuadran II), maupun kategori yang memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi kategori tersebut terhadap perekonomian di wilayah D.I. Yogyakarta secara keseluruhan (Kuadran IV).

Kategori-kategori yang termasuk golongan ini antara lain: Pertambangan dan Penggalan (B); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G); Transportasi dan Pergudangan (H); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I); Jasa Keuangan dan Asuransi (K) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O).

2.3.5. Analisis Overlay.

Analisis Overlay pada dasarnya menyandingkan hasil identifikasi potensi potensi ekonomi dari beberapa alat analisis lainnya. Dalam buku ini, Analisis Overlay menyandingkan hasil dari Analisis *Location Quotient* (LQ), Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis *Shift Share* (SS), dan Analisis Tipologi Klassen.

Penyandingan ini ditujukan agar pemilihan kategori lapangan usaha yang potensial lebih akurat karena mempertimbangkan beberapa kriteria analisis. Adapun hasil Analisis Overlay tersaji dalam tabel 2.8 berikut ini :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.8 Hasil Analisis Overlay Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Kategori	LQ	MRP	SS	Klassen	Kesimpulan
A	+			+	Unggulan
B	+				Potensi
C					-
D		+	+		Potensi
E	+			+	Unggulan
F	+			+	Unggulan
G	+	+			Unggulan
H					-
I		+			-
J		+	+		Potensi
K		+			-
L					-
M,N					-
O	+	+			Unggulan
P					-
Q					-
R,S,T,U	+			+	Unggulan

Hasil Analisis Overlay menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki 6 (enam) kategori lapangan usaha yang bersifat unggulan, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E); Konstruksi (F); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) ; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O) dan Jasa Lainnya (R,S,T,U).

2.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Pembangunan daerah dalam perkembangannya selalu berubah menyesuaikan kondisi yang diinginkan supaya selalu baru dan bisa *up to date*. Pembangunan daerah sekarang ini diwajibkan untuk bisa mengakomodir dan menyesuaikan pembangunan diatasnya termasuk dalam perencanaannya. Kondisi pemerintahan pusat tercermin pada pelaksanaan provinsi, provinsi tercermin pada pelaksanaan daerah, apalagi kondisi nasional harus bisa mengadopsi kumpulan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

negara-negara di tingkat asean, maupun dunia supaya ada kesamaan standar dalam capaian akhir pembangunan yang merupakan dampak dari perencanaan.

Kesepakatan negara-negara dunia pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB, para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Menindaklanjuti kesepakatan negara-negara anggota PBB yang tertuang dalam “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” tanggal 2 Agustus 2015, pengesahan 17 SDGs menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional pada agenda pembangunan global untuk meneruskan pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

Point kedelapan dalam kesepakatan SDGs yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan laik bagi semua, merupakan keberlanjutan pembangunan melalui millenium development goals, selaras dengan RPJMN pada point enam yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan nawa cita, point ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik selaras juga dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul pada visi dua yaitu pemantapan pengelolaan pariwisata yang profesional; dan point lima yaitu peningkatan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah, dan selaras dengan prioritas RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 point pertama yaitu ekonomi dan pariwisata.

Pembangunan keberlanjutan di Kabupaten Gunungkidul terlaksana melalui pengembangan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat, pelaku, lokasi, dan pelaksanaannya berasal dari masyarakat setempat hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah jikalau tidak ada komitmen yang sama antara pemerintah dan masyarakat tersebut. Aspek perencanaan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat merupakan aspek utama dalam peningkatan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain adalah tata ruang, politik, sosial, maupun ekonomi.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya pada sektor publik yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

tersedia di daerah tersebut untuk memperbaiki kapasitas sektor yang ada untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Dalam dimensi waktu perencanaan juga perlu memperhatikan kondisi tahun sekarang, serta tahun lalu. Salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan kedepan pada tahun 2018 adalah perkembangan kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya maupun variabel-variabelnya.

Adapun beberapa tantangan perekonomian daerah tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2018 tema pembangunan masih berkonsentrasi pada pengembangan pariwisata, meningkatnya kunjungan wisata di Gunungkidul terutama destinasi wisata pantai terutama pada hari sabtu dan minggu serta libur nasional membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, pembangunan areal parkir dan pengelolaan persampahan yang lebih komprehensif.
- 2) Pembebasan tanah dalam rangka menunjang pembangunan sarana prasarana wisata seperti jalan, parkir, mck, maupun los/kios terkendala mahal nya harga tanah di lokasi tersebut.
- 3) Dampak sosial masyarakat pada lokasi wisata yang tadinya bertani/nelayan berubah menjadi pelaku wisata.
- 4) Rehabilitasi pasar negeri
- 5) Pengembangan dan pemasaran produk unggulan UMKM sebagai penunjang pariwisata
- 6) Perlunya memperhatikan sektor-sektor lain selain tiga sektor yaitu sektor pertanian, Peternakan, dan Perikanan, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Sektor Industri Pengolahan, supaya bisa bergerak dan tumbuh dalam kontribusi terbentuknya PDRB dan peningkatan perekonomian daerah.
- 7) Perlu memperhatikan kebijakan pemerintah pusat untuk menghadapi diberlakukannya AEC dan AFTA bagi Gunungkidul pada Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan memperhatikan sektor-sektor lain penunjang pengembangan pariwisata.
- 8) Kesiapan Pemda dalam melindungi pelaku usaha UKM dan UMKM dalam menghadapi gempuran produk atas kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

seiring dengan dibukanya ajang pasar bebas asia dalam menghadapi *ASEAN Economy Community (AEC)* dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, pada kesiapan riil di masyarakat dan pelaku usaha baik UMKM maupun UKM dalam menghadapi tantangan dari banyaknya produk-produk luar yang membanjiri pasar.

2.4.1. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara lebih optimal, diharapkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul akan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Secara umum kondisi dan pertumbuhan ekonomi Gunungkidul akan mengalami Pergeseran apabila sektor-sektor penopang pertumbuhan perekonomian yang ada di masyarakat dapat bekerja secara optimal dengan dukungan dari semua *stakeholders* maka pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mampu mencapai 5,27% pada tahun 2018, dan 5,48% pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB ADHK 2010, diproyeksi naik dengan masa akhir tahun jabatan presiden dengan target-target nasional yang telah dicapai.

Penyebaran teknologi informasi terutama akses internet akan menambah dan munculnya lokasi-lokasi baru wisata alam baik pantai, susur goa, maupun wisata alam lainnya bagi kalangan generasi muda/anak sekolah dan perguruan tinggi sebagai pengunjung akan membawa cepatnya informasi kepada masyarakat luas dan akan lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul.

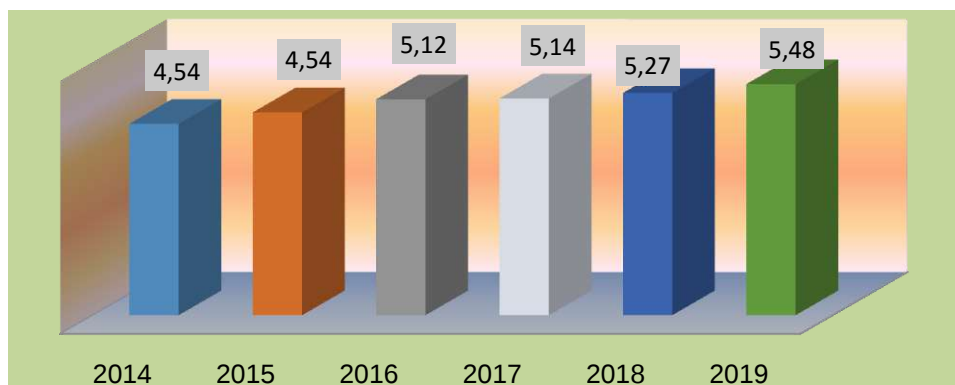
Disisi lain kunjungan wisatawan di Gunungkidul dipengaruhi oleh banyaknya aktivitas ekonomi pada hari raya keagamaan, libur panjang dan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja. Gunungkidul sebagai penyandang gelar dari UNESCO mengenai Global Geopark Gunungsewu mempunyai peluang lebih besar dikenal oleh dunia luar terutama pada pengembangan wisata minat khusus, sehingga akan berkontribusi dalam menggerakkan sektor-sektor PDRB selain tiga sektor. Gambaran perekonomian Gunungkidul pada tahun-tahun kedepan, berikut ini proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat dicapai sampai dengan tahun 2019.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**Gambar 2.23 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019**



Sumber : Bappeda Gunungkidul, 2017 (diolah)

2.4.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 - 2019

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perlu didukung kebijakan dan intervensi dari Pemerintah Daerah seperti tertera pada grafik di atas terutama untuk tahun 2018 dan 2019 dalam pembentukan PDRB. Mengingat Kabupaten Gunungkidul sebagai lahan kering terbesar di DIY, dari tahun ke tahun sektor terbesar pembentukan PDRB adalah sektor pertanian, peternakan dan perikanan akan tetapi kontribusinya semakin tahun semakin turun. Turunnya kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan diharapkan akan mendorong sektor-sektor lain tumbuh untuk mendorong perekonomian daerah tahun 2018, dan 2019. Perlunya inovasi daerah dalam pembentukan sektor PDRB selain sektor pertanian dengan pemanfaatan potensi lokal pada pariwisata.

Perlunya inovasi-inovasi daerah dalam menggerakkan dan mengarahkan pada perputaran ekonomi daerah untuk pembentukan struktur perekonomian. Inovasi daerah dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan dengan mendayagunakan dan menggerakkan masyarakat setempat sebagai subyek, obyek, dan pelaksana pariwisata untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Inovasi daerah dilaksanakan oleh masyarakat dan generasi muda dengan memanfaatkan teknologi informasi via internet dalam pemasaran dan penyebaran informasi mengenai potensi wisata lokal yang dimiliki. Inovasi dilakukan masyarakat dalam pemasaran sumber daya lokal yang dimiliki melalui



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

pemanfaatan internet secara online yang akan mengangkat harkat masyarakat melalui melekat teknologi informasi.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berkelanjutan yang sudah dilaksanakan di lokasi wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Desa Bleberan dengan lokasi wisata air terjun Sri Gethuk, Desa Banyusoco dengan lokasi wisata Air Terjun Gedad (ATG), di desa Nglanggeran dengan lokasi wisata Embung Nglanggeran dan Gunung Api Purba, akan berdampak positif pada masyarakat lainnya di Gunungkidul dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya untuk bisa dikembangkan melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) berkelanjutan. Perkembangan kedepan diharapkan lebih banyak pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu bentuk pengembangan yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang merupakan suatu model pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan kesesuaian dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia demi meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Gunungkidul.

2.5. Kebijakan Keuangan

Reformasi di bidang keuangan, pengelolaan keuangan publik harus dikelola secara transparan, agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan Pergeseran kebijakan anggaran tidak berdasarkan *money follow function* tapi kepada *money follow program*. Belanja daerah berlandaskan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja, dengan berorientasi pada kepentingan publik.

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional, pada tahun 2017 dan tahun-tahun ke depan pembangunan akan dilaksanakan dengan konsep holistik - tematik, integratif - spasial, dengan pergeseran paradigma dari *money follow functions* menjadi *money follow programs*.

Perkembangan sektor pariwisata selama kurun waktu lima tahun yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang secara riil telah memberikan peningkatan PAD menjadi pilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

untuk dikembangkan dan didorong untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan (pertumbuhan ekonomi berkeadilan). Hal ini berarti bahwa pengembangan sektor pariwisata harus didukung oleh pengembangan sektor yang lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Memperhatikan beberapa hal dan kondisi tersebut maka dirumuskan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. Konsep dan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 harus memperhatikan dan sinkron dengan konsep dan tema pembangunan nasional Tahun 2018 yakni: **“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”** serta konsep dan tema pembangunan Pemerintah DIY Tahun 2018 yaitu: **“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur, untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”**.

Dengan mengacu dan memperhatikan beberapa hal tersebut selanjutnya ditetapkan tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, sebagai berikut: **“Meningkatkan Pengembangan Industri Pariwisata Sebagai Basis Pembangunan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kemandirian Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berintegritas”**.

Selanjutnya, tema pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pariwisata sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul merupakan sektor unggulan yang diharapkan dapat menjadi pemacu perkembangan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Berbagai potensi pariwisata yang dimiliki akan dikembangkan seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan DIY terutama potensi pengembangan Pantai Selatan dan Kawasan Geopark.
2. Pendidikan yang baik merupakan syarat mutlak guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk Kabupaten Gunungkidul pendidikan masih merupakan pekerjaan rumah terbesar karena berdasarkan angka IPM Tahun 2015, diantara Kabupaten/Kota yang ada di DIY masih menempati urutan terbawah. Sesuai dengan kewenangan maka fokus peningkatan kualitas pendidikan dasar menjadi arah tujuan yang mesti dilakukan disamping upaya



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan informal.

3. Kesehatan menjadi pelayanan dasar yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten, karena hanya dengan kondisi sehat maka seseorang dapat beraktivitas dan berproduksi. Pelayanan kesehatan ini diupayakan dengan memberikan jaminan sosial kesehatan terhadap seluruh warga yang berkategori miskin serta dengan upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan baik dari sisi peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, alat penunjang kesehatan, obat-obatan maupun pembangunan infrastruktur kesehatan.
4. Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu keniscayaan suatu daerah dalam upaya membangun wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kabupaten Gunungkidul dari kabupaten/kota di DIY masih menempati urutan terbawah dalam angka pertumbuhan ekonomi, meskipun di beberapa wilayah/kawasan terutama di kawasan wisata unggulan telah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup menggembirakan, namun secara rata-rata penyebaran masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat diartikan masih terdapat ketimpangan pertumbuhan antar wilayah/kawasan sehingga upaya yang dilakukan ke depan adalah bagaimana melibatkan seluruh masyarakat di semua wilayah untuk mengambil peran pada sektor pariwisata yang dalam beberapa tahun ini menjadi komoditi unggulan penggerak roda pertumbuhan.
5. Infrastruktur wilayah yang baik merupakan syarat suatu daerah menjadi tumbuh berkembang, meski secara umum kondisi infrastruktur wilayah terutama jalan di Kabupaten Gunungkidul dapat dikategorikan baik, namun sesuai dengan perkembangan terkini, kondisi yang telah baik tersebut belum cukup untuk mendukung laju pembangunan. Sehingga diperlukan pembangunan jalan-jalan baru seperti pembangunan jalan lintas selatan, pembangunan jalan alternative penghubung kawasan wisata, peningkatan kualitas jalan dan sarana prasarana lain yang berfungsi sebagai pendukung wajib upaya pengembangan pariwisata yang diharapkan akan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pergeseran atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018 didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan RKPD Tahun 2018. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran.

2.5.1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pengelolaan keuangan publik harus dikelola secara transparan, agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan Pergeseran kebijakan anggaran tidak berdasarkan *money follow function* tapi kepada *money follow programs*. Pendapatan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pendanaan kegiatan pembangunan di daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Belanja daerah berlandaskan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja, dengan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian arah kebijakan pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dan pemanfaatan penerimaan kembali pemberian pinjaman. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA pada satu sisi sebagai kurang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi pada sisi yang lain bagi tahun berikutnya merupakan sumber pendanaan untuk menutup defisit.

Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp1.693.713.601.669,37 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan asli daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besar kecilnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Unsur Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan

Pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana perimbangan dimaksudkan untuk mempersempit kesenjangan atau ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah lainnya. Dana perimbangan ini mencakup : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sementara yang diperhitungkan adalah DAK non Fisik, dan Bagi hasil pajak/bukan pajak.

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari kementerian/lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus yang antara lain dana untuk sertifikasi guru.

Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 berasal dari estimasi SiLPA tahun anggaran 2017 yang digunakan penyertaan modal pemerintah daerah dan menutup defisit. Adapun rincian pendapatan daerah dapat dilihat sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**Tabel 2.9 Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Proyeksi TA. 2018 (Rp)
	PENDAPATAN DAERAH	1.693.713.601.669,37
1	Pendapatan Asli Daerah	203.076.954.568,37
1.1	Hasil Pajak Daerah	39.140.250.000,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.689.630.036,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.626.002.400,00
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115.621.072.132,37
2	Dana Perimbangan	1.266.217.866.101,00
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.875.000.000,00
2.2	Dana Alokasi Umum	997.997.369.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	237.345.497.101,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	224.418.781.000,00
3.1	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00
3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	87.565.000.000,00
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	132.353.781.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.693.713.601.669,37
4	Penerimaan Pembiayaan	20.500.000.000,00
4.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.500.000.000,00
5	Jumlah Dana Tersedia	1.714.213.601.669,37

2.5.1 Prioritas Belanja Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018, selain untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama diarahkan untuk mendukung terwujudnya tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018. Alokasi dana belanja daerah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme belanja



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

langsung PD dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan antara lain: ADD, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bantuan Keuangan kepada Desa, Usulan PIWK, Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Sosial, dan lain-lain.

Belanja langsung dalam APBD mengutamakan pendanaan terhadap urusan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib, pilihan, penunjang urusan, pendukung dan kewilayahan. Ada beberapa belanja wajib yang tetap harus mendapatkan prioritas pada Belanja daerah, seperti pemenuhan belanja di bidang pendidikan sesuai ketentuan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari belanja daerah dan bidang kesehatan minimal 10 (sepuluh) persen dari total belanja APBD di luar gaji.

Juga terdapat kewajiban di belanja tidak langsung untuk memenuhi alokasi dana desa (ADD) sebesar minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. Selain itu juga terdapat belanja wajib, mendesak, dan prioritas lainnya yang harus diakomodir baik melalui belanja langsung maupun tidak langsung.

Adapun urutan prioritas penggunaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan di SKPD sebagai berikut :

Tabel 2.10 Matrik Prioritas Pembangunan

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
1	Ekonomi dan Pariwisata	Pendapatan Masyarakat Meningkatkan	Dinas Pertanian dan Pangan	Peningkatan Agribisnis Pertanian
			Dinas Pertanian dan Pangan	Peningkatan Kualitas Penyuluhan
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Agribisnis Perikanan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemberdayaan Nelayan
			Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Pertumbuhan Ekonomi Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan, Pengembangan, dan Efisiensi Perdagangan
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Industri Kecil Menengah
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	progam peningkatan kualitas pengelolaan UMKM
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Peningkatan Kapasitas Koperasi
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
		Daya Saing Pariwisata Meningkat	Dinas Pariwisata	Peningkatan Pemasaran Pariwisata



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
			Dinas Pariwisata	Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Dinas Pariwisata	Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata
2.	Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat	Dinas Kesehatan	Kesehatan Keluarga
			Dinas Kesehatan	Perbaikan Gizi Masyarakat
			Dinas Kesehatan	Pencegahan Penyakit
			Dinas Kesehatan	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
			Dinas Kesehatan	Peningkatan Sumber daya Kesehatan
			Dinas Kesehatan	Pelayanan Jaminan Kesehatan
			Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
			Dinas Kesehatan	Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas
			RSUD Wonosari	Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
			Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
			Dinas Kesehatan	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera
			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Pembinaan dan pemyarakatan olahraga
			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Peningkatan peran serta kepemudaan dan kewirausahaan pemuda
			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
			Dinas Pendidikan	Program Pendidikan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
			Pemuda dan Olah Raga	Dasar SD
			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Program Pendidikan Dasar SMP
			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan
			Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		Jumlah Penduduk Miskin Menurun	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat)	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
			Dinas Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Sosial
			Dinas Sosial	Peningkatan Rehabilitasi Sosial
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
		Pelestarian Budaya Berbasis Pemberdayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan Pelestarian Dan Pengembangan Adat, Seni, Dan Tradisi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
		Meningkat		
			Dinas Kebudayaan	Peningkatan Pelestarian Dan Pengembangan Warisan Dan Nilai Budaya
			Dinas Kebudayaan	Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa Dan Sastra
		Angka Pengangguran Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan Kesempatan Kerja
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengembangan Transmigrasi
3.	Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Infrastruktur Publik Wilayah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan
			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Susun, Air Minum Non PDAM dan Prasarana Lingkungan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung
			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan berat
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Program Pelaksanaan Dan Pengawasan Pertanahan Dan Penataan Ruang
			Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
			Dinas Perhubungan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Dinas Perhubungan	Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang
			Dinas Perhubungan	Uji Kelayakan Sarana Transportasi
4.	Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	Ketahanan Pangan Meningkat	Dinas Pertanian Dan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
			Dinas Pertanian dan Pangan	Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Dinas Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
			Dinas Pertanian dan Pangan	Peningkatan produksi peternakan
			Dinas Pertanian dan Pangan	Peningkatan produksi perkebunan
		Kualitas Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Meningkat	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
			Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
				Persampahan
			Dinas Lingkungan Hidup	Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam
			Dinas Lingkungan Hidup	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi dan Penanganan Bahaya Kebakaran
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
5.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
			Semua PD	Peningkatan Kualitas Perencanaan
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
			Badan Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
			Daerah	Pemerintahan, Sosial, dan Budaya
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Ekonomi
			Badan Kepegawaian Daerah	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS
			Badan Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai
			Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan dan kesejahteraan aparatur
			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
			Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			Semua PD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			Semua PD	Pelayanan Administrasi Perkantoran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
			Semua PD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
			Semua PD	Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
			Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persandian <u>dan</u> Pengamanan Informasi
			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	Peningkatan Pelayanan Terpadu
			Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)	Analisis Kebijakan Pembangunan
			Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Penataan Peraturan Perundang-undangan
			Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Rumah Tangga)	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah
			Sekretariat Daerah, (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana,	Pengembangan Otonomi Desa



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
			Pemberdayaan	
			Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
			Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)	Pembinaan Wilayah
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan Administrasi Kependudukan
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
				Pemanfaat Data dan Inovasi
			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Peningkatan Pelayanan Kearsipan
			Sekretariat DPRD	Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Badan Perencanaan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
			Daerah (Litbangdal)	
			Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pengembangan Statistik Daerah
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
			Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD
			Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
			Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
			Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengelolaan pendapatan pajak daerah
			Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengembangan Pendapatan Daerah
			Semua PD	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
			Inspektorat Daerah	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Prioritas	Sasaran Daerah	PD Penanggung jawab	Program
				Kepala Daerah
		Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Peraturan Daerah
			Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
			Satuan Polisi Pamong Praja	Pemeliharaan Keamanan Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal
			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik Sosial
				Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, Dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Dan LSM



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.5.2 Plafon Anggaran Sementara.

2.5.2.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

Uraian belanja berdasarkan urusan pemerintahan yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan, dapat disajikan sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018**

Kode	Urusan/ Nama Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	987.754.367.861,86
1.01.	Pendidikan	669.195.235.334,62
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	669.195.235.334,62
1.02.	Kesehatan	217.036.621.316,34
1.02.01.	Dinas Kesehatan	146.439.326.576,46
1.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah	70.597.294.739,88
1.03.	Pekerjaan Umum	86.675.674.136,10
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	86.675.674.136,10
1.04.	Perumahan Rakyat	1.284.200.000,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.284.200.000,00
1.05.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.668.546.166,25
1.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	6.668.546.166,25
1.06.	Sosial	6.894.090.908,56
1.06.01.	Dinas Sosial	6.894.090.908,56
2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	108.883.360.602,72
2.01.	Tenaga Kerja	5.604.922.735,93
2.01.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.604.922.735,93
2.02.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.565.715.525,92



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kode	Urusan/ Nama Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.565.715.525,92
2.03.	Pangan	980.600.000,00
3.03.01.	Dinas Pertanian dan Pangan	980.600.000,00
2.04.	Pertanahan	27.751.531.255,39
2.04.01.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	27.751.531.255,39
2.05.	Lingkungan	12.830.521.753,56
2.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup	12.830.521.753,56
2.06.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.310.556.420,93
2.06.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.310.556.420,93
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.600.373.750,00
2.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.600.373.750,00
2.08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.039.425.000,00
2.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.039.425.000,00
2.09.	Perhubungan	8.425.941.593,83
2.09.01.	Dinas Perhubungan	8.425.941.593,83
2.10.	Komunikasi dan Informatika	6.733.180.047,35
2.10.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.733.180.047,35
2.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.966.928.959,60
2.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.966.928.959,60
2.12.	Penanaman Modal	4.327.904.248,69
2.12.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	4.327.904.248,69
2.13.	Kepemudaan dan Olahraga	6.131.800.620,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kode	Urusan/ Nama Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.131.800.620,00
2.14.	Statistik	279.980.000,00
2.10.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	279.980.000,00
2.15.	persandian	263.550.000,00
2.10.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	263.550.000,00
2.16.	Kebudayaan	4.569.506.053,47
2.16.01.	Dinas Kebudayaan	4.569.506.053,47
2.17.	Perpustakaan	4.221.980.138,04
2.17.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.221.980.138,04
2.18.	kearsipan	278.942.500,00
2.17.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	278.942.500,00
3.	Urusan Pilihan	66.648.187.828,29
3.01.	Kelautan dan Perikanan	5.843.238.584,76
3.01.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.843.238.584,76
3.02.	Pariwisata	18.871.424.820,72
3.02.01.	Dinas Pariwisata	18.871.424.820,72
3.03.	Pertanian	24.685.312.883,49
3.03.01.	Dinas Pertanian Dan Pangan	24.685.312.883,49
3.04.	Kehutanan	-
3.05.	Energi dan Sumber Daya Mineral	-
3.06.	Perdagangan	15.080.717.539,31
3.06.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.080.717.539,31
3.07.	Perindustrian	1.597.214.000,00
3.06.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.597.214.000,00
3.08.	Transmigrasi	570.280.000,00
2.01.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	570.280.000,00
4.	Penunjang Urusan	412.344.798.211,26
4.01.	Inspektorat	5.854.108.725,01
4.01.01.	Inspektorat Daerah	5.854.108.725,01
4.02.	Perencanaan	7.669.369.368,70



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kode	Urusan/ Nama Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
4.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.669.369.368,70
4.03.	Keuangan	345.132.189.266,73
4.03.01.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	345.132.189.266,73
4.04.	Kepegawaian	49.084.469.499,54
4.04.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	49.084.469.499,54
4.05.	Pendidikan dan Pelatihan	-
4.06.	Penelitian dan Pengembangan	345.299.500,00
4.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	345.299.500,00
4.07.	Bencana	4.259.361.851,27
4.07.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.259.361.851,27
5.	Pendukung	77.091.079.413,12
5.01.	Sekretariat Daerah	21.039.319.343,65
5.01.01.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	781.219.963,04
5.01.02.	Sekretariat Daerah	20.258.099.380,60
5.02.	Sekretariat DPRD	56.051.760.069,47
5.02.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18.398.474.423,62
5.02.02.	Sekretariat DPRD	37.653.285.645,85
6.	Kesatuan Bangsa dan Politik	5.229.777.835,03
6.01.	Kesatuan Bangsa dan Politik	5.229.777.835,03
6.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.229.777.835,03
7.	Kewilayahan	36.762.029.917,10
7.01.	Kecamatan	36.762.029.917,10
7.01.01.	Kecamatan Wonosari	2.126.947.934,03
7.01.02.	Kecamatan Paliyan	2.210.067.213,78
7.01.03.	Kecamatan Panggang	1.969.834.304,83
7.01.04.	Kecamatan Tepus	1.627.712.242,68
7.01.05.	Kecamatan Rongkop	1.750.759.769,91
7.01.06.	Kecamatan Semanu	2.331.125.076,17
7.01.07.	Kecamatan Ponjong	2.137.464.741,43
7.01.08.	Kecamatan Karangmojo	2.513.492.577,51



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kode	Urusan/ Nama Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.09.	Kecamatan Playen	1.903.144.185,66
7.01.10.	Kecamatan Nglipar	1.981.111.250,14
7.01.11.	Kecamatan Ngawen	2.308.573.849,12
7.01.12.	Kecamatan Semin	1.866.750.864,76
7.01.13.	Kecamatan Patuk	2.573.492.056,50
7.01.14.	Kecamatan Saptosari	2.051.441.739,30
7.01.15.	Kecamatan Gedangsari	2.010.571.272,70
7.01.16.	Kecamatan Girisubo	1.665.606.021,76
7.01.17.	Kecamatan Tanjungsari	1.781.244.246,35
7.01.18.	Kecamatan Purwosari	1.952.690.570,46
JUMLAH		1.694.713.601.669,37

2.5.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

1) Belanja Pegawai

- a. Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan pimpinan serta anggota dewan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan gaji berkala PNSD yaitu kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan tambahan penghasilan pegawai.

Sementara tambahan tunjangan kesejahteraan untuk pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan, untuk pimpinan dewan adalah uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Selain itu juga mendapat tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD. Sedangkan anggota DPRD adalah tunjangan rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.

- b. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD.
 - c. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD.
 - d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran insentif memperhitungkan rencana target pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2018.
 - e. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK non fisik.
- 2) Belanja Hibah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.
- 3) Belanja Bagi Hasil
- Belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pergeseran Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka belanja bantuan keuangan kepada partai politik diarahkan pada tujuan pendidikan politik masyarakat.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan kepala desa, dan perangkat desa, pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa, serta pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa, yang meliputi:

- a. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. Adapun pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara merata dan proporsional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

5) Belanja Tidak Terduga

Kebijakan penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah, sifatnya tidak biasa atau yang diperkirakan tidak terjadi berulang, tidak dapat diprediksi, memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak untuk dilaksanakan, dan belum teranggarkan dalam program kegiatan yaitu kebutuhan tanggap darurat bencana, untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, penanganan gangguan keamanan, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Anggaran 2017, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan disertai bukti yang sah.

Adapun besarnya masing-masing belanja tersebut sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 2.12 PLAFON ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	Belanja Tidak Langsung	1.193.595.184.906,37
1.	Belanja Pegawai	918.427.504.581,37
2.	Belanja Hibah	22.964.375.000,00
3.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	9.477.685.575,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik	239.725.619.750,00
5.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00

2.5.4 Rencana Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menampung penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp20.500.000.000,00 yang berasal dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA APBD Tahun Anggaran 2017) sebesar Rp20.500.000.000,00.

Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk investasi daerah yang berupa penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp10.000.000.000,00, PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG) sebesar Rp5.000.000.000,00 dan PDAM Tirta Handayani sebesar Rp4.500.000.000,00 yang merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan rasio kecukupan modal (*capital adequate ratio*) serta peningkatan cakupan layanan kredit kepada UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dan dukungan kepada perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Berikut disajikan ringkasan estimasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.13 Proyeksi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2018

No.	Pembiayaan Daerah	Proyeksi Tahun Anggaran 2018
	Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	20.500.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	20.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.500.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	19.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	1.000.000.000,00

2.5.5 Pergeseran APBD

Persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disebutkan bahwa dalam hal Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah akhir bulan September 2018, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Atas hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak ada Peraturan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul dengan berdasarkan hasil evaluasi gubernur melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/KEP/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tertanggal 24 Oktober



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2018, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hanya diperkenankan melakukan perubahan Peraturan Bupati nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan tidak mengubah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 tertanggal 31 Oktober 2018. Penyesuaian pendapatan daerah dan tambahan Belanja Langsung serta penyesuaian Belanja Tidak Langsung ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Tambahan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung hanya diperkenankan untuk hal-hal yang bersifat wajib mengikat, pelayanan publik dan pendanaan yang sudah ditentukan peruntukannya (earmarking) oleh pemerintah.

2.5.5.1 Pergeseran atas pendapatan,

Anggaran pendapatan pada tahun anggaran 2018 ada revisi dalam Anggaran Pendapatan karena beberapa sebab, diantaranya karena tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran dan adanya perubahan kebijakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Anggaran Pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 (versi Permendagri 13 Tahun 2006) dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RINGKASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-1	6
4.	PENDAPATAN	1.716.742.745.689,30	1.861.299.324.079,01	144.556.578.389,71	8,42
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	208.747.851.213,37	217.393.391.371,08	8.645.540.157,71	4,14
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	41.388.250.000,00	47.137.026.586,00	5.748.776.586,00	13,89
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	36.061.984.696,00	36.747.368.399,00	685.383.703,00	1,90
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.626.002.400,00	14.370.184.563,64	255.817.836,36)	(1,75)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.671.614.117,37	119.138.811.822,44	2.467.197.705,07	2,11
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.297.211.891.000,00	1.298.814.083.208,00	1.602.192.208,00	0,12
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.589.808.000,00	29.192.000.208,00	1.602.192.208,00	5,81
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	938.221.136.000,00	938.221.136.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	322.400.947.000,00	322.400.947.000,00	0,00	0,00
4.2.4.	Dana Insentif Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	210.783.003.475,93	345.091.849.499,93	134.308.846.024,00	63,72
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	138.028.919.024,00	133.528.919.024,00	2.967,31
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	87.521.058.475,93	87.521.058.475,93	0,00	0,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	118.761.945.000,00	117.574.520.000,00	(1.187.425.000,00)	(1,00)
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.967.352.000,00	1.967.352.000,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.716.742.745.689,30	1.861.299.324.079,01	144.556.578.389,71	8,42



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Anggaran Pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 (versi SAP) dengan rincian sebagai berikut :

RINGKASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-1	6
4.	PENDAPATAN	1.716.742.745.689,30	1.861.299.324.079,01	144.556.578.389,71	8,42
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	208.747.851.213,37	217.393.391.371,08	8.645.540.157,71	4,14
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	41.388.250.000,00	47.137.026.586,00	5.748.776.586,00	13,89
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	36.061.984.696,00	36.747.368.399,00	685.383.703,00	1,90
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.626.002.400,00	14.370.184.563,64	255.817.836,36)	(1,75)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.671.614.117,37	119.138.811.822,44	2.467.197.705,07	2,11
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.494.494.894.475,93	1.496.877.013.683,93	2.382.119.208,00	0,16
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.288.211.891.000,00	1.289.814.083.208,00	1.602.192.208,00	0,12
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	26.635.454.000,00	26.533.927.777,00	(101.526.223,00)	(0,38)
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	954.354.000,00	2.658.072.431,00	1.703.718.431,00	178,52
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	938.221.136.000,00	938.221.136.000,00	0,00	0,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	322.400.947.000,00	322.400.947.000,00	0,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya	118.761.945.000,00	117.574.520.000,00	(1.187.425.000,00)	(1,00)
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Dana Penyesuaian	118.761.945.000,00	117.574.520.000,00	(1.187.425.000,00)	(1,00)
4.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi	87.521.058.475,93	87.521.058.475,93	0,00	0,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	87.521.058.475,93	87.521.058.475,93	0,00	0,00
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.2.4	Bantuan Keuangan	0,00	1.967.352.000 ,00	0,00	0,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan Khusus	0,00	1.967.352.000 ,00	0,00	0,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.500.000.000,00	147.028.919.024,00	135.496.571.024,00	1.003,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	138.028.919.024,00	133.528.919.024,00	2.967,31
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Dana Lainnya	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,0
JUMLAH PENDAPATAN		1.716.742.745.689,30	1.861.299.324.079,01	144.556.578.389,71	8,42

2.5.5.2 Pergeseran dalam Belanja Daerah

Pergeseran dalam Belanja Daerah dapat terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisi dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SiLPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena :

- Pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD; dan
- BPK RI belum menyatakan bahwa jumlah SiLPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Selisih (*variance*) antara SiLPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk Pergeseran anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SiLPA akan menyebabkan Pergeseran alokasi belanja.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam Pergeseran anggaran pada APBD Pergeseran TA 2018 untuk Belanja Langsung yang bersifat wajib mengikat telah memperhatikan prioritas pembangunan terutama untuk pengentasan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Hal tersebut ditekankan berdasarkan catatan sebagai berikut:

- Tingkat kemiskinan Kabupaten Gunungkidul yang relatif tinggi dan penurunannya relatif kecil. Selain itu, pada Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat Pergeseran asumsi tingkat kemiskinan dari 18,31% naik menjadi 18,58%.
- Capaian IPM Kabupaten Gunungkidul selama periode 2010-2017 berada pada kategori sedang dan merupakan capaian terendah di wilayah DIY.

Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2018 (versi Permendagri 13 Tahun 2006) dengan rincian sebagai berikut :

RINGKASAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran		%
5.	BELANJA DAERAH	1.814.778.220.496,95	2.008.179.845.827,09	193.401.625.330,14	10,66
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.128.995.929.606,95	1.158.986.206.486,09	29.990.276.879,14	2,66
5.1.1.	Belanja Pegawai	867.313.854.241,95	847.282.557.847,42	(20.031.296.394,53)	(2,31)
5.1.4.	Belanja Hibah	23.364.375.000,00	23.364.375.000,00	0,00	0,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	907.900.000,00	907.900.000,00	0,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	9.136.446.675,00	11.605.279.400,00	2.468.832.725,00	27,02
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi, Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	219.827.641.150,00	219.940.216.150,00	112.575.000,00	0,05
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	9.353.612.540,00	55.885.878.088,67	6.532.265.548,67	497,48
5.2.	BELANJA LANGSUNG	85.782.290.890,00	849.193.639.341,00	163.411.348.451,00	23,83
5.2.1.	Belanja Pegawai	41.859.883.260,00	49.536.765.760,00	7.676.882.500,00	18,34
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	337.961.117.723,00	404.724.197.884,00	66.763.080.161,00	19,75
5.2.3.	Belanja Modal	305.961.289.907,00	394.932.675.697,00	88.971.385.790,00	29,08
	JUMLAH BELANJA	1.814.778.220.496,95	2.008.179.845.827,09	193.401.625.330,14	10,66



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adapun Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2018 (versi SAP) dengan rincian sebagai berikut :

RINGKASAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
5.	BELANJA DAERAH	1.585.814.132.671,95	1.776.634.350.277,09	190.820.217.605,14	12,03
5.1.	BELANJA OPERASI	1.270.499.230.224,95	1.325.815.796.491,42	55.316.566.266,47	4,35
5.1.1.	Belanja Pegawai	909.173.737.501,95	896.819.323.607,42	-12.354.413.894,53	(1,36)
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	337.961.117.723,00	404.724.197.884,00	66.763.080.161,00	19,75
5.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.	Belanja Hibah	23.364.375.000,00	23.364.375.000,00	0,00	0,00
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	907.900.000,00	907.900.000,00	0,00
5.2.	BELANJA MODAL	305.961.289.907,00	394.932.675.697,00	88.971.385.790,00	29,08
5.2.1.	Tanah	44.041.500.000,00	44.041.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.	Peralatan dan Mesin	39.930.179.163,00	61.400.553.147,00	21.470.373.984,00	53,77
5.2.3.	Gedung dan Bangunan	88.804.865.630,00	87.191.855.856,00	-1.613.009.774,00	(1,82)
5.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	132.703.420.614,00	201.815.942.194,00	69.112.521.580,00	52,08
5.2.5.	Aset Tetap Lainnya	481.324.500,00	482.824.500,00	1.500.000,00	0,31
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.353.612.540,00	55.885.878.088,67	46.532.265.548,67	497,48
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	9.353.612.540,00	55.885.878.088,67	46.532.265.548,67	497,48
6.	TRANSFER	228.964.087.825,00	231.545.495.550,00	2.581.407.725,00	1,13
6.1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9.136.446.675,00	11.605.279.400,00	2.468.832.725,00	27,02
6.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.914.025.000,00	5.517.308.000,00	1.603.283.000,00	40,96
6.1.2.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.222.421.675,00	6.087.971.400,00	865.549.725,00	16,57
6.2.	Transfer Bantuan Keuangan	219.827.641.150,00	219.940.216.150,00	112.575.000,00	0,05
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	218.745.210.150,00	218.857.785.150,00	112.575.000,00	0,05



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.082.431.000,00	1.082.431.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.814.778.220.496,95	2.008.179.845.827,09	193.401.625.330,14	10,66

2.5.5.3 Pergeseran dalam pembiayaan.

Pergeseran dalam Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 yaitu pada penyertaan modal di PT. Bank BPD DIY dan PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY sebesar Rp13.000.000.000,00 untuk dilaksanakan pada Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi kewajiban dan mengikat sesuai dengan RUPS dan Perda yang ditetapkan, dikarenakan pemegang saham PT Bank BPD DIY terdiri atas beberapa daerah.

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Daerah Gunungkidul yang dialokasikan pada Rancangan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.000.000.000,00. Modal PD BPR Bank Daerah Gunungkidul dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham sehingga menjadi kewajiban namun tidak mengikat pada Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2018, sehingga untuk ditambahkan pada APBD Tahun Anggaran 2019.

Anggaran Pembiayaan menurut versi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan versi SAP dapat dirinci sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RINGKASAN PERGESERAN ANGGARAN PEMBIAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
6.	PEMBIAYAAN	98.035.474.807,65	46.880.521.748,08	48.845.046.940,43	49,82
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	106.535.474.807,65	168.418.167.281,08	61.882.692.473,43	58,09
6.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	106.535.474.807,65	168.418.167.281,08	61.882.692.473,43	58,09
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.535.474.807,65	168.418.167.281,08	61.882.692.473,43	58,09
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.500.000.000,00	21.537.645.533,00	13.037.645.533,00	153,38
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	21.500.000.000,00	13.000.000.000,00	152,94
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	37.645.533,00	37.645.533,00	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.500.000.000,00	21.537.645.533,00	13.037.645.533,00	153,38
	PEMBIAYAAN NETO	98.035.474.807,65	146.880.521.748,08	48.845.046.940,43	49,82



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diklasifikasikan menurut urusan wajib serta urusan pilihan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas sebagai berikut :

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAPATAN
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
				Rp	%
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	105.891.945.606,00	109.725.480.313,00	3.833.534.707,00	3,62
1.01.	PENDIDIKAN				
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	55.330.480.000	55.330.480.000	-
1.02.	KESEHATAN				
1.02.01.	Dinas Kesehatan	47.856.374.470,00	45.397.627.268,00	(2.458.747.202,00)	(5,14)
1.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah	57.450.000.000,00	63.931.957.045,00	6.481.957.045,00	11,28
1.03.	PEKERJAAN UMUM				
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	585.571.136,00	395.896.000,00	(189.675.136,00)	(32,39)
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	4.180.987.500,00	5.730.167.846,00	1.549.180.346,00	37,05
2.01.	LINGKUNGAN				
2.01.01.	Dinas Lingkungan Hidup	360.000.000,00	391.647.000,00	31.647.000,00	8,79



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.02.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.02.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	650.630.000,00	650.630.000,00	-
2.03.	PERHUBUNGAN				
2.03.01.	Dinas Perhubungan	1.820.987.500,00	2.073.646.400,00	252.658.900,00	13,87
2.04.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.04.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	800.000.000,00	1.268.542.350,00	468.542.350,00	58,57
2.05.	PENANAMAN MODAL				
2.05.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.200.000.000,00	1.345.702.096,00	145.702.096,00	12,14
3.	URUSAN PILIHAN	32.207.786.786,23	28.177.510.970,00	(4.030.275.816,23)	(12,5)
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.01.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	640.000.000,00	758.340.745,00	118.340.745,00	18,49
3.02.	PARIWISATA				
3.02.01	Dinas Pariwisata	28.276.144.000,00	23.993.614.325,00	(4.282.529.675,00)	(15,15)
3.03.	PERTANIAN				
3.03.01.	Dinas Pertanian Dan Pangan	262.600.000,00	315.067.450,00	52.467.450,00	19,98
3.04.	PERDAGANGAN				
3.04.01.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.029.042.786,23	3.110.488.450,00	81.445.663,77	2,69
4.	PENUNJANG URUSAN	1.719.018.604.186,78	1.652.438.713.950,83	(66.579.890.235,95)	(3,87)
4.03.	KEUANGAN	1.719.018.604.186,78	1.652.438.713.950,83	(66.579.890.235,95)	(3,87)
4.03.01.	PPKD	1.643.905.932.707,93	1.568.836.048.507,93	(75.069.884.200,00)	(4,57)
4.03.02.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	75.112.671.478,85	83.602.665.442,90	8.489.993.964,05	11,30
	JUMLAH	1.861.299.324.079,01	1.851.402.353.079,83	(9.896.970.999,18)	(0,53)

Dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang memiliki prosentase realisasi pendapatan terbesar berturut turut adalah urusan wajib :

1. Rumah Sakit Umum Daerah ditargetkan sebesar Rp57.540.000.000,00 realisasi sebesar Rp63.931.957.045,00 atau mencapai sebesar 111,28%;
2. Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar Rp47.856.374.470,00 realisasi sebesar Rp45.3973627.268,00 atau mencapai sebesar 94,86%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditargetkan sebesar Rp585.571.136,00 realisasi sebesar Rp395.896.000,00 atau mencapai sebesar 37,61%; dan
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang tidak ditargetkan tetapi ada realisasi sebesar Rp55.330.480,00 yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika ditargetkan sebesar Rp800.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.268.542.350,00 atau mencapai sebesar 158,57%;
2. Dinas Perhubungan ditargetkan sebesar Rp1.820.987.500,00 realisasi sebesar Rp2.073.646.400,00 atau mencapai sebesar 113,87 %;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ditargetkan sebesar Rp1.200.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.345.702.096,00 atau mencapai sebesar 112,14%;
4. Dinas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar Rp360.000.000,00 realisasi sebesar Rp391.647.000,00 atau mencapai sebesar 108,79%; dan
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak ditargetkan tetapi ada realisasi sebesar Rp650.630.000,00 yang berasal dari Denda Keterlambatan Retribusi Jasa Umum.

Sedang Urusan Pilihan yang pendapatannya melebihi target berturut turut adalah Urusan Pilihan :

1. Dinas Pertanian dan Pangan ditargetkan sebesar Rp262.600.000,00 realisasi sebesar Rp315.067.450,00 atau mencapai sebesar 119,98%;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan ditargetkan sebesar Rp640.000.000,00 realisasi sebesar Rp758.340.745,00 atau mencapai sebesar 118,49%;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah ditargetkan sebesar Rp75.119.671.478,85 realisasi sebesar Rp83.602.665.442,90 atau mencapai sebesar 111,30%;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditargetkan sebesar Rp3.029.042.786,23 realisasi sebesar Rp3.110.488.450,00 atau mencapai sebesar 102,69%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5. PPKD ditargetkan sebesar Rp1.643.905.932.707,93 realisasi sebesar Rp1.568.836.048.507,93 atau mencapai sebesar 95,13%; dan
6. Dinas Pariwisata ditargetkan sebesar Rp28.276.144.000,00 realisasi sebesar Rp23.993.614.325,00 atau mencapai sebesar 84,85%;

Adapun realisasi belanja menurut urusan dan organisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BELANJA
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
				Rp	%
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	506.291.263.020,00	402.477.837.403,34	(103.813.425.616,66)	(20,50)
1.01.	PENDIDIKAN				
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	144.066.711.785,00	74.461.435.701,00	(69.605.276.084,00)	(48,31)
1.02.	KESEHATAN				
1.02.01	Dinas Kesehatan	99.597.830.542,00	84.071.534.185,80	(15.526.296.356,20)	(15,59)
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	68.101.141.000,00	66.925.109.284,00	(1.176.031.716,00)	(1,73)
1.03.	PEKERJAAN UMUM				
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	183.599.705.693,00	166.749.618.782,54	(16.850.086.910,46)	(9,18)
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT				
1.04.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.520.465.000,00	2.304.444.393,00	(216.020.607,00)	(8,57)
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.920.247.000,00	2.767.055.634,00	(153.191.366,00)	(5,25)
1.06.	SOSIAL				
1.06.01.	Dinas Sosial	5.485.162.000,00	5.198.639.423,00	(286.522.577,00)	(5,22)
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	107.432.893.120,00	101.443.683.766,00	(5.989.209.354,00)	(5,57)
2.01.	TENAGA KERJA				
2.01.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.134.066.400,00	3.025.997.155,00	(108.069.245,00)	(3,45)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.580.233.700,00	1.516.672.364,00	(63.561.336,00)	(4,02)
2.03.	PANGAN				
2.03.01.	Dinas Pertanian dan Pangan	927.530.000,00	913.884.400,00	(13.645.600,00)	(1,47)
2.04.	PERTANAHAN				
2.04.01.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	49.232.849.500,00	48.160.733.252,00	(1.072.116.248,00)	(2,18)
2.05.	LINGKUNGAN				
2.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup	11.273.300.000,00	10.648.650.479,00	(624.649.521,00)	(5,54)
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.06.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.126.712.450,00	4.730.953.029,00	(395.759.421,00)	(7,72)
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.282.175.950,00	1.735.893.945,00	(546.282.005,00)	(23,94)
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.706.460.000,00	4.506.945.673,00	(1.199.514.327,00)	(21,02)
2.09.	PERHUBUNGAN				
2.09.01.	Dinas Perhubungan	7.006.973.000,00	6.663.986.266,00	(342.986.734,00)	(4,89)
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.10.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.706.899.000,00	4.327.365.955,00	(379.533.045,00)	(8,06)
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
2.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.424.456.500,00	2.234.285.531,00	(190.170.969,00)	(7,84)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.12.	PENANAMAN MODAL				
2.12.01.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	2.313.230.000,00	2.198.953.366,00	(114.276.634,00)	(4,94)
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2.13.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7.079.390.120,00	6.715.609.900,00	(363.780.220,00)	(5,14)
2.14.	STATISTIK				
2.14.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	256.395.000,00	166.278.699,00	(90.116.301,00)	(35,15)
2.15.	PERSANDIAN				
2.15.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	242.580.000,00	217.660.621,00	(24.919.379,00)	(10,27)
2.16.	KEBUDAYAAN				
2.16.01.	Dinas Kebudayaan	2.185.769.500,00	1.918.028.738,00	(267.740.762,00)	(12,25)
2.17.	PERPUSTAKAAN				
2.17.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.711.689.500,00	1.524.454.358,00	(187.235.142,00)	(10,94)
2.18.	KEARSIPAN				
2.18.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	242.182.500,00	237.330.035,00	(4.852.465,00)	(2,00)
3.	URUSAN PILIHAN				
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.01.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.522.663.500,00	3.245.604.552,00	(277.058.948,00)	(7,87)
3.02.	PARIWISATA				
3.02.01.	Dinas Pariwisata	14.500.006.900,00	12.689.580.976,00	(1.810.425.924,00)	(12,49)
3.03.	PERTANIAN				
3.03.01.	Dinas Pertanian dan Pangan	13.141.234.660,00	12.594.730.485,00	(546.504.175,00)	(4,16)
3.04.	KEHUTANAN				
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
3.06.	PERDAGANGAN				
3.06.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.687.603.600,00	15.564.253.032,50	(2.123.350.567,50)	(12,00)
3.07.	PERINDUSTRIAN				
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.176.700.000,00	3.022.952.984,00	(153.747.016,00)	(4,84)
3.08.	TRANSMIGRASI				
3.08.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	490.175.000,00	487.262.198,00	(2.912.802,00)	(0,59)
4.	PENUNJANG URUSAN	116.586.340.931,00	36.188.042.638,00	(80.398.298.293,00)	(68,96)
4.01.	INSPEKTORAT				
4.01.01.	Inspektorat Daerah	2.410.276.000,00	2.250.535.076,00	(159.740.924,00)	(6,63)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.02.	PERENCANAAN				
4.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.750.555.500,00	3.619.877.863,00	(130.677.637,00)	(3,48)
4.03.	KEUANGAN				
4.03.01.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	26.900.547.131,00	23.003.716.920,00	(3.896.830.211,00)	(14,49)
4.04.	KEPEGAWAIAN				
4.04.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4.753.387.100,00	4.067.803.109,00	(685.583.991,00)	(14,42)
4.05.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
4.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
4.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	440.904.500,00	417.769.050,00	(23.135.450,00)	(5,25)
4.07.	BENCANA				
4.07.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.330.670.700,00	2.828.340.620,00	(75.502.330.080,00)	(96,39)
5.	PENDUKUNG	52.008.058.000,00	41.082.232.350,00	(10.925.825.650,00)	(21,01)
5.01.	SEKRETARIAT DAERAH				
5.01.01.	Sekretariat Daerah	11.566.463.500,00	11.090.311.964,00	(476.151.536,00)	(4,12)
5.02.	SEKRETARIAT DPRD				
5.02.01.	Sekretariat DPRD	40.441.594.500,00	29.991.920.386,00	(10.449.674.114,00)	(25,84)
6.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
6.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.366.335.000,00	2.136.708.619,00	(229.626.381,00)	(9,70)
7.	KEWILAYAHAN	11.990.365.610,00	11.425.504.594,00	(564.861.016,00)	(4,71)
7.01.	KECAMATAN				
7.01.01.	Kecamatan Wonosari	564.100.000,00	523.148.031,00	(40.951.969,00)	(7,26)
7.01.02.	Kecamatan Paliyan	535.107.000,00	492.605.628,00	(42.501.372,00)	(7,94)
7.01.03.	Kecamatan Panggang	731.617.000,00	678.973.503,00	(52.643.497,00)	(7,20)
7.01.04.	Kecamatan Tepus	506.357.000,00	495.828.314,00	(10.528.686,00)	(2,08)
7.01.05.	Kecamatan Rongkop	470.678.000,00	439.517.996,00	(31.160.004,00)	(6,62)
7.01.06.	Kecamatan Semanu	794.308.750,00	786.901.557,00	(7.407.193,00)	(0,93)
7.01.07.	Kecamatan Ponjong	686.041.000,00	662.300.407,00	(23.740.593,00)	(3,46)
7.01.08.	Kecamatan Karangmojo	1.099.264.360,00	1.074.843.887,00	(24.420.473,00)	(2,22)
7.01.09.	Kecamatan Playen	535.710.000,00	515.377.798,00	(20.332.202,00)	(3,80)
7.01.10.	Kecamatan Nglipar	651.234.000,00	596.934.980,00	(54.299.020,00)	(8,34)
7.01.11.	Kecamatan Ngawen	925.574.000,00	846.429.822,00	(79.144.178,00)	(8,55)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7.01.12.	Kecamatan Semin	535.687.000,00	516.039.611,00	(19.647.389,00)	(3,67)
7.01.13.	Kecamatan Patuk	858.303.000,00	845.423.612,00	(12.879.388,00)	(1,50)
7.01.14.	Kecamatan Saptosari	497.062.000,00	481.719.700,00	(15.342.300,00)	(3,09)
7.01.15.	Kecamatan Gedangsari	584.121.000,00	569.809.608,00	(14.311.392,00)	(2,45)
7.01.16.	Kecamatan Girisubo	612.361.500,00	594.032.346,00	(18.329.154,00)	(2,99)
7.01.17.	Kecamatan Tanjungsari	482.205.000,00	465.853.566,00	(16.351.434,00)	(3,39)
7.01.18.	Kecamatan Purwosari	920.635.000,00	839.764.228,00	(80.870.772,00)	(8,78)
JUMLAH		849.193.639.341,00	642.358.393.597,84	(206.835.245.743,16)	(24,36)

Apabila merujuk pada optimalisasi kinerja belanja maka berturut-turut dari
Urusan Wajib Pelayanan Dasar :

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang ditargetkan sebesar Rp68.101.141.000,00 realisasi sebesar Rp66.925.109.284,00 atau mencapai sebesar 98,27%;
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang ditargetkan sebesar Rp2.920.247.000,00 realisasi sebesar Rp2.767.055.634,00 atau mencapai sebesar 94,75%;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Urusan Pemerintahan – Perumahan Rakyat) yang ditargetkan sebesar Rp2.520.465.000,00 realisasi sebesar Rp2.304.444.393,00 atau mencapai sebesar 91,43%;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Urusan Pemerintahan – Pekerjaan Umum) yang ditargetkan sebesar Rp183.599.705.693,00 realisasi sebesar Rp166.749.618.782,54 atau mencapai sebesar 90,82%;
5. Dinas Kesehatan yang ditargetkan sebesar Rp99.597.830.542,00 realisasi sebesar Rp84.071.534.185,80 atau mencapai sebesar 84,41% dan
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang ditargetkan sebesar Rp144.066.711.785,00 realisasi sebesar Rp74.461.435.701,00 atau mencapai sebesar 51,69%;

Selanjutnya untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar:

1. Dinas Pertanian dan Pangan (Urusan dan Pemerintah Daerah – Pangan) yang ditargetkan sebesar Rp927.530.000,00 realisasi sebesar Rp913.884.400,00 atau mencapai sebesar 98,53%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang ditargetkan sebesar Rp242.182.500,00 realisasi sebesar Rp237.330.035,00 atau mencapai sebesar 97,99%;
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang ditargetkan sebesar Rp49.232.849.500,00 realisasi sebesar Rp48.160.733.252,00 atau mencapai sebesar 97,83%;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditargetkan sebesar Rp3.134.066.400,00 realisasi sebesar Rp3.025.997.155,00 atau mencapai sebesar 96,55%;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditargetkan sebesar Rp1.580.233.700,00 realisasi sebesar Rp1.516.672.364,00 atau mencapai sebesar 95,98%;
6. Dinas Perhubungan yang ditargetkan sebesar Rp7.006.973.000,00 realisasi sebesar Rp6.663.986.266,00 atau mencapai sebesar 95,11%;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang ditargetkan sebesar yang ditargetkan sebesar Rp2.313.230.000,00 realisasi sebesar Rp2.198.953.366,00 atau mencapai sebesar 95,06%;
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Urusan Pemerintah Daerah – Kepemudaan dan Olahraga) yang ditargetkan sebesar Rp7.079.390.120,00 realisasi sebesar Rp6.715.609.900,00 atau mencapai sebesar 94,86%;
9. Dinas Sosial yang ditargetkan sebesar Rp5.485.162.000,00 realisasi sebesar Rp5.198.639.423,00 atau mencapai sebesar 94,78%;
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang ditargetkan sebesar Rp2.920.247.000,00 realisasi sebesar Rp2.767.055.634,00 atau mencapai sebesar 94,75%;
11. Dinas Lingkungan Hidup yang ditargetkan sebesar Rp11.273.300.000,00 realisasi sebesar Rp10.648.650.476,00 atau mencapai sebesar 94,46%;
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditargetkan sebesar Rp5.126.712.450,00 realisasi sebesar Rp4.730.953.039,00 atau mencapai sebesar 92,28%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditargetkan sebesar Rp2.424.456.500,00 realisasi sebesar Rp2.234.285.531,00 atau mencapai sebesar 92,16%;
14. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang ditargetkan sebesar Rp43.253.204.516,00 realisasi sebesar Rp39.395.233.107,00 atau mencapai sebesar 91,08%;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika (Urusan Pemerintah Daerah – Komunikasi dan Informatika) yang ditargetkan sebesar Rp4.706.899.000,00 realisasi sebesar Rp4.327.365.955,00 atau mencapai sebesar 91,94%;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika (Urusan Pemerintah Daerah – Persandian) yang ditargetkan sebesar Rp242.182.500,00 realisasi sebesar Rp237.330.035,00 atau mencapai sebesar 89,73%;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Urusan Pemerintah Daerah – Kearsipan) yang ditargetkan sebesar Rp1.711.689.500,00 realisasi sebesar Rp1.524.454.358,00 atau mencapai sebesar 89,06%;
18. Dinas Kebudayaan yang ditargetkan sebesar Rp2.185.769.500,00 realisasi sebesar Rp1.918.028.738,00 atau mencapai sebesar 87,75%;
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Urusan Pemerintah Daerah – Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) yang ditargetkan sebesar Rp5.706.460.000,00 realisasi sebesar Rp4.506.945.673,00 atau mencapai sebesar 78,98%;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Urusan Pemerintah Daerah – Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang ditargetkan sebesar Rp2.282.175.950,00 realisasi sebesar Rp1.735.893.945,00 atau mencapai sebesar 76,06%; dan
21. Dinas Komunikasi dan Informatika (Urusan Pemerintah Daerah – Statistika) yang ditargetkan sebesar Rp256.3953.000,00 realisasi sebesar Rp166.278.699,00 atau mencapai sebesar 64,86%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Selanjutnya untuk Urusan Pilihan :

1. Dinas Tenaga dan Transmigrasi yang ditargetkan sebesar Rp490.175.000,00 realisasi sebesar Rp487.262.198,00 atau mencapai sebesar 99,41%;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp3.750.555.500,00 realisasi sebesar Rp3.619.877.863,00 atau mencapai sebesar 96,52%
3. Dinas Pertanian dan Pangan yang ditargetkan sebesar Rp13.141.234.600,00 realisasi sebesar Rp12.594.730.485,00 atau mencapai sebesar 95,84%
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Pemerintah Daerah – Perindustrian) yang ditargetkan sebesar Rp3.176.700.000,00 realisasi sebesar Rp3.022.952.984,00 atau mencapai sebesar 95,16%;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp440.904.500,00 realisasi sebesar Rp417.769.050,00 atau mencapai sebesar 94,75%;
6. Inspektorat Daerah yang ditargetkan sebesar Rp2.410.276.000,00 realisasi sebesar Rp2.250.535.076,00 atau mencapai sebesar 93,37%;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditargetkan sebesar Rp3.522.663.500,00 realisasi sebesar Rp3.245.604.552,00 atau mencapai sebesar 92,14%;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Pemerintah Daerah – Perdagangan) yang ditargetkan sebesar Rp17.687.603.600,00 realisasi sebesar Rp15.564.253.032,50,00 atau mencapai sebesar 87,99%;
9. Dinas Pariwisata yang ditargetkan sebesar Rp14.500.006.900,00 realisasi sebesar Rp12.689.580.976,00 atau mencapai sebesar 87,51%;
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp4.753.387.100,00 realisasi sebesar Rp4.067.803.109,00 atau mencapai sebesar 85,58%;
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditargetkan sebesar Rp26.900.547.131,00 realisasi sebesar Rp23.003.716.920,00 atau mencapai sebesar 85,51%; dan
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditargetkan sebesar Rp78.330.670.700,00 realisasi sebesar Rp2.828.340.620,00 atau mencapai sebesar 3,61%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Selanjutnya untuk Pendukung :

1. Sekretariat Daerah yang ditargetkan sebesar Rp11.566.463.500,00 realisasi sebesar Rp11.090.311.964,00 atau mencapai sebesar 95,88%;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditargetkan sebesar Rp2.366.335.000,00 realisasi sebesar Rp2.136.708.619,00 atau mencapai sebesar 90,30%;
3. Sekretariat DPRD yang ditargetkan sebesar Rp40.441.594.500,00 realisasi sebesar Rp29.991.920.386,00 atau mencapai sebesar 74,16%.

Adapun untuk Kewilayahan :

1. Kecamatan Semanu yang ditargetkan sebesar Rp794.308.750,00 realisasi sebesar Rp786.901.557,00 atau mencapai sebesar 99,07%;
2. Kecamatan Ponjong yang ditargetkan sebesar Rp686.041.000,00 realisasi sebesar Rp662.300.407,00 atau mencapai sebesar 98,54%;
3. Kecamatan Patuk yang ditargetkan sebesar Rp858.303.000,00 realisasi sebesar Rp845.423.612,00 atau mencapai sebesar 98,50%;
4. Kecamatan Tepus yang ditargetkan sebesar Rp506.357.000,00 realisasi sebesar Rp495.828.314,00 atau mencapai sebesar 97,92%;
5. Kecamatan Karangmojo yang ditargetkan sebesar Rp1.099.264.360,00 realisasi sebesar Rp523.148.031,00 atau mencapai sebesar 97,78%;
6. Kecamatan Gedangsari yang ditargetkan sebesar Rp584.121.000,00 realisasi sebesar Rp569.809.608,00 atau mencapai sebesar 97,56%;
7. Kecamatan Girisubo yang ditargetkan sebesar Rp612.361.500,00 realisasi sebesar Rp594.032.346,00 atau mencapai sebesar 97,01%;
8. Kecamatan Saptosari yang ditargetkan sebesar Rp497.062.000,00 realisasi sebesar Rp481.719.700,00 atau mencapai sebesar 96,91%;
9. Kecamatan Tanjungsari yang ditargetkan sebesar Rp482.205.000,00 realisasi sebesar Rp465.853.566,00 atau mencapai sebesar 96,61%;
10. Kecamatan Semin yang ditargetkan sebesar Rp535.687.000,00 realisasi sebesar Rp516.039.611,00 atau mencapai sebesar 96,33%;
11. Kecamatan Playen yang ditargetkan sebesar Rp535.710.000,00 realisasi sebesar Rp515.377.798,00 atau mencapai sebesar 96,21%;
12. Kecamatan Rongkop yang ditargetkan sebesar 1.099.264.360,00 realisasi sebesar Rp1.074.843.887,00 atau mencapai sebesar 93,38%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

13. Kecamatan Panggang yang ditargetkan sebesar Rp731.617.000,00 realisasi sebesar Rp678.973.503,00 atau mencapai sebesar 92,81%;
14. Kecamatan Wonosari yang ditargetkan sebesar Rp564.100.000,00 realisasi sebesar Rp523.148.031,00 atau mencapai sebesar 92,74%;
15. Kecamatan Paliyan yang ditargetkan sebesar Rp506.357.000,00 realisasi sebesar Rp492.605.628,00 atau mencapai sebesar 92,06%;
16. Kecamatan Nglipar yang ditargetkan sebesar Rp651.234.000,00 realisasi sebesar Rp596.934.980,00 atau mencapai sebesar 91,66%;
17. Kecamatan Ngawen yang ditargetkan sebesar Rp925.574.000,00 realisasi sebesar Rp846.429.822,00 atau mencapai sebesar 91,45%; dan
18. Kecamatan Purwosari yang ditargetkan sebesar Rp920.635.000,00 realisasi sebesar Rp839.764.227,00 atau mencapai sebesar 91,22%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB IV **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4. PENDAHULUAN

Instrumen penting dalam penerapan akuntansi akrual adalah Kebijakan Akuntansi yang dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD dan menjadi pedoman oleh pihak-pihak lain seperti fungsi perencanaan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak, mulai dari proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diimplementasikan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2018.

4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1. Pendahuluan

a. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan akuntansi menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Basis Akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai :

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh entitas pelaporan, sedangkan untuk setiap entitas akuntansi tidak menyajikan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Struktur dan Isi masing-masing laporan sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/Defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- 2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan Aset dalam Aset Lancar dan Aset Non Lancar serta mengklasifikasikan Kewajiban menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- 4) Beban luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos :

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Ekuitas Mutasi
- 3) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 4) Jumlah Ekuitas Akhir.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

g Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan - kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan;
- 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1. Aset

a. Kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek dapat berupa: Saham, Deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Investasi Jangka pendek BLUD dan Investasi Jangka pendek lainnya.

c. Piutang

Piutang diakui saat:

- 1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Piutang disajikan sebesar Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung Penyisihan piutang adalah kualitas piutang yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 1) Kualitas Piutang lancar
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar
- 3) Kualitas Piutang Diragukan dan
- 4) Kualitas Piutang Macet

Adapun besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang
Berdasarkan Kualitas Piutang**

Nomor	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

d. Persediaan

Metode pencatatan persediaan menggunakan Metode Perpetual yang dinilai menggunakan Metode Pertama Keluar Pertama atau First In First Out (FIFO)

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Adapun untuk persediaan barang cetakan dan barang kuasi yang sudah tidak digunakan lagi, rusak dan cacat, dilakukan perhitungan kembali dan dituangkan dalam Berita Acara menurut nilai persediaannya kemudian dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode Biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2) Metode Ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta Revaluasi Aset Tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

f. Aset Tetap

1) Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengakuan Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa Hewan/Ternak dan Tumbuhan serta Kontruksi dalam Pengerjaan.

2) Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan perkiraan masa manfaat sebagai berikut :

Tabel 4.2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1				2	3
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1				2	3
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1				2	3
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Penyusutan terhadap Aset Tetap dilakukan pada tahun Aset Tetap tersebut diperoleh berdasarkan Harga Perolehan dan masa manfaatnya setiap tahun. Adapun untuk aset ekstrakompabel tidak dilakukan penyusutan.

Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun. Akumulasi disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.

g. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset lainnya antara lain Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri Atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah Golongan III.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Adapun untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari :

- 1) Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- 3) Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu kemudian menyerahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.
- 4) Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan asset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah Aset Non Moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset Tak Berwujud terdiri atas :

1) Hak Paten

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya

2) Aset Tak Berwujud Lainnya

a) *Software*/Sistem Informasi Manajemen

Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud (ATB) adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

b) Kajian

Kajian adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai Aset.

c) Konsultan Perencana.

Konsultan Perencana adalah hasil pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan perencana, dapat berupa gambar kerja pelaksanaan, desain bangunan, detail perencanaan bangunan, pembuatan gambar, shop drawing.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas Pemerintah Daerah.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dilakukan dengan metode Garis Lurus.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Perhitungan metode garis lurus menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Didalam penghitungan dan pencatatannya Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi sedangkan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas, dilakukan amortisasi.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

2. Kewajiban

a) Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Panjang hanya terdapat di PPKD.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kewajiban Jangka Pendek di PPKD terdiri atas:

- 1) Utang Bunga;
- 2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Adapun Kewajiban Jangka Pendek di SKPD terdiri atas:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang di PPKD terdiri atas:

- 1) Utang Dalam Negeri;
- 2) Utang Luar Negeri; dan
- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya.

b) Pengakuan Kewajiban.

Kewajiban diakui pada saat:

- 1) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- 2) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- 3) Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

c) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3. Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

a) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

b) Ekuitas Awal

Ekuitas Awal digunakan untuk mencatat akun atas ekuitas pertama kali diterapkan. Ekuitas yaitu pada saat dilakukan restatemen atas LKPD tahun 2014 sebagai dasar nilai ekuitas awal tahun 2015.

c) Surplus/ Defisit Lo

Surplus Defisit LO pada saat periode bersangkutan.

4. Pendapatan-LRA

a) Pengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:

- 1) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Diterima oleh SKPD; atau
- 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

b) Pengukuran Pendapatan-LRA

- 1) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c) Penyajian

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5. Belanja

a) Pengakuan Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b) Pengukuran belanja

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

6. Transfer

a) Pengakuan Transfer

- 1) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul hak daerah terhadap transfer masuk.
- 2) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah maka timbul kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

b) Pengukuran Transfer

- 1) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

c) Penilaian Transfer

- 1) Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2) Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7. Pembiayaan

a. Pengakuan Pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat :

- a) Penerimaan pembiayaan yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang.
- c) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan untuk pembiayaan.

2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.

b. Pengukuran Pembiayaan

- 1) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah
- 2) Berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- 3) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

8. Pendapatan-LO

a. Definisi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan- LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

b. Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan LO dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO.

Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

c. Pengukuran Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

9. Beban

a. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

b. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

10. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan tidak berulang :

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

- 3) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi tahun 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	217.393.391.371,08	226.984.458.096,18	104,41	271.370.043.388,71
1.2. Pendapatan Transfer	1.496.877.013.683,93	1.479.787.393.507,93	98,86	1.518.680.566.844,39
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	147.028.919.024,00	144.122.556.516,62	98,02	57.054.808.350,00
Jumlah Pendapatan	1.861.299.324.079,01	1.850.894.408.120,73	99,44	1.847.105.418.583,10

Realisasi Pendapatan TA 2018 sebesar Rp1.850.894.408.120,73 atau mencapai 99,44% dari anggarannya sebesar Rp1.861.299.324.079,01 dan meningkat sebesar Rp3.788.989.537,63 (0,21%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.847.105.418.583,1 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp226.984.458.096,18

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2018 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut :

	2018			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Pendapatan Pajak Daerah	47.137.026.586,00	51.299.015.171,00	108,83	43.686.045.795,82
b. Pendapatan Retribusi Daerah	36.747.368.399,00	34.184.023.146,00	93,02	34.783.664.615,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.370.184.563,64	14.373.326.016,87	100,02	13.088.999.290,33
d. Lain-lain PAD yang Sah	119.138.811.822,44	127.128.093.762,31	106,71	179.811.333.687,56
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	217.393.391.371,08	226.984.458.096,18	104,41	271.370.043.388,71

Realisasi PAD TA 2018 sebesar Rp226.984.458.096,180 atau 104,41% dari anggaran sebesar Rp217.393.391.371,08 menurun sebesar -Rp44.385.585.292,530 (-16,36%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp271.370.043.388,71.

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2018 dan 2017, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah Rp51.299.015.171,00

Pendapatan Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018(Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Pajak Hotel	700.650.000,00	674.820.241,00	96,31	716.245.584,00
2) Pajak Restoran	4.072.909.050,00	6.076.089.063,00	149,18	5.204.844.585,82
3) Pajak Hiburan	154.250.000,00	167.413.450,00	108,53	118.663.050,00
4) Pajak Reklame	694.000.000,00	868.311.921,00	125,12	716.074.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5) Pajak Penerangan Jalan	14.100.000.000,00	14.352.708.494,00	101,79	12.666.417.764,00
6) Pajak Mineral bukan Logam & Batuan	1.367.000.000,00	1.560.923.300,00	114,19	311.736.000,00
7) Pajak Parkir	40.000.000,00	41.698.275,00	104,25	44.125.000,00
9) Pajak Air Bawah Tanah	387.000.000,00	401.770.472,00	103,82	420.615.999,00
10) Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Pajak Bumi dan Bangunan	20.471.217.536,00	20.604.941.479,00	100,65	18.221.289.537,00
12) Pajak BPHTB	5.150.000.000,00	6.550.338.476,00	127,19	5.266.034.276,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	47.137.026.586,00	51.299.015.171,00	108,83	43.686.045.795,82

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 sebesar Rp51.299.015.171, atau 108,83% dari anggarannya sebesar Rp47.137.026.586,00, naik sebesar Rp7.612.969.375,18 (17,43%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp43.686.045.795,8200.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp51.299.015.171, termasuk didalamnya Penerimaan Piutang Pajak Daerah pada Tahun 2018 sebesar Rp23.022.731.783,00. Dengan perincian sebagai berikut :

1) Piutang Pajak Hotel/Losmen	0,00
2) Piutang Pajak Restoran	1.380.000,00
3) Piutang Pajak Hiburan	0,00
4) Piutang Pajak Reklame	887.574.671,00
5) Piutang Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	19.633.000,00
6) Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.107.432.161,00
7) Piutang Pajak Parkir	0,00
8) Piutang Pajak Air Bawah Tanah	401.770.472,00
9) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	20.604.941.479,00
Jumlah	23.022.731.783,00

Ketetapan pajak PBB-P2 untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 23.735.677.790,00 (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan realisasi pendapatan dari pajak PBB-P2 pada tahun 2018 untuk penerimaan tahun pajak 1995 sampai dengan tahun 2018 yang tercatat pada SISMIOP adalah sebesar Rp.20.784.157.606,- (Dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) yang terdiri dari penerimaan pokok sebesar Rp.20.604.882.155,- (dua puluh milyar enam ratus empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan denda sebesar

Rp.179.275.453,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sedangkan realisasi pendapatan dari pajak PBB-P2 pada tahun 2018 untuk penerimaan tahun pajak 1995 sampai dengan tahun 2018 yang dilimpahkan ke Kasda adalah sebesar Rp.20.784.236.223 (Dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). Selisih tersebut disebabkan karena :

- 1) Pada tanggal 17 Februari 2018 dilakukan uji coba pembayaran dengan host to host, sebagai uji coba maka dilakukan pembayaran atas 2 NOP yaitu NOP 34.03.090.001.012.0074.0 a/n Mukianah Rp. 10.000,- dan NOP 34.03.090.001.013.0236.0 a/n Mujari Rp. 10.000,- kemudian setelah ujicoba berhasil maka pada kedua NOP tersebut dilakukan penetapan ulang dengan kondisi belum terbayar.
- 2) Pada tanggal 19 Maret 2018 dilakukan penghapusan terhadap NOP 34.03.080.011.0286.0 a/n Saryanti dengan ketentuan Rp. 36.000,- disebabkan double ketentuan yang merupakan objek baru yang telah dibayar/lunas.
- 3) Pada tanggal 12 April 2018 dilakukan penghapusan terhadap NOP 34.03.080.011.0286.0 a/n Tukino dengan ketentuan Rp. 22.617,- disebabkan double ketentuan yang merupakan objek baru yang telah dibayar/lunas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Penerimaan PBB-P2 untuk tahun pajak 2018 adalah sebesar Rp. 20.183.111.520,- (Dua puluh milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan pokok sebesar Rp. 20.140.175.000,- (Dua puluh milyar seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan denda sebesar Rp. 42.936.520,- (Empat puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah). Pada realisasi penerimaan tersebut terdapat lebih bayar yang disebabkan karena pembetulan dan pemecahan yang perubahannya dilakukan setelah wajib pajak melunasi kewajibannya sebesar Rp. 6.773.210,- (Enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah). Dari realisasi tersebut diatas juga terdapat kurang bayar yang disebabkan karena perubahan SPPT dilakukan setelah wajib pajak membayar kewajibannya sebesar Rp. 1.085.000,- (Satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Jadi piutang PBB-P2 adalah Rp. 3.601.191.000,- yang berasal dari jumlah ketetapan PBB-P2 Rp. 23.735.677.790,- dikurangi dengan penerimaan pokok ditambah dengan penerimaan dari lebih bayar dan dikurangi kurang bayar yaitu (23.735.677.790 + 6.773.210 – 1.085.000) = Rp. 3.601.191.000,- (tiga milyar enam ratus satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Rp34.184.023.146,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai Unit Pengelola Pendapatan, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Pelayanan Kesehatan	146.000.000,00	180.261.450,00	123,47	151.655.650,00
2) Pelayanan Persampahan	546.421.500,00	578.678.900,00	105,90	543.113.100,00
3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	650.000.000,00	678.459.500,00	104,38	647.116.000,00
4) Pelayanan Pasar	1.483.145.263,00	1.485.630.800,00	100,17	1.361.627.400,00
5) Pengujian Kendaraan Bermotor	442.797.500,00	522.381.000,00	117,97	516.302.500,00
6) Pengendalian Menara Telekomunikasi	800.000.000,00	1.268.542.350,00	158,57	499.424.530,00
7) Pemakaian Kekayaan Daerah	1.386.379.636,00	2.122.300.580,00	153,08	1.033.019.894,00
8) Jasa Usaha Terminal	37.303.000,00	50.025.400,00	134,11	0,00
9) Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	1.097.193.500,00	1.157.959.500,00	105,54	1.196.375.500,00
10) Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	45.000.000,00	39.468.750,00	87,71	47.075.000,00
11) Usaha Tempat Rekreasi & Olahraga	28.151.144.000,00	23.860.554.075,00	84,76	26.141.620.085,00
12) Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	377.600.000,00	401.499.000,00	106,33	824.460.500,00
13) Retribusi Tempat Pelelangan	350.000.000,00	451.719.745,00	129,06	681.062.920,00
14) Izin Mendirikan Bangunan	1.200.000.000,00	1.345.702.096,00	112,14	1.065.982.536,00
15) Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
16) Ijin Trayek	34.384.000,00	40.840.000,00	118,78	33.129.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	36.747.368.399,00	34.184.023.146,00	93,02	34.783.664.615,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 sebesar Rp34.184.023.146,00 atau 93,02% dari anggarannya sebesar Rp36.747.368.399,00, menurun sebesar Rp34.184.023.146,00 (98,28%) dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp34.783.664.615,.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp180.261.450,00 dikelola oleh 2 (dua) OPD yaitu :
 - a. Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp 360.000,00
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan dengan realisasi sebesar Rp 179.901.450,00
2. Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp578.678.900,00 dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaitu :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar Rp 391.647.000,00
 - b. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dengan realisasi sebesar Rp 187.031.900,00
3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp678.459.500,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.
4. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.485.630.800,00 dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul yaitu :
 - a. Kemantren Pasar Wonosari Rp 393.375.900,00
 - b. Kemantren Pasar Playen Rp 280.148.100,00
 - c. Kemantren Pasar Paliyan Rp 97.356.300,00
 - e. Kemantren Pasar Semin Rp 170.405.600,00
 - f. Kemantren Pasar Semanu Rp 280.255.400,00
 - g. Kemantren Pasar Ponjong Rp 86.558.800,00
 - h. Kemantren Pasar Rongkop Rp 107.317.600,00
 - i. Kemantren Pasar Nglipar Rp 70.213.100,00
5. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp522.381.000,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.268.542.350,00 dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.122.300.580,00 dikelola oleh 6 (Enam) SKPD yaitu :
 - a. Dinas Pertanian Dan Pangan Rp 40.288.000,00
 - b. Dinas Pariwisata Rp 93.591.500,00
 - c. DPU, Perum & Kawasan Permukiman Rp 395.896.000,00
 - d. Dinas Kesehatan Rp 125.656.500,00
 - e. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Rp 601.867.250,00
 - f. Dinas Perhubungan Rp 40.719.400,00
 - g. Badan Keuangan Aset Daerah Rp 452.717.930,00
8. Retribusi Jasa Usaha Terminal sebesar Rp50.025.400,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.
9. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir Rp1.157.959.500,00 dikelola oleh 3 (tiga) SKPD yaitu :
 - a. Dinas Perhubungan Rp 693.565.000,00
 - b. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Rp 464.394.500,00
10. Retribusi Jasa Usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp39.468.750,00 dikelola oleh Dinas Pariwisata
11. Retribusi usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp23.860.554.075,00 dikelola oleh Dinas Pariwisata
12. Retribusi Jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp401.499.000,00 dikelola oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu :
 - a. Dinas Pertanian Dan Pangan Rp 94.878.000,00
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 306.621.000,00
13. Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp451.719.745,00 dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
14. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp1.345.702.096,00 dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu.
15. Retribusi Ijin Trayek realisasinya sebesar Rp40.840.000,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dapat mencapai target, namun untuk Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan Villa di Pantai kukup dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga yang di kelola pada Dinas Pariwisata realisasinya kurang dari target, hal tersebut disebabkan antara lain karena :

Pada tanggal 25 Juli 2018 terjadi gelombang tinggi yang menerjang hampir semua pantai selatan di Kabupaten Gunungkidul dan memporakporandakan beberapa obyek wisata pantai selatan sehingga sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gunungkidul.

Liburan pada tanggal 25 Desember 2018 yang diharapkan dapat menutup target pendapatan, tetapi dengan terjadinya tsunami di Selat Sunda dan informasi dari BMKG kalau pantai selatan akan terjadi gelombang pasang hal ini berdampak besar terhadap psikis masyarakat sehingga banyak wisatawan yang mengalihkan kunjungan wisata selain ke Gunungkidul

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp14.373.326.016,87

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Gunungkidul pada PD BPR Bank Daerah Gunungkidul, Bank Pembangunan Daerah DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dengan realisasi TA 2018 dan 2017 sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Daerah Gunungkidul	3.559.359.848,00	3.559.359.848,00	100,00	3.019.512.088,00
2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPD DIY	10.451.467.656,34	10.451.467.656,34	100,00	9.971.848.517,70
3) Perusahaan Daerah Air Minum	355.505.659,30	355.505.659,48	100,00	92.286.650,00
4) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank (BUKP)	3.851.400,00	6.992.853,05	181,57	5.352.034,63
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	14.370.184.563,64	14.373.326.016,87	100,02	13.088.999.290,33

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 sebesar Rp14.373.326.016,87 atau mencapai 100,02% dari anggarannya sebesar Rp14.370.184.563,64 atau naik sebesar Rp1.284.326.726,54 (9,81%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp13.088.999.290,33.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Rp127.128.093.762,31

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Perda, dengan realisasi TA 2018 dan 2017 sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	587.000.000,00	894.982.661,00	152,47	1.522.908.000,00
2) Penerimaan Jasa Giro	2.514.500.000,00	3.310.616.437,00	131,66	3.123.141.397,20
3) Pendapatan Bunga deposito	10.000.000.000,00	10.855.781.874,50	108,56	18.142.566.291,79
4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	1.130.198.586,47	0,00	1.989.131.238,18



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	699.329.329,77	0,00	196.929.605,48
6) Pendapatan Denda Pajak	0,00	225.657.528,00	0,00	248.895.321,00
7) Pendapatan Denda Retribusi	0,00	48.496.100,00	0,00	53.583.926,00
8) Pendapatan dari Pengembalian	0,00	94.594.663,00	0,00	385.961.247,25
9) Hasil Operasi Penegakan Perda	0,00	171.970.141,00	0,00	59.839.000,00
10) Pendapatan Bunga dari Pemberian Pinjaman Penguatan Modal	0,00	0,00	0,00	8.257,00
11) Pendapatan BLUD	105.251.848.970,00	109.203.567.813,00	103,75	93.672.780.504,00
12) Penerimaan Penempatan/ Perpanjangan Kios dan Los	706.502.523,23	0,00	0,00	902.753.375,00
13) Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	73.960.329,21	146.863.564,29	198,57	112.747.700,66
14) Pendapatan dari Pemusnahan Arsip	5.000.000,00	10.927.000,00	218,54	8.892.000,00
15) Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	0,00	650.630.000,00	0,00	721.580.000,00
16) Dana BOS	0,00	0,00	0,00	58.669.615.824,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	119.138.811.822,44	127.443.615.698,03	106,97	179.811.333.687,56

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 sebesar Rp127.443.615.698,03 atau mencapai 106,97% dari anggarannya sebesar Rp119.138.811.822,44 atau turun sebesar -Rp52.367.717.989,53 (-29,12%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp179.811.333.687,56.

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp894.982.661,00 merupakan hasil dari penjualan aset daerah
 - Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai Rp 6.000.000,00
 - Penjualan Kendaraan Dinas roda dua Rp 40.005.800,00
 - Penjualan Kendaraan Dinas roda empat Rp 103.549.998,00
 - Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Rp 530.134.200,00
 - Pelepasan Hak Atas Bangunan Rp 215.292.663,00
- Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp3.310.616.437, terdiri dari :
 - Jasa Giro Kas Daerah Rp 3.215.406.092,00
 - Jasa Giro Pemegang Kas Rp 95.210.345,00
- Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp10.855.781.874,5 terdiri dari :
 - Bunga Deposito Dari Bank Rp 10.855.781.874,50
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.130.198.586,47 terdiri dari :
 - Kerugian Uang Rp 1.130.198.586
 - Kerugian Barang Rp -
- Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp699.329.329,77 terdiri dari :
 - Bidang Pekerjaan Umum Rp 699.329.329,77
- Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp225.657.528,00 terdiri dari :
 - Pendapatan Denda Pajak Hotel Rp 2.448.210,00
 - Pendapatan Denda Pajak Restoran Rp 30.247.067,00
 - Pendapatan Denda Pajak Hiburan Rp 2.141.126,00
 - Pendapatan Denda Pajak Reklame Rp 870.780,00
 - Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Rp 8.707.258,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

-	Pendapatan Denda Pajak Parkir	Rp	445.908,00
-	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Rp	1.502.435,00
-	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bngunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp	179.294.744,00
7	Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp48.496.100,00 terdiri dari :		
-	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan	Rp	44.790.700,00
-	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	Rp	2.865.400,00
-	Pendapatan Denda Sewa Kios	Rp	840.000,00
8	Pendapatan Dari Pengembalian sebesar Rp94.594.663, terdiri dari :		
-	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp	94.594.663,00
9	Hasil Operasi dari Penegakan Perda sebesar Rp171.970.141, terdiri dari :		
-	Hasil Operasi dari Penegakan Perda	Rp	171.970.141,00
11	Pendapatan BLUD sebesar Rp109.203.567.813,00 terdiri dari :		
-	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	63.931.957.045,00
-	Pendapatan BLUD Puskesmas	Rp	45.271.610.768,00
12	Penerimaan Penempatan/Perpanjangan Kios dan Los sebesar Rp,00 terdiri dari :		
-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	787.649.250,00
13	Pendapatan dan Pengelolaan BUKP sebesar Rp146.863.564,29 merupakan dana Pembinaan dan Produksi BUKP yang di Kelola 15 (lima belas) Kecamatan terdiri dari :		
-	Kecamatan Patuk	Rp	8.919.025,80
-	Kecamatan Nglipar	Rp	10.570.711,32
-	Kecamatan Gedangsari	Rp	17.083.534,53
-	Kecamatan Panggang	Rp	13.983.201,66
-	Kecamatan Playen	Rp	7.209.237,68
-	Kecamatan Wonosari	Rp	1.950.902,86
-	Kecamatan Semanu	Rp	4.679.898,02
-	Kecamatan Ngawen	Rp	10.483.427,22
-	Kecamatan Tepus	Rp	5.730.168,55
-	Kecamatan Semin	Rp	27.363.865,60
-	Kecamatan Ponjong	Rp	6.966.329,87
-	Kecamatan Karangmojo	Rp	6.510.495,77
-	Kecamatan Rongkop	Rp	8.502.547,94
-	Kecamatan Paliyan	Rp	10.746.540,23
-	Kecamatan Saptosari	Rp	6.163.677,24
14	Pendapatan Pemusnahan Arsip sebesar Rp10.927.000, terdiri dari :		
-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	10.927.000,00
15	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan sebesar Rp650.630.000, terdiri dari :		
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	650.630.000,00

1.2. Pendapatan Transfer

Rp1.479.787.393.507,93

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan realisasi dalam TA 2018 dan 2017 sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.289.814.083.208,00	1.264.791.667.120,00	98,06	1.250.742.434.026,00
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	117.574.520.000,00	117.574.520.000,00	100,00	160.667.997.000,00
c. Transfer Pemerintah Provinsi	87.521.058.475,93	95.691.354.387,93	109,34	89.029.917.919,39
d. Bantuan Keuangan Provinsi	1.967.352.000,00	1.729.852.000,00	87,93	18.240.217.899,00
Jumlah Pendapatan Transfer	1.496.877.013.683,93	1.479.787.393.507,93	98,86	1.518.680.566.844,39



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 sebesar Rp1.479.787.393.507,93 atau 98,86% dari anggarannya sebesar Rp1.496.877.013.683,93 turun sebesar -Rp38.893.173.336,46 (-2,56%) dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.518.680.566.844,39 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Rp1.264.791.667.120,00

Penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.264.791.667.120,00 dari rencana sebesar Rp1.289.814.083.208,00 atau mencapai 98,06%, dengan perincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Dana Bagi Hasil Pajak	26.533.927.777,00	20.375.691.123,00	76,79	26.468.644.452,00
2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.658.072.431,00	2.330.959.941,00	87,69	2.344.005.472,00
3) Dana Alokasi Umum	938.221.136.000,00	938.221.136.000,00	100,00	938.221.136.000,00
4) Dana Alokasi Khusus	322.400.947.000,00	303.863.880.056,00	94,25	283.708.648.102,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.289.814.083.208,00	1.264.791.667.120,00	98,06	1.250.742.434.026,00

- Dana Bagi Hasil Pajak (Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK. 07 /2018 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018), terdiri dari :

- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Rp 5.606.026.112,00
- Bagi Hasil Pajak Penghasilan PPh Ps. 25 dan Ps. 29 Rp 14.769.665.011,00

- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari :

- Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Rp 43.549.909,00
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Rp 701.234.591,00
- Bagi Hasil dari Cukai Tembakau Rp 1.584.686.000,00
- Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara Rp 1.489.441,00

- Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 besaran realisasi DAU Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp938.221.136.000,00

- Dana Alokasi Khusus Rp303.863.880.056,00

Berdasarkan Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 besaran realisasi DAK Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Dana Alokasi Khusus Fisik reguler: Rp 35.147.766.897,00

- Bidang Pendidikan Rp 14.446.690.100,00
- Bidang Kesehatan Rp 5.021.147.250,00
- Bidang Pertanian Rp 3.883.756.000,00
- Bidang Kelautan dan Perikanan Rp 766.185.000,00
- Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah Rp 918.023.697,00
- Bidang Pariwisata Rp 1.410.405.000,00
- Bidang Air Minum Rp 83.874.500,00
- Bidang Jalan Rp 8.617.685.350,00

Dana Alokasi Khusus Fisik penugasan : Rp 38.240.160.311,00

- Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama) Rp 13.352.440.115,00
- Bidang Air Minum Rp 1.007.394.500,00
- Bidang Sanitasi Rp 6.401.060.000,00
- Bidang Jalan Rp 8.960.704.650,00
- Bidang Pasar Rp 4.430.038.000,00
- Bidang Irigasi Rp 3.643.313.000,00
- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 445.210.046,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp	230.475.952.848,00
1) Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	Rp	189.497.762.273,00
2) Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	Rp	735.900.000,00
3) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	17.309.369.900,00
4) Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Rp	21.323.203.600,00
5) Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	1.609.717.075,00

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya **Rp117.574.520.000,00**

2018 (Rp)				2017 (Rp)
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
1) Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Dana Penyesuaian	117.574.520.000,00	117.574.520.000,00	100,00	160.667.997.000,00
Jumlah Pemerintah Pusat Lainnya	117.574.520.000,00	117.574.520.000,00	100,00	160.667.997.000,00

Penerimaan sebesar Rp117.574.520.000,00 merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut :

1) Dana Desa (APBN)	Rp117.574.520.000,00
2) Penyelesaian DAK	Rp -

c. Transfer Pemerintah Provinsi **Rp95.691.354.387,93**

2018 (Rp)				2017 (Rp)
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	87.521.058.475,93	95.691.354.387,93	109,34	89.029.917.919,39
2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	87.521.058.475,93	95.691.354.387,93	109,34	89.029.917.919,39

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2018 sebesar Rp95.691.354.387,93 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

2018 (Rp)				2017 (Rp)
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	23.703.358.560,00	25.980.976.989,99	109,61	22.898.986.657,01
2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.536.784.000,00	16.024.489.746,00	127,82	14.464.568.450,00
3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.185.612.735,93	24.364.193.664,84	109,82	21.618.784.040,54
4) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	49.470.000,00	56.386.271,64	113,98	45.873.800,00
5) Bagi Hasil Pajak Rokok	29.045.833.180,00	29.265.307.715,46	100,76	30.001.704.971,84
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	87.521.058.475,93	95.691.354.387,93	109,34	89.029.917.919,39

2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya **Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak ada Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

d. Bantuan Keuangan Provinsi				Rp1.729.852.000,00
	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Bantuan Keuangan	1.967.352.000,00	1.729.852.000,00	0,00	14.790.200.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi	1.967.352.000,00	1.729.852.000,00	87,93	14.790.200.000,00

Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	Rp	1.729.852.000,00
1) Bantuan Cor Blok Jalan	Rp	1.159.452.000,00
2) Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	Rp	167.900.000,00
3) Pembangunan Jamban	Rp	402.500.000,00
4) Pembangunan Embung Kedung Poh	Rp	-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah **Rp144.122.556.516,62**

Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi penerimaan sumbangan, subsidi, hibah, bantuan, dana kontijensi dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis pendapatan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya. Sumber penerimaan dana tersebut dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun pihak lain sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Pendapatan Hibah	138.028.919.024,00	135.122.556.516,62	97,89	3.498.000.000,00
b. Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Pendapatan Lainnya	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	147.028.919.024,00	144.122.556.516,62	98,02	3.498.000.000,00

Lain lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp144.122.556.516,6200 merupakan Dana Hibah dan Dana Insentif Daerah

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp	80.048.655.000,00
1) Belanja Hibah Rehab Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahap Ke I Th 2018	Rp	75.248.655.000,00
2) Belanja Hibah Air Minum Rm Dlm Negri Tahap Ke 1 Ta 2018	Rp	4.500.000.000,00
3) Belanja Hibah Air Limbah Rm Dlm Negri Tahap Ke 1 Ta 2018	Rp	300.000.000,00
b. Pendapatan Hibah Dana BOS	Rp	55.330.480.000,00
Hibah Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri	Rp	55.330.480.000,00
c. Dana Insentif Daerah	Rp	9.000.000.000,00
Pendapatan Lainnya sebesar Rp9.000.000.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah		

2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Belanja Operasi	1.325.815.796.491,42	1.231.640.679.530,00	92,90	1.215.396.079.934,38
b. Belanja Modal	394.932.675.697,00	304.835.916.710,65	77,19	396.845.243.914,63
c. Belanja Tak Terduga	55.885.878.088,67	4.918.073.465,00	8,80	2.636.676.819,00
Jumlah Belanja	1.776.634.350.277,09	1.541.394.669.705,65	86,76	1.614.878.000.668,01



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jumlah realisasi belanja daerah TA 2018 sebesar Rp1.541.394.669.705,65 atau 86,76% dari anggarannya sebesar Rp1.776.634.350.277,09 menurun sebesar -Rp73.483.330.962,36 (-4,55%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.614.878.000.668,01, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1. Belanja Operasi **Rp1.231.640.679.530,00**

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan anggaran dan realisasi tahun 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Belanja Pegawai	896.819.323.607,42	862.800.267.530,00	96,21	845.856.903.059,50
b. Belanja Barang dan Jasa	404.724.197.884,00	348.479.175.300,00	86,10	347.304.478.779,88
c. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Belanja Hibah	23.364.375.000,00	19.599.136.700,00	83,88	22.234.698.095,00
f. Belanja Bantuan Sosial	907.900.000,00	762.100.000,00	83,94	0,00
Jumlah Belanja Operasi	1.325.815.796.491,42	1.231.640.679.530,00	92,90	1.215.396.079.934,38

Realisasi Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp1.231.640.679.530, atau 92,9% dari anggarannya sebesar Rp1.325.815.796.491,42, naik sebesar Rp16.244.599.595,62 (1,34%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.215.396.079.934,38. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai **Rp862.800.267.530,00**

Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Belanja Pegawai Langsung, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Tidak Langsung	847.282.557.847,42	821.080.583.450,00	96,91	809.386.840.516,50
2) Langsung	49.536.765.760,00	41.719.684.080,00	84,22	36.470.062.543,00
Jumlah Belanja Pegawai	896.819.323.607,42	862.800.267.530,00	96,21	845.856.903.059,50

Realisasi belanja pegawai TA 2018 sebesar Rp862.800.267.530,0 atau 96,21% dari anggaran sebesar Rp896.819.323.607,42 meningkat sebesar Rp16.943.364.470,50 (2,00%) dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp845.856.903.059,500.

Belanja Pegawai – Tidak Langsung meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Komunikasi Intensif DPRD, serta Insentif dan Upah Pungut, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Gaji & Tunjangan	543.015.894.722,72	538.850.633.120,00	99,23	549.275.240.253,50
2) Tambahan Penghasilan PNS	46.083.333.334,00	45.360.479.713,00	98,43	38.946.484.882,00
3) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.687.500.000,00	7.656.000.000,00	99,59	3.983.100.000,00
4) Tunjangan Profesi Guru PNSD	202.027.705.000,00	183.967.266.835,00	91,06	185.707.272.950,00
5) Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.075.450.000,00	2.037.549.600,00	98,17	1.891.853.619,00
6) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.669.379.790,70	1.230.789.855,00	73,73	1.434.870.874,00
7) Iuran Jaminan Kesehatan	44.723.295.000,00	41.977.864.327,00	93,86	28.148.017.938,00
Jumlah Belanja Pegawai - Tidak Langsung	847.282.557.847,42	821.080.583.450,00	96,91	809.386.840.516,50



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Belanja Pegawai – Tidak Langsung TA 2018 sebesar Rp821.080.583.450,00 atau 96,91% dari anggarannya sebesar Rp847.282.557.847,42 meningkat sebesar Rp11.693.742.933,500 (1,44%) dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp809.386.840.516,500.

Rincian belanja pegawai tidak langsung dapat disajikan sebagai berikut :

1) Gaji dan tunjangan :

		2018 (Rp)			2017 (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Gaji Pokok/Uang Representasi	424.305.975.895,64	421.720.078.473,00	99,39	437.200.248.258,00
b)	Tunjangan Keluarga	40.359.125.686,30	39.952.120.025,00	98,99	38.774.447.765,50
c)	Tunjangan Jabatan	8.848.206.003,00	8.620.024.000,00	97,42	8.149.446.996,00
d)	Tunjangan Fungsional	32.031.179.136,00	31.940.757.953,00	99,72	31.022.459.000,00
e)	Tunjangan Fungsional Umum	5.596.263.000,00	5.484.595.000,00	98,00	5.409.910.000,00
f)	Tunjangan Beras	21.167.079.169,56	20.803.526.900,00	98,28	21.938.593.976,00
g)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.455.986.808,12	1.296.033.050,00	89,01	1.207.058.969,00
h)	Pembulatan Gaji	6.112.424,10	5.634.969,00	92,19	5.414.089,00
i)	Uang Paket	86.058.000,00	85.743.000,00	99,63	85.585.500,00
j)	Tunjangan Badan Musyawarah	29.414.700,00	29.323.350,00	99,69	29.414.700,00
k)	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	55.723.500,00	99,67	55.510.350,00
l)	Tunjangan Badan Anggaran	30.510.900,00	30.510.900,00	100,00	30.510.900,00
m)	Tunjangan Badan Kehormatan	9.317.700,00	9.226.350,00	99,02	9.317.700,00
n)	Tunjangan Pansus	44.944.200,00	16.443.000,00	36,59	17.265.150,00
o)	Tunjangan Perumahan	4.578.000.000,00	4.561.000.000,00	99,63	3.400.650.000,00
p)	Tunjangan Badan Legislatif Daerah	15.894.900,00	15.742.650,00	99,04	15.894.900,00
q)	Uang Jasa Pengabdian	31.500.000,00	26.250.000,00	83,33	0,00
r)	Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	243.600.000,00	61,97	299.712.000,00
s)	Tunjangan Pengamanan Sandi	35.300.000,00	34.300.000,00	97,17	28.300.000,00
t)	Tunjangan Transportasi	3.936.000.000,00	3.920.000.000,00	99,59	1.312.000.000,00
u)	Tunjangan Reses	0,00	0,00	0,00	283.500.000,00
JUMLAH		543.015.894.722,72	538.850.633.120,00	99,23	549.275.240.253,50

2) Tambahan Penghasilan Pegawai

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membayarkan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tambahan Penghasilan Pegawai, berdasarkan :	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	46.083.333.334,00	45.360.479.713,00	98,43	38.946.484.882,00
Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai	46.083.333.334,00	45.360.479.713,00	98,43	38.946.484.882,00

3) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membayarkan Tunjangan Operasional kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada DPRD serta Tunjangan Reses sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.649.000.000,00	99,63	3.383.100.000,00
b) Belanja Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
c) Tunjangan Reses	1.417.500.000,00	1.407.000.000,00	99,26	0,00
Jumlah	6.270.000.000,00	6.249.000.000,00	99,67	3.983.100.000,00

4) Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1) Tunjangan Profesi Guru PNSD.	198.193.705.000,00	182.916.741.835,00	92,29	184.331.335.450,00
(2) Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.834.000.000,00	1.050.525.000,00	27,40	1.375.937.500,00
Jumlah	202.027.705.000,00	183.967.266.835,00	91,06	185.707.272.950,00

5) Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dibayarkan kepada pegawai yang terkait langsung dengan kegiatan pemungutan pajak negara/daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.075.450.000,00	2.037.549.600,00	98,17	1.891.853.619,00
Jumlah	2.075.450.000,00	2.037.549.600,00	98,17	1.891.853.619,00

6) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dibayarkan kepada pegawai yang terkait langsung dengan kegiatan pemungutan pajak daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.669.379.790,70	1.230.789.855,00	73,73	1.434.870.874,00
Jumlah	1.669.379.790,70	1.230.789.855,00	73,73	1.434.870.874,00

7) Iuran Jaminan Kesehatan

Iuran Jaminan Kesehatan dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	39.973.295.000,00	37.739.809.321,00	94,41	26.130.033.707,00
(2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.185.000.000,00	864.798.918,00	72,98	896.881.880,00
(3) Iuran Jaminan Kematian	3.565.000.000,00	3.373.256.088,00	94,62	1.121.102.351,00
Jumlah	44.723.295.000,00	41.977.864.327,00	93,86	28.148.017.938,00

Sedangkan rincian Belanja Langsung Pegawai dapat disajikan sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Honorarium PNS	16.387.355.760,00	14.897.133.250,00	90,91	13.055.648.550,00
2. Honorarium Non PNS	15.311.632.500,00	12.064.457.500,00	78,79	10.833.334.000,00
3. Uang Lembur	711.975.000,00	629.894.000,00	88,47	574.682.500,00
4. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	506.000.000,00	299.000.000,00	59,09	103.000.000,00
5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	8.899.154.000,00	6.590.312.830,00	74,06	4.081.023.642,00
6. Honorarium Pengelola SIPKD	441.220.000,00	414.715.000,00	93,99	390.350.000,00
7. Belanja Pegawai Dana BOS	7.279.428.500,00	6.824.171.500,00	93,75	7.432.023.851,00
Jumlah	49.536.765.760,00	41.719.684.080,00	84,22	36.470.062.543,00

b. Belanja Barang dan Jasa

				Rp348.479.175.300,00
	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	404.724.197.884,00	348.479.175.300,00	86,10	347.304.478.779,88
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	404.724.197.884,00	348.479.175.300,00	86,10	347.304.478.779,88

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 sebesar Rp348.479.175.300, atau 86,1% dari anggaran sebesar Rp404.724.197.884,00 meningkat sebesar Rp1.174.696.520,12 (0,34%) dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp347.304.478.779,88.

Sedangkan rincian Belanja Barang dan Jasa dapat disajikan sebagai berikut :

	2018 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%
1. Belanja Bahan Pakai Habis	11.466.822.590,00	10.567.556.531,00	92,16
2. Belanja Bahan/Material	36.517.987.697,00	34.107.297.283,00	93,40
3. Belanja Jasa Kantor	116.134.188.771,00	105.781.589.836,00	91,09
4. Belanja Premi Asuransi	127.800.000,00	98.614.665,00	77,16



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Anggaran	Realisasi	%
5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.155.458.797,00	8.774.674.975,00	86,40
6. Belanja Cetak dan Penggandaan	14.887.934.019,00	13.013.709.836,00	87,41
7. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	2.406.156.486,00	1.987.067.736,00	82,58
8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.821.420.000,00	1.512.246.500,00	83,03
9. Belanja Sewa Alat Berat	183.000.000,00	130.090.360,00	71,09
10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.841.913.500,00	3.444.663.100,00	89,66
11. Belanja Makanan dan Minuman	34.996.524.620,00	30.970.014.769,00	88,49
12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	851.710.000,00	833.420.800,00	97,85
13. Belanja Pakaian Kerja	1.289.865.700,00	1.121.552.670,00	86,95
14. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	618.185.000,00	602.730.000,00	97,50
15. Belanja Perjalanan Dinas	53.219.341.100,00	40.846.467.362,00	76,75
16. Belanja perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	4.597.287.325,00	3.711.650.260,00	80,74
17. Belanja Jasa Konsultan	4.873.450.000,00	4.865.027.950,00	99,83
18. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.149.975.000,00	1.978.150.000,00	92,01
19. Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	27.062.399.013,00	23.083.638.011,00	85,30
20. Belanja Bantuan Sosial Barang	17.087.771.610,00	6.597.643.260,00	38,61
21. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	15.642.585.000,00	12.535.112.000,00	80,13
22. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.501.238.073,00	2.411.973.873,00	96,43
23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.022.864.308	2.718.674.262	89,94
24. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.655.317.000	5.511.084.498	97,45
25. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	33.613.002.275	31.274.524.763	93,04
<i>Jumlah</i>	404.724.197.884,00	348.479.175.300,00	86,10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

c. Belanja Bunga

Rp0,00

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada Pemerintah Pusat berupa Sub Loan Agreement (SLA) dan pinjaman tersebut telah lunas pada tahun 2016. Sehingga Realisasi Belanja Bunga Tahun 2018 sebesar Rp0,00.

d. Belanja Subsidi

Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak menganggarkan dan merealisasikan belanja subsidi baik dalam TA 2018 maupun 2017.

e. Belanja Hibah

Rp19.599.136.700,00

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah	23.364.375.000,00	19.599.136.700,00	83,88	22.234.698.095,00
Jumlah Belanja Hibah	23.364.375.000,00	19.599.136.700,00	83,88	22.234.698.095,00

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merealisasikan Belanja Hibah TA 2018 sebesar Rp19.599.136.700,00 atau 83,88% dari anggarannya sebesar Rp23.364.375.000,00, turun sebesar (-Rp2.635.561.395,00) atau sebesar (-11,85%) dari TA 2017 sebesar Rp22.234.698.095,00.

Rincian belanja hibah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

	2018 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%
1) National Paralympic Komite Indonesia (NPC)	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
2) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00
3) KWARCAB	4.323.175.000,00	557.936.700,00	12,91
4) Palang Merah Indonesia (PMI)	575.000.000,00	575.000.000,00	100,00
5) TK/PAUD (1.123)	16.516.200.000,00	16.516.200.000,00	100,00
6) KNPI	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
7) Panti Asuhan Darma Putra Semin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
8) Panti Asuhan Islam Playen	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
9) Nahdatul Ulama (NU)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
10) Muhammadiyah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja Hibah	23.364.375.000,00	19.599.136.700,00	83,88

f. Belanja Bantuan Sosial

Rp762.100.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp762.100.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.2. Belanja Modal

Rp305.415.954.871,84

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Belanja Tanah	44.041.500.000,00	43.883.631.085,00	99,64	37.594.740.572,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	60.487.953.147,00	54.343.833.841,50	89,84	66.558.569.367,92
c. Belanja Gedung dan Bangunan	99.958.092.170,00	88.672.482.347,21	88,71	113.023.915.402,60
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	189.049.705.880,00	116.825.871.316,94	61,80	164.806.828.414,86
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	482.824.500,00	460.603.120,00	95,40	14.861.190.157,25
f. Belanja Aset Lainnya	912.600.000,00	649.495.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	394.932.675.697,00	304.835.916.710,65	77,19	396.845.243.914,63

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp304.835.916.710,65 dari rencana sebesar Rp394.932.675.697,00 atau mencapai 77,19%. Atau turun sebesar (-Rp92.009.327.203,98) atau sebesar (-23,19%) dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp396.845.243.914,6300.

2.3. Belanja Tak Terduga

Rp4.918.073.465,00

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	55.885.878.088,67	4.918.073.465,00	8,80	2.636.676.819,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	55.885.878.088,67	4.918.073.465,00	8,80	2.636.676.819,00

Belanja Tak Terduga dari rencana sebesar Rp55.885.878.088,67 sampai dengan akhir tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merealisasikan sebesar Rp4.918.073.465,00. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2018 berada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan Konstruksi: Penanganan Darurat Jalan Sawahan-Pundungsari (1207)	1.167.041.000,00
2. Paket Pekerjaan Konstruksi Penanganan Darurat Ruas Jalan Semin-Umbulrejo (1211)	975.054.000,00
3. Penanganan Darurat Pengolahan Limbah TPA Baleharjo	485.468.280,00
4. Penanganan Darurat Ruas Jalan Semin-Tambakromo (1209)	1.187.571.000,00
5. Penanganan Darurat Jalan Ketelo, Desa Tegalrejo	257.126.000,00
6. Paket Pekerjaan Konstruksi Penanganan Darurat Jalan Gupit Desa Tegalrejo	757.300.000,00
7. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan	88.513.185,00
Sesuai Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 319/KPTS/2018 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 untuk Penanganan Kekeringan di Kabupaten Gunungkidul pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul	

3. PENJELASAN POS-POS TRANSFER

Transfer Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meliputi Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	11.605.279.400,00	11.075.380.750,00	95,43	9.497.596.225,00
2. Transfer Bantuan Keuangan	219.940.216.150,00	219.837.276.150,00	99,95	235.850.041.400,00
Jumlah	231.545.495.550,00	230.912.656.900,00	99,73	245.347.637.625,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Transfer TA 2018 sebesar Rp230.912.656.900,00 atau 99,73% dari anggarannya sebesar Rp231.545.495.550,00 turun sebesar -Rp14.434.980.725,00 (-5,88%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp245.347.637.625,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan** **Rp11.075.380.750,00**
 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membayarkan belanja transfer Bagi Hasil Pendapatan, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Bagi Hasil Pajak	5.517.308.000,00	5.517.308.000,00	100,00	4.119.172.000,00
b. Bagi Hasil Retribusi	6.087.971.400,00	5.558.072.750,00	91,30	5.378.424.225,00
c. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	11.605.279.400,00	11.075.380.750,00	95,43	9.497.596.225,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2018 sebesar Rp11.075.380.750,00 atau 95,43% dari anggarannya sebesar Rp11.605.279.400,00 naik sebesar Rp1.577.784.525,00 (16,61%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp9.497.596.225,00.

- 2. Transfer Bantuan Keuangan** **Rp219.837.276.150,00**

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membayarkan Transfer Bantuan Keuangan, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	0,00
2) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	218.657.785.150,00	218.654.845.150,00	100,00	234.767.610.400,00
3) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.082.431.000,00	1.082.431.000,00	100,00	1.082.431.000,00
Jumlah	219.940.216.150,00	219.837.276.150,00	99,95	235.850.041.400,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 sebesar Rp219.837.276.150,00 atau 99,95% dari anggarannya sebesar Rp219.940.216.150,00 turun sebesar -Rp16.012.765.250,00 (-6,79%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp235.850.041.400,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya**
 Bantuan Keuangan Bencana Alam ke Lombok Nusa Tenggara Barat 100.000.000,00

- 2) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	4.502.170.750,00	4.499.170.750,00	99,93	1.800.200.000,00
b. Alokasi Dana Desa	96.581.094.400,00	96.581.154.400,00	100,00	100.613.629.400,00
c. Dana Desa	117.574.520.000,00	117.574.520.000,00	100,00	132.353.781.000,00
Jumlah	218.657.785.150,00	218.654.845.150,00	100,00	234.767.610.400,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa TA 2018 sebesar Rp218.654.845.150,00 atau 100,0% dari anggarannya sebesar Rp218.657.785.150,00 turun sebesar (-Rp16.112.765.250,00) atau sebesar (-6,86)% dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp234.767.610.400,00

- 3) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.082.431.000,00, adalah belanja bantuan kepada Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	2018 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%
a) Partai Amanat Nasional (PAN)	155.254.000,00	155.254.000,00	100,00
b) Partai Golongan Karya (GOLKAR)	153.154.000,00	153.154.000,00	100,00
c) Partai Demokrat	90.735.000,00	90.735.000,00	100,00
d) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	77.049.000,00	77.049.000,00	100,00
e) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	124.380.000,00	124.380.000,00	100,00
f) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	287.335.000,00	287.335.000,00	100,00
g) Partai NASDEM	80.661.000,00	80.661.000,00	100,00
h) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	79.721.000,00	79.721.000,00	100,00
i) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	34.142.000,00	34.142.000,00	100,00
Jumlah	1.082.431.000,00	1.082.431.000,00	100,00

3. PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi tahun 2018 dan 2017, sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3.1. Penerimaan Pembiayaan	168.418.167.281,08	168.418.167.281,08	100,00	201.053.321.175,99
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	21.537.645.533,00	21.537.645.533,00	100,00	19.514.934.185,00
Pembiayaan Netto (a - b)	146.880.521.748,08	146.880.521.748,08	100,00	181.538.386.990,99

Realisasi pembiayaan netto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) TA 2018 sebesar Rp146.880.521.748,08 atau 100,% dari anggaran sebesar Rp146.880.521.748,08 turun sebesar (Rp34.657.865.242,91) atau sebesar (19,09%) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp181.538.386.990,990.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

3.1. Penerimaan Pembiayaan **Rp168.418.167.281,08**

Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pinjaman, dan Penerimaan Piutang dengan anggaran dan realisasi tahun 2018 serta realisasi TA 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	168.418.167.281,08	168.418.167.281,08	100,00	201.053.229.432,99
b. Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	91.743,00
c. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	168.418.167.281,08	168.418.167.281,08	100,00	201.053.321.175,99

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp168.418.167.281,08 atau Rp100,% dari anggaran Rp168.418.167.281,08, turun sebesar (Rp32.635.153.894,910) atau sebesar (16,23%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp201.053.321.175,990.

Penerimaan TA 2018 dari Penggunaan SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp168.418.167.281,08 adalah seluruh SiLPA TA 2017, yang telah dilaporkan oleh Bupati Gunungkidul dan disetujui DPRD Kabupaten Gunungkidul, serta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Rp21.537.645.533,00

Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 dan 2017 meliputi pengeluaran untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Penyertaan Modal Daerah	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	100,00	28.462.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang	37.645.533,00	37.645.533,00	100,00	54.386.870,43
c. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	21.537.645.533,00	21.537.645.533,00	100,00	28.516.386.870,43

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 sebesar Rp21.537.645.533,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp21.537.645.533,00, turun sebesar (-Rp21.537.645.533,00) atau (-75,53%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp28.516.386.870,4300 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2018 sebesar Rp21.500.000.000,00 digunakan untuk penambahan Penyertaan Modal pada :
- Penyertaan Modal pada BPD DIY Cabang wonosari Rp. 15.000.000.000,00
 - Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul Rp. 2.000.000.000,00
 - Penyertaan Modal pada PDAM "Tirta Handayani" Rp. 4.500.000.000,00
- b. Pembayaran pokok utang sebesar Rp37.645.533, terdiri dari :
- Pembayaran Hutang Pihak Ketiga. Rp. 27.900.000,00
 - Pembayaran Kelebihan Penerimaan Rp. 9.745.533,00

4. PENJELASAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, sebagai berikut :

Perhitungan APBD :	2018 (Rp)			2017 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Pendapatan	1.861.299.324.079,01	1.850.894.408.120,73	99,44	1.847.105.418.583,10
b. Belanja	1.776.634.350.277,09	1.541.394.669.705,65	86,76	1.614.878.000.668,01
c. Transfer	231.545.495.550,00	230.912.656.900,00	99,73	245.347.637.625,00
Surplus (Defisit) (a - b - c)	(146.880.521.748,08)	78.587.081.515,08	(53,50)	(13.120.219.709,91)
d. Penerimaan Pembiayaan	201.053.229.432,99	168.418.167.281,08	83,77	201.053.321.175,99
e. Pengeluaran Pembiayaan	21.537.645.533,00	21.537.645.533,00	100,00	19.514.934.185,00
Pembiayaan Neto (d - e)	179.515.583.899,99	146.880.521.748,08	81,82	181.538.386.990,99
SiLPA (SiKPA) TA 2018	32.635.062.151,91	225.467.603.263,16		168.418.167.281,08

Perhitungan APBD TA 2018 dan 2017 menunjukkan SiLPA masing-masing sebesar Rp225.467.603.263,16 dan Rp168.418.167.281,08 yang berupa kas tunai, rekening giro yang dikelola oleh masing-masing Bendahara Daerah dan deposito.

Adapun rincian saldo Kas Daerah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

RINCIAN SALDO KAS DAERAH :	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Sisa Kas Tunai (1 s.d. 4) :	600.008.806,47	514.495.498,00
1) Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)	0,00	0,00
2) Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	280.073.825,47	10.609.000,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	319.934.981,00	503.886.498,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b. Sisa Kas di Rekening Giro BPD Yogyakarta Cab. Wonosari :			
	152.500.267.175,71		18.682.784.975,92
1) A/C 002.111.000038 : Rek. Kas Umum Daerah	153.790.941.119,71		19.976.601.919,92
DIKURANGI :			
- Utang PFK (PPh Ps. 21 Tahun 2017)	83.850.975,00		83.850.975,00
- Utang PFK (PPh Ps. 21 Tahun 2018)	1.206.899.969,00		1.206.899.969,00
- Puskesmas Semin I (Salah setor seharusnya ke BLUD)	0,00		3.225.000,00
- Puskesmas Nglipar I (Salah setor seharusnya ke BLUD)	82.000,00		-
	<u>1.290.832.944,00</u>		<u>1.293.975.944,00</u>
DITAMBAH			
- Kelebihan setoran IWP	159.000,00		159.000,00
c. Sisa Kas di Rekening RSUD Wonosari(BLUD) :			
1) Kas Bank BPD DIY Cab. Wonosari A/C : 002.111.000.679	5.615.488.691,36		680.530.790,36
2) Kas Bank BRI Wonosari A/C : 0153.01.001094.30.4	2.808.971.648,00		232.385.591,00
Jumlah sisa kas di BLUD	8.424.460.339,36		912.916.381,36
<u>DIKURANGI :</u>			
1) SP2D dalam perjalanan (PMI)	-		117.720.000,00
SALDO KAS RSUD PER 31 DESEMBER 2018	8.424.460.339,36	0,00	795.196.381,36
d. Sisa Kas di Rekening BLUD PUSKESMAS :			
1) UPT Puskesmas Nglipar I : No. Rek. 002.111.000765	140.284.261,62		152.459.603,62
2) UPT Puskesmas Nglipar II: No. Rek. 002.111.000859	306.665.370,00		167.302.996,00
3) UPT Puskesmas Gedangsari I: No. Rek. 002.111.000847	148.485.818,00		238.079.929,00
4) UPT Puskesmas Gedangsari II: No. Rek. 002.111.000842	450.922.107,00		535.082.410,00
5) UPT Puskesmas Patuk I : No. Rek. 002.111.000763	86.797.824,97		235.938.966,97
6) UPT Puskesmas Patuk II: No. Rek. 002.111.000846	69.484.152,89		196.834.296,89
7) UPT Puskesmas Rongkop : No. Rek. 002.111.000768	497.943.118,00		547.414.330,00
8) UPT Puskesmas Girisubo: No. Rek. 002.111.000839	175.643.384,00		687.603.440,00
9) UPT Puskesmas Ponjong I : No. Rek. 002.111.000767	516.938.310,00		763.863.667,00
10) UPT Puskesmas Ponjong II: No. Rek. 002.111.000857	54.209.741,00		127.188.597,00
11) UPT Puskesmas Wonosari I : No. Rek. 002.111.000766	364.337.640,49		501.970.755,49
12) UPT Puskesmas Wonosari II: No. Rek. 002.111.000853	434.908.949,00		655.727.800,00
13) UPT Puskesmas Karangmojo I: No. Rek. 002.111.000848	688.921.360,00		1.122.504.140,00
14) UPT Puskesmas Karangmojo II: No. Rek. 002.111.000855	104.470.629,00		224.899.578,00
15) UPT Puskesmas Panggang I: No. Rek. 002.111.000856	104.037.043,00		81.511.064,00
16) UPT Puskesmas Panggang II : No. Rek. 002.111.000764	377.600.777,00		107.102.003,00
17) UPT Puskesmas Purwosari: No. Rek. 002.111.000845	286.344.260,00		179.701.201,00
18) UPT Puskesmas Tepus I: No. Rek. 002.111.000849	252.220.561,00		225.891.117,00
19) UPT Puskesmas Tepus II: No. Rek. 002.111.000851	101.349.302,40		120.555.990,20
20) UPT Puskesmas Tanjungsari : No. Rek. 002.111.000844	246.471.417,00		286.695.306,00
21) UPT Puskesmas Paliyan : No. Rek. 002.111.000762	936.680.469,00		676.017.817,00
22) UPT Puskesmas Saptosari: No. Rek. 002.111.000843	1.013.242.533,00		1.124.828.816,00
23) UPT Puskesmas Ngawen I: No. Rek. 002.111.000840	231.286.710,00		408.029.286,00
24) UPT Puskesmas Ngawen II: No. Rek. 002.111.000850	126.841.141,00		34.782.599,00
25) UPT Puskesmas Semanu I : No. Rek. 002.111.000142	297.573.285,00		379.112.051,00
26) UPT Puskesmas Semanu II: No. Rek. 002.111.000858	456.988.537,00		532.939.498,00
27) UPT Puskesmas Semin I : No. Rek. 002.111.000769	176.465.005,00		690.756.156,00
28) UPT Puskesmas Semin II: No. Rek. 002.111.000852	161.324.427,00		220.067.687,00
29) UPT Puskesmas Playen I : No. Rek. 002.111.000761	164.965.863,00		116.380.625,00
30) UPT Puskesmas Playen II: No. Rek. 002.111.000841	168.483.382,25		161.962.459,25
Jumlah	9.141.887.378,62		11.503.204.185,42

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Ditambah			
31) SEMIN I (Salah setor ke Kasda)	0,00		3.225.000,00
32) Salah transfer dari Pusk. Nglipar I	82.000,00		0,00
Jumlah keseluruhan	9.141.969.378,62		11.506.429.185,42
e. Setara Kas	50.000.000.000,00		134.000.000.000,00
1) Deposito	50.000.000.000,00		134.000.000.000,00
1) BPD DIY Cabang Wonosari	50.000.000.000,00		129.000.000.000,00
2) BSM Cab. Wonosari	0,00		0,00
3) BRI Cab. Wonosari	0,00		0,00
4) BNI 1946 Yogyakarta	0,00		5.000.000.000,00
5) Bank Mega Syari'ah Yogyakarta	0,00		0,00
6) Bank Tabungan Negara Yogyakarta	0,00		0,00
7) Bank Muamalat Indo Cab. Yogya	0,00		0,00
JUMLAH (a + b + c+d+e) :	220.666.705.700,16		165.498.906.040,70
f. Kas Lainnya	4.800.897.563,00		2.919.261.240,38
- Saldo Kas BOS	4.800.897.563,00		2.919.261.240,38
Termasuk didalamnya pendapatan jasa BOS yang di buku			
di BKAD Jasa Giro BOS Rp. 94,774,630,20			
JUMLAH (a + b + c+d+e+f) :	225.467.603.263,16	0,00	168.418.167.281,08

Rincian diatas menunjukkan saldo Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp225.467.603.263,16 dan Rp165.498.906.040,7, berupa uang tunai, deposito dan rekening giro yang dikelola oleh masing-masing Bendahara Daerah. terdapat penurunan sebesar Rp57.049.435.982,08 atau (33,87%) Saldo Kas Daerah ini tersaji dalam Neraca per tanggal tersebut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 302/KEP/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Tambahan belanja langsung dan belanja tidak langsung ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

1. PENJELASAN SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Saldo Anggaran Lebih Awal	168.418.167.281,08	201.053.229.432,99

Realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2018 sebesar Rp168.418.167.281,08 sedangkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp201.053.229.432,99 turun sebesar (-Rp32.635.062.151,91).

2. PENJELASAN PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	168.418.167.281,08	201.053.229.432,99

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2018 sebesar Rp168.418.167.281,08 sedangkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp201.053.229.432,99 turun sebesar (-Rp32.635.062.151,91).

3. PENJELASAN SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	225.467.603.263,16	168.418.167.281,08

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp225.467.603.263,16 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Gunungkidul dari surplus/defisit anggaran ditambah dengan pembiayaan netto, dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan	1.850.894.408.120,73	
Belanja	1.541.394.669.705,65	
Transfer	230.912.656.900,00	
Surplus/Defisit		78.587.081.515,08
Penerimaan Pembiayaan	168.418.167.281,08	
Pengeluaran Pembiayaan	21.537.645.533,00	
Pembiayaan Netto		146.880.521.748,08
		225.467.603.263,16

4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk tahun 2018 tidak ada koreksi atas kesalahan pembukaan tahun sebelumnya.



C. PENJELASAN POS-POS NERACA

1. ASET LANCAR **Rp320.711.459.290,78**

1. KAS DAN SETARA KAS **Rp226.758.195.207,16**

Kas dan Setara Kas sebesar Rp226.493.760.981,69 adalah saldo Kas dan Setara Kas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Kas di Kas Daerah **Rp153.790.941.119,71**

Kas di Kas Daerah sebesar Rp153.790.941.119,71 merupakan saldo Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2018 pada rekening giro BPD DIY Cabang Wonosari dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Nama & Nomor Rekening Giro Bank :	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- A/C 002.111.000038 : Rek. Kas Umum Daerah (BPD DIY)	153.790.941.119,71	19.976.601.919,92
Jumlah Kas di Kas Daerah	153.790.941.119,71	19.976.601.919,92

Saldo Kas pada Kas Daerah sebesar Rp153.790.941.119,71 termasuk didalamnya Kas BLUD Puskesmas Nglipar I sebesar Rp82.000,00 yang seharusnya disetor ke Kas BLUD Puskesmas tetapi salah setor ke Kas Daerah, serta utang PFK PPh Pasal 21 tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp1.290.750.944,00

Disamping itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terdapat kelebihan setor Tabungan Perumahan Pegawai sebesar Rp159.000,00 sesuai dengan Surat Kepala BKAD Nomor 900/3194 tertanggal 18 Desember 2017 perihal Kelebihan Penyetoran Iuran Taperum

Setara Kas **Rp50.000.000.000,00**

Setara Kas sebesar Rp50.000.000.000,00 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2018 berupa simpanan deposito berjangka satu bulan automatic roll over (ARO) dengan rincian saldo per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Rincian nama bank dan saldo serta kas sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1 BPD DIY Cabang Wonosari	50.000.000.000,00	129.000.000.000,00
2 Bank Syariah Mandiri Cabang Wonosari	0,00	0,00
3 BRI Cabang Wonosari	0,00	0,00
4 BNI 1946 Yogyakarta	0,00	5.000.000.000,00
5 Bank Tabungan Negara	0,00	0,00
Jumlah Deposito	50.000.000.000,00	134.000.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp280.073.825,47**

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp280.073.825,47 merupakan saldo kas yang masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran SKPD yang merupakan sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetorkan sampai dengan tanggal per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.557.600,00 dan koreksi lebih catat atas belanja modal gedung dan bangunan berupa temuan kekurangan volume pekerjaan BPK sebesar Rp264.516.225,57.

Dengan rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Sisa Uang Persediaan (UP)		
- Puskesmas Saptosari	0,00	65.000,00
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0,00	1.054.000,00
- Sekretariat DPRD	0,00	6.620.000,00
- Kecamatan Tepus (sisa kas)	0,00	675.000,00
- DISNAKERTRANS	15.557.600,00	1.200.000,00
- PUSK. NGLIPAR I	0,00	995.000,00
Koreksi lebih catat atas belanja modal gedung dan bangunan di:		
- DISPERINDAG	45.583.980,10	0,00
- DINKES	39.437.672,03	0,00
- DISDIKPORA	72.830.008,51	0,00
- DPUPRKP	106.664.564,83	0,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	280.073.825,47	10.609.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kas di Bendahara Penerimaan

Rp319.934.981,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp319.934.981,00 Saldo per 31 Desember 2018 maupun 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Dinas Kesehatan		
- UPT Puskesmas Saptosari	0,00	0,00
- UPT Puskesmas Wonosari II	0,00	0,00
- UPT Puskesmas Playen II	0,00	0,00
- UPT Puskesmas Patuk I	0,00	104.813.350,00
- Labkes	261.000,00	
2) BKAD (Jasa Giro Kec. Tepus)	0,00	1.125,00
- Catering	156.734.620,00	0,00
- Denda Pajak Restoran	3.144.063,00	0,00
3) Kantor Pengelolaan Pasar	0,00	0,00
4) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	0,00	0,00
5) Dinas Pariwisata (Pendapatan malam tahun baru)		
a. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	315.000,00	362.000,00
b. Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	900.000,00	2.087.500,00
c. Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	142.076.655,00	390.642.180,00
6) Dinas Perhubungan	0,00	437.500,00
7) RSUD Wonosari	16.503.643,00	5.542.843,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	319.934.981,00	503.886.498,00

Kas di BLUD

Rp17.566.347.717,98

Rincian Kas Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah selaku BLUD sebesar Rp9.141.969.378,62 adalah sebagai berikut:

			31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Dinas Kesehatan				
- UPT Puskesmas Nglihar I	No. Rekening :	002.111.000765	140.284.261,62	152.459.603,62
- UPT Puskesmas Nglihar II	No. Rekening :	002.111.000859	306.665.370,00	167.302.996,00
- UPT Puskesmas Rongkop	No. Rekening :	002.111.000768	497.943.118,00	547.414.330,00
- UPT Puskesmas Ponjong I	No. Rekening :	002.111.000767	516.938.310,00	763.863.667,00
- UPT Puskesmas Ponjong II	No. Rekening :	002.111.000857	54.209.741,00	127.188.597,00
- UPT Puskesmas Wonosari I	No. Rekening :	012.111.000766	364.337.640,49	501.970.755,49
- UPT Puskesmas Wonosari II	No. Rekening :	002.111.000853	434.908.949,00	655.727.800,00
- UPT Puskesmas Paliyan	No. Rekening :	012.111.000762	936.680.469,00	676.017.817,00
- UPT Puskesmas Panggang I	No. Rekening :	002.111.000856	104.037.043,00	81.511.064,00
- UPT Puskesmas Panggang II	No. Rekening :	012.111.000764	377.600.777,00	107.102.003,00
- UPT Puskesmas Tanjungsari	No. Rekening :	002.111.000844	246.471.417,00	286.695.306,00
- UPT Puskesmas Playen I	No. Rekening :	002.111.000761	164.965.863,00	116.380.625,00
- UPT Puskesmas Playen II	No. Rekening :	002.111.000841	168.483.382,25	161.962.459,25
- UPT Puskesmas Patuk I	No. Rekening :	012.111.000763	86.797.824,97	235.938.966,97
- UPT Puskesmas Patuk II	No. Rekening :	002.111.000846	69.484.152,89	196.834.296,89
- UPT Puskesmas Saptosari	No. Rekening :	002.111.000843	1.013.242.533,00	1.124.828.816,00
- UPT Puskesmas Purwosari	No. Rekening :	002.111.000845	286.344.260,00	179.701.201,00
- UPT Puskesmas Semin I	No. Rekening :	002.111.000769	176.465.005,00	690.756.156,00
- UPT Puskesmas Semin II	No. Rekening :	002.111.000852	161.324.427,00	220.067.687,00
- UPT Puskesmas Semanu I	No. Rekening :	002.111.000142	297.573.285,00	379.112.051,00
- UPT Puskesmas Semanu II	No. Rekening :	002.111.000858	456.988.537,00	532.939.498,00
- UPT Puskesmas Girisubo	No. Rekening :	002.111.000839	175.643.384,00	687.603.440,00
- UPT Puskesmas Tepus I	No. Rekening :	002.111.000849	252.220.561,00	225.891.117,00
- UPT Puskesmas Tepus II	No. Rekening :	002.111.000851	101.349.302,40	120.555.990,20
- UPT Puskesmas Gedangsari I	No. Rekening :	002.111.000847	148.485.818,00	238.079.929,00
- UPT Puskesmas Gedangsari II	No. Rekening :	002.111.000842	450.922.107,00	535.082.410,00
- UPT Puskesmas Ngawen I	No. Rekening :	002.111.000840	231.286.710,00	408.029.286,00
- UPT Puskesmas Ngawen II	No. Rekening :	002.111.000850	126.841.141,00	34.782.599,00
- UPT Puskesmas Karangmojo I	No. Rekening :	002.111.000848	688.921.360,00	1.122.504.140,00
- UPT Puskesmas Karangmojo II	No. Rekening :	002.111.000855	104.470.629,00	224.899.578,00
Jumlah Kas di BLUD UPT Puskesmas			9.141.887.378,62	11.503.204.185,42
- Salah transfer dari Puskesmas Nglihar I			82.000,00	



2) **Rumah Sakit Umum Daerah**

a) Kas Bank BPD DIY Cab. Wonosari A/C : 002.111.000.679	5.615.488.691,36	680.530.790,36
b) Kas Bank BRI Cab. Wonosari A/C : 0153.01.001094.30.4	2.808.971.648,00	232.385.591,00

DIKURANGI :

- SP2D PMI yang belum dicairkan s/d 31 Desember 2018	0,00	117.720.000,00
--	------	----------------

Jumlah Kas di BLUD RSUD	8.424.460.339,36	795.196.381,36
--------------------------------	-------------------------	-----------------------

Jumlah Kas di BLUD	17.566.347.717,98	12.298.400.566,78
---------------------------	--------------------------	--------------------------

Kas Lainnya

Rp4.800.897.563,00

Kas Lainnya sebesar Rp4.800.897.563,00 merupakan saldo kas BOS yang berada di Rekening Bendahara Pengeluaran Sekolah yang merupakan sisa Dana BOS Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo tahun lalu	2.919.261.240,38
Penyesuaian kas karena pembulatan	1,62
Pendapatan Tahun 2018	55.330.480.000,00
Belanja Tahun 2018	(53.256.420.654,00)
Pengembalian kas 2018	(256.578.485,00)
Bunga bank	81.886.869,00
Administrasi bank	(17.731.409,00)
Jumlah Kas Lainnya	4.800.897.563,00

Saldo Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp4.800.897.563,00 termasuk didalamnya penerimaan jasa giro setelah dikurangi biaya administrasi bank/pajak jasa bank dan setor kembali dana BOS sebesar Rp64.155.460.

2. INVESTASI JANGKA PENDEK **Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki Investasi Jangka Pendek baik pada posisi saldo per 31 Desember 2018 maupun 31 Desember 2017.

3. PIUTANG DAERAH **Rp37.851.782.512,06**

Pada Tahun 2018 Piutang Daerah terdapat mutasi tambah sebesar Rp84.885.946.938,56 dan mutasi kurang sebesar Rp91.735.378.683,85 sehingga Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp37.851.782.512,06 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp84.885.946.938,56 merupakan penambahan pada Piutang Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah, Transfer Pemerintah daerah Lainnya serta Beban Dibayar Di muka dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tambah Piutang Tahun 2018

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	26.333.687.655,00
2	Piutang Retribusi	1.308.004.555,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.101.758.354,56
4	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	42.142.496.374,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
6	Beban Dibayar Di muka	0,00
	JUMLAH	84.885.946.938,56

- b. Mutasi kurang sebesar Rp91.735.378.683,85 merupakan pengurangan pada Piutang Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Beban Dibayar Di muka dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Kurang Piutang Tahun 2018

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	23.022.731.783,00
2	Piutang Retribusi	1.575.613.940,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.366.334.044,38
4	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	50.741.275.704,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2.019.923.212,47
6	Beban Dibayar Di muka	9.500.000,00
	JUMLAH	91.735.378.683,85



- c. Saldo Akhir Piutang tahun 2018 sebesar Rp37.851.782.512,06 merupakan Piutang Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya serta Beban Dibayar Di muka dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Saldo Akhir Piutang Tahun 2018

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	18.186.311.561,00
2	Piutang Retribusi	547.515.511,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.101.758.354,06
4	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	4.011.447.086,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
6	Beban Dibayar Di muka	4.750.000,00
	JUMLAH	37.851.782.512,06

Saldo Piutang tersebut dikelola pada beberapa OPD berikut :

Rincian Piutang Per SKPD Tahun 2018

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	272.724.000,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3.743.473.086,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	0,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00
5	DINAS PERINDAG	0,00
6	BKAD	33.611.157.205,06
7	DP3AKBPMD	0,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0,00
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.774.331,00
10	DPMPT	219.653.890,00
	JUMLAH	37.851.782.512,06

- Piutang pada Dinas Kesehatan **Rp272.724.000,00**
Piutang pada Dinas Kesehatan pada Klasifikasi Piutang BLUD, yaitu piutang atas klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 30 puskesmas.

- Piutang Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) **Rp3.743.473.086,00**
Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada Klasifikasi Piutang BLUD, yaitu piutang atas klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Saldo awal 2018 senilai Rp11.405.199.963,00 mutasi tambah klaim selama 2018 sebesar Rp38.816.3692.526,00 dan sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat atas klaim tersebut senilai Rp46.747.326.689,00 sehingga saldo akhir 2018 yang menjadi piutang senilai Rp3.474.565.800,00.

Sedangkan saldo awal tahun 2018 untuk Klaim Jasa Raharja senilai Rp39.401.103,00, mutasi tambah klaim selama 2018 senilai Rp1.573.690.598,00 dan sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat senilai Rp1.555.003.215,00 sehingga saldo akhir 2018 menjadi senilai Rp58.088.486,00.

Pada tahun 2018 terdapat Klaim Jampersal senilai Rp1.479.389,250,00 dan sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat senilai Rp1.273.320.450,00 sehingga saldo akhir 2018 menjadi senilai Rp206.068.800,00.

Selain Klaim JKN, Jasa Raharja, dan Jampersal RSUD juga mempunyai Beban dibayar dimuka yang merupakan kegiatan sewa gudang aset, saldo awal Rp4.750.000,00, mutasi tambah senilai Rp9.500.000,00, mutasi kurang senilai Rp9.500.000,00, sehingga saldo akhir menjadi senilai Rp4.750.000,00.

- Piutang Pada Dinas Perhubungan **Rp0,00**
Pada tahun 2018, saldo awal piutang retribusi tempat khusus parkir senilai Rp12.620.000,00 telah dilakukan penghapusan bersyarat atas nama Cokro Suharto dan Hari Wibowo, masing-masing senilai Rp6.710.000,00 dan Rp5.910.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 68/KPTS/2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 5 Maret 2018 dan dicatat secara ekstrakomptabel serta tetap diupayakan penagihannya.

- Piutang Pada Dinas Lingkungan Hidup **Rp0,00**
Piutang yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp19.137.600,00 yang terdiri dari Piutang retribusi dan denda retribusi berupa penerbitan ijin gangguan/HO dengan saldo akhir tahun 2017 sebesar Rp14.020.000,00 dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah berupa Piutang Denda Retribusi senilai Rp5.117.600,00 telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 68/KPTS/2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 5 Maret 2018 dan dicatat secara ekstrakomptabel serta tetap diupayakan penagihannya.



5. Piutang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan **Rp0,00**
Piutang pada Disperindagkop ESDM senilai Rp15.584.150,00 yang terdiri dari Piutang Penguatan Modal Industri Kecil Tahun 2003, 2004, 2005 senilai Rp14.389.127,00 dan Bunga atas Penguatan Modal Industri Kecil Tahun 2003, 2004, 2005 senilai Rp1.295.023,00 telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 68/KPTS/2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 5 Maret 2018 serta tetap diupayakan penagihannya.

6. Piutang Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah **Rp33.611.157.205,06**
Piutang Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang dari Pengembalian, dengan rincian:

Rincian Piutang pada BKAD

No	Jenis Piutang	Tahun 2017 (Rp)
1	PIUTANG PAJAK DAERAH	18.186.311.561,00
2	PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH	323.087.290,00
3	PIUTANG DARI PENGEMBALIAN	0,00
4	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	15.101.758.354,06
5	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00
	JUMLAH	33.611.157.205,06

6.1 Piutang Pajak Daerah **Rp18.186.311.561,00**

Piutang Pajak Daerah saldo awal Tahun 2018 sebesar Rp14.875.355.689,00, mutasi tambah selama tahun 2018 sebesar Rp26.333.687.655,00 sedangkan mutasi kurang selama tahun 2018 sebesar Rp23.022.731.783,00 sehingga saldo akhir tahun 2018 berjumlah Rp18.186.311.561,00. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Rincian Piutang Pajak Daerah

No	Jenis Piutang Pajak	Tahun 2018 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00
2	Pajak Restoran	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00
4	Pajak Reklame	47.307.941,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.283.878.824,00
6	Pajak Parkir	0,00
7	Pajak Air Tanah	6.271.010,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.848.853.786,00
	JUMLAH	18.186.311.561,00

Adapun rincian per jenis Piutang Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 6.1.1 Pajak Restoran **Rp0,00**
Saldo awal Piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.380.000,00 telah dihapuskan sebesar Rp1.380.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 163/KPTS/2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah TA 2018 dan dicatat secara ekstra komptabel dan tetap diupayakan penagihannya.

- 6.1.2 Pajak Reklame **Rp47.307.941,00**
Saldo awal Piutang Pajak Reklame sebesar Rp20.408.500,00, mutasi tambah selama tahun 2018 sebesar Rp914.474.112,00 dan mutasi kurang selama tahun 2018 sebesar Rp887.574.671,00 sehingga saldo akhir 2018 senilai Rp47.307.941,00.
Di dalam mutasi kurang tahun 2018 terdapat penghapusan piutang pajak reklame senilai Rp12.506.500,00 berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 163/KPTS/2018 tanggal 23 Juli 2018, dan penghapusan senilai Rp7.902.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 19/KPTS/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah TA 2018 dan dicatat secara ekstra komptabel dan tetap diupayakan penagihannya.

- 6.1.3 Pajak Penerangan Jalan **Rp1.283.878.824,00**
Saldo awal Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.107.432.161,00, mutasi tambah selama tahun 2018 sebesar Rp1.283.878.824,00 dan realisasi pembayaran tahun 2018 sebesar Rp1.107.432.161,00 sehingga saldo akhir 2018 tetap senilai Rp1.283.878.824,00.

- 6.1.4 Pajak Air Tanah **Rp6.271.010,00**
Saldo awal Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp8.384.553,00, mutasi tambah selama tahun 2018 sebesar Rp399.656.929,00 dan realisasi pembayaran tahun 2018 sebesar Rp401.770.472,00 sehingga saldo akhir 2018 tetap senilai Rp6.271.010,00

- 6.1.5 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan **Rp0,00**
Saldo awal Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp19.633.000,00 telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati No. 19/KPTS/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp4.820.000,00 dan Keputusan Bupati No. 163/KPTS/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 14.813.000,00 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah TA 2018 dan dicatat secara ekstra komptabel serta tetap diupayakan penagihannya.



- 6.1.6 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan **Rp16.848.853.786,00**
Saldo awal Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp13.718.117.475,00, mutasi tambah selama tahun 2018 sebesar Rp23.735.677.790,00 dan realisasi pembayaran tahun 2018 sebesar Rp20.604.941.479,00 sehingga saldo akhir 2018 senilai Rp16.848.853.786,00.

6.2 Piutang Retribusi Daerah **Rp547.515.511,00**
Pada Tahun 2018 Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp547.515.511,00 dengan penjelasan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

No	Tahun Pajak / Uraian	Saldo akhir 2017	Mutasi 2018		Saldo akhir
		(Audited)	Tambah	Kurang	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH	205.421.014,00	303.326.720,00	185.660.444,00	323.087.290,00
3	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	366.451.986,00	906.864.675,00	1.268.542.330,00	4.774.331,00
4	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	12.620.000,00	0,00	12.620.000,00	0,00
5	RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN	221.411.896,00	97.813.140,00	99.571.146,00	219.653.890,00
6	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	14.020.000,00	0,00	14.020.000,00	0,00
	JUMLAH	819.924.896,00	1.308.004.535,00	1.580.413.920,00	547.515.511,00

- 6.2.1 Piutang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum **Rp0,00**
Tidak ada Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Tahun Anggaran 2018.
- 6.2.2 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **Rp323.087.290,00**
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan reklasifikasi dari Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada Lain-Lain PAD yang Sah, yang berupa penyewaan aset kepada pihak lain yaitu kepada Bank BPD DIY, Bank BRI, Jasa Fotocopi, Kantin, dan Kios dan Gedung Serbaguna Siyono dan Kios depan RSUD Wonosari serta sewa rumah dinas.

Saldo awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp205.421.014,00 dengan mutasi tambah selama tahun 2018 sebesar Rp303.326.720,00, mutasi kurang sebesar Rp185.660.444,00 sehingga saldo akhir 2018 senilai Rp323.087.290,00.

Adapun rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)
1	Penyewaan kios depan RSUD	7.034.500,00
2	Sewa ruangan untuk kantin kepada Setyawati (Kantin Yu Seti)	5.240.000,00
3	Penyewaan 1 (satu) ruangan kepada BPD DIY di poliklinik RSUD Wonosari	5.795.000,00
4	Penyewaan tanah untuk ATM kepada BPD DIY di kompleks DIKPORA	10.080.000,00
5	Sewa lahan ATM di DPRD GK oleh BPD DIY	23.520.000,00
6	Penyewaan aset (lahan) kepada BPD DIY Cab. Wonosari (ATM dan Neonbox) di kompleks Setda	8.792.000,00
7	Penyewaan ruangan kepada BPD DIY Cab. Wonosari di DPMPPT	30.245.790,00
8	Penyewaan lahan di komplek Kec. Ngawen kepada PD BPR BDG	15.748.000,00
9	Penyewaan lahan di komplek Kec. Semin kepada PD BPR BDG	56.360.000,00
10	Penyewaan ruangan di 7 kecamatan kepada PD BPR BDG	25.632.000,00
11	Penyewaan ruangan di RSUD Wonosari kepada PD BPR BDG	3.460.000,00
12	Penyewaan tanah (lahan) di kompleks GSG Siyono kepada Sujono Suryodanto, SE	48.200.000,00
13	Sewa lahan untuk SPBU Kranon oleh PT. Putra Sigit Perkasa	32.000.000,00
15	Sewa lahan untuk menara jaringan repeater	43.580.000,00
16	Penyewaan ruangan untuk ATM BRI di Komplek RSUD	1.200.000,00
17	Sewa ruangan untuk layanan kas di RSUD oleh BRI	1.700.000,00
18	Sewa ruangan untuk ATM di Komplek Pemda oleh BRI	4.500.000,00
	JUMLAH	323.087.290,00



6.2.3 Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi **Rp4.774.331,00**

Saldo awal Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp366.451.986,00 merupakan tunggakan tahun 2017. Mutasi tambah tahun 2018 sebesar Rp906.864.695,00 dan mutasi kurang yang merupakan realisasi pendapatan PAD tahun 2018 sebesar Rp1.268.542.350,00, sehingga saldo akhir tahun 2018 sebesar Rp4.774.331,00.

6.2.4 Piutang Tempat Parkir Khusus **Rp0,00**

Saldo awal Piutang Retribusi Tempat sebesar Rp12.620.000,00 telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 68/KPTS/2018 tanggal 5 Maret 2018 sehingga saldo akhir tahun 2018 menjadi Rp0,00.

6.2.5 Piutang Ijin Mendirikan Bangunan **Rp219.653.890,00**

Saldo awal Piutang Retribusi IMB sebesar Rp221.411.896,00, mutasi tambah selama tahun 2018 sebesar Rp97.813.140,00 dan realisasi pembayaran tahun 2018 sebesar Rp99.571.146,00 sehingga saldo akhir 2018 senilai Rp219.653.890,00.

6.2.6 Piutang Ijin Gangguan **Rp0,00**

Saldo awal Piutang Retribusi Tempat sebesar Rp14.020.000,00 telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 163/KPTS/2018 tanggal 23 Juli 2018.

6.3 Piutang dari Pengembalian **Rp0,00**

Tidak ada piutang dari pengembalian tahun 2018.

6.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **Rp15.101.758.354,06**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dalam hal ini merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda pada Bank BPD DIY, PD BPR BDG, PDAM Tirta Handayani dan BUKP se Kabupaten Gunungkidul yang akan diterima pada tahun berikutnya.

Saldo awal tahun 2018 senilai Rp3.924.305.823,80, terdapat koreksi sebesar Rp10.460.907.092,60, mutasi tambah sebesar Rp15.101.758.354,56, mutasi kurang senilai Rp14.366.334.044,38, sehingga saldo akhir menjadi Rp15.101.758.354,06 yang nantinya akan dibayarkan pada Tahun 2019. Adapun rincian masing-masing BUMD sebagai berikut :

No	BUMD	Tahun 2018 (Rp)
1	Bank BPD DIY	10.485.487.739,05
2	PD BPR BDG	3.972.470.853,00
3	PDAM TIRTA HANDAYANI	635.985.788,06
4	BUKP SE KAB. GUNUNGKIDUL	7.813.973,95
JUMLAH		15.101.758.354,06

6.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya **0,00**

Piutang ini merupakan transfer bagi hasil pajak daerah dari Propinsi DIY yang pada saat akhir Tahun 2017 belum terbayarkan semua, yang terdiri dari PKB, BBNKB, PBBKB, P-AP, dan Pajak Rokok. Adapun saldo awal Rp2.019.923.212,47 telah terbayarkan di tahun 2018. Pada tahun 2018 tidak ada piutang transfer pemerintah daerah lainnya karena pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah tahun 2018 telah terbayarkan secara keseluruhan.

7. Piutang Pada DP3AKBPMD **Rp0,00**

Saldo awal senilai Rp38.106.600,00 yang terdiri dari Pokok Penguatan Modal UPPKS sebesar Rp20.400.000,00, Bunga sebesar Rp1.344.000,00 dan Denda senilai Rp16.362.600,00 telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 163/KPTS/2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah TA 2018, sehingga saldo akhir sebesar Rp0,00.

8. Piutang Pada Dinas Pertanian dan Pangan **Rp0,00**

Piutang Pada Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir yang semula dikelola oleh Dinas Peternakan yaitu berupa Penguatan Modal Penggemukan Sapi Tahun 2013, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 1999/2001 dan Piutang dari Pengembalian yang merupakan Bunga Penguatan Modal Penggemukan Sapi Tahun 2008 dan 2007. Saldo awal senilai Rp453.290.000,00 yang terdiri dari Piutang Pokok senilai Rp450.725.000,00 dan Bunga senilai Rp2.565.000,00 yang merupakan Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 163/KPTS/2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah TA 2018, sehingga saldo akhir sebesar Rp0,00.

9. Piutang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika **Rp4.774.331,00**

Piutang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Saldo awal tahun 2018 sebesar Rp366.451.986,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp361.677.675,00, sehingga terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp4.774.311,00. Tagihan tahun 2018 sebesar Rp906.864.695,00 telah dibayarkan sebesar Rp906.864.675,00, selisih kurang bayar sebesar Rp20,00. Sehingga saldo akhir tahun 2018 sebesar Rp4.774.331,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tahun 2018
1	PT. INDOSAT Tbk	36,00
2	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	4.774.275,00
3	PT. TOWERINDO KONVERGEN	20,00
JUMLAH		4.774.331,00



10. Piutang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. **Rp219.653.890,00**
Saldo awal Tahun 2018 sebesar Rp221.441.896,00, mutasi tambah selama tahun 2018 sebesar Rp97.813.140,00 serta realisasi pembayaran selama tahun 2018 Rp99.571.146,00 sehingga saldo akhir 2018 senilai Rp219.653.890,00.

Penyisihan Piutang

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka piutang harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (nett realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai 6 (enam) klasifikasi yaitu Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, serta Beban Dibayar Dimuka.

Piutang Pajak Daerah terdiri dari 9 jenis yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, dan mineral bukan logam dan batuan, serta PBB-P2.

Selanjutnya piutang retribusi terdiri dari 6 jenis yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum, pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tempat khusus parkir, retribusi izin mendirikan bangunan dan izin gangguan.

Untuk piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah piutang bagian laba atas penyertaan modal pada Bank BPD DIY, PD BPR BDG, PDAM TIRTA HANDAYANI, dan BUKP.

Sedangkan piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari 6 jenis yaitu piutang TGKD, denda retribusi izin gangguan, piutang dari pengembalian, piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, piutang BLUD, dan piutang hasil dari pengelolaan dana bergulir.

Untuk Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa piutang transfer bagi hasil pajak daerah, yang terdiri PKB, BBNKB, PBBKB, P-AP, dan Pajak Rokok, yang dikelola oleh PPKD.

Untuk Beban Dibayar Dimuka, pada RSUD merupakan sewa gudang aset senilai Rp4.750.000,00. Khusus piutang ini tidak diterapkan penyisihan.

Dari kelima klasifikasi diatas, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan, termasuk didalamnya mengenai kewajiban bunga dan denda yang merupakan konsekuensi pemberian pinjaman dan pemberian fasilitas yang ada.

Mendasarkan pada Kebijakan Akuntansi di atas, piutang harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penggolongan piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka piutang 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2018

No	Jenis Piutang	Tahun 2018 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	18.186.311.561,00
	<i>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</i>	<i>(8.480.309.234,48)</i>
2	Piutang Retribusi	547.515.511,00
	<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	<i>(132.611.151,15)</i>
3	Piutang Bunga	0,00
4	Piutang Denda	0,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.101.758.354,06
	<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>	<i>(75.508.791,77)</i>
6	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	4.011.447.086,00
	<i>Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah</i>	<i>(20.057.235,43)</i>
7	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
	<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>	<i>0,00</i>
8	Beban Dibayar Dimuka	4.750.000,00
	JUMLAH	29.143.296.099,23



1. Piutang Pajak Daerah

Klasifikasi piutang pajak daerah berdasarkan umur piutang beserta penyisihannya sebagai berikut :

Klasifikasi	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
Lancar 0,5%	4.929.825.935,00	24.649.129,68	4.905.176.805,32
Kurang Lancar 10%	2.384.067.798,00	238.406.779,80	2.145.661.018,20
Diragukan 50%	5.310.329.006,00	2.655.164.503,00	2.655.164.503,00
Macet 100%	5.562.088.822,00	5.562.088.822,00	-
Jumlah	18.186.311.561,00	8.480.309.234,48	9.706.002.326,52

Dari nilai Piutang Pajak Daerah sebesar Rp18.186.311.561,00 dikurangi penyisihan piutang dengan klasifikasi lancar Rp24.649.129,68, kurang lancar Rp238.406.779,80 diragukan Rp2.655.164.503,00 dan macet Rp5.562.088.822,00 sehingga nilai bersih piutang pajak daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.706.002.326,52.

2. Piutang Retribusi

Klasifikasi piutang retribusi daerah berdasarkan umur piutang beserta penyisihannya sebagai berikut :

Klasifikasi	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
Lancar 0,5%	405.685.230,00	2.028.426,15	403.656.803,85
Kurang Lancar 10%	11.574.820,00	1.157.482,00	10.417.338,00
Diragukan 50%	1.660.436,00	830.218,00	830.218,00
Macet 100%	128.595.025,00	128.595.025,00	-
Jumlah	547.515.511,00	132.611.151,15	414.904.359,85

Dari nilai Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp547.515.511,00 dikurangi penyisihan piutang dengan klasifikasi lancar Rp2.028.426,15, kurang lancar Rp1.157.480,00 diragukan Rp830.218,00 dan macet Rp128.595.025,00 sehingga nilai bersih piutang retribusi daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp414.904.361,75.

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Klasifikasi piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan umur piutang beserta penyisihannya sebagai berikut :

Klasifikasi	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
Lancar 0,5%	15.101.758.354,06	75.508.791,77	15.026.249.562,29
Kurang Lancar 10%	0,00	0,00	0,00
Diragukan 50%	0,00	0,00	0,00
Macet 100%	0,00	0,00	0,00
Jumlah	15.101.758.354,06	75.508.791,77	15.026.249.562,29

Dari nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp15.101.758.354,00 dikurangi penyisihan piutang dengan klasifikasi lancar Rp75.508.791,77, kurang lancar Rp0,00 diragukan Rp0,00 dan macet Rp0,00 sehingga nilai bersih piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.026.249.562,23.

4. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Klasifikasi piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan umur piutang beserta penyisihannya sebagai berikut :

Klasifikasi	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
Lancar 0,5%	4.011.447.086,00	20.057.235,43	3.991.389.850,57
Kurang Lancar 10%	0,00	0,00	0,00
Diragukan 50%	0,00	0,00	0,00
Macet 100%	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.011.447.086,00	20.057.235,43	3.991.389.850,57

Dari nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4.011.447.086,00 dikurangi penyisihan piutang dengan klasifikasi lancar Rp20.057.235,43, kurang lancar Rp0,00 diragukan Rp0,00 dan macet Rp0,00 sehingga nilai bersih piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.991.389.850,57.

5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tidak ada penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya di tahun 2018.



DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG BERSIH (NETT REALIZABLE VALUE)
PER 31 DESEMBER 2018

No	Jenis Piutang	Tahun 2018 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	9.706.002.326,52
2	Piutang Retribusi	414.904.359,85
3	Piutang Bunga	0,00
4	Piutang Denda	0,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.026.249.562,29
6	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	3.991.389.850,57
7	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
8	Beban Dibayar Dimuka	4.750.000,00
	JUMLAH	29.143.296.099,23

Selain dari Piutang yang telah diungkapkan di atas, terdapat juga saldo tagihan yang merupakan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang tidak ditetapkan dengan SKTJM.

Saldo awal tahun 2018 mengalami koreksi sebesar Rp4.000.000,00 untuk Dinsosnakertrans. Semula kelebihan pembayaran honor sebesar Rp5.747.600,00, setelah koreksi menjadi Rp9.747.600,00, sehingga saldo awal menjadi Rp1.762.344.233,00.

Temuan tersebut terdiri dari temuan IRDA dan temuan BPK-RI senilai Rp1.762.344.233,00 mutasi tambah senilai Rp63.101.706,61, mutasi kurang senilai Rp155.461.789,00, dan saldo akhir sebesar Rp1.669.984.150,61.

- Temuan IRDA saldo awal Rp144.215.177,00, mutasi tambah Rp63.101.706,61, mutasi kurang sebesar Rp155.461.789,00, sehingga saldo akhir menjadi Rp51.855.094,61. Temuan ini ada pada SKPD Dinkes, Dinas Peternakan, Disdikpora, RSUD, Dinsosnakertrans, dan Dispar.
- Temuan BPK-RI saldo awal Rp1.618.129.056,00, tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang, sehingga saldo akhir tidak berubah tetap senilai Rp1.618.129.056,00. Temuan ini ada pada SKPD DPRD dan Sekretariat DPRD.

Adapun secara rinci rincian temuan IRDA dan BPK dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Tagihan Yang Merupakan Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang tidak ditetapkan dengan SKTJM

No	Uraian	2017 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	2018 (Rp)
I	Temuan IRDA				
1	DINKES				
	Kelebihan penganggaran (volume) pekerjaan fisik dalam RAB	8.005.562,00	0,00	8.005.562,00	0,00
	Kelebihan Tunjangan anak dan beras	3.392.736,00	0,00	3.392.736,00	0,00
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	938.080,00	0,00	938.080,00	0,00
	Kelebihan Tunjangan suami/istri, anak dan beras	109.158.972,00	0,00	102.071.464,00	7.087.508,00
2	DISDIKPORA				
	Kekurangan volume pekerjaan fisik	1.818.280,00	0,00	0,00	1.818.280,00
3	RSUD				
	Kekurangan setor pendapatan parkir	11.153.947,00	0,00	11.153.947,00	0,00
4	DINSOSNAKERTRANS				
	Kelebihan pembayaran Honor	9.747.600,00	0,00	0,00	9.747.600,00
5	DISPAR				
	Pekerjaan tidak dilaksanakan		58.201.706,61	25.000.000,00	33.201.706,61
6	DP3AKB				
	Honor tidak sesuai ketentuan		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
II	Temuan BPK-RI				
	Belanja DPRD dan Sek. DPRD sebesar Rp6.651.383.000,- tidak sesuai ketentuannya	662.768.400,00	0,00	0,00	662.768.400,00
	PPh 21 anggota DPRD belum dipungut dan disetor	64.175.656,00	0,00	0,00	64.175.656,00
	Anggaran & realisasi belanja DPRD dan Sek. DPRD sebesar	891.185.000,00	0,00	0,00	891.185.000,00
	JUMLAH	1.762.344.233,00	63.101.706,61	155.461.789,00	1.669.984.150,61



Disamping Piutang yang telah diungkapkan di atas dan saldo tagihan yang merupakan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang tidak ditetapkan dengan SKTJM. Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 juga mempunyai Piutang yang sudah dihapuskan secara bersyarat dan dicatat secara Ekstrakomptabel sebesar Rp611.915.300,00. Piutang tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp39.557.450,00 dan mutasi tambah sebesar Rp572.357.850,00. Penambahan terdiri dari pajak retribusi parkir sebesar Rp12.620.000,00, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 68/KPTS/2018 tanggal 5 Maret 2018; Piutang pajak bahan galian C sebesar Rp4.820.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 19/KPTS/2018 tanggal 2 Januari 2018; Piutang penguatan modal pengrajin/industri kecil menengah sebesar Rp15.684.150,00, piutang penerimaan pinjaman UPPKS sebesar Rp38.106.600,00, piutang denda retribusi izin gangguan sebesar Rp14.020.000,00, piutang denda retribusi izin gangguan sebesar Rp5.117.600, piutang penggemukan sapi potong sebesar Rp453.290.000,00, piutang pajak restoran sebesar Rp1.380.000,00, piutang pajak reklame sebesar Rp12.506.500,00, dan piutang MBLB sebesar Rp14.813.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 163/KPTS/2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah TA 2018 tanggal 23 Juli 2018. Meskipun telah dilakukan penghapusan bersyarat, piutang daerah ini akan tetap diusahakan penagihannya.

4. BEBAN DIBAYAR DIMUKA	Rp4.750.000,00
Beban dibayar dimuka pada RSUD Wonosari berupa sewa Gudang karena Gedung RSUD sedang dibangun.	
Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 disajikan sebesar Rp4.750.000,00 mutasi tambah senilai Rp9.500.000,00 mutasi kurang senilai Rp9.500.000,00 sehingga saldo akhir menjadi Rp4.750.000,00.	
5. BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	Rp0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 Rp0,00	
6. BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	Rp0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2018 Rp0,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7. PERSEDIAAN

Rp64.809.967.984,39

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp64.809.967.984,39 berasal dari persediaan awal per 31 Desember 2017 sebesar Rp82.671.909.890,78 ditambah dengan pengadaan Tahun 2018 sebesar Rp129.562.696.924,55 dan dikurangi dengan pemakaian sebesar Rp147.424.638.830,94.

Daftar Mutasi Persediaan 2018

No	Nama Perangkat Daerah	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	260.063.673,45	35.326.041.628,00	35.302.926.739,46	283.178.561,99
2	Dinas Kesehatan	10.269.908.966,38	27.536.484.452,26	26.381.234.234,97	11.425.159.183,67
3	RSUD	3.302.688.665,81	23.300.125.551,63	23.854.921.382,17	2.747.892.835,27
4	DPUPRKP	35.707.647.712,13	13.239.611.037,00	31.645.190.884,00	17.302.067.865,13
5	Satpol PP	1.939.000,00	190.785.800,00	188.675.300,00	4.049.500,00
6	Dinas Sosial	4.257.325,00	2.210.656.850,00	2.206.377.075,00	8.537.100,00
7	DISNAKERTRANS	10.239.750,00	957.049.000,00	965.283.150,00	2.005.600,00
8	DP3AKBPMD	295.493.145,00	2.214.389.520,00	2.327.598.504,00	182.284.161,00
9	DISPERTARUNG	4.259.000,00	215.388.650,00	215.020.350,00	4.627.300,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	406.471.759,10	899.259.949,82	894.996.657,75	410.735.051,17
11	DISDUKCAPIL	1.026.678.920,60	2.425.686.700,00	1.842.219.165,60	1.610.146.455,00
12	Dinas Perhubungan	718.297.600,36	736.198.185,73	950.923.161,18	503.572.624,91
13	DISKOMINFO	4.822.000,00	499.688.960,00	496.432.960,00	8.078.000,00
14	DISKOP DAN UKM	13.368.200,00	72.853.600,00	74.690.000,00	11.531.800,00
15	DPMPT	2.788.170,00	156.196.475,00	138.680.145,00	20.304.500,00
16	Dinas Kebudayaan	10.602.000,00	110.426.500,00	119.502.500,00	1.526.000,00
17	DPK	1.088.500,00	123.483.400,00	122.993.900,00	1.578.000,00
18	DKP	119.579.790,00	1.066.591.276,00	878.284.590,00	307.886.476,00
19	Dinas Pariwisata	153.742.313,00	751.003.011,14	754.319.936,91	150.425.387,23
20	DPP	119.541.251,00	8.966.379.122,00	8.937.907.422,00	148.012.951,00
21	DISPERINDAG	66.854.260,95	1.004.333.716,22	1.013.170.396,96	58.017.580,21
22	Inspektorat Daerah	2.821.500,00	123.669.000,00	124.488.000,00	2.002.500,00
23	BAPPEDA	629.000,00	240.727.700,00	238.280.700,00	3.076.000,00
24	BKAD	30.011.930.068,00	1.791.341.804,75	2.307.583.490,94	29.495.688.381,81
25	BKPPD	3.889.400,00	102.681.800,00	101.838.800,00	4.732.400,00
26	BPBD	117.546.720,00	175.882.600,00	201.451.100,00	91.978.220,00
27	Sekretariat Daerah	22.666.900,00	696.305.250,00	710.863.750,00	8.108.400,00
28	Sekretariat DPRD	1.793.500,00	547.588.650,00	547.709.350,00	1.672.800,00
29	Badan Kesbangpol	849.000,00	86.726.300,00	86.721.800,00	853.500,00
30	Kecamatan Wonosari	273.000,00	106.536.200,00	106.351.200,00	458.000,00
31	Kecamatan Paliyan	206.250,00	90.875.500,00	90.775.400,00	306.350,00
32	Kecamatan Panggang	129.000,00	239.230.000,00	239.102.500,00	256.500,00
33	Kecamatan Tepus	678.500,00	30.857.500,00	31.178.500,00	357.500,00
34	Kecamatan Rongkop	1.859.800,00	25.060.000,00	25.549.800,00	1.370.000,00
35	Kecamatan Semanu	402.000,00	370.761.450,00	371.070.950,00	92.500,00
36	Kecamatan Ponjong	595.500,00	183.323.500,00	183.634.000,00	285.000,00
37	Kecamatan Karangmojo	208.000,00	690.156.360,00	690.066.360,00	298.000,00
38	Kecamatan Playen	591.000,00	106.053.700,00	105.989.700,00	655.000,00
39	Kecamatan Nglipar	57.000,00	229.933.960,00	229.884.460,00	106.500,00
40	Kecamatan Ngawen	88.500,00	468.440.500,00	467.656.000,00	873.000,00
41	Kecamatan Semin	1.541.000,00	119.742.000,00	119.712.000,00	1.571.000,00
42	Kecamatan Patuk	1.042.250,00	389.532.965,00	389.267.715,00	1.307.500,00
43	Kecamatan Saptosari	343.000,00	92.692.000,00	92.729.000,00	306.000,00
44	Kecamatan Gedangsari	216.000,00	63.603.000,00	63.545.000,00	274.000,00
45	Kecamatan Girisubo	522.000,00	157.461.200,00	156.960.200,00	1.023.000,00
46	Kecamatan Tanjungsari	565.000,00	37.584.500,00	37.714.500,00	435.000,00
47	Kecamatan Purwosari	134.000,00	393.296.100,00	393.166.100,00	264.000,00
Jumlah		82.671.909.890,78	129.562.696.924,55	147.424.638.830,94	64.809.967.984,39



Sesuai dengan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan, telah dilakukan mapping klasifikasi persediaan menjadi:

Rekapitulasi Persediaan per Jenis Barang Tahun 2018

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	PERSEDIAAN BAHAN PAKAI		
1.1.	Alat Tulis Kantor	1.449.828.944,65	1.813.501.912,24
	Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
1.2	Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	466.536.083,00	282.169.278,00
1.3	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	10.695.500,00	8.688.000,00
1.4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	133.237.989,15	179.140.278,17
1.5	Bahan Bakar Minyak/Gas	5.149.035,00	11.442.400,00
1.6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	471.000,00	753.600,00
1.7	Isi Tabung Gas	7.000.000,00	0,00
	JUMLAH PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS	2.072.918.551,80	2.295.695.468,41
2.	PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL		
2.1	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
2.2	Bibit Ternak	87.316.751,00	318.861.751,00
2.3	Bahan Obat-obatan	8.589.235.182,81	8.005.020.306,53
2.4	Bahan Kimia	1.884.262.089,82	1.910.451.830,61
2.5	Bahan Praktek KBM	8.564.307,00	6.154.170,00
2.6	Bahan Sosialisasi, Diklat, Seminar	0,00	0,00
2.7	Bahan Makanan Pokok/Logistik/Peralatan Bencana	203.128.195,00	1.587.482.822,70
2.8	Alat-alat Pertanian	0,00	37.661.200,00
2.9	Peralatan Medis Habis Pakai	2.185.854.063,34	2.002.484.421,66
2.10	Materi/Media Bahan BKB	469.372.999,00	369.695.627,00
2.11	Peralatan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
2.12	Bahan Perlengkapan BBI	0,00	860.000,00
2.13	Perlengkapan Selam	0,00	0,00
2.14	Pigura	1.080.000,00	1.154.500,00
2.15	Peralatan Boga	37.764.310,00	20.670.000,00
2.16	Taplak	0,00	0,00
2.17	Makmin Pasien	0,00	0,00
2.18	Suku Cadang	491.297.800,00	1.092.602.900,00
2.19	Pakaian	0,00	0,00
2.20	Lain-lain	0,00	0,00
	JUMLAH PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL	13.957.875.697,97	15.353.099.529,50
3	PERSEDIAAN BARANG CETAKAN		
3.1	Barang Cetakan	1.122.474.132,47	1.194.493.777,91
3.2	Barang Kuasi	1.155.371.195,41	762.496.876,44
	JUMLAH PERSEDIAAN BARANG CETAKAN	2.277.845.327,88	1.956.990.654,35



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA		
4.1	Hibah Barang yang Akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	64.190.023.603,13	45.185.641.856,13
4.2	Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Individu/Keluarga/Masyarakat	107.030.920,00	8.586.000,00
4.3	Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	66.215.790,00	9.954.476,00
4.4	Lain-lain	0,00	0,00
	JUMLAH PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	64.363.270.313,13	45.204.182.332,13
	JUMLAH PERSEDIAAN	82.671.909.890,78	64.809.967.984,39



8. INVESTASI JANGKA PANJANG **Rp0,00**
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki Investasi Jangka Panjang berdasarkan posisi saldo per 31 Desember 2018 maupun saldo per 31 Desember 2017.

8.1. INVESTASI NON PERMANEN **Rp0,00**
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki Investasi Non Permanen berdasarkan posisi saldo per 31 Desember 2018 maupun saldo per 31 Desember 2017.

8.2. INVESTASI PERMANEN **Rp233.631.137.892,47**

8.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD **Rp233.631.137.892,47**

Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul dan/atau Peraturan Bupati Gunungkidul.

Metode ekuitas digunakan untuk mencatat pengakuan penyertaan modal Pemda pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul dan PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG). Sedangkan metode biaya masih digunakan untuk menilai investasi atas penyertaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Bank BPD DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), karena prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah relatif kecil. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Nama BUMD	Saldo 2017 Audited (Rp)	Koreksi (Rp)	Penyertaan Modal 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 Rp)
Bank BPD DIY	67.300.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	82.300.000.000,00
PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul	86.554.251.014,00	0,00	2.429.593.266,98	88.983.844.280,98
PDAM TIRTA HANDAYANI	31.510.186.615,60	0,00	30.827.763.700,89	62.337.950.316,49
BUKP se-Kabupaten Gunungkidul	9.343.295,00	0,00	0,00	9.343.295,00
Jumlah	185.373.780.924,60	0,00	21.102.184.787,52	233.631.137.892,47

8.2.1. Investasi Permanen Lainnya **Rp0,00**
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki Investasi Permanen Lainnya berdasarkan posisi saldo per 31 Desember 2018 maupun 31 Desember 2017.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

9. ASET TETAP **Rp 2.111.987.984.090,81**

Jumlah di bawah ini merupakan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2018 dengan rincian saldo untuk setiap jenis aset tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 :

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Tanah	506.090.279.852,00	472.212.848.897,00
Peralatan dan Mesin	412.633.372.049,46	412.125.188.148,77
Gedung dan Bangunan	938.306.581.939,24	892.508.452.987,16
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.064.501.902.606,67	941.425.899.584,73
Aset Tetap Lainnya	29.734.512.374,48	28.311.958.374,89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.109.294.000,00	27.455.752.383,54
Akumulasi Penyusutan	(841.387.958.731,04)	(859.595.794.939,12)
Jumlah Aset Tetap	2.111.987.984.090,81	1.914.444.305.436,97

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 melaksanakan sensus barang daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Daerah, tanggal 19 Oktober 2017, hasil sensus tersebut menghasilkan penyesuaian atas saldo awal aset tetap per 31 Desember 2017 Audited yang dituangkan dalam berita acara penyesuaian hasil sensus saldo awal aset tetap.

Nilai aset tetap disajikan sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 43 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	300.000
2.2	Alat-alat Angkutan	300.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	150.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	150.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	150.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	300.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	300.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	300.000
2.9	Alat Keamanan	300.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	5.000.000
3.2	Bangunan Monumen	5.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air/Irigasi	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	50.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	100.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Masa manfaat untuk setiap unit aset tetap berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat
1 3	ASET TETAP	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 1	Alat-Alat Besar Darat	10
1 3 2 2	Alat-Alat Besar Apung	8
1 3 2 3	Alat-alat Bantu	7
1 3 2 4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Renovasi</i>	>50% s.d 75%	1
		>75%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>21% s.d 40%	2
		>51%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>25% s.d 50%	1
Alat Studio		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Radiation Application & Non	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Peralatan Laboratorium	Overhaul	>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Laboratorium Standarisasi	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75%	1



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Senjata Sinar	Overhaul	>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Komputer Unit	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Alat Pengeboran		>25% s.d 50%	4
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>50% s.d 75%	6
		>75%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Produksi	Renovasi	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75%	3
Alat Pelindung	<i>Renovasi</i>	>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat SAR	<i>Renovasi</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat Kerja Penerbang	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/ Produksi	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	<i>Renovasi</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	<i>Renovasi</i>	>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 60%	5
		>60%	10
Jembatan	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	<i>Renovasi</i>	>5% s.d 10%	5
		>10%	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengairan Pasang Surut	<i>Renovasi</i>	>5% s.d 10%	5
		>10%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan	<i>Renovasi</i>	>5% s.d 10%	3
		>10%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai	<i>Renovasi</i>	>5% s.d 10%	2
		>10%	3
Bangunan Pengembangan Sumber	<i>Renovasi</i>	>5% s.d 10%	2
		>10%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Air Kotor	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Instalasi Air Kotor	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Pengolahan Bahan	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Gardu Listrik	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Pertahanan	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Gas	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Pengaman	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	1
		>45%	3
Instalasi Lain	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	1
		>45%	3
Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	5
		>45%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam	<i>Renovasi /Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	5

Saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2017 (Audited) sebesar Rp2.774.040.100.376,08 dengan nilai buku atas aset tetap sebesar Rp1.914.444.305.436,97 kemudian pada tahun 2018 terdapat mutasi tambah aset tetap dari hasil sensus sebesar Rp45.270.329.025,82 dan mutasi kurangnya sebesar Rp165.907.283.271,84 sehingga diperoleh saldo aset tetap setelah hasil sensus sebesar Rp2.653.403.146.130,06.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adapun rekapitulasi atas rincian mutasi hasil sensus dan penyesuaian Aset Tetap tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Daftar Mutasi Hasil Sensus/ Penyesuaian Aset Tetap 2018 Berdasarkan Klasifikasi

Aset Tetap	Saldo Akhir 2017 Audited (Rp)	Mutasi Tambah Sensus/ Penyesuaian 2018 (Rp)	Mutasi Kurang Sensus/ Penyesuaian 2018 (Rp)	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)
Tanah	472.212.848.897,00	0,00	7.227.400.000,00	464.985.448.897,00
Peralatan dan Mesin	412.125.188.148,77	8.441.663.109,76	56.062.710.602,56	364.504.140.655,97
Gedung dan Bangunan	892.508.452.987,16	35.909.236.809,82	86.064.605.180,92	842.353.084.616,06
Jalan, Irigasi dan Jaringan	941.425.899.584,73	496.054.623,20	11.646.771.366,07	930.275.182.841,86
Aset Tetap Lainnya	28.311.958.374,89	423.374.483,04	4.905.796.122,29	23.829.536.735,64
Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.455.752.383,54	0,00	0,00	27.455.752.383,54
Jumlah	2.774.040.100.376,08	45.270.329.025,82	165.907.283.271,84	2.653.403.146.130,06

Aset Tetap	Saldo Akhir 2017 Audited (Rp)	Mutasi Tambah Sensus/ Penyesuaian 2018 (Rp)	Mutasi Kurang Sensus/ Penyesuaian 2018 (Rp)	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)
TANAH	472.212.848.897,00	0,00	7.227.400.000,00	464.985.448.897,00
Tanah	472.212.848.897,00	0,00	7.227.400.000,00	464.985.448.897,00
PERALATAN & MESIN	412.125.188.148,77	8.441.663.109,76	56.062.710.602,56	364.504.140.655,97
Alat-alat Berat/Besar	13.555.248.942,00	61.226.375,00	621.172.053,00	12.995.303.264,00
Alat-alat Angkutan	86.549.238.747,57	33.500.000,00	1.755.231.719,50	84.827.507.028,07
Alat-alat Bengkel	11.442.855.851,07	44.911.456,00	2.234.959.213,19	9.252.808.093,88
Alat Pertanian dan Peternakan	3.755.515.806,05	31.875.000,00	516.606.881,59	3.270.783.924,46
Alat-alat Kantor & Rumah	204.362.136.059,62	5.522.438.708,35	34.141.880.647,24	175.742.694.120,73
Alat Studio dan Komunikasi	19.557.925.810,79	531.218.592,31	3.807.798.580,05	16.281.345.823,05
Alat-alat Kedokteran	37.977.995.394,05	797.843.428,60	5.463.748.904,13	33.312.089.918,52
Alat-alat Laboratorium	34.721.715.737,62	1.418.649.549,50	7.510.930.103,86	28.629.435.183,26
Alat-alat Keamanan	202.555.800,00	0,00	10.382.500,00	192.173.300,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	892.508.452.987,16	35.909.236.809,82	86.064.605.180,92	842.353.084.616,06
Bangunan Gedung	838.586.687.604,77	35.263.373.898,00	83.541.403.444,78	790.308.658.057,99
Bangunan Monumen	53.921.765.382,39	645.862.911,82	2.523.201.736,14	52.044.426.558,07
JALAN, IRIGASI & JARINGAN	941.425.899.584,73	496.054.623,20	11.646.771.366,07	930.275.182.841,86
Jalan dan Jembatan	768.522.142.741,12	20.000.000,00	2.809.404.640,57	765.732.738.100,55
Bangunan Air (Irigasi)	108.496.111.657,23	445.050.622,20	3.529.489.697,56	105.411.672.581,87
Instalasi	24.106.962.105,00	27.400.000,00	4.471.345.763,00	19.663.016.342,00
Jaringan	40.300.683.081,38	3.604.001,00	836.531.264,94	39.467.755.817,44
ASET TETAP LAINNYA	28.311.958.374,89	423.374.483,04	4.905.796.122,29	23.829.536.735,64
Buku dan Perpustakaan	10.817.162.665,19	126.976.879,71	3.309.219.046,09	7.634.920.498,81
Barang bercorak Kesenian/ Bud.	12.326.933.735,69	296.397.603,33	1.537.671.933,70	11.085.659.405,32
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	467.467.400,00	0,00	58.905.142,50	408.562.257,50
Aset Tetap Renovasi	4.700.394.574,00	0,00	0,00	4.700.394.574,00
KONS. DLM Pengerjaan	27.455.752.383,54	0,00	0,00	27.455.752.383,54
Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.455.752.383,54	0,00	0,00	27.455.752.383,54
Jumlah	2.774.040.100.376,08	45.270.329.025,82	165.907.283.271,84	2.653.403.146.130,06



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Atas hasil sensus Aset Tetap tahun 2018 diperoleh beberapa perubahan nilai aset tetap pada beberapa Perangkat Daerah rinciannya sebagai berikut:

Daftar Mutasi Hasil Sensus Aset Tetap 2018 berdasarkan OPD

No	Nama OPD	Saldo Akhir 2017 Audited (Rp)	Mutasi Tambah Sensus/ Penyesuaian 2018 (Rp)	Mutasi Kurang Sensus/ Penyesuaian 2018 (Rp)	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	674.467.188.270,93	14.439.564.456,82	60.415.081.028,04	628.491.671.699,71
2	DINAS KESEHATAN	142.138.787.544,91	886.232.528,00	12.711.813.839,95	130.313.206.232,96
3	RSUD WONOSARI	93.510.953.129,00	94.704.000,00	4.215.505.745,00	89.390.151.384,00
4	DPUPRKP	1.220.563.879.176,58	24.025.000,00	12.631.247.908,91	1.207.956.656.267,67
5	SATPOL PP	2.421.642.075,41	-	230.317.729,41	2.191.324.346,00
6	DINAS SOSIAL	593.652.959,00	-	-	593.652.959,00
7	DISNAKERTRANS	10.004.034.268,31	7.049.000,00	855.590.998,00	9.155.492.270,31
8	DP3AKBPMD	10.559.130.693,92	-	57.354.361,00	10.501.776.332,92
9	DIPERTARUNG	40.884.612.795,00	-	205.575.740,00	40.679.037.055,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.310.018.343,83	-	954.421.424,00	20.355.596.919,83
11	DISDUKCAPIL	9.358.450.355,00	50.624.765,00	1.500.790.599,67	7.908.284.520,33
12	DINAS PERHUBUNGAN	65.499.641.990,04	447.796.000,00	5.317.191.938,95	60.630.246.051,09
13	DISKOMINFO	5.737.671.310,20	-	1.547.563.211,20	4.190.108.099,00
14	DISKOP UKM	867.174.687,00	-	48.387.950,00	818.786.737,00
15	DPMPPT	5.962.355.497,00	33.246.670,00	256.192.336,00	5.739.409.831,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	1.144.515.387,53	-	62.081.839,00	1.082.433.548,53
17	DPK	8.632.833.354,72	45.705.600,00	205.416.041,73	8.473.122.912,99
18	DKP	22.561.393.631,00	-	2.803.448.292,00	19.757.945.339,00
19	DINAS PARIWISATA	40.077.090.726,69	-	981.091.742,91	39.095.998.983,78
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	39.403.215.087,89	-	2.156.094.128,99	37.247.120.958,90
21	DISPERINDAG	103.885.116.883,47	29.195.292.006,00	54.125.192.078,80	78.955.216.810,67
22	INSPEKTORAT DAERAH	6.226.969.441,04	-	58.008.428,00	6.168.961.013,04
23	BAPPEDA	4.364.321.864,50	-	386.496.554,00	3.977.825.310,50
24	BKAD	27.598.416.386,53	8.839.000,00	581.363.264,94	27.025.892.121,59
25	BKPPD	12.128.188.344,65	-	398.454.363,00	11.729.733.981,65
26	BPBD	6.377.411.164,00	-	153.967.500,00	6.223.443.664,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	149.463.029.885,16	-	1.381.733.474,00	148.081.296.411,16
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	14.081.476.118,86	-	411.146.043,00	13.670.330.075,86
31	BAKESBANGPOL	2.700.528.052,56	-	25.494.112,67	2.675.033.939,89
32	KECAMATAN WONOSARI	968.145.332,93	-	161.451.537,00	806.693.795,93
33	KECAMATAN PALIYAN	1.628.240.506,72	8.000.000,00	13.464.664,11	1.622.775.842,61
34	KECAMATAN PANGGANG	2.435.666.323,00	-	208.636.250,00	2.227.030.073,00
35	KECAMATAN TEPUS	1.207.895.687,00	6.500.000,00	279.511.857,16	934.883.829,84
36	KECAMATAN RONGKOP	2.205.895.975,04	1.500.000,00	25.785.000,00	2.181.610.975,04
37	KECAMATAN SEMANU	1.391.201.312,33	21.000.000,00	45.472.334,00	1.366.728.978,33
38	KECAMATAN PONJONG	1.513.886.922,28	-	20.136.875,00	1.493.750.047,28
39	KECAMATAN KARANGMOJO	1.606.480.033,98	-	62.851.000,00	1.543.629.033,98
40	KECAMATAN PLAYEN	1.223.867.587,00	-	33.217.500,00	1.190.650.087,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	1.824.429.777,00	-	37.655.375,00	1.786.774.402,00
42	KECAMATAN NGAWEN	1.848.547.250,73	-	17.266.500,00	1.831.280.750,73
43	KECAMATAN SEMIN	2.158.933.050,92	250.000,00	6.400.000,00	2.152.783.050,92
44	KECAMATAN PATUK	2.805.853.582,00	-	16.474.250,00	2.789.379.332,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	2.559.106.445,82	-	125.283.858,29	2.433.822.587,53
46	KECAMATAN GEDANGSARI	1.271.497.015,00	-	23.062.000,00	1.248.435.015,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	2.001.006.446,65	-	66.220.200,00	1.934.786.246,65
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	1.205.809.490,95	-	63.173.400,00	1.142.636.090,95
49	KECAMATAN PURWOSARI	1.659.938.212,00	-	24.197.998,11	1.635.740.213,89
Jumlah		2.774.040.100.376,08	45.270.329.025,82	165.907.283.271,84	2.653.403.146.130,06

Mutasi tambah hasil sensus sebesar Rp45.270.329.025,82 dikarenakan adanya barang yang belum tercatat yang terdapat pada 16 OPD sesuai tabel di atas sedangkan mutasi kurang hasil sensus sebesar Rp165.907.283.271,84 terdapat pada hampir seluruh OPD.

Mutasi tambah kurang sensus pada Disdikpora termasuk di dalamnya terdapat mutasi tambah kurang karena penyesuaian angka karena proses migrasi database serta adanya reklasifikasi.

Mutasi tambah murni dari hasil sensus, dikarenakan:

- barang belum tercatat Rp 37.981.508.715,93
- koreksi pencatatan Rp 7.288.820.309,89

Sedangkan mutasi kurang murni dari hasil sensus, dikarenakan:

- barang yang tidak digunakan Rp 19.938.357.300,85
- barang dengan kondisi rusak berat Rp 55.971.359.800,04



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- barang tidak ditemukan karena hilang	Rp	3.907.858.666,33
- barang tidak ditemukan karena karena dihibahkan,	Rp	14.543.093,27
- barang tidak ditemukan karena dikuasai pihak ketiga	Rp	171.402.785,74
- barang tidak ditemukan karena kesalahan pencatatan	Rp	85.479.301.067,42
- barang bukan BMD	Rp	424.460.558,19

Barang Bukan BMD terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Daftar Mutasi Kurang Hasil Sensus Aset Tetap 2018 berdasarkan OPD

No	Nama OPD	Barang Tidak Digunakan (Rp)	Barang Kondisi Rusak Berat (Rp)	Barang Tidak Ditemukan-Hilang (Rp)
1	DISDIKPORA	8.348.041.760,80	22.708.366.026,33	2.910.179.215,40
2	DINAS KESEHATAN	3.824.395.066,72	6.910.714.232,01	43.060.774,60
3	RSUD WONOSARI	574.700.572,00	3.638.085.973,00	0,00
4	DPUPRKP	1.994.578.588,56	964.722.336,00	22.068.533,33
5	SATPOL PP	56.368.600,00	143.688.010,00	30.261.119,41
6	DINAS SOSIAL	-	-	-
7	DISNAKERTRANS	346.373.500,00	491.017.498,00	18.200.000,00
8	DP3AKBPMD	-	48.095.861,00	9.258.500,00
9	DIPERTARUNG	84.363.750,00	95.565.790,00	25.646.200,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	80.359.790,00	209.255.421,50	240.850.010,20
11	DISDUKCAPIL	857.476.666,64	642.835.933,03	478.000,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	278.922.046,00	2.780.174.102,89	594.000,00
13	DISKOMINFO	178.765.464,00	972.556.787,20	-
14	DISKOP UKM	200.000,00	33.430.350,00	-
15	DPMPT	28.010.950,00	190.741.386,00	37.440.000,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	62.081.839,00	-
17	DPK	31.379.304,00	74.869.257,54	9.822.591,45
18	DKP	1.922.740.688,00	807.884.084,00	72.823.520,00
19	DINAS PARIWISATA	50.703.086,00	914.762.656,91	8.226.000,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	251.337.846,50	1.149.857.952,19	298.931.817,30
21	DISPERINDAG	181.977.666,00	9.620.747.548,89	63.081.284,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	18.000.000,00	23.963.341,00	16.045.087,00
23	BAPPEDA	150.469.500,00	236.027.054,00	-
24	BKAD	98.202.103,63	329.700.161,31	32.731.000,00
25	BKPPD	18.121.995,00	380.332.368,00	-
26	BPBD	13.588.500,00	137.349.000,00	2.040.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	181.412.372,00	1.200.321.102,00	-
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-
29	DPRD	-	-	-
30	SEKRETARIAT DPRD	138.461.875,00	266.023.468,00	6.360.700,00
31	BAKESBANGPOL	5.607.777,00	19.886.335,67	-
32	KECAMATAN WONOSARI	140.400.000,00	20.362.387,00	249.150,00
33	KECAMATAN PALIYAN	4.700.000,00	8.764.664,11	-
34	KECAMATAN PANGGANG	5.758.000,00	201.178.250,00	450.000,00
35	KECAMATAN TEPUS	8.877.000,00	251.744.428,58	15.740.428,58
36	KECAMATAN RONGKOP	6.350.000,00	16.935.000,00	-
37	KECAMATAN SEMANU	2.695.000,00	38.479.334,00	300.000,00
38	KECAMATAN PONJONG	2.050.000,00	17.336.875,00	250.000,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	10.416.000,00	52.435.000,00	-
40	KECAMATAN PLAYEN	454.500,00	32.428.000,00	-
41	KECAMATAN NGLIPAR	4.143.000,00	33.512.375,00	-
42	KECAMATAN NGAWEN	-	16.816.500,00	-
43	KECAMATAN SEMIN	2.900.000,00	1.500.000,00	-
44	KECAMATAN PATUK	8.775.000,00	5.774.250,00	1.575.000,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	3.240.333,00	114.438.622,77	4.024.375,06
46	KECAMATAN GEDANGSARI	500.000,00	21.522.000,00	190.000,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	7.164.000,00	22.174.840,00	36.881.360,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	15.375.000,00	41.203.400,00	100.000,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	21.697.998,11	-
Jumlah		19.938.357.300,85	55.971.359.800,04	3.907.858.666,33



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daftar Mutasi Kurang Hasil Sensus Aset Tetap 2018 berdasarkan OPD

No	Nama OPD	Barang Tidak Ditemukan-Dihibahkan (Rp)	Barang Tidak Ditemukan-Dikuasai Pihak Ketiga (Rp)	Barang Tidak Ditemukan-Kesalahan Pencatatan (Rp)	Barang Bukan BMD (Rp)
1	DISDIKPORA	11.637.143,27	13.713.847,00	25.998.682.477,05	424.460.558,19
2	DINAS KESEHATAN	0,00	70.000.000,00	1.863.643.766,62	0,00
3	RSUD WONOSARI	0,00	-	2.719.200,00	0,00
4	DPUPRKP	0,00	-	9.649.878.451,02	0,00
5	SATPOL PP	0,00	-	0,00	0,00
6	DINAS SOSIAL	0,00	-	0,00	0,00
7	DISNAKERTRANS	0,00	-	0,00	0,00
8	DP3AKBPMD	0,00	-	0,00	0,00
9	DIPERTARUNG	0,00	-	0,00	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	260.000,00	423.696.202,30	0,00
11	DISDUKCAPIL	0,00	-	0,00	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	-	2.257.501.790,06	0,00
13	DISKOMINFO	0,00	-	396.240.960,00	0,00
14	DISKOP UKM	0,00	-	14.757.600,00	0,00
15	DPMPT	0,00	-	0,00	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	0,00	-	0,00	0,00
17	DPK	1.915.950,00	87.428.938,74	0,00	0,00
18	DKP	0,00	-	0,00	0,00
19	DINAS PARIWISATA	0,00	-	7.400.000,00	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	0,00	-	455.966.513,00	0,00
21	DISPERINDAG	0,00	-	44.259.385.579,91	0,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	-	0,00	0,00
23	BAPPEDA	0,00	-	0,00	0,00
24	BKAD	0,00	-	120.730.000,00	0,00
25	BKPPD	0,00	-	0,00	0,00
26	BPBD	990.000,00	-	0,00	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	-	0,00	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	0,00	-	0,00	0,00
29	DPRD	0,00	-	0,00	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	0,00	-	300.000,00	0,00
31	BAKESBANGPOL	0,00	-	0,00	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	0,00	-	440.000,00	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	0,00	-	0,00	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	0,00	-	1.250.000,00	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	0,00	-	3.150.000,00	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	0,00	-	2.500.000,00	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	0,00	-	3.998.000,00	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	0,00	-	500.000,00	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	0,00	-	0,00	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	0,00	-	335.000,00	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	0,00	-	0,00	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	0,00	-	450.000,00	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	0,00	-	2.000.000,00	0,00
44	KECAMATAN PATUK	0,00	-	350.000,00	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	0,00	-	3.580.527,46	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	0,00	-	850.000,00	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	0,00	-	0,00	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	0,00	-	6.495.000,00	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	0,00	-	2.500.000,00	
Jumlah		14.543.093,27	171.402.785,74	85.479.301.067,42	424.460.558,19

Saldo aset tetap setelah hasil sensus sebesar Rp2.653.403.146.130,06 kemudian pada tahun 2018 terdapat penambahan Rp351.692.872.301,38 dan pengurangan sebesar Rp51.720.075.609,59 sehingga saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp2.953.375.942.821,85 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp841.387.958.731,04 dan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.111.987.984.090,81 .



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daftar Mutasi Aset Tetap 2018 berdasarkan Klasifikasi

Aset Tetap	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
Tanah	464.985.448.897,00	46.436.306.085,00	5.331.475.130,00	506.090.279.852,00
Peralatan dan Mesin	364.504.140.655,97	49.752.168.243,49	1.622.936.850,00	412.633.372.049,46
Gedung dan Bangunan	842.353.084.616,06	98.668.737.612,08	2.715.240.288,90	938.306.581.939,24
Jalan, Irigasi dan Jaringan	930.275.182.841,86	148.187.535.315,96	13.960.815.551,15	1.064.501.902.606,67
Aset Tetap Lainnya	23.829.536.735,64	5.906.263.638,85	1.288.000,00	29.734.512.374,48
Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.455.752.383,54	2.741.861.406,00	28.088.319.789,54	2.109.294.000,00
Sub Jumlah	2.653.403.146.130,06	351.692.872.301,38	51.720.075.609,59	2.953.375.942.821,85
Akumulasi Penyusutan	(859.595.794.939,12)			(841.387.958.731,04)
Jumlah	1.793.807.351.190,94			2.111.987.984.090,81

Aset Tetap	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
TANAH	464.985.448.897,00	46.436.306.085,00	5.331.475.130,00	506.090.279.852,00
Tanah	464.985.448.897,00	46.436.306.085,00	5.331.475.130,00	506.090.279.852,00
PERALATAN & MESIN	364.504.140.655,97	49.752.168.243,49	1.622.936.850,00	412.633.372.049,46
Alat-alat Berat/Besar	12.995.303.264,00	1.687.956.646,00	2.500.000,00	14.680.759.910,00
Alat-alat Angkutan	84.827.507.028,07	6.424.785.002,50	1.562.940.350,00	89.689.351.680,57
Alat-alat Bengkel	9.252.808.093,88	1.394.136.970,30	0,00	10.646.945.064,18
Alat Pertanian dan Peternakan	3.270.783.924,46	88.169.800,01	0,00	3.358.953.724,47
Alat-alat Kantor & Rumah	175.742.694.120,73	23.404.988.583,93	57.496.500,00	199.090.186.204,66
Alat Studio dan Komunikasi	16.281.345.823,05	1.842.613.788,19	0,00	18.123.959.611,24
Alat-alat Kedokteran	33.312.089.918,52	12.420.480.905,50	0,00	45.732.570.824,02
Alat-alat Laboratorium	28.629.435.183,26	2.422.386.547,06	0,00	31.051.821.730,32
Alat-alat Keamanan	192.173.300,00	66.650.000,00	0,00	258.823.300,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	842.353.084.616,06	98.668.737.612,08	2.715.240.288,90	938.306.581.939,24
Bangunan Gedung	790.308.658.057,99	93.539.930.616,90	2.670.527.288,90	881.178.061.385,99
Bangunan Monumen	52.044.426.558,07	5.128.806.995,18	44.713.000,00	57.128.520.553,25
JALAN, IRIGASI & JARINGAN	930.275.182.841,86	148.187.535.315,96	13.960.815.551,15	1.064.501.902.606,67
Jalan dan Jembatan	765.732.738.100,55	117.588.876.437,54	269.845.211,15	883.051.769.326,94
Bangunan Air (Irigasi)	105.411.672.581,87	18.517.092.424,62	0,00	123.928.765.006,49
Instalasi	19.663.016.342,00	5.483.284.399,80	0,00	25.146.300.741,80
Jaringan	39.467.755.817,44	6.598.282.054,00	13.690.970.340,00	32.375.067.531,44
ASET TETAP LAINNYA	23.829.536.735,64	5.906.263.638,85	1.288.000,00	29.734.512.374,48
Buku dan Perpustakaan	7.634.920.498,81	4.002.117.667,69	0,00	11.637.038.166,50
Barang bercorak Kesenian/ Bud.	11.085.659.405,32	1.351.241.846,16	0,00	12.436.901.251,48
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	408.562.257,50	305.352.000,00	1.288.000,00	712.626.257,50
Aset Tetap Renovasi	4.700.394.574,00	247.552.125,00	0,00	4.947.946.699,00
KONS. DLM Pengerjaan	27.455.752.383,54	2.741.861.406,00	28.088.319.789,54	2.109.294.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.455.752.383,54	2.741.861.406,00	28.088.319.789,54	2.109.294.000,00
Jumlah	2.653.403.146.130,06	351.692.872.301,38	51.720.075.609,59	2.953.375.942.821,85



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rekapitulasi atas rincian mutasi Aset Tetap selama Tahun 2018 berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Daftar Mutasi Aset Tetap 2018 berdasarkan OPD

No	Nama OPD	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	628.491.671.699,71	49.294.570.910,94	2.879.119.008,51	674.907.123.602,14
2	DINAS KESEHATAN	130.313.206.232,96	15.919.121.066,30	624.770.333,03	145.607.556.966,23
3	RSUD WONOSARI	89.390.151.384,00	14.507.444.020,00	788.544.000,00	103.109.051.404,00
4	DPUPRKP	1.207.956.656.267,67	175.957.204.495,47	31.360.713.775,58	1.352.553.146.987,56
5	SATPOL PP	2.191.324.346,00	-	-	2.191.324.346,00
6	DINAS SOSIAL	593.652.959,00	483.952.950,00	-	1.077.605.909,00
7	DISNAKERTRANS	9.155.492.270,31	518.264.500,00	7.049.000,00	9.666.707.770,31
8	DP3AKBPM	10.501.776.332,92	926.652.040,00	-	11.428.428.372,92
9	DIPERTARUNG	40.679.037.055,00	44.202.256.985,00	-	84.881.294.040,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.355.596.919,83	5.229.284.746,00	1.288.000,00	25.583.593.665,83
11	DISDUKCAPIL	7.908.284.520,33	401.518.120,00	2.722.500,00	8.307.080.140,33
12	DINAS PERHUBUNGAN	60.630.246.051,09	9.693.297.968,94	6.793.505.468,94	63.530.038.551,09
13	DISKOMINFO	4.190.108.099,00	1.188.318.335,00	40.000.000,00	5.338.426.434,00
14	DISKOP UKM	818.786.737,00	877.818.550,00	-	1.696.605.287,00
15	DPMP	5.739.409.831,00	528.001.920,00	-	6.267.411.751,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	1.082.433.548,53	201.318.500,00	-	1.283.752.048,53
17	DPK	8.473.122.912,99	667.993.445,00	-	9.141.116.357,99
18	DKP	19.757.945.339,00	1.220.944.875,00	293.969.000,00	20.684.921.214,00
19	DINAS PARIWISATA	39.095.998.983,78	6.258.218.120,00	-	45.354.217.103,78
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	37.247.120.958,90	2.123.794.564,30	-	39.370.915.523,20
21	DISPERINDAG	78.955.216.810,67	11.388.561.422,50	650.320.681,67	89.693.457.551,50
22	INSPEKTORAT DAERAH	6.168.961.013,04	141.252.285,00	-	6.310.213.298,04
23	BAPPEDA	3.977.825.310,50	166.450.000,00	-	4.144.275.310,50
24	BKAD	27.025.892.121,59	2.635.365.005,93	1.545.248.730,93	28.116.008.396,59
25	BKPPD	11.729.733.981,65	109.118.900,00	-	11.838.852.881,65
26	BPBD	6.223.443.664,00	1.674.817.000,00	-	7.898.260.664,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	148.081.296.411,16	3.269.068.750,00	5.281.475.130,00	146.068.890.031,16
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	13.670.330.075,86	653.155.500,00	-	14.323.485.575,86
31	BAKESBANGPOL	2.675.033.939,89	143.699.572,00	-	2.818.733.511,89
32	KECAMATAN WONOSARI	806.693.795,93	82.635.000,00	301.219.980,93	588.108.815,00
33	KECAMATAN PALIYAN	1.622.775.842,61	63.625.000,00	-	1.686.400.842,61
34	KECAMATAN PANGGANG	2.227.030.073,00	123.450.000,00	1.008.405.000,00	1.342.075.073,00
35	KECAMATAN TEPUS	934.883.829,84	39.500.000,00	-	974.383.829,84
36	KECAMATAN RONGKOP	2.181.610.975,04	59.082.300,00	-	2.240.693.275,04
37	KECAMATAN SEMANU	1.366.728.978,33	172.690.950,00	127.500.000,00	1.411.919.928,33
38	KECAMATAN PONJONG	1.493.750.047,28	66.130.000,00	-	1.559.880.047,28
39	KECAMATAN KARANGMOJO	1.543.629.033,98	77.000.000,00	14.000.000,00	1.606.629.033,98
40	KECAMATAN PLAYEN	1.190.650.087,00	56.000.000,00	-	1.246.650.087,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	1.786.774.402,00	15.399.440,00	-	1.802.173.842,00
42	KECAMATAN NGAWEN	1.831.280.750,73	37.360.000,00	-	1.868.640.750,73
43	KECAMATAN SEMIN	2.152.783.050,92	104.856.700,00	-	2.257.639.750,92
44	KECAMATAN PATUK	2.789.379.332,00	33.568.028,00	-	2.822.947.360,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	2.433.822.587,53	72.434.500,00	-	2.506.257.087,53
46	KECAMATAN GEDANGSARI	1.248.435.015,00	50.140.000,00	225.000,00	1.298.350.015,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	1.934.786.246,65	184.700.000,00	-	2.119.486.246,65
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	1.142.636.090,95	24.935.836,00	-	1.167.571.926,95
49	KECAMATAN PURWOSARI	1.635.740.213,89	47.900.000,00	-	1.683.640.213,89
Jumlah		2.653.403.146.130,06	351.692.872.301,38	51.720.075.609,59	2.953.375.942.821,85

Pada tahun 2018 terdapat Penambahan Aset Tetap, diantaranya berasal dari:

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2018	Rp	295.291.965.664,28
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	18.889.462.590,53
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain	Rp	10.835.332.150,00
- Koreksi pencatatan	Rp	26.676.111.896,57



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Penambahan aset tetap yang berasal dari Hibah/Hadiah/Perolehan lain terdapat pada 15 OPD sebagai berikut:

No	Nama OPD	Nilai	Keterangan
1	Disdikpora	7.533.791.310,00	Dari Komite, Pihak Ketiga, Kementerian berupa buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan
2	Rumah Sakit Umum Daerah	16.888.850,00	Dari UGM berupa Alat Laboratorium Umum
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	442.084.000,00	Dari Pusat berupa Perkakas Bengkel Service Rp21.080.000,00 dan bangunan gedung kanor di UPT BLK senilai Rp192.819.000,00 serta Rp228.185.000,00
4	DP3AKBPM&D	37.842.000,00	Dari Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 2 sepeda motor Vario @ Rp18.921.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000,00	CSR BRI Syariah berupa 4 unit kendaraan bermotor roda tiga total senilai Rp100.000.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	860.000,00	Hadiah lomba dari Perpustakaan berupa hardisk external senilai Rp860.000,00
7	Dinas Koperasi dan UKM	731.845.000,00	Dari Pusat berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Pasar Mulusan) senilai Rp731.845.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	385.910.990,00	Dari PNRI berupa 1 mobil 308.100.000,00 perpustakaan keliling Dari PNRI berupa genset 3.200.000,00 Dari PNRI berupa 1 laptop senilai Rp9.095.000,00, TV LED senilai Rp15.500.000,00, modem senilai Rp775.000,00 serta layar proyektor senilai Rp577.600,00 Dari PNRI berupa 1 proyektor mini 8.389.590,00 Dari PNRI 404 buku IPU 40.273.800,00
9	BKAD	1.680.000,00	Hadiah lomba dari Perpustakaan berupa hardisk scanner senilai Rp1.680.000,00
10	BKPPD	3.385.000,00	Hadiah lomba dari Perpustakaan berupa Laptop dan softcase senilai Rp3.385.000,00
11	BPBD	1.485.120.000,00	Dari BNPB berupa: - 2 sepeda motor @ 26.587.000 - 2 mobil log pal @ 144.500.000 - 1 mobil log pal 225.700.000 - 1 mobil tangki air 323.565.000 - 1 knock down container 437.104.000 - 1 file server 37.776.000 - 3 PC @ 13.206.000 - 1 printer 1.267.000 - 1 LCD 9.649.000 - 1 stabilizer 11.786.000 - 1 UPS 2.624.000 - 1 jaringan komunikasi data 17.500.000 - 1 radio 24.147.000 - 1 faxcile 3.686.000 - 1 switch 3.328.000 - 1 switch 5.196.000
12	Kecamatan Wonosari	3.385.000,00	Hadiah lomba dari Perpustakaan berupa Laptop dan softcase senilai Rp3.385.000,00
13	Kecamatan Panggang	90.000.000,00	Dari masyarakat berupa tempat ibadah senilai Rp90.000.000,00
14	Kecamatan Ponjong	1.680.000,00	Hadiah lomba dari Perpustakaan berupa hardisk scanner senilai Rp1.680.000,00
15	Kecamatan Patuk	860.000,00	Hadiah lomba dari Perpustakaan berupa hardisk external senilai Rp860.000,00
Total		10.835.332.150,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Berikut ini daftar Penambahan Aset Tetap berdasarkan Klasifikasi:

Aset Tetap	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
Tanah	43.911.306.085,00	25.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
Peralatan dan Mesin	44.473.966.343,86	1.491.193.950,00	3.049.958.152,00	737.049.797,63
Gedung dan Bangunan	66.582.244.977,61	16.695.396.453,53	7.547.412.978,00	7.843.683.202,94
Jalan, Irigasi dan Jaringan	131.907.205.232,96	677.872.187,00	7.079.000,00	15.595.378.896,00
Aset Tetap Lainnya	5.675.381.618,85	0,00	230.882.020,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.741.861.406,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap	295.291.965.664,28	18.889.462.590,53	10.835.332.150,00	26.676.111.896,57
		351.692.872.301,38		

Penambahan Aset Tetap berdasarkan OPD, sebagai berikut:

Penambahan Aset Tetap berdasarkan OPD, sebagai berikut:					
No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	38.976.490.600,94	-	7.533.791.310,00	2.784.289.000,00
2	DINAS KESEHATAN	15.433.788.405,30	-	-	485.332.661,00
3	RSUD WONOSARI	14.052.565.170,00	-	16.888.850,00	437.990.000,00
4	DPUPRKP	146.351.498.756,54	17.097.048.659,60	-	12.508.657.079,33
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	272.752.950,00	211.200.000,00	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	76.180.500,00	-	442.084.000,00	0,00
8	DP3AKBPM	888.810.040,00	-	37.842.000,00	0,00
9	DIPERTARUNG	44.202.256.985,00	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.985.519.746,00	143.765.000,00	100.000.000,00	0,00
11	DISDUKCAPIL	189.458.120,00	211.200.000,00	860.000,00	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	2.899.792.500,00	-	-	6.793.505.468,94
13	DISKOMINFO	1.068.268.335,00	120.050.000,00	-	0,00
14	DISKOP UKM	131.215.950,00	14.757.600,00	731.845.000,00	0,00
15	DPMPT	527.351.920,00	-	-	650.000,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	201.318.500,00	-	-	0,00
17	DPK	282.082.455,00	-	385.910.990,00	0,00
18	DKP	918.025.875,00	-	-	302.919.000,00
19	DINAS PARIWISATA	6.147.668.120,00	110.550.000,00	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	2.005.669.100,00	-	-	118.125.464,30
21	DISPERINDAG	10.757.110.599,50	14.757.600,00	-	616.693.223,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	141.252.285,00	-	-	0,00
23	BAPPEDA	166.450.000,00	-	-	0,00
24	BKAD	2.292.465.025,00	341.219.980,93	1.680.000,00	0,00
25	BKPPD	105.733.900,00	-	3.385.000,00	0,00
26	BPBD	189.697.000,00	-	1.485.120.000,00	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	288.105.000,00	480.963.750,00	-	2.500.000.000,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	653.155.500,00	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	143.699.572,00	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	79.250.000,00	-	3.385.000,00	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	63.625.000,00	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	33.000.000,00	-	90.000.000,00	450.000,00
35	KECAMATAN TEPUS	39.500.000,00	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	59.082.300,00	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	45.190.950,00	-	-	127.500.000,00
38	KECAMATAN PONJONG	64.450.000,00	-	1.680.000,00	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	77.000.000,00	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	56.000.000,00	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	15.399.440,00	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	20.910.000,00	16.450.000,00	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	104.856.700,00	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	32.708.028,00	-	860.000,00	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	72.434.500,00	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	50.140.000,00	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	57.200.000,00	127.500.000,00	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	24.935.836,00	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	47.900.000,00	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap		295.291.965.664,28	18.889.462.590,53	10.835.332.150,00	26.676.111.896,57
		351.692.872.301,38			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sedangkan Pengurangan Aset Tetap pada tahun 2018, antara lain terdiri dari:

- Hibah	Rp	3.082.695.110,93
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	Rp	1.681.346.971,00
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	18.874.704.990,53
- Koreksi pencatatan	Rp	28.081.328.537,13

Pengurangan aset tetap yang berupa hibah terdapat pada 2 OPD sebagai berikut:

No	Nama OPD	Nilai Hibah	Keterangan
1	BKAD	301.219.980,93	Hibah Tanah Wonosari ke Propinsi Rp25.000.000,00 dan hibah bangunan gedung ke Propinsi berupa: - gedung KPU 121.995.980,93 - gedung KPU 120.224.000,00 - tempat ibadah 14.000.000,00 - rumah negara 20.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	2.781.475.130,00	Hibah terminal tipe A Kementrian Perhubungan Rp2.465.000.000,00 - Hibah KPU ke Provinsi Rp233.399.652,00 dan Rp83.075.478,00
	Total	3.082.695.110,93	

Terdapat Penyertaan Modal berupa Aset Tetap milik DPU ke PDAM sebagai Berikut:

No	Nama OPD	Nilai	Keterangan
1	DPUPRKP	14.067.480.115,98	Penyertaan modal ke PDAM berupa: - Reservoir dan jaringan listrik 492.619.000,00 - Jaringan air bersih 899.476.000,00 - Saluran Pembawa air bersih 481.730.950,00 - SPAM IKK Rongkop 9.307.483.390,00 - Jaringan air bersih 1.560.350.000,00 - Jaringan listrik 949.311.000,00

Mekanisme penghapusan atas aset tetap yang rusak berat adalah melalui proses reklasifikasi aset tetap yang rusak berat ke aset lainnya, dan jumlah aset tetap yang rusak berat yang direklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp1.681.346.971, terdapat pada 4 OPD yaitu Disperindag, Kecamatan Panggang, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Gedangsari .

Mutasi antar OPD sebesar Rp18.874.704.990,53 terdapat pada 5 OPD yaitu Diskominfo, Disperindag, BKAD, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Semanu.

Berikut ini daftar Pengurangan Aset Tetap berdasarkan Klasifikasi:

Aset Tetap	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
Tanah	2.806.475.130,00	0,00	25.000.000,00	2.500.000.000,00
Peralatan dan Mesin	0,00	225.000,00	1.476.436.350,00	146.275.500,00
Gedung dan Bangunan	276.219.980,93	1.484.936.971,00	276.219.980,93	677.863.356,04
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	13.960.815.551,15
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	196.185.000,00	17.097.048.659,60	10.795.086.129,94
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap	3.082.695.110,93	1.681.346.971,00	18.874.704.990,53	28.081.328.537,13
			51.720.075.609,59	

Pengurangan Aset Tetap berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	0,00	22.000.000,00	0,00	2.857.119.008,51
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	624.770.333,03
3	RSUD WONOSARI	0,00	0,00	0,00	788.544.000,00
4	DPUPRKP	0,00	196.185.000,00	17.097.048.659,60	14.067.480.115,98



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
5	SATPOL PP	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DISNAKERTRANS	0,00	0,00	0,00	7.049.000,00
8	DP3AKBPMD	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DIPERTARUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00
11	DISDUKCAPIL	0,00	0,00	0,00	2.722.500,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	6.793.505.468,94
13	DISKOMINFO	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
14	DISKOP UKM	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DPMPT	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DKP	0,00	0,00	0,00	293.969.000,00
19	DINAS PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DISPERINDAG	0,00	440.531.971,00	64.907.600,00	144.881.110,67
22	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BKAD	301.219.980,93	0,00	1.244.028.750,00	0,00
25	BKPPD	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	2.781.475.130,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BAKESBANGPOL	0,00	0,00	0,00	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	0,00	0,00	301.219.980,93	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	0,00	0,00	0,00	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	0,00	1.008.405.000,00	0,00	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	0,00	0,00	0,00	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	0,00	0,00	0,00	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	0,00	0,00	127.500.000,00	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	0,00	0,00	0,00	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	0,00	0,00	0,00	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	0,00	0,00	0,00	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
44	KECAMATAN PATUK	0,00	0,00	0,00	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	0,00	225.000,00	0,00	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	0,00	0,00	0,00	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap		3.082.695.110,93	1.681.346.971,00	18.874.704.990,53	28.081.328.537,13
		51.720.075.609,59			

A. TANAH

..... **Rp 506.090.279.852,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2018. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 43 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Aset Tetap Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

a. Pada tahun 2018 terdapat Penambahan aset Tanah sebesar Rp46.436.306.085, dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2018	Rp	43.911.306.085,00
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	25.000.000,00
- Hibah	Rp	0,00
- Koreksi pencatatan	Rp	2.500.000.000,00

Penambahan tanah yang berasal dari belanja 2018 sebesar Rp43.911.306.085, terdapat pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp25.000.000, terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Terdapat koreksi pencatatan sebesar Rp2.500.000.000, terdapat pada Sekretariat Daerah berupa penyesuaian terminal tipe A Kementerian Perhubungan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b. Pada tahun 2018 terdapat Pengurangan aset Tanah sebesar Rp5.331.475.130, dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah/Hadiah/Perolehan lain Rp 2.806.475.130,00
- Mutasi keluar antar OPD Rp 25.000.000,00

Hibah aset tanah kepada Propinsi berupa tanah Wonosari sebesar Rp25.000.000, terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah serta pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.781.475.130, berupa Hibah terminal tipe A Kementerian Perhubungan Rp2.465.000.000,00 dan ke Provinsi sebesar Rp233.399.652,00 dan Rp83.075.478,00.

Mutasi keluar antar OPD sebesar Rp25.000.000, terdapat pada Kecamatan Wonosari berupa tanah untuk bangunan gedung tempat kerja.

Daftar Mutasi Tanah 2018

No	Nama OPD	Saldo Akhir Setelah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	15.096.112.974,00	-	-	15.096.112.974,00
2	DINAS KESEHATAN	1.197.210.000,00	-	-	1.197.210.000,00
3	RSUD WONOSARI	417.390.000,00	-	-	417.390.000,00
4	DPUPRKP	277.838.336.667,00	-	-	277.838.336.667,00
5	SATPOL PP	-	-	-	-
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
7	DISNAKERTRANS	1.071.800.000,00	-	-	1.071.800.000,00
8	DP3AKBPMD	2.835.000,00	-	-	2.835.000,00
9	DIPERTARUNG	37.925.744.572,00	43.911.306.085,00	-	81.837.050.657,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	908.286.145,00	-	-	908.286.145,00
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	-
12	DINAS PERHUBUNGAN	210.000.000,00	-	-	210.000.000,00
13	DISKOMINFO	-	-	-	-
14	DISKOP UKM	-	-	-	-
15	DPMPT	-	-	-	-
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-
17	DPK	23.800.000,00	-	-	23.800.000,00
18	DKP	1.602.035.000,00	-	-	1.602.035.000,00
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	1.507.267.000,00	-	-	1.507.267.000,00
21	DISPERINDAG	9.160.727.500,00	-	-	9.160.727.500,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
23	BAPPEDA	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
24	BKAD	1.266.390.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	1.266.390.000,00
25	BKPPD	25.126.560,00	-	-	25.126.560,00
26	BPBD	-	-	-	-
27	SEKRETARIAT DAERAH	115.407.697.179,00	2.500.000.000,00	5.281.475.130,00	112.626.222.049,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	-
29	DPRD	-	-	-	-
30	SEKRETARIAT DPRD	184.575.000,00	-	-	184.575.000,00
31	BAKESBANGPOL	569.181.600,00	-	-	569.181.600,00
32	KECAMATAN WONOSARI	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
33	KECAMATAN PALIYAN	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	-
35	KECAMATAN TEPUS	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
36	KECAMATAN RONGKOP	76.250.000,00	-	-	76.250.000,00
37	KECAMATAN SEMANU	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
38	KECAMATAN PONJONG	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	-
40	KECAMATAN PLAYEN	75.750.000,00	-	-	75.750.000,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	134.840.700,00	-	-	134.840.700,00
42	KECAMATAN NGAWEN	71.568.000,00	-	-	71.568.000,00
43	KECAMATAN SEMIN	25.000,00	-	-	25.000,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	-
45	KECAMATAN SAPTOSARI	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	-
47	KECAMATAN GIRISUBO	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	-
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	-
Jumlah		464.985.448.897,00	46.436.306.085,00	5.331.475.130,00	506.090.279.852,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Penambahan Tanah berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
3	RSUD WONOSARI	-	-	-	-
4	DPUPRKP	-	-	-	-
5	SATPOL PP	-	-	-	-
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	-
8	DP3AKBPMD	-	-	-	-
9	DIPERTARUNG	43.911.306.085,00	-	-	-
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	-
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
13	DISKOMINFO	-	-	-	-
14	DISKOP UKM	-	-	-	-
15	DPMPPT	-	-	-	-
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-
17	DPK	-	-	-	-
18	DKP	-	-	-	-
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	-
21	DISPERINDAG	-	-	-	-
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
23	BAPPEDA	-	-	-	-
24	BKAD	-	25.000.000,00	-	-
25	BKPPD	-	-	-	-
26	BPBD	-	-	-	-
No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
27	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	2.500.000.000
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	-
29	DPRD	-	-	-	-
30	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	-
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	-
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	-
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	-
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	-
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	-
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	-
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	-
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	-
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	-
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	-
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	-
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	-
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	-
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	-
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	-
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	-
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	-
Jumlah Mutasi Tambah Tanah		43.911.306.085,00	25.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
		46.436.306.085,00			

Pengurangan Tanah berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
3	RSUD WONOSARI	-	-	-	-
4	DPUPRKP	-	-	-	-
5	SATPOL PP	-	-	-	-
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	-
8	DP3AKBPMD	-	-	-	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
9	DIPERTARUNG	-	-	-	-
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	-
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
13	DISKOMINFO	-	-	-	-
14	DISKOP UKM	-	-	-	-
15	DPMPPT	-	-	-	-
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-
17	DPK	-	-	-	-
18	DKP	-	-	-	-
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	-
21	DISPERINDAG	-	-	-	-
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
23	BAPPEDA	-	-	-	-
24	BKAD	25.000.000,00	-	-	-
25	BKPPD	-	-	-	-
26	BPBD	-	-	-	-
27	SEKRETARIAT DAERAH	2.781.475.130,00	-	-	2.500.000.000
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	-
29	DPRD	-	-	-	-
30	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	-
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	25.000.000,00	-
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	-
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	-
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	-
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	-
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	-
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	-
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	-
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	-
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	-
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	-
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	-
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	-
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	-
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	-
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	-
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	-
Jumlah Mutasi Kurang Tanah		2.806.475.130,00	0,00	25.000.000,00	2.500.000.000,00
		5.331.475.130,00			

B. PERALATAN DAN MESIN **Rp 412.633.372.049,46**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 43 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Aset Tetap Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Atas nilai peralatan dan mesin tersebut telah dilakukan penyusutan dan diperoleh nilai akumulasi penyusutan atas peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp288.296.361.911,84 sehingga nilai buku peralatan dan mesin menjadi sebesar Rp124.337.010.137,62. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

- Pada tahun 2018 telah dilakukan sensus terhadap aset tetap per 31 Desember 2017, yang mengubah saldo dan klasifikasi Peralatan dan Mesin, semula Rp412.125.188.148,77 menjadi Rp364.504.140.655,97.
- Penambahan atas Peralatan dan Mesin dari hasil sensus aset adalah sebesar Rp8.441.663.109,76 dan pengurangan aset tetap sebesar Rp56.062.710.602,56 sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daftar Mutasi Hasil Sensus Peralatan dan Mesin 2018

No	Nama OPD	Saldo Akhir 2017 Audited (Rp)	Mutasi Tambah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Kurang Sensus 2018 (Rp)	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	163.167.434.869,23	7.270.825.546,76	31.697.350.857,28	138.740.909.558,71
2	DINAS KESEHATAN	63.088.604.972,91	886.232.528,00	7.658.971.606,61	56.315.865.894,30
3	RSUD WONOSARI	34.477.477.609,00	94.704.000,00	2.150.911.892,00	32.421.269.717,00
4	DPUPRKP	9.505.809.206,26	24.025.000,00	506.036.849,33	9.023.797.356,93
5	SATPOL PP	2.351.112.725,41	-	230.317.729,41	2.120.794.996,00
6	DINAS SOSIAL	592.070.959,00	-	-	592.070.959,00
7	DISNAKERTRANS	3.362.841.887,00	7.049.000,00	431.531.498,00	2.938.359.389,00
8	DP3AKBPMD	5.989.407.193,92	-	51.906.861,00	5.937.500.332,92
9	DIPERTARUNG	1.860.597.723,00	-	192.148.240,00	1.668.449.483,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.966.973.345,00	-	465.558.887,50	8.501.414.457,50
11	DISDUKCAPIL	5.171.211.605,00	50.624.765,00	1.499.428.599,67	3.722.407.770,33
12	DINAS PERHUBUNGAN	12.806.747.769,00	-	1.589.660.438,89	11.217.087.330,11
13	DISKOMINFO	5.543.410.310,20	-	1.547.563.211,20	3.995.847.099,00
14	DISKOP UKM	866.774.687,00	-	48.387.950,00	818.386.737,00
15	DPMPT	1.421.423.547,00	33.246.670,00	246.128.336,00	1.208.541.881,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	833.320.387,53	-	62.081.839,00	771.238.548,53
17	DPK	3.189.040.018,00	45.705.600,00	96.736.776,00	3.138.008.842,00
18	DKP	8.761.743.241,00	-	888.216.292,00	7.873.526.949,00
19	DINAS PARIWISATA	3.253.723.347,07	-	260.530.747,01	2.993.192.600,06
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	13.263.739.041,06	-	1.957.205.786,49	11.306.533.254,57
21	DISPERINDAG	3.307.663.662,00	-	354.931.206,89	2.952.732.455,11
22	INSPEKTORAT DAERAH	1.947.916.836,66	-	58.008.428,00	1.889.908.408,66
23	BAPPEDA	2.655.259.614,78	-	386.496.554,00	2.268.763.060,78
24	BKAD	11.975.750.525,06	-	540.343.264,94	11.435.407.260,12
25	BKPPD	2.918.666.190,00	-	382.049.163,00	2.536.617.027,00
26	BPBD	5.953.953.164,00	-	153.967.500,00	5.799.985.664,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	14.048.441.904,00	-	1.328.619.034,00	12.719.822.870,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	8.558.656.431,00	-	407.135.343,00	8.151.521.088,00
31	BAKESBANGPOL	915.993.878,56	-	25.494.112,67	890.499.765,89
32	KECAMATAN WONOSARI	658.655.352,00	-	161.451.537,00	497.203.815,00
33	KECAMATAN PALIYAN	677.701.187,00	-	13.464.664,11	664.236.522,89
34	KECAMATAN PANGGANG	607.424.323,00	-	23.976.250,00	583.448.073,00
35	KECAMATAN TEPUS	758.429.187,00	6.500.000,00	81.152.857,16	683.776.329,84
36	KECAMATAN RONGKOP	581.973.433,89	1.500.000,00	25.785.000,00	557.688.433,89
37	KECAMATAN SEMANU	575.693.920,00	21.000.000,00	45.072.334,00	551.621.586,00
38	KECAMATAN PONJONG	599.713.675,00	-	18.386.875,00	581.326.800,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	501.013.900,34	-	62.851.000,00	438.162.900,34
40	KECAMATAN PLAYEN	497.923.087,00	-	33.217.500,00	464.705.587,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	508.451.977,00	-	37.655.375,00	470.796.602,00
42	KECAMATAN NGAWEN	658.763.394,00	-	17.266.500,00	641.496.894,00
43	KECAMATAN SEMIN	547.248.357,00	250.000,00	6.400.000,00	541.098.357,00
44	KECAMATAN PATUK	715.955.382,00	-	16.474.250,00	699.481.132,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	609.791.908,89	-	125.283.858,29	484.508.050,60
46	KECAMATAN GEDANGSARI	776.982.015,00	-	23.062.000,00	753.920.015,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	711.408.952,00	-	66.220.200,00	645.188.752,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	627.211.361,00	-	63.073.400,00	564.137.961,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	755.080.087,00	-	24.197.998,11	730.882.088,89
Jumlah		412.125.188.148,77	8.441.663.109,76	56.062.710.602,56	364.504.140.655,97

- Atas hasil sensus tersebut maka terdapat perubahan saldo maupun klasifikasi peralatan dan mesin pada seluruh OPD selain Dinas Sosial seperti tercantum pada tabel di atas.
- Sehingga dari hasil sensus tersebut diperoleh saldo awal setelah sensus atas peralatan dan mesin sebesar Rp364.504.140.655,97.
- c. **Penambahan aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2018 sebesar Rp49.752.168.243,49 dengan rincian sebagai berikut:**
 - Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2018 Rp 44.473.966.343,86
 - Mutasi masuk antar OPD Rp 1.491.193.950,00
 - Hibah/Hadiah/Perolehan Lain Rp 3.049.958.152,00
 - Koreksi pencatatan Rp 737.049.797,63



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Koreksi pencatatan sebesar Rp737.049.797,63 terdiri dari koreksi pencatatan pada RSUD sebesar Rp437.990.000, pada DPMPT sebesar Rp650.000,, pada DKP sebesar Rp8.950.000, serta pada Kecamatan Semanu Rp127.500.000,.

d. Pengurangan aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2018 sebesar Rp1.622.936.850, dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah	Rp	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	Rp	225.000,00
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	1.476.436.350,00
- Koreksi pencatatan	Rp	146.275.500,00

Koreksi pencatatan sebesar Rp146.275.500, terdapat pada RSUD sebesar Rp136.504.000, berupa reklasifikasi alat angkutan, bangunan gedung dan bangunan monumen, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp7.049.000, karena koreksi kesalahan input pada SIM Sensus berupa alat kantor dan rumah tangga dan pada Disdukcapil sebesar Rp2.722.500, karena reklasifikasi ke aset lainnya berupa alat kantor dan rumah tangga.

Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin 2018

No	Nama OPD	Saldo Akhir Setelah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	138.740.909.558,71	11.297.649.693,86	-	150.038.559.252,57
2	DINAS KESEHATAN	56.315.865.894,30	6.877.904.730,50	-	63.193.770.624,80
3	RSUD WONOSARI	32.421.269.717,00	11.833.544.900,00	136.504.000,00	44.118.310.617,00
4	DPUPRKP	9.023.797.356,93	5.517.341.433,33	-	14.541.138.790,26
5	SATPOL PP	2.120.794.996,00	-	-	2.120.794.996,00
6	DINAS SOSIAL	592.070.959,00	482.056.950,00	-	1.074.127.909,00
7	DISNAKERTRANS	2.938.359.389,00	78.340.500,00	7.049.000,00	3.009.650.889,00
8	DP3AKBPMD	5.937.500.332,92	797.037.040,00	-	6.734.537.372,92
9	DIPERTARUNG	1.668.449.483,00	290.950.900,00	-	1.959.400.383,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.501.414.457,50	951.536.046,00	-	9.452.950.503,50
11	DISDUKCAPIL	3.722.407.770,33	386.520.120,00	2.722.500,00	4.106.205.390,33
12	DINAS PERHUBUNGAN	11.217.087.330,11	605.282.000,00	-	11.822.369.330,11
13	DISKOMINFO	3.995.847.099,00	1.188.318.335,00	40.000.000,00	5.144.165.434,00
14	DISKOP UKM	818.386.737,00	145.973.550,00	-	964.360.287,00
15	DPMPT	1.208.541.881,00	378.774.920,00	-	1.587.316.801,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	771.238.548,53	201.318.500,00	-	972.557.048,53
17	DPK	3.138.008.842,00	397.605.670,00	-	3.535.614.512,00
18	DKP	7.873.526.949,00	88.523.000,00	-	7.962.049.949,00
19	DINAS PARIWISATA	2.993.192.600,06	307.366.450,00	-	3.300.559.050,06
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	11.306.533.254,57	511.856.564,30	-	11.818.389.818,87
21	DISPERINDAG	2.952.732.455,11	1.196.176.599,50	64.907.600,00	4.084.001.454,61
22	INSPEKTORAT DAERAH	1.889.908.408,66	122.715.285,00	-	2.012.623.693,66
23	BAPPEDA	2.268.763.060,78	166.450.000,00	-	2.435.213.060,78
24	BKAD	11.435.407.260,12	2.095.346.900,00	1.244.028.750,00	12.286.725.410,12
25	BKPPD	2.536.617.027,00	109.118.900,00	-	2.645.735.927,00
26	BPBD	5.799.985.664,00	1.674.817.000,00	-	7.474.802.664,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	12.719.822.870,00	684.733.750,00	-	13.404.556.620,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	8.151.521.088,00	279.380.500,00	-	8.430.901.588,00
31	BAKESBANGPOL	890.499.765,89	88.243.572,00	-	978.743.337,89
32	KECAMATAN WONOSARI	497.203.815,00	82.635.000,00	-	579.838.815,00
33	KECAMATAN PALIYAN	664.236.522,89	27.225.000,00	-	691.461.522,89
34	KECAMATAN PANGGANG	583.448.073,00	33.450.000,00	-	616.898.073,00
35	KECAMATAN TEPUS	683.776.329,84	39.500.000,00	-	723.276.329,84
36	KECAMATAN RONGKOP	557.688.433,89	25.769.000,00	-	583.457.433,89
37	KECAMATAN SEMANU	551.621.586,00	172.690.950,00	127.500.000,00	596.812.536,00
38	KECAMATAN PONJONG	581.326.800,00	66.130.000,00	-	647.456.800,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	438.162.900,34	60.500.000,00	-	498.662.900,34
40	KECAMATAN PLAYEN	464.705.587,00	36.000.000,00	-	500.705.587,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	470.796.602,00	15.399.440,00	-	486.196.042,00
42	KECAMATAN NGAWEN	641.496.894,00	37.360.000,00	-	678.856.894,00
43	KECAMATAN SEMIN	541.098.357,00	74.121.180,00	-	615.219.537,00
44	KECAMATAN PATUK	699.481.132,00	33.568.028,00	-	733.049.160,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	484.508.050,60	49.800.000,00	-	534.308.050,60
46	KECAMATAN GEDANGSARI	753.920.015,00	15.550.000,00	225.000,00	769.245.015,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	645.188.752,00	184.700.000,00	-	829.888.752,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	564.137.961,00	24.935.836,00	-	589.073.797,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	730.882.088,89	17.950.000,00	-	748.832.088,89
Jumlah		364.504.140.655,97	49.752.168.243,49	1.622.936.850,00	412.633.372.049,46



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Penambahan Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	10.266.109.581,86	-	1.031.540.112,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	6.877.904.730,50	-	-	0,00
3	RSUD WONOSARI	11.378.666.050,00	-	16.888.850,00	437.990.000,00
4	DPUPRKP	5.501.083.100,00	-	-	16.258.333,33
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	270.856.950,00	211.200.000,00	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	57.260.500,00	-	21.080.000,00	0,00
8	DP3AKBPMD	759.195.040,00	-	37.842.000,00	0,00
9	DIPERTARUNG	290.950.900,00	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	707.771.046,00	143.765.000,00	100.000.000,00	0,00
11	DISDUKCAPIL	174.460.120,00	211.200.000,00	860.000,00	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	605.282.000,00	-	-	0,00
13	DISKOMINFO	1.068.268.335,00	120.050.000,00	-	0,00
14	DISKOP UKM	131.215.950,00	14.757.600,00	-	0,00
15	DPMPT	378.124.920,00	-	-	650.000,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	201.318.500,00	-	-	0,00
17	DPK	51.968.480,00	-	345.637.190,00	0,00
18	DKP	79.573.000,00	-	-	8.950.000,00
19	DINAS PARIWISATA	196.816.450,00	110.550.000,00	-	0,00
20	DIN PERTANIAN & PANGAN	393.731.100,00	-	-	118.125.464,30
21	DISPERINDAG	1.154.292.999,50	14.757.600,00	-	27.126.000,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	122.715.285,00	-	-	0,00
23	BAPPEDA	166.450.000,00	-	-	0,00
24	BKAD	2.053.666.900,00	40.000.000,00	1.680.000,00	0,00
25	BKPPD	105.733.900,00	-	3.385.000,00	0,00
26	BPBD	189.697.000,00	-	1.485.120.000,00	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	203.770.000,00	480.963.750,00	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	279.380.500,00	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	88.243.572,00	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	79.250.000,00	-	3.385.000,00	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	27.225.000,00	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	33.000.000,00	-	-	450.000,00
35	KECAMATAN TEPUS	39.500.000,00	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	25.769.000,00	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	45.190.950,00	-	-	127.500.000,00
38	KECAMATAN PONJONG	64.450.000,00	-	1.680.000,00	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	60.500.000,00	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	36.000.000,00	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	15.399.440,00	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	20.910.000,00	16.450.000,00	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	74.121.180,00	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	32.708.028,00	-	860.000,00	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	49.800.000,00	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	15.550.000,00	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	57.200.000,00	127.500.000,00	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	24.935.836,00	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	17.950.000,00	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin		44.473.966.343,86	1.491.193.950,00	3.049.958.152,00	737.049.797,63
		49.752.168.243,49			

Pengurangan Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	-	-	0,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	0,00
3	RSUD WONOSARI	-	-	-	136.504.000,00
4	DPUPRKP	-	-	-	0,00
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	7.049.000,00
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0,00
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	2.722.500,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	0,00
13	DISKOMINFO	-	-	40.000.000,00	0,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPT	-	-	-	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	-	-	-	0,00
18	DKP	-	-	-	0,00
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	0,00
21	DISPERINDAG	-	-	64.907.600,00	0,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	-	-	1.244.028.750,00	0,00
25	BKPPD	-	-	-	0,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	127.500.000,00	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	225.000,00	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin		0,00	225.000,00	1.476.436.350,00	146.275.500,00
		1.622.936.850,00			

C. GEDUNG DAN BANGUNAN **Rp 938.306.581.939,24**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 43 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Atas nilai gedung dan bangunan tersebut telah dilakukan penyusutan dan diperoleh nilai akumulasi penyusutan atas gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp82.173.587.612,33 sehingga nilai buku gedung dan bangunan menjadi sebesar Rp856.132.994.326,91. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

- Pada tahun 2018 telah dilakukan sensus terhadap aset tetap per 31 Desember 2017, yang mengubah saldo Gedung dan Bangunan, semula Rp892.508.452.987,16 menjadi Rp842.353.084.616,06.
- Terdapat penambahan atas Gedung dan Bangunan dari hasil sensus aset sebesar Rp35.909.236.809,82 sedangkan pengurangannya sebesar Rp86.064.605.180,92 sebagai berikut:

Daftar Mutasi Hasil Sensus Gedung dan Bangunan 2018

No	Nama OPD	Saldo Akhir 2017 Audited (Rp)	Mutasi Tambah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Kurang Sensus 2018 (Rp)	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	457.869.975.263,73	6.249.309.811,82	22.858.808.119,37	441.260.476.956,18
2	DINAS KESEHATAN	75.755.268.298,00	-	5.036.100.900,00	70.719.167.398,00
3	RSUD WONOSARI	54.116.962.551,00	-	-	54.116.962.551,00
4	DPUPRKP	24.680.203.129,91	-	42.055.105,00	24.638.148.024,91



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	5.519.281.881,31	-	423.790.000,00	5.095.491.881,31
8	DP3AKBPMD	4.557.941.000,00	-	-	4.557.941.000,00
9	DIPERTARUNG	1.082.843.000,00	-	-	1.082.843.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.703.392.953,83	-	436.683.149,50	9.266.709.804,33
No	Nama OPD	Saldo Akhir 2017 Audited (Rp)	Mutasi Tambah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Kurang Sensus 2018 (Rp)	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)
11	DISDUKCAPIL	4.172.523.250,00	-	-	4.172.523.250,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	25.018.197.402,10	447.796.000,00	1.081.327.433,00	24.384.665.969,10
13	DISKOMINFO	193.511.000,00	-	-	193.511.000,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPT	4.528.562.250,00	-	-	4.528.562.250,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	282.450.000,00	-	-	282.450.000,00
17	DPK	4.472.400.872,75	-	10.037.000,00	4.462.363.872,75
18	DKP	10.592.354.390,00	-	1.856.833.000,00	8.735.521.390,00
19	DINAS PARIWISATA	23.516.838.288,31	-	100.870.298,14	23.415.967.990,17
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	22.476.620.038,20	-	184.126.200,00	22.292.493.838,20
21	DISPERINDAG	89.274.895.905,55	29.195.291.998,00	53.589.384.975,91	64.880.802.927,64
22	INSPEKTORAT DAERAH	4.262.269.278,38	-	-	4.262.269.278,38
23	BAPPEDA	1.698.860.549,72	-	-	1.698.860.549,72
24	BKAD	13.904.091.731,47	8.839.000,00	41.020.000,00	13.871.910.731,47
25	BKPPD	9.123.609.594,65	-	-	9.123.609.594,65
26	BPBD	417.958.000,00	-	-	417.958.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	19.674.041.188,16	-	20.550.000,00	19.653.491.188,16
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	5.243.605.187,86	-	-	5.243.605.187,86
31	BAKESBANGPOL	1.020.334.230,00	-	-	1.020.334.230,00
32	KECAMATAN WONOSARI	276.219.980,93	-	-	276.219.980,93
33	KECAMATAN PALIYAN	889.866.819,72	8.000.000,00	-	897.866.819,72
34	KECAMATAN PANGGANG	1.810.137.000,00	-	184.660.000,00	1.625.477.000,00
35	KECAMATAN TEPUS	401.894.000,00	-	198.359.000,00	203.535.000,00
36	KECAMATAN RONGKOP	1.529.970.441,15	-	-	1.529.970.441,15
37	KECAMATAN SEMANU	766.837.392,33	-	-	766.837.392,33
38	KECAMATAN PONJONG	895.933.247,28	-	-	895.933.247,28
39	KECAMATAN KARANGMOJO	1.093.296.133,64	-	-	1.093.296.133,64
40	KECAMATAN PLAYEN	632.622.000,00	-	-	632.622.000,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	1.171.602.000,00	-	-	1.171.602.000,00
42	KECAMATAN NGAWEN	1.101.795.856,73	-	-	1.101.795.856,73
43	KECAMATAN SEMIN	1.602.382.193,92	-	-	1.602.382.193,92
44	KECAMATAN PATUK	2.085.773.000,00	-	-	2.085.773.000,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	1.911.879.436,93	-	-	1.911.879.436,93
46	KECAMATAN GEDANGSARI	474.745.000,00	-	-	474.745.000,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	1.241.327.494,65	-	-	1.241.327.494,65
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	569.220.629,95	-	-	569.220.629,95
49	KECAMATAN PURWOSARI	893.959.125,00	-	-	893.959.125,00
Jumlah		892.508.452.987,16	35.909.236.809,82	86.064.605.180,92	842.353.084.616,06

- Dari hasil sensus tersebut diperoleh saldo awal setelah sensus atas gedung dan bangunan sebesar Rp842.353.084.616,06.

d. Penambahan aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2018 sebesar Rp98.668.737.612,08 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2018	Rp	66.582.244.977,61
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	16.695.396.453,53
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain	Rp	7.547.412.978,00
- Koreksi pencatatan	Rp	7.843.683.202,94

Koreksi taambah pencatatan atas gedung dan bangunan sebesar Rp7.843.683.202,94 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp485.332.661, pada Dishub sebesar Rp3.730.326.568,94 pada DKP sebesar Rp254.167.750, dan pada Disperindag sebesar Rp589.567.223,.

e. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2018 sebesar Rp2.715.240.288,9 dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah	Rp	276.219.980,93
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	Rp	1.484.936.971,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Mutasi keluar antar OPD	Rp	276.219.980,93
- Koreksi pencatatan	Rp	677.863.356,04

Daftar Mutasi Gedung dan Bangunan 2018

No	Nama OPD	Saldo Akhir Setelah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	441.260.476.956,18	26.103.274.468,21	94.830.008,51	467.268.921.415,88
2	DINAS KESEHATAN	70.719.167.398,00	8.462.697.031,00	139.437.672,03	79.042.426.756,97
3	RSUD WONOSARI	54.116.962.551,00	1.508.053.750,00	214.050.000,00	55.410.966.301,00
4	DPUPRKP	24.638.148.024,91	38.887.802.500,00	106.664.564,83	63.419.285.960,08
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	5.095.491.881,31	439.924.000,00	-	5.535.415.881,31
8	DP3AKBPMD	4.557.941.000,00	129.615.000,00	-	4.687.556.000,00
9	DIPERTARUNG	1.082.843.000,00	-	-	1.082.843.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.266.709.804,33	3.682.079.700,00	-	12.948.789.504,33
11	DISDUKCAPIL	4.172.523.250,00	14.998.000,00	-	4.187.521.250,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	24.384.665.969,10	4.462.318.568,94	-	28.846.984.538,04
13	DISKOMINFO	193.511.000,00	-	-	193.511.000,00
14	DISKOP UKM	-	731.845.000,00	-	731.845.000,00
15	DPMPT	4.528.562.250,00	149.227.000,00	-	4.677.789.250,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	282.450.000,00	-	-	282.450.000,00
17	DPK	4.462.363.872,75	189.820.000,00	-	4.652.183.872,75
18	DKP	8.735.521.390,00	749.548.750,00	-	9.485.070.140,00
19	DINAS PARIWISATA	23.415.967.990,17	664.141.170,00	-	24.080.109.160,17
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	22.292.493.838,20	1.508.198.300,00	-	23.800.692.138,20
21	DISPERINDAG	64.880.802.927,64	9.765.117.073,00	585.413.081,67	74.060.506.918,97
22	INSPEKTORAT DAERAH	4.262.269.278,38	18.537.000,00	-	4.280.806.278,38
23	BAPPEDA	1.698.860.549,72	-	-	1.698.860.549,72
24	BKAD	13.871.910.731,47	380.999.980,93	276.219.980,93	13.976.690.731,47
25	BKPPD	9.123.609.594,65	-	-	9.123.609.594,65
26	BPBD	417.958.000,00	-	-	417.958.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	19.653.491.188,16	79.485.000,00	-	19.732.976.188,16
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	5.243.605.187,86	371.476.000,00	-	5.615.081.187,86
31	BAKESBANGPOL	1.020.334.230,00	55.456.000,00	-	1.075.790.230,00
32	KECAMATAN WONOSARI	276.219.980,93	-	276.219.980,93	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	897.866.819,72	36.400.000,00	-	934.266.819,72
34	KECAMATAN PANGGANG	1.625.477.000,00	90.000.000,00	1.008.405.000,00	707.072.000,00
35	KECAMATAN TEPUS	203.535.000,00	-	-	203.535.000,00
36	KECAMATAN RONGKOP	1.529.970.441,15	33.313.300,00	-	1.563.283.741,15
37	KECAMATAN SEMANU	766.837.392,33	-	-	766.837.392,33
38	KECAMATAN PONJONG	895.933.247,28	-	-	895.933.247,28
39	KECAMATAN KARANGMOJO	1.093.296.133,64	16.500.000,00	14.000.000,00	1.095.796.133,64
40	KECAMATAN PLAYEN	632.622.000,00	20.000.000,00	-	652.622.000,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	1.171.602.000,00	-	-	1.171.602.000,00
42	KECAMATAN NGAWEN	1.101.795.856,73	-	-	1.101.795.856,73
43	KECAMATAN SEMIN	1.602.382.193,92	30.735.520,00	-	1.633.117.713,92
44	KECAMATAN PATUK	2.085.773.000,00	-	-	2.085.773.000,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	1.911.879.436,93	22.634.500,00	-	1.934.513.936,93
46	KECAMATAN GEDANGSARI	474.745.000,00	34.590.000,00	-	509.335.000,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	1.241.327.494,65	-	-	1.241.327.494,65
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	569.220.629,95	-	-	569.220.629,95
49	KECAMATAN PURWOSARI	893.959.125,00	29.950.000,00	-	923.909.125,00
Jumlah		842.353.084.616,06	98.668.737.612,08	2.715.240.288,90	938.306.581.939,24

Penambahan Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain(Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	17.014.421.490,21	-	6.304.563.978,00	2.784.289.000,00
2	DINAS KESEHATAN	7.977.364.370,00	-	-	485.332.661,00
3	RSUD WONOSARI	1.508.053.750,00	-	-	0,00
4	DPUPRKP	22.468.626.027,40	16.419.176.472,60	-	0,00
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	18.920.000,00	-	421.004.000,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
8	DP3AKBPMD	129.615.000,00	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.682.079.700,00	-	-	0,00
11	DISDUKCAPIL	14.998.000,00	-	-	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	731.992.000,00	-	-	3.730.326.568,94
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	-	-	731.845.000,00	0,00
15	DPMPPT	149.227.000,00	-	-	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	189.820.000,00	-	-	0,00
18	DKP	495.381.000,00	-	-	254.167.750,00
19	DINAS PARIWISATA	664.141.170,00	-	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	1.508.198.300,00	-	-	0,00
21	DISPERINDAG	9.175.549.850,00	-	-	589.567.223,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	18.537.000,00	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	104.780.000,00	276.219.980,93	-	0,00
25	BKPPD	-	-	-	0,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	79.485.000,00	-	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	371.476.000,00	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	55.456.000,00	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	36.400.000,00	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	90.000.000,00	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	33.313.300,00	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	16.500.000,00	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	20.000.000,00	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	30.735.520,00	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	22.634.500,00	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	34.590.000,00	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	29.950.000,00	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah Gedung Bangunan		66.582.244.977,61	16.695.396.453,53	7.547.412.978,00	7.843.683.202,94
		98.668.737.612,08			

Pengurangan Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	22.000.000,00	-	72.830.008,51
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	139.437.672,03
3	RSUD WONOSARI	-	-	-	214.050.000,00
4	DPUPRKP	-	-	-	106.664.564,83
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	0,00
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0,00
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	0,00
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPPT	-	-	-	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	-	-	-	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
18	DKP	-	-	-	0,00
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	0,00
21	DISPERINDAG	-	440.531.971,00	-	144.881.110,67
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	276.219.980,93	-	-	0,00
25	BKPPD	-	-	-	0,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	276.219.980,93	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	1.008.405.000,00	-	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	14.000.000,00	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang Gedung Bangunan		276.219.980,93	1.484.936.971,00	276.219.980,93	677.863.356,04
		2.715.240.288,90			

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN **Rp 1.064.501.902.606,67**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 43 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Atas nilai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut telah dilakukan penyusutan dan diperoleh nilai akumulasi penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp470.918.009.206,87 sehingga nilai buku jalan, irigasi, dan jaringan menjadi sebesar Rp593.583.893.399,8. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

- Pada tahun 2018 telah dilakukan sensus terhadap aset tetap per 31 Desember 2017, yang mengubah nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
- Terdapat mutasi tambah atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari hasil sensus aset sebesar Rp496.054.623,2 dan mutasi kurang sebesar Rp11.646.771.366,07 sehingga saldo awal aset tetap setelah sensus sebesar Rp930.275.182.841,86 sebagai berikut:

Daftar Mutasi Hasil Sensus Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2018

No	Nama OPD	Saldo Akhir 2017 Audited (Rp)	Mutasi Tambah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Kurang Sensus 2018 (Rp)	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	13.895.009.971,06	496.054.615,20	1.180.197.930,67	13.210.866.655,59
2	DINAS KESEHATAN	1.743.098.019,00	-	9.375.600,00	1.733.722.419,00
3	RSUD WONOSARI	4.404.389.151,00	-	1.999.593.853,00	2.404.795.298,00
4	DPUPRKP	879.249.656.699,81	-	4.921.336.634,58	874.328.320.065,23
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	48.518.000,00	-	-	48.518.000,00
8	DP3AKBPM	8.947.500,00	-	5.447.500,00	3.500.000,00
9	DIPERTARUNG	14.124.000,00	-	12.124.000,00	2.000.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.513.849.000,00	-	13.346.987,00	1.500.502.013,00
11	DISDUKCAPIL	12.285.000,00	-	400.000,00	11.885.000,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	20.658.854.650,00	-	2.645.313.067,06	18.013.541.582,94



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Saldo Akhir 2017 Audited (Rp)	Mutasi Tambah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Kurang Sensus 2018 (Rp)	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	400.000,00	-	-	400.000,00
15	DPMPT	10.200.000,00	-	10.000.000,00	200.000,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	28.745.000,00	-	-	28.745.000,00
17	DPK	134.491.522,00	-	-	134.491.522,00
18	DKP	1.592.475.500,00	-	58.399.000,00	1.534.076.500,00
19	DINAS PARIWISATA	13.281.270.191,31	-	605.763.397,76	12.675.506.793,55
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	1.862.157.008,63	-	3.097.500,00	1.859.059.508,63
21	DISPERINDAG	2.132.312.615,92	8,00	180.875.896,00	1.951.436.727,92
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	362.252.400,00	-	-	362.252.400,00
25	BKPPD	12.215.000,00	-	-	12.215.000,00
26	BPBD	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	207.616.162,00	-	1.500.000,00	206.116.162,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	11.990.000,00	-	-	11.990.000,00
31	BAKESBANGPOL	11.493.194,00	-	-	11.493.194,00
32	KECAMATAN WONOSARI	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00
33	KECAMATAN PALIYAN	10.672.500,00	-	-	10.672.500,00
34	KECAMATAN PANGGANG	16.970.000,00	-	-	16.970.000,00
35	KECAMATAN TEPUS	7.572.500,00	-	-	7.572.500,00
36	KECAMATAN RONGKOP	17.702.100,00	-	-	17.702.100,00
37	KECAMATAN SEMANU	18.270.000,00	-	-	18.270.000,00
38	KECAMATAN PONJONG	10.990.000,00	-	-	10.990.000,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	12.170.000,00	-	-	12.170.000,00
40	KECAMATAN PLAYEN	17.572.500,00	-	-	17.572.500,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	9.385.100,00	-	-	9.385.100,00
42	KECAMATAN NGAWEN	16.420.000,00	-	-	16.420.000,00
43	KECAMATAN SEMIN	9.277.500,00	-	-	9.277.500,00
44	KECAMATAN PATUK	4.125.200,00	-	-	4.125.200,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	16.435.100,00	-	-	16.435.100,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	19.770.000,00	-	-	19.770.000,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	9.277.500,00	-	-	9.277.500,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	10.899.000,00	-	-	10.899.000,00
Jumlah		941.425.899.584,73	496.054.623,20	11.646.771.366,07	930.275.182.841,86

c. Penambahan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2018 sebesar Rp148.187.535.315,96 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2017	Rp	131.907.205.232,96
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	677.872.187,00
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain	Rp	7.079.000,00
- Koreksi pencatatan	Rp	15.595.378.896,00

d. Pengurangan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2018 sebesar Rp13.960.815.551,15 dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah	Rp	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	Rp	0,00
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	0,00
- Koreksi pencatatan	Rp	13.960.815.551,15

Koreksi pencatatan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2018 sebesar Rp13.960.815.551,15 terdapat pada DPUPRKP dikarenakan terdapat aset tetap yang digunakan sebagai penyertaan modal ke PDAM.

Daftar Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2018

No	Nama OPD	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	13.210.866.655,59	6.561.500.380,02	-	19.772.367.035,61
2	DINAS KESEHATAN	1.733.722.419,00	340.504.898,80	-	2.074.227.317,80
3	RSUD WONOSARI	2.404.795.298,00	214.150.800,00	-	2.618.946.098,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
4	DPUPRKP	874.328.320.065,23	130.502.747.762,14	13.960.815.551,15	990.870.252.276,22
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	48.518.000,00	-	-	48.518.000,00
8	DP3AKBPMD	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
9	DIPERTARUNG	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.500.502.013,00	290.317.000,00	-	1.790.819.013,00
11	DISDUKCAPIL	11.885.000,00	-	-	11.885.000,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	18.013.541.582,94	4.625.697.400,00	-	22.639.238.982,94
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	400.000,00	-	-	400.000,00
15	DPMPT	200.000,00	-	-	200.000,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	28.745.000,00	-	-	28.745.000,00
17	DPK	134.491.522,00	-	-	134.491.522,00
18	DKP	1.534.076.500,00	100.619.125,00	-	1.634.695.625,00
19	DINAS PARIWISATA	12.675.506.793,55	5.286.710.500,00	-	17.962.217.293,55
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	1.859.059.508,63	103.739.700,00	-	1.962.799.208,63
21	DISPERINDAG	1.951.436.727,92	161.547.750,00	-	2.112.984.477,92
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	362.252.400,00	-	-	362.252.400,00
25	BKPPD	12.215.000,00	-	-	12.215.000,00
26	BPBD	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	206.116.162,00	-	-	206.116.162,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	11.990.000,00	-	-	11.990.000,00
31	BAKESBANGPOL	11.493.194,00	-	-	11.493.194,00
32	KECAMATAN WONOSARI	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00
33	KECAMATAN PALIYAN	10.672.500,00	-	-	10.672.500,00
34	KECAMATAN PANGGANG	16.970.000,00	-	-	16.970.000,00
35	KECAMATAN TEPUS	7.572.500,00	-	-	7.572.500,00
36	KECAMATAN RONGKOP	17.702.100,00	-	-	17.702.100,00
37	KECAMATAN SEMANU	18.270.000,00	-	-	18.270.000,00
38	KECAMATAN PONJONG	10.990.000,00	-	-	10.990.000,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	12.170.000,00	-	-	12.170.000,00
40	KECAMATAN PLAYEN	17.572.500,00	-	-	17.572.500,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	9.385.100,00	-	-	9.385.100,00
42	KECAMATAN NGAWEN	16.420.000,00	-	-	16.420.000,00
43	KECAMATAN SEMIN	9.277.500,00	-	-	9.277.500,00
44	KECAMATAN PATUK	4.125.200,00	-	-	4.125.200,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	16.435.100,00	-	-	16.435.100,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	19.770.000,00	-	-	19.770.000,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	9.277.500,00	-	-	9.277.500,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	10.899.000,00	-	-	10.899.000,00
Jumlah		930.275.182.841,86	148.187.535.315,96	13.960.815.551,15	1.064.501.902.606,67

Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	6.554.421.380,02	-	7.079.000,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	340.504.898,80	-	-	0,00
3	RSUD WONOSARI	214.150.800,00	-	-	0,00
4	DPUPRKP	117.332.476.829,14	677.872.187,00	-	12.492.398.746,00
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	0,00
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	290.317.000,00	-	-	0,00
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	1.562.518.500,00	-	-	3.063.178.900,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPT	-	-	-	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	-	-	-	0,00
18	DKP	60.817.875,00	-	-	39.801.250,00
19	DINAS PARIWISATA	5.286.710.500,00	-	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	103.739.700,00	-	-	0,00
21	DISPERINDAG	161.547.750,00	-	-	0,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	-	-	-	0,00
25	BKPPD	-	-	-	0,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan		131.907.205.232,96	677.872.187,00	7.079.000,00	15.595.378.896,00
		148.187.535.315,96			

Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	-	-	0,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	0,00
3	RSUD WONOSARI	-	-	-	0,00
4	DPUPRKP	-	-	-	13.960.815.551,15
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	0,00
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0,00
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	0,00
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPT	-	-	-	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	-	-	-	0,00
18	DKP	-	-	-	0,00
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	0,00
21	DISPERINDAG	-	-	-	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	-	-	-	0,00
25	BKPPD	-	-	-	0,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00	0,00	13.960.815.551,15
		13.960.815.551,15			

E. ASET TETAP LAINNYA **Rp 29.734.512.374,48**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2018. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 43 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Aset Tetap Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

- Pada tahun 2018 telah dilakukan sensus terhadap aset tetap lainnya per 31 Desember 2017, yang merubah saldo Aset Tetap Lainnya, semula Rp28.311.958.374,89 menjadi Rp23.829.536.735,64.
- Penambahan atas Aset Tetap Lainnya dari hasil sensus aset adalah sebesar Rp423.374.483,04 dan pengurangannya sebesar Rp4.905.796.122,29 sebagai berikut:

Daftar Mutasi Hasil Sensus Aset Tetap Lainnya 2018

No	Nama OPD	Saldo Akhir 2017 Audited (Rp)	Mutasi Tambah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Kurang Sensus 2018 (Rp)	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	21.649.366.192,92	423.374.483,04	4.673.724.120,72	17.399.016.555,24
2	DINAS KESEHATAN	107.288.000,00	-	7.365.733,34	99.922.266,66
3	RSUD WONOSARI	14.243.818,00	-	-	14.243.818,00
4	DPUPRKP	4.592.189.814,00	-	4.419.320,00	4.587.770.494,00
5	SATPOL PP	70.529.350,00	-	-	70.529.350,00
6	DINAS SOSIAL	1.582.000,00	-	-	1.582.000,00
7	DISNAKERTRANS	1.592.500,00	-	269.500,00	1.323.000,00
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	1.303.500,00	-	1.303.500,00	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	217.516.900,00	-	38.832.400,00	178.684.500,00
11	DISDUKCAPIL	2.430.500,00	-	962.000,00	1.468.500,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	12.336.700,00	-	891.000,00	11.445.700,00
13	DISKOMINFO	750.000,00	-	-	750.000,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPT	2.169.700,00	-	64.000,00	2.105.700,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	813.100.941,97	-	98.642.265,73	714.458.676,24
18	DKP	1.070.500,00	-	-	1.070.500,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Saldo Akhir 2017 Audited (Rp)	Mutasi Tambah Sensus 2018 (Rp)	Mutasi Kurang Sensus 2018 (Rp)	Saldo Awal Setelah Sensus 2018 (Rp)
19	DINAS PARIWISATA	25.258.900,00	-	13.927.300,00	11.331.600,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	230.281.000,00	-	11.664.642,50	218.616.357,50
21	DISPERINDAG	9.517.200,00	-	-	9.517.200,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	16.783.326,00	-	-	16.783.326,00
23	BAPPEDA	9.201.700,00	-	-	9.201.700,00
24	BKAD	89.931.730,00	-	-	89.931.730,00
25	BKPPD	48.571.000,00	-	16.405.200,00	32.165.800,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	125.233.452,00	-	31.064.440,00	94.169.012,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	82.649.500,00	-	4.010.700,00	78.638.800,00
31	BAKESBANGPOL	183.525.150,00	-	-	183.525.150,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	1.135.000,00	-	-	1.135.000,00
35	KECAMATAN TEPUK	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	400.000,00	-	400.000,00	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	1.750.000,00	-	1.750.000,00	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	150.000,00	-	-	150.000,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	100.000,00	-	100.000,00	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah		28.311.958.374,89	423.374.483,04	4.905.796.122,29	23.829.536.735,64

Dari hasil rekonsiliasi tersebut diperoleh saldo awal setelah rekonsiliasi atas aset tetap lainnya sebesar Rp23.829.536.735,64.

c. **Penambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp5.906.263.638,85 dengan rincian sebagai berikut:**

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2017	Rp	5.675.381.618,85
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	0,00
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain	Rp	230.882.020,00
- Koreksi pencatatan	Rp	0,00

d. **Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp1.288.000, dengan rincian sebagai berikut:**

- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	Rp	0,00
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	0,00
- Koreksi pencatatan	Rp	1.288.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya 2018

No	Nama OPD	Saldo Awal Setelah Sensus (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	17.399.016.555,24	5.257.946.368,85	-	22.656.962.924,08
2	DINAS KESEHATAN	99.922.266,66	-	-	99.922.266,66
3	RSUD WONOSARI	14.243.818,00	3.934.570,00	-	18.178.388,00
4	DPUPRKP	4.587.770.494,00	115.399.800,00	-	4.703.170.294,00
5	SATPOL PP	70.529.350,00	-	-	70.529.350,00
6	DINAS SOSIAL	1.582.000,00	1.896.000,00	-	3.478.000,00
7	DISNAKERTRANS	1.323.000,00	-	-	1.323.000,00
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	178.684.500,00	305.352.000,00	1.288.000,00	482.748.500,00
11	DISDUKCAPIL	1.468.500,00	-	-	1.468.500,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	11.445.700,00	-	-	11.445.700,00
13	DISKOMINFO	750.000,00	-	-	750.000,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPT	2.105.700,00	-	-	2.105.700,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	714.458.676,24	80.567.775,00	-	795.026.451,24
18	DKP	1.070.500,00	-	-	1.070.500,00
19	DINAS PARIWISATA	11.331.600,00	-	-	11.331.600,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	218.616.357,50	-	-	218.616.357,50
21	DISPERINDAG	9.517.200,00	-	-	9.517.200,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	16.783.326,00	-	-	16.783.326,00
23	BAPPEDA	9.201.700,00	-	-	9.201.700,00
24	BKAD	89.931.730,00	134.018.125,00	-	223.949.855,00
25	BKPPD	32.165.800,00	-	-	32.165.800,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	94.169.012,00	4.850.000,00	-	99.019.012,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	78.638.800,00	2.299.000,00	-	80.937.800,00
31	BAKESBANGPOL	183.525.150,00	-	-	183.525.150,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	1.135.000,00	-	-	1.135.000,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	150.000,00	-	-	150.000,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah		23.829.536.735,64	5.906.263.638,85	1.288.000,00	29.734.512.374,48

Penambahan Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	5.067.338.148,85	-	190.608.220,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	0,00
3	RSUD WONOSARI	3.934.570,00	-	-	0,00
4	DPUPRKP	115.399.800,00	-	-	0,00
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
6	DINAS SOSIAL	1.896.000,00	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	0,00
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	305.352.000,00	-	-	0,00
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	0,00
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPT	-	-	-	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	40.293.975,00	-	40.273.800,00	0,00
18	DKP	-	-	-	0,00
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	0,00
21	DISPERINDAG	-	-	-	0,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	134.018.125,00	-	-	0,00
25	BKPPD	-	-	-	0,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	4.850.000,00	-	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	2.299.000,00	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya		5.675.381.618,85	0,00	230.882.020,00	0,00
		5.906.263.638,85			

Pengurangan Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	-	-	0,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	0,00
3	RSUD WONOSARI	-	-	-	0,00
4	DPUPRKP	-	-	-	0,00
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	0,00
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	1.288.000,00
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	0,00
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPT	-	-	-	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
17	DPK	-	-	-	0,00
18	DKP	-	-	-	0,00
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	0,00
21	DISPERINDAG	-	-	-	0,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	-	-	-	0,00
25	BKPPD	-	-	-	0,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	1.288.000,00
		1.288.000,00			

5.A.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp 2.109.294.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 43 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

- a. Pada tahun 2018 telah dilakukan sensus terhadap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017, dan atas hasil sensus tersebut saldo akhir 2017 (audited) konstruksi dalam pengerjaan tidak ada perubahan maupun koreksi.
- b. **Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2018 sebesar Rp2.741.861.406, dengan rincian sebagai berikut:**

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2017	Rp	2.741.861.406,00
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	0,00
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain	Rp	0,00
- Koreksi pencatatan	Rp	0,00
- c. **Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2018 sebesar Rp28.088.319.789,54 dengan rincian sebagai berikut:**

- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	Rp	196.185.000,00
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	17.097.048.659,60
- Koreksi pencatatan	Rp	10.795.086.129,94



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 2018

No	Nama OPD	Saldo Awal Setelah Sensus (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
1	DISDIKPORA	2.784.289.000,00	74.200.000,00	2.784.289.000,00	74.200.000,00
2	DINAS KESEHATAN	247.318.255,00	238.014.406,00	485.332.661,00	0,00
3	RSUD WONOSARI	15.490.000,00	947.760.000,00	437.990.000,00	525.260.000,00
4	DPUPRKP	17.540.283.659,60	933.913.000,00	17.293.233.659,60	1.180.963.000,00
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	0,00
No	Nama OPD	Saldo Awal Setelah Sensus (Rp)	Mutasi Tambah 2018 (Rp)	Mutasi Kurang 2018 (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0,00
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	6.793.505.468,94	-	6.793.505.468,94	0,00
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPT	-	-	-	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	-	-	-	0,00
18	DKP	11.715.000,00	282.254.000,00	293.969.000,00	0,00
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	63.151.000,00	-	-	63.151.000,00
21	DISPERINDAG	-	265.720.000,00	-	265.720.000,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	-	-	-	0,00
25	BKPPD	-	-	-	0,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah		27.455.752.383,54	2.741.861.406,00	28.088.319.789,54	2.109.294.000,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	74.200.000,00	-	-	0,00
2	DINAS KESEHATAN	238.014.406,00	-	-	0,00
3	RSUD WONOSARI	947.760.000,00	-	-	0,00
4	DPUPRKP	933.913.000,00	-	-	0,00
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Belanja 2018 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	0,00
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0,00
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	0,00
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00
15	DPMPT	-	-	-	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	-	-	-	0,00
18	DKP	282.254.000,00	-	-	0,00
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	0,00
21	DISPERINDAG	265.720.000,00	-	-	0,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	-	-	-	0,00
25	BKPPD	-	-	-	0,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah KDP		2.741.861.406,00	0,00	0,00	0,00
		2.741.861.406,00			

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan OPD, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	-	-	2.784.289.000,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	485.332.661,00
3	RSUD WONOSARI	-	-	-	437.990.000,00
4	DPUPRKP	-	196.185.000,00	17.097.048.659,60	0,00
5	SATPOL PP	-	-	-	0,00
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	0,00
7	DISNAKERTRANS	-	-	-	0,00
8	DP3AKBPMD	-	-	-	0,00
9	DIPERTARUNG	-	-	-	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0,00
11	DISDUKCAPIL	-	-	-	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	6.793.505.468,94
13	DISKOMINFO	-	-	-	0,00
14	DISKOP UKM	-	-	-	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama OPD	Hibah (Rp)	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
15	DPMPT	-	-	-	0,00
16	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	0,00
17	DPK	-	-	-	0,00
18	DKP	-	-	-	293.969.000,00
19	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0,00
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	0,00
21	DISPERINDAG	-	-	-	0,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0,00
23	BAPPEDA	-	-	-	0,00
24	BKAD	-	-	-	0,00
25	BKPPD	-	-	-	0,00
26	BPBD	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	0,00
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	0,00
29	DPRD	-	-	-	0,00
30	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0,00
31	BAKESBANGPOL	-	-	-	0,00
32	KECAMATAN WONOSARI	-	-	-	0,00
33	KECAMATAN PALIYAN	-	-	-	0,00
34	KECAMATAN PANGGANG	-	-	-	0,00
35	KECAMATAN TEPUS	-	-	-	0,00
36	KECAMATAN RONGKOP	-	-	-	0,00
37	KECAMATAN SEMANU	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN PONJONG	-	-	-	0,00
39	KECAMATAN KARANGMOJO	-	-	-	0,00
40	KECAMATAN PLAYEN	-	-	-	0,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	-	-	-	0,00
42	KECAMATAN NGAWEN	-	-	-	0,00
43	KECAMATAN SEMIN	-	-	-	0,00
44	KECAMATAN PATUK	-	-	-	0,00
45	KECAMATAN SAPTOSARI	-	-	-	0,00
46	KECAMATAN GEDANGSARI	-	-	-	0,00
47	KECAMATAN GIRISUBO	-	-	-	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	0,00
49	KECAMATAN PURWOSARI	-	-	-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	196.185.000,00	17.097.048.659,60	10.795.086.129,94
		28.088.319.789,54			

d. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp27.455.752.383,54 Pada tahun 2018 terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.741.861.406, dan mutasi kurang sebesar Rp28.088.319.789,54 sehingga Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.109.294.000, dengan penjelasan sebagai berikut:

Mutasi tambah sebesar Rp2.741.861.406, merupakan penambahan dari realisasi Belanja Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

No	Perangkat Daerah	Belanja 2018
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	74.200.000,00
2	Dinas Kesehatan	238.014.406,00
3	RSUD Wonosari	947.760.000,00
4	DPUPRKP	933.913.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	282.254.000,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	265.720.000,00
Jumlah		2.741.861.406,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**AKUMULASI PENYUSUTAN****841.387.958.731,04**

Dalam rangka penyajian Laporan Keuangan dengan basis akrual Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melakukan perhitungan penyusutan atas saldo aset tetap. Penyusutan pertama kali atas aset tetap didasarkan pada data saldo aset tetap yang telah diaudited oleh BPK RI. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Kabupaten Gunungkidul penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus terhadap aset tetap berupa:

- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan nilai residu aset tetap serta dilakukan sejak tahun diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Berikut ini Tabel masa manfaat Aset tetap berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 43 Tahun 2016:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan berikut akumulasi penyusutannya dan tidak serta merta dilakukan penghapusan.

Tatacara penghitungan penyusutan aset tetap dengan tetap memperhitungkan adanya penambahan masa manfaat aset tetap sebagai akibat adanya perbaikan atau renovasi, tabel penambahan masa manfaat aset tetap akibat perbaikan terdapat pada Lampiran II Perbup No.43 tahun 2016.

Berikut ini daftar akumulasi penyusutan aset tetap:

Uraian	Nilai Aset Tetap 2018 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2018 (Rp)	Nilai Buku Aset Tetap 2018 (Rp)
Peralatan dan Mesin	412.633.372.049,46	288.296.361.911,84	124.337.010.137,62
Gedung dan Bangunan	938.306.581.939,24	82.173.587.612,33	856.132.994.326,91
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.064.501.902.606,67	470.918.009.206,87	593.583.893.399,80
Jumlah	2.415.441.856.595,37	841.387.958.731,04	1.574.053.897.864,33



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daftar akumulasi penyusutan aset tetap berdasarkan OPD:

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jumlah Akumulasi Penyusutan
1	DISDIKPORA	112.700.298.351,42	20.272.862.734,80	4.028.887.163,65	137.002.048.249,87
2	DINAS KESEHATAN	38.632.149.172,51	10.469.289.167,02	383.423.735,16	49.484.862.074,69
3	RSUD WONOSARI	24.032.527.670,86	4.741.178.731,64	615.548.935,93	29.389.255.338,43
4	DPUPRKP	7.343.649.241,80	2.385.207.500,63	455.605.724.957,15	465.334.581.699,58
5	SATPOL PP	1.424.880.435,42	-	-	1.424.880.435,42
6	DINAS SOSIAL	347.945.522,21	-	-	347.945.522,21
7	DISNAKERTRANS	2.505.172.297,50	858.292.701,47	2.425.900,00	3.365.890.898,97
8	DP3AKBPMD	5.451.379.912,71	370.958.342,29	175.000,00	5.822.513.255,00
9	DIPERTARUNG	1.142.662.699,83	183.760.351,48	400.000,00	1.326.823.051,31
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.705.392.415,43	828.028.927,71	112.060.730,95	7.645.482.074,09
11	DISDUKCAPIL	3.141.032.750,28	249.298.483,13	5.348.250,00	3.395.679.483,41
12	DINAS PERHUBUNGAN	8.824.024.849,66	5.614.813.353,70	4.990.309.612,64	19.429.147.816,00
13	DISKOMINFO	3.595.124.897,25	55.556.807,83	-	3.650.681.705,08
14	DISKOP UKM	528.061.685,43	29.273.800,00	340.000,00	557.675.485,43
15	DPMPT	851.957.711,42	266.360.631,32	120.000,00	1.118.438.342,74
16	DINAS KEBUDAYAAN	605.208.577,08	57.687.000,00	8.251.500,00	671.147.077,08
17	DPK	2.602.912.020,15	706.923.617,79	11.140.016,88	3.320.975.654,82
18	DKP	6.504.778.219,53	1.580.471.016,08	418.259.819,49	8.503.509.055,10
19	DINAS PARIWISATA	2.244.013.732,27	2.707.953.957,97	3.721.655.893,49	8.673.623.583,73
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	9.902.464.681,69	2.679.361.620,50	386.561.142,38	12.968.387.444,57
21	DISPERINDAG	2.330.776.576,46	16.327.259.057,43	469.046.526,80	19.127.082.160,69
22	INSPEKTORAT DAERAH	1.626.835.262,38	456.229.314,77	-	2.083.064.577,15
23	BAPPEDA	1.992.259.603,60	522.935.921,08	-	2.515.195.524,68
24	BKAD	9.411.798.667,54	2.020.514.431,56	45.472.552,10	11.477.785.651,20
25	BKPPD	1.968.808.781,94	704.322.221,20	9.468.703,54	2.682.599.706,68
26	BPBD	5.466.770.539,43	25.077.480,00	412.500,00	5.492.260.519,43
27	SEKRETARIAT DAERAH	10.331.851.718,17	3.341.256.824,34	30.052.849,30	13.703.161.391,81
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	-
29	DPRD	-	-	-	-
30	SEKRETARIAT DPRD	6.515.168.319,38	1.020.218.660,35	2.398.000,00	7.537.784.979,73
31	BAKESBANGPOL	595.040.967,27	276.596.596,38	842.948,92	872.480.512,57
32	KECAMATAN WONOSARI	422.152.207,81	-	2.274.250,00	424.426.457,81
33	KECAMATAN PALIYAN	556.402.808,55	99.197.408,25	4.018.671,37	659.618.888,17
34	KECAMATAN PANGGANG	487.852.215,81	46.316.850,62	4.369.000,00	538.538.066,43
35	KECAMATAN TEPUS	598.477.286,95	84.634.934,03	4.951.250,00	688.063.470,98
36	KECAMATAN RONGKOP	470.120.426,70	280.777.015,24	9.300.081,88	760.197.523,82
37	KECAMATAN SEMANU	439.982.345,26	125.342.076,49	4.314.750,00	569.639.171,75
38	KECAMATAN PONJONG	519.773.985,66	174.697.090,56	6.046.249,97	700.517.326,19
39	KECAMATAN KARANGMOJO	369.944.358,00	476.932.966,65	3.707.500,00	850.584.824,65
40	KECAMATAN PLAYEN	382.091.729,81	138.614.142,46	4.681.166,73	525.387.039,00
41	KECAMATAN NGLIPAR	387.706.050,66	275.583.840,00	1.877.020,00	665.166.910,66
42	KECAMATAN NGAWEN	534.725.047,68	266.085.892,91	6.049.250,00	806.860.190,59
43	KECAMATAN SEMIN	445.037.738,66	192.535.757,06	1.855.500,00	639.428.995,72
44	KECAMATAN PATUK	603.820.763,26	516.957.380,00	412.520,00	1.121.190.663,26
45	KECAMATAN SAPTOSARI	397.314.163,99	183.484.610,34	3.287.020,00	584.085.794,33
46	KECAMATAN GEDANGSARI	613.244.898,81	89.920.469,11	3.984.000,00	707.149.367,92
47	KECAMATAN GIRISUBO	650.464.180,53	106.964.521,56	1.240.500,00	758.669.202,09
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	477.421.905,66	123.296.039,58	4.044.038,54	604.761.983,78
49	KECAMATAN PURWOSARI	614.882.517,42	240.557.365,00	3.269.700,00	858.709.582,42
Jumlah Akumulasi Penyusutan		288.296.361.911,84	82.173.587.612,33	470.918.009.206,87	841.387.958.731,04



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Selain itu, terdapat Aset Tetap yang digunakannya kepada pihak lain, antara lain sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Sewa Rumah Dinas	34.195.000,00
2	Sewa tanah untuk reklame	18.960.000,00
3	Sewa tanah lain:	185.081.930,00
	- Sewa Bangunan dan Lahan	168.721.930,00
	- Sewa Kios GSG	12.840.000,00
	- Sewa Kios depan RSUD dan Komplek Pemda Gunungkidul	3.520.000,00
4	Sewa Tempat/Gedung Olahraga	213.365.000,00
	- Gedung Serbaguna Siyono (BKAD)	192.600.000,00
	- GOR Handayani/Stadion (Disdikpora)	9.300.000,00
	- Gedung Kesenian (Disdikpora)	5.655.000,00
	- Alun-alun Wonosari (Sekretariat Daerah)	3.950.000,00
	- Lapangan tenis Komplek Bangsal Sewoko Projo (Sekretariat Daerah)	1.860.000,00
	JUMLAH	451.601.930,00

ASET TETAP EKSRAKOMPTABEL **43.942.316.145,81**

Selain saldo aset tetap yang disajikan pada Neraca, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki aset tetap yang nilai per unitnya dibawah minimal kapitalisasi sebagai aset tetap yang disajikan dalam neraca, dan dicatat secara ekstrakomptabel.

Saldo akhir 2017 senilai Rp51.542.567.892,55 mutasi tambah hasil sensus sebesar Rp1.900.261.500,87 dan mutasi kurang hasil sensus senilai Rp19.206.468.556,11 sehingga saldo awal setelah sensus 2018 sebesar Rp34.236.360.837,31

Adapun rincian besarnya saldo awal, mutasi tambah kurang hasil sensus dan saldo awal setelah sensus, sebagai berikut :

Daftar Aset Tetap Ekstrakomptabel

No	Uraian	Saldo Akhir 2017	Mutasi Tambah Hasil Sensus	Mutasi Kurang Hasil Sensus	Saldo Awal Setelah Sensus
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	18.291.275.009,10	292.384.823,04	4.824.049.092,40	13.759.610.739,74
3	Gedung dan Bangunan	4.980.628.240,53	288.608.667,00	1.297.950.630,38	3.971.286.277,15
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	28.270.664.642,92	1.319.268.010,83	13.084.468.833,33	16.505.463.820,42
6	KDP	-	-	-	-
	Jumlah	51.542.567.892,55	1.900.261.500,87	19.206.468.556,11	34.236.360.837,31

Mutasi Tambah Hasil Sensus atas aset ekstrakomptabel tersebut, dikarenakan:

- barang belum tercatat Rp 579.543.996,00
- koreksi pencatatan Rp 1.320.717.504,87

Mutasi tambah hasil sensus sebesar Rp579.543.996, dikarenakan adanya barang yang belum tercatat yang terdapat pada 7 OPD yaitu Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Perhubungan, DPMPT, Disperindag, BKAD, dan Bakesbangpol sedangkan koreksi pencatatan sebesar Rp1.320.717.504,87 terdapat pada DKP, Kec Semanu dan Kec. Semin, untuk mutasi kurang hasil sensus sebesar Rp19.206.468.556,11 terdapat pada hampir seluruh OPD.

Mutasi Kurang Hasil Sensus atas aset ekstrakomptabel tersebut, dikarenakan:

- barang yang tidak digunakan Rp 3.285.156.446,79
- barang dengan kondisi rusak berat Rp 5.677.270.750,17
- barang tidak ditemukan karena hilang Rp 3.231.622.510,63
- barang tidak ditemukan karena karena dihibahkan, Rp 44.837.197,39
- barang tidak ditemukan karena dikuasai pihak ketiga Rp 155.709.354,00
- barang tidak ditemukan karena kesalahan pencatatan Rp 4.398.078.669,24
- barang bukan BMD Rp 2.413.793.627,89



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian besarnya saldo awal setelah sensus, mutasi tambah 2018, mutasi kurang 2018 dan saldo akhir 2018, sebagai berikut :

Daftar Aset Tetap Ekstrakomptabel					
No	Uraian	Saldo Awal Setelah Sensus	Mutasi Tambah 2018	Mutasi Kurang 2018	Saldo Akhir 2018
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	13.759.610.739,74	628.452.372,50	50.000,00	14.388.013.112,24
3	Gedung dan Bangunan	3.971.286.277,15	340.522.505,00	-	4.311.808.782,15
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	16.505.463.820,42	8.737.030.431,00	-	25.242.494.251,42
6	KDP	-	-	-	-
	Jumlah	34.236.360.837,31	9.706.005.308,50	50.000,00	43.942.316.145,81

Adapun pengelompokan Aset Tetap Ekstrakomptabel per akun/ KIB adalah sebagai berikut :

- a. Tanah** **0,00**
Tidak ada aset tanah yang dicatat secara ekstrakomptabel, semua dicatat secara intrakomptabel dan tersaji dalam Neraca baik Laporan Keuangan OPD maupun LKPD
- b. Peralatan dan Mesin** **14.388.013.112,24**
Saldo awal 2017 Peralatan dan Mesin yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp18.291.275.009,1 kemudian pada tahun 2018 dilakukan sensus yang menghasilkan mutasi tambah hasil sensus atas aset ekstrakomptabel sebesar Rp292.384.823,04 dan mutasi kurang hasil sensusnya sebesar Rp4.824.049.092,4 sehingga saldo awal 2018 setelah hasil sensus menjadi sebesar Rp13.759.610.739,74 .
Sedangkan pada tahun 2018 terdapat mutasi tambah atas aset tetap ekstrakomptabel sebesar Rp628.452.372,5 dan mutasi kurang sebesar Rp50.000, sehingga saldo akhir 2018 aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin sebesar Rp14.388.013.112,24.
- c. Gedung dan Bangunan** **4.311.808.782,15**
Saldo awal 2017 Gedung dan Bangunan yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp4.980.628.240,53 kemudian pada tahun 2018 dilakukan sensus yang menghasilkan mutasi tambah hasil sensus atas aset ekstrakomptabel sebesar Rp288.608.667, dan mutasi kurang hasil sensusnya sebesar Rp1.297.950.630,38 sehingga saldo awal 2018 setelah hasil sensus menjadi sebesar Rp3.971.286.277,15 .
Sedangkan pada tahun 2018 terdapat mutasi tambah atas aset tetap ekstrakomptabel Gedung dan bangunan sebesar Rp340.522.505, dan tidak terdapat mutasi kurang sehingga saldo akhir 2018 aset ekstrakomptabel gedung dan bangunan sebesar Rp4.311.808.782,15.
- d. Jalan Irigasi dan Jaringan** **0,00**
Tidak ada aset jalan, irigasi, dan jaringan yang dicatat secara ekstrakomptabel, semua dicatat secara intrakomptabel dan tersaji dalam Neraca baik Laporan Keuangan OPD maupun LKPD.
- e. Aset Tetap Lainnya** **25.242.494.251,42**
Saldo awal 2017 Aset Tetap Lainnya yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp28.270.664.642,92 kemudian pada tahun 2018 dilakukan sensus yang menghasilkan mutasi tambah hasil sensus atas aset ekstrakomptabel sebesar Rp1.319.268.010,83 dan mutasi kurang hasil sensusnya sebesar Rp13.084.468.833,33 sehingga saldo awal 2018 setelah hasil sensus menjadi sebesar Rp16.505.463.820,42 .
Sedangkan pada tahun 2018 terdapat mutasi tambah atas aset tetap ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.737.030.431, dan tidak terdapat mutasi kurang aset ekstrakomptabel atas aset tetap lainnya sehingga saldo akhir 2018 aset ekstrakomptabel aset tetap lainnya sebesar Rp25.242.494.251,42.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan** **0,00**
Tidak ada aset konstruksi dalam pengerjaan yang dicatat secara ekstrakomptabel, semua dicatat secara intrakomptabel dan tersaji dalam Neraca baik Laporan Keuangan OPD maupun LKPD.

ASET DALAM PENGUASAAN **26.821.510.406,00**
Selain Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel diatas, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki Aset Tetap Dalam Penguasaan, yang saldo akhir per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp26.821.510.406,.

Aset Tetap dalam penguasaan terdapat pada OPD sebagai berikut:

- Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari**
Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.267.908.802,.
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**
Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel pada DPUPRKP per 31 Desember 2018 sebesar Rp43.250.000,.
- Dinas Sosial**
Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel pada Dinas Sosial per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.398.970.258,.
- Dinas Lingkungan Hidup**
Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.688.179.890,.
- Dinas Kebudayaan**
Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel pada Dinas Kebudayaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.396.975,.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel pada BPBD per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.412.804.481,.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

10. DANA CADANGAN

Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak ada Dana Cadangan

11. ASET LAINNYA

Rp180.015.118.882,05

Aset lainnya Tahun 2018 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Kerjasama Pemanfaatan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Sedangkan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Untuk akun Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi tidak dipunyai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Daftar Aset Lainnya

Uraian	2017 Audited (Rp)	2018 (Rp)
Kerjasama Pemanfaatan	188.750.000,00	188.750.000,00
Aset Tak Berwujud	24.519.085.689,32	28.343.642.230,32
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(8.854.406.121,31)	(11.813.778.405,55)
Aset Lain-lain	19.563.527.112,37	163.296.505.057,28
Jumlah	35.416.956.680,38	180.015.118.882,05

1. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan berupa penyewaan aset kepada PT. Sinar Sukses Sentosa untuk pembuatan tiwul instan. Saldo per 31 Desember 2018 untuk Kerjasama Pemanfaatan tetap sebesar Rp188.750.000,00.

2. Aset Tak Berwujud

Rincian aset tak berwujud per OPD per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2018 (Rp)
1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.547.534.513,64
2. DINAS KESEHATAN	717.797.799,00
3. RSUD Wonosari	657.629.996,00
4. DPUPRKP	3.582.266.755,68
5. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	336.418.500,00
6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	134.441.500,00
7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	795.000.000,00
8. DINAS PERHUBUNGAN	274.213.000,00
9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	237.880.000,00
10. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	48.092.000,00
11. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	847.453.000,00
12. DINAS KEBUDAYAAN	0,00
13. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	178.307.500,00
14. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	356.351.000,00
15. DINAS PARIWISATA	3.484.293.100,00
16. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.160.882.500,00
17. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	186.827.000,00
18. INSPEKTORAT DAERAH	88.041.500,00
19. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.725.288.566,00
20. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.525.700.500,00
21. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	232.758.500,00
22. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	92.363.000,00
23. SEKRETARIAT DAERAH	134.102.000,00
JUMLAH	28.343.642.230,32



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Penghitungan masa manfaat Aset Tak Berwujud didasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan pada tahun Aset Tak Berwujud tersebut diperoleh berdasarkan Harga Perolehan dan masa manfaatnya setiap tahun Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan Amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, menggunakan metode garis lurus untuk menghitung Amortisasi Aset Tak Berwujud yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud tanggal 12 Nopember 2016.

Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (indefinite life) dan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (finite life). Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (indefinite life) tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sehingga yang dikelola hanya Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (finite life). Masa manfaat Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dapat dibatasi dari umur, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Adapun jenis dan masa manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dalam tabel V.54.

Metode amortisasi Aset Tak Berwujud diterapkan dengan menggunakan metode garis lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat. Jadi perhitungannya harga perolehan dibagi masa manfaat dan diperoleh nilai amortisasi per tahun. Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud yang dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasikan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud. Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Ketentuan mengenai penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

KODE AKUN	URAIAN	MASA MANFAAT
1.5	ASET LAINNYA	
1.5.3	ASET TAK BERWUJUD	
1.5.3.4	HAK PATEN	20
1.5.3.5	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	
1.5.3.5.1	SOFTWARE/SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	10
1.5.3.5.2	KAJIAN	5
1.5.3.5.3	KONSULTAN PERENCANA	10

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per OPD per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2018(Rp)
1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(2.820.204.008,25)
2. DINAS KESEHATAN	(173.902.802,30)
3. RSUD Wonosari	(282.217.097,60)
4. DPUPRKP	(861.617.526,70)
5. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	(33.641.850,00)
6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(46.943.400,00)
7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	(795.000.000,00)
8. DINAS PERHUBUNGAN	(87.694.100,00)
9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(47.576.000,00)
10. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	(4.809.200,00)
11. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	(449.428.200,00)
12. DINAS KEBUDAYAAN	0,00
13. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(56.472.250,00)
14. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(140.540.200,00)
15. DINAS PARIWISATA	(1.912.856.620,00)
16. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(447.051.075,00)
17. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(50.371.700,00)
18. INSPEKTORAT DAERAH	(74.027.400,00)
19. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(1.892.479.850,70)
20. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1.477.886.246,00)
21. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	(102.690.079,00)
22. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(33.485.400,00)
23. SEKRETARIAT DAERAH	(22.883.400,00)
JUMLAH	(11.813.778.405,55)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sehingga Saldo Akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 per OPD adalah sebagai berikut :

	Tahun 2018 (Rp)
1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.727.330.505,39
2. DINAS KESEHATAN	543.894.996,70
3. RSUD Wonosari	375.412.898,40
4. DPUPRPK	2.720.649.228,98
5. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	302.776.650,00
6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	87.498.100,00
7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0,00
8. DINAS PERHUBUNGAN	186.518.900,00
9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	190.304.000,00
10. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	43.282.800,00
11. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	398.024.800,00
12. DINAS KEBUDAYAAN	0,00
13. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	121.835.250,00
14. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	215.810.800,00
15. DINAS PARIWISATA	1.571.436.480,00
16. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	713.831.425,00
17. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	136.455.300,00
18. INSPEKTORAT DAERAH	14.014.100,00
19. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.832.808.715,30
20. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.047.814.254,00
21. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	130.068.421,00
22. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	58.877.600,00
23. SEKRETARIAT DAERAH	111.218.600,00
JUMLAH	16.529.863.824,77

4. Aset Lain-lain	Rp163.296.505.057,28
a. PPKD	
Saldo awal PPKD sebesar Rp75.775.000,00 tidak mengalami perubahan karena tidak ada mutasi tambah maupun kurang di tahun 2018. Aset lain-lain PPKD merupakan penggaduh sapi banpres tahun 1988, 1992, 1993, 1999 dan penggaduh kambing 1992 dengan rincian sebagai berikut:	
Penggaduh Sapi Banpres Th 1988, 1992, 1993, 1999, dan Penggaduh Kambing 1992 :	Tahun 2018 (Rp)
Kec. Grirsubo:	
Penggaduh Sapi Banpres	1.300.000,00
Kec. Purwosari:	
Penggaduh Sapi Banpres	1.200.000,00
Kec. Patuk:	
- Penggaduh Sapi Banpres	3.200.000,00
- Penggaduh Kambing	875.000,00
Kec. Semin:	
Penggaduh Sapi Banpres	6.400.000,00
Kec. Ngawen:	
Penggaduh Sapi Banpres	12.400.000,00
Kec. Nglipar:	
Penggaduh Sapi Banpres	2.400.000,00
Kec. Panggang:	
Penggaduh Sapi Banpres	9.200.000,00
Kec. Wonosari:	
Penggaduh Sapi Banpres	38.800.000,00
JUMLAH	75.775.000,00



b.	DINKES	
	Kehilangan karena pencurian uang	15.080.125,00
c.	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	
	Kekurangan setor pendapatan	17.607.420,00
d.	Reklasifikasi dari aset tetap yang rusak berat (RB)	163.188.042.512,28
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	75.856.497.323,97
	- Tanah	5.000.000,00
	- Peralatan dan Mesin	44.179.686.223,58
	- Gedung dan Bangunan	25.148.398.963,67
	- Jalan Irigasi dan Jaringan	1.117.317.130,71
	- Aset Tetap lainnya	5.406.095.006,01
	Dinas Kesehatan	14.434.303.244,71
	- Peralatan dan Mesin	9.329.423.011,37
	- Gedung dan Bangunan	5.088.138.900,00
	- Jalan Irigasi dan Jaringan	9.375.600,00
	- Aset Tetap Lainnya	7.365.733,34
	RSUD	5.139.359.065,00
	- Tanah	65.000.000,00
	- Peralatan dan Mesin	2.845.715.212,00
	- Gedung dan Bangunan	214.050.000,00
	- Jalan Irigasi dan Jaringan	2.014.593.853,00
	DPUPRKP	12.685.877.575,58
	- Tanah	7.157.400.000,00
	- Peralatan dan Mesin	545.611.516,00
	- Gedung dan Bangunan	42.055.105,00
	- Jalan Irigasi dan Jaringan	4.936.336.634,58
	- Aset Tetap Lainnya	4.474.320,00
	POL PP	186.071.129,41
	- Peralatan dan Mesin	186.071.129,41
	NAKERTRANS	554.320.998,00
	- Peralatan dan Mesin	431.531.498,00
	- Gedung dan Bangunan	122.520.000,00
	- Aset Tetap Lainnya	269.500,00
	DP3AKBPMD	57.354.361,00
	- Peralatan dan Mesin	51.906.861,00
	- Jalan Irigasi dan Jaringan	5.447.500,00
	DISPERTARUNG	205.575.740,00
	- Peralatan dan Mesin	192.148.240,00
	- Jalan Irigasi dan Jaringan	12.124.000,00
	- Aset Tetap Lainnya	1.303.500,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	815.594.729,40
	- Peralatan dan Mesin	469.558.887,50
	- Gedung dan Bangunan	294.339.954,90
	- Jalan Irigasi dan Jaringan	13.346.987,00
	- Aset Tetap Lainnya	38.348.900,00
	DINAS DUKCAPIL	1.392.511.609,67
	- Peralatan dan Mesin	1.391.149.609,67
	- Jalan Irigasi dan Jaringan	400.000,00
	- Aset Tetap Lainnya	962.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	7.392.412.938,95
	- Peralatan dan Mesin	3.664.881.438,89
	- Gedung dan Bangunan	1.081.327.433,00
	- Jalan Irigasi dan Jaringan	2.645.313.067,06
	- Aset Tetap Lainnya	891.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DISKOMINFO	1.547.563.211,20
- Peralatan dan Mesin	1.547.563.211,20
DISKOP-UKM	33.630.350,00
- Peralatan dan Mesin	33.630.350,00
DPMPT	273.912.336,00
- Peralatan dan Mesin	263.848.336,00
- Jalan Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
- Aset Tetap Lainnya	64.000,00
DISBUD	85.683.882,00
- Peralatan dan Mesin	85.683.882,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	230.455.341,73
- Peralatan dan Mesin	121.776.076,00
- Gedung dan Bangunan	10.037.000,00
- Aset Tetap Lainnya	98.642.265,73
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.034.183.407,00
- Peralatan dan Mesin	915.523.292,00
- Gedung dan Bangunan	2.056.153.015,00
- Jalan Irigasi dan Jaringan	62.507.100,00
DINAS PARIWISATA	1.198.871.375,48
- Peralatan dan Mesin	347.510.379,58
- Gedung dan Bangunan	231.670.298,14
- Jalan Irigasi dan Jaringan	605.763.397,76
- Aset Tetap Lainnya	13.927.300,00
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.037.968.664,69
- Peralatan dan Mesin	1.839.080.322,19
- Gedung dan Bangunan	184.126.200,00
- Jalan Irigasi dan Jaringan	3.097.500,00
- Aset Tetap Lainnya	11.664.642,50
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31.087.454.364,80
- Peralatan dan Mesin	361.466.456,89
- Gedung dan Bangunan	30.545.112.011,91
- Jalan Irigasi dan Jaringan	180.875.896,00
- Aset Tetap Lainnya	-
INSPEKTORAT DAERAH	101.508.428,00
- Peralatan dan Mesin	101.508.428,00
BAPPEDA	386.496.554,00
- Peralatan dan Mesin	386.496.554,00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	776.075.923,69
- Peralatan dan Mesin	718.163.798,69
- Gedung dan Bangunan	57.912.125,00
BKPPD	446.954.363,00
- Peralatan dan Mesin	430.549.163,00
- Aset Tetap Lainnya	16.405.200,00
BPBD	153.967.500,00
- Peralatan dan Mesin	153.967.500,00
SEKRETARIAT DAERAH	1.393.105.174,00
- Peralatan dan Mesin	1.339.990.734,00
- Gedung dan Bangunan	20.550.000,00
- Jalan Irigasi dan Jaringan	1.500.000,00
- Aset Tetap Lainnya	31.064.440,00
SEKRETARIAT DPRD	411.146.043,00
- Peralatan dan Mesin	407.135.343,00
- Aset Tetap Lainnya	4.010.700,00
BAKESBANGPOL	25.494.112,67
- Peralatan dan Mesin	25.494.112,67
Kecamatan Wonosari	161.451.537,00
- Peralatan dan Mesin	161.451.537,00
Kecamatan Paliyan	22.814.664,11
- Peralatan dan Mesin	22.814.664,11

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kecamatan Panggang	289.339.107,16
- Peralatan dan Mesin	23.526.250,00
- Gedung dan Bangunan	184.660.000,00
Kecamatan Tepus	
- Peralatan dan Mesin	81.152.857,16
Kecamatan Rongkop	29.285.000,00
- Peralatan dan Mesin	29.285.000,00
Kecamatan Semanu	54.472.334,00
- Peralatan dan Mesin	54.072.334,00
- Aset Tetap Lainnya	400.000,00
Kecamatan Ponjong	38.136.875,00
- Peralatan dan Mesin	36.386.875,00
- Aset Tetap Lainnya	1.750.000,00
Kecamatan Karangmojo	81.827.166,66
- Peralatan dan Mesin	81.827.166,66
Kecamatan Playen	33.217.500,00
- Peralatan dan Mesin	33.217.500,00
Kecamatan Nglipar	48.655.375,00
- Peralatan dan Mesin	48.655.375,00
Kecamatan Ngawen	17.266.500,00
- Peralatan dan Mesin	17.266.500,00
Kecamatan Semin	17.286.000,00
- Peralatan dan Mesin	17.286.000,00
Kecamatan Patuk	67.955.250,00
- Peralatan dan Mesin	57.955.250,00
- Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
Kecamatan Saptosari	152.783.858,29
- Peralatan dan Mesin	152.783.858,29
Kecamatan Gedangsari	3.110.000,00
- Peralatan dan Mesin	3.110.000,00
Kecamatan Girisubo	76.084.200,00
- Peralatan dan Mesin	76.084.200,00
Kecamatan Tanjungsari	76.673.400,00
- Peralatan dan Mesin	76.573.400,00
- Aset Tetap Lainnya	100.000,00
Kecamatan Purwosari	73.333.998,11
- Peralatan dan Mesin	73.333.998,11
12. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp17.964.073.548,55
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp1.290.750.944,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 gaji pegawai yang belum disetor per 31 Desember 2018. Saldo awal per 31 Desember 2016 sebesar Rp83.850.975,00 sedangkan tahun 2017 PPH pasal 21 gaji pegawai yang belum disetor sebesar Rp1.207.058.969,00. Disamping itu terdapat kelebihan setoran Iuran Wajib Pegawai tahun 2017 sebesar Rp159.000,00. Sehingga saldo akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar sebesar Rp1.290.750.944,00.	
2. Pendapatan Diterima di Muka	Rp1.234.346.588,55
Pendapatan Diterima di Muka adalah utang atas kontribusi perjanjian penyewaan aset pemerintah daerah yang telah dibayar dimuka tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari.	
Terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa sewa los dan kios pasar sebesar Rp1.159.976.172,22, BKAD berupa Sewa Tanah dan Ruangan sebesar Rp72.423.333,33 dan pada Dinas Pariwisata berupa Sewa Los dan Kios di Lokasi Obyek Wisata sebesar Rp1.947.083,00.	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3. Utang Belanja Barang dan Jasa

Rp14.864.485.591,00

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan beban rutin akhir tahun yang dibayarkan tahun berikutnya. Saldo per 31 Desember 2018 per jenis utang belanja dengan rincian sebagai berikut :

a. Listrik	Rp370.762.934,00
b. Telpon	Rp20.728.478,00
c. Air	Rp47.152.695,00
d. Alat Tulis Kantor	Rp118.265.000,00
e. Obat-Obatan	Rp5.948.245.608,00
f. Bahan Kimia	Rp661.117.342,00
g. Makan Minum Harian Pegawai	Rp40.298.800,00
h. Makan Minum Pasien	Rp5.132.038,00
i. Pemeriksaan/ Pengujian Bahan	Rp321.880.450,00
j. Pemeliharaan perlatan kantor	Rp31.166.275,00
k. Pemeliharaan perlengkapan kantor	Rp52.119.788,00
l. Jasa Pelayanan Medik	Rp6.215.326.738,00
l. Pengolahan Limbah Medis	Rp63.032.795,00
m. Jasa administrasi pajak Penerangan jalan umum	Rp872.082.451,00
n. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp741.000,00
o. Sewa Tanah	Rp350.000,00
p. Olie, BBM	Rp2.089.579,00
q. Tenaga Harian Lepas	Rp11.611.670,00
r. Jasa Pungutan Retribusi	Rp82.381.950,00
	Rp14.864.485.591,00

4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp574.490.425,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Pemerintah Desa pada akhir tahun yang dibayarkan tahun berikutnya. Saldo per 31 Desember 2018 per jenis utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Utang Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp331.199.000,00
b. Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp243.291.425,00

13. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Rp0,00

Saldo awal Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Selama tahun 2018 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang sehingga saldo akhir per 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp0,00.

14. EKUITAS

Rp2.828.381.626.607,56

Ekuitas Akhir pada tahun 2018 sebesar Rp2.828.381.626.607,56 berasal dari Ekuitas Awal LKPD Audited 2017, Surplus/Defisit LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Ekuitas Awal	2.402.224.618.238,26
Surplus/Defisit - LO	217.736.221.992,27
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	208.420.786.377,03
Ekuitas Akhir	2.828.381.626.607,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

E. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Rp2.828.381.626.607,56

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal laporan.

1. Ekuitas Awal Rp2.402.224.618.238,26

Ekuitas Awal 2018 atau sama dengan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.402.224.618.238,26 dengan rincian sebagai berikut:

**Ekuitas Awal Perangkat Daerah
Per 1 Januari 2018**

No	Nama Perangkat Daerah	Ekuitas Awal (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	455.087.218.318,73
2	Dinas Kesehatan	116.372.901.260,28
3	Rumah Sakit Umum Daerah	82.819.974.371,45
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	865.535.645.390,99
5	Satuan Polisi Pamong Praja	993.415.203,32
6	Dinas Sosial	440.729.986,43
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.534.333.606,86
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.536.665.589,58
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	39.943.080.187,94
10	Dinas Lingkungan Hidup	14.926.156.749,79
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.267.429.975,99
12	Dinas Perhubungan	49.308.040.997,90
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.960.303.994,41
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	466.655.759,69
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	5.294.935.618,07
16	Dinas Kebudayaan	583.055.421,16
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.052.350.026,06
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.644.395.930,15
19	Dinas Pariwisata	36.439.058.079,31
20	Dinas Pertanian dan Pangan	30.269.636.362,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	77.063.046.330,41
22	Inspektorat Daerah	4.488.606.485,83
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.278.218.435,85
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	338.927.242.096,93
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	59.647.803.616,05
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	9.755.277.537,75
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.042.639.448,42
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00
29	Sekretariat Daerah	136.187.178.670,54
30	DPRD	0,00
31	Sekretariat DPRD	7.322.115.874,55
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.971.341.355,22
33	Kecamatan Wonosari	380.958.708,98
34	Kecamatan Paliyan	1.072.803.419,86
35	Kecamatan Panggang	1.689.022.644,30
36	Kecamatan Tepus	433.492.571,35
37	Kecamatan Rongkop	1.525.474.622,43
38	Kecamatan Semanu	1.058.270.615,40
39	Kecamatan Ponjong	897.922.541,60
40	Kecamatan Karangmojo	819.752.636,65
41	Kecamatan Playen	746.453.833,45
42	Kecamatan Nglipar	1.217.789.719,33
43	Kecamatan Ngawen	1.137.201.742,77
44	Kecamatan Semin	1.643.878.588,30
45	Kecamatan Patuk	1.844.958.485,33
46	Kecamatan Saptosari	1.992.737.052,80
47	Kecamatan Gedangsari	629.917.634,66
48	Kecamatan Girisubo	1.425.673.316,05
49	Kecamatan Tanjungsari	635.176.441,52
50	Kecamatan Purwosari	913.680.981,82
Jumlah		2.402.224.618.238,26



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2. Surplus/Defisit - LO.....

Rp217.736.221.992,27

Surplus/Defisit -LO per 31 Desember 2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp217.736.221.992,27, dengan rincian sebagai berikut :

Surplus/Defisit LO Perangkat Daerah Per 31 Desember 2018

No	Nama Perangkat Daerah	Surplus/Defisit-LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	(576.454.767.138,94)
2	Dinas Kesehatan	(88.462.542.279,94)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(32.250.622.663,71)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(110.371.204.029,82)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(6.008.496.768,74)
6	Dinas Sosial	(6.492.542.964,64)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(6.865.355.224,52)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(9.685.202.849,65)
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	(6.069.094.338,22)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(9.191.414.131,63)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(7.579.452.913,80)
12	Dinas Perhubungan	(7.749.063.032,18)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(5.691.238.071,30)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(2.624.581.271,12)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	(2.307.190.979,01)
16	Dinas Kebudayaan	(3.597.486.579,91)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.184.077.116,45)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	(4.733.145.886,22)
19	Dinas Pariwisata	10.939.809.060,33
20	Dinas Pertanian dan Pangan	(27.151.029.806,12)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(12.268.012.843,36)
22	Inspektorat Daerah	(5.636.812.645,21)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(7.054.080.013,24)
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.311.267.656.205,46
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.139.587.036,39
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(53.444.824.689,78)
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(3.076.793.945,85)
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(761.729.248,00)
29	Sekretariat Daerah	(22.540.852.837,19)
30	DPRD	(18.450.680.341,00)
31	Sekretariat DPRD	(33.217.296.866,42)
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.540.691.154,90)
33	Kecamatan Wonosari	(1.842.128.218,42)
34	Kecamatan Paliyan	(1.567.654.927,09)
35	Kecamatan Panggang	(1.624.914.202,73)
36	Kecamatan Tepus	(1.535.300.590,37)
37	Kecamatan Rongkop	(1.455.967.609,21)
38	Kecamatan Semanu	(2.239.471.812,04)
39	Kecamatan Ponjong	(1.961.853.035,95)
40	Kecamatan Karangmojo	(2.214.582.552,66)
41	Kecamatan Playen	(1.757.791.499,45)
42	Kecamatan Nglipar	(1.746.023.151,99)
43	Kecamatan Ngawen	(2.179.339.104,63)
44	Kecamatan Semin	(1.462.729.153,10)
45	Kecamatan Patuk	(2.012.787.438,59)
46	Kecamatan Saptosari	(1.908.751.315,04)
47	Kecamatan Gedangsari	(1.779.018.915,58)
48	Kecamatan Girisubo	(1.460.174.793,49)
49	Kecamatan Tanjungsari	(1.534.515.950,35)
50	Kecamatan Purwosari	(1.867.543.408,35)
Jumlah		217.736.221.992,27

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar..... 208.420.786.377,03**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp208.420.786.377,03 berasal dari penyesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited 2017 dan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2018**

No	Nama Perangkat Daerah	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	138.717.941.844,34
2	Dinas Kesehatan	7.431.656.959,93
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.971.376.939,43
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(9.585.590.072,21)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	182.016.629,41
6	Dinas Sosial	211.200.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	561.100.498,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(620.721.965,01)
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	171.049.389,97
10	Dinas Lingkungan Hidup	211.644.972,15
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.294.047.995,40
12	Dinas Perhubungan	2.916.872.066,23
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.430.972.689,01
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15.233.875,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	401.374.419,50
16	Dinas Kebudayaan	61.912.898,20
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	368.705.297,29
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.123.802.632,97
19	Dinas Pariwisata	126.361.925,12
20	Dinas Pertanian dan Pangan	(998.367.987,56)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.924.898.553,15
22	Inspektorat Daerah	26.322.594,27
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	342.461.123,51
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	26.827.289.316,93
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	18.542.733.660,38
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	277.185.104,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.135.363.700,00)
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00
29	Sekretariat Daerah	1.677.945.484,00
30	DPRD	0,00
31	Sekretariat DPRD	369.368.643,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.334.112,67
33	Kecamatan Wonosari	(63.486.303,37)
34	Kecamatan Paliyan	7.717.322,78
35	Kecamatan Panggang	(726.024.450,00)
36	Kecamatan Tepus	(31.926.071,96)
37	Kecamatan Rongkop	23.265.500,00
38	Kecamatan Semanu	(108.569.404,78)
39	Kecamatan Ponjong	17.131.479,44
40	Kecamatan Karangmojo	43.326.000,00
41	Kecamatan Playen	33.217.500,00
42	Kecamatan Nglipar	37.510.425,00
43	Kecamatan Ngawen	31.366.500,00
44	Kecamatan Semin	3.642.500,00
45	Kecamatan Patuk	12.711.750,00
46	Kecamatan Saptosari	122.300.132,73
47	Kecamatan Gedangsari	2.548.000,00
48	Kecamatan Girisubo	59.450.200,00
49	Kecamatan Tanjungsari	61.641.400,00
50	Kecamatan Purwosari	24.197.998,11
Jumlah		208.420.786.377,03



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adapun Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2018 karena ada penyesuaian sebagai berikut:

No	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Jumlah (Rp)
1	Penyesuaian Kas	(22.035.480.600,38)
2	Penyesuaian Setara Kas	-
3	Penyesuaian Piutang	17.507.904.373,47
5	Penyesuaian Persediaan	(660.071.267,57)
6	Penyesuaian Aset Tetap	58.345.685.755,04
7	Penyesuaian Aset Tak Berwujud	602.449.555,58
8	Penyesuaian Aset Lain-lain	127.618.781.657,30
9	Penyesuaian Utang PFK	-
10	Penyesuaian Utang Belanja	-
11	Penyesuaian Utang Jangka Pendek Lainnya	-
12	Penyesuaian Penyertaan Modal	26.757.356.967,87
13	Penyesuaian Pendapatan	(443.539.284,28)
14	Penyesuaian Beban	(751.702.536,00)
15	Penyesuaian Utang Bunga	1.479.401.756,00
	Jumlah	208.420.786.377,03

4. Ekuitas Akhir Rp2.828.381.626.607,56

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.828.381.626.607,56 berasal dari Ekuitas Awal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Tahun 2017, Surplus/Defisit LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2018

Ekuitas Awal	Rp2.402.224.618.238,26
Surplus/Defisit - LO	Rp217.736.221.992,27
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp208.420.786.377,03
Ekuitas Akhir	Rp2.828.381.626.607,56

Adapun Ekuitas Akhir masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Ekuitas Akhir Perangkat Daerah Per 31 Desember 2018

No	Nama Perangkat Daerah	Ekuitas Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	623.600.683.528,13
2	Dinas Kesehatan	128.247.740.632,27
3	Rumah Sakit Umum Daerah	84.278.241.147,17
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	920.023.985.790,50
5	Satuan Polisi Pamong Praja	956.326.839,99
6	Dinas Sosial	736.770.083,79
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.865.172.237,34
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.839.245.019,92
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	84.064.471.108,69
10	Dinas Lingkungan Hidup	19.240.225.654,31
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.900.193.624,59
12	Dinas Perhubungan	52.133.438.034,95
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.383.137.017,12
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.224.027.259,57
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	5.929.571.038,56
16	Dinas Kebudayaan	695.137.727,45
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.163.405.952,90
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.733.572.348,90
19	Dinas Pariwisata	39.733.267.801,76
20	Dinas Pertanian dan Pangan	29.289.805.479,32
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.728.467.853,70
22	Inspektorat Daerah	4.338.227.552,89
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.843.673.224,12
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	435.632.612.643,18
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	72.411.369.954,92
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	9.730.961.088,97
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.708.570.789,57
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00
29	Sekretariat Daerah	133.840.898.253,35
30	DPRD	0,00
31	Sekretariat DPRD	7.179.166.690,13

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama Perangkat Daerah	Ekuitas Akhir (Rp)
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.970.185.418,99
33	Kecamatan Wonosari	322.842.703,19
34	Kecamatan Paliyan	1.049.657.665,55
35	Kecamatan Panggang	1.011.641.568,57
36	Kecamatan Tepus	366.475.686,02
37	Kecamatan Rongkop	1.509.699.475,22
38	Kecamatan Semanu	894.740.621,58
39	Kecamatan Ponjong	897.606.377,09
40	Kecamatan Karangmojo	837.911.375,99
41	Kecamatan Playen	755.059.598,00
42	Kecamatan Nglipar	1.184.616.466,34
43	Kecamatan Ngawen	1.079.835.157,14
44	Kecamatan Semin	1.636.753.324,20
45	Kecamatan Patuk	1.769.808.084,74
46	Kecamatan Saptosari	2.075.158.651,49
47	Kecamatan Gedangsari	594.508.772,08
48	Kecamatan Girisubo	1.436.390.253,56
49	Kecamatan Tanjungsari	639.089.215,17
50	Kecamatan Purwosari	897.279.814,58
Jumlah		2.828.381.626.607,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional
4. Pos luar biasa
5. Surplus/defisit LO.

1. PENDAPATAN

Rp1.871.353.367.244,79

Pendapatan LO merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan-LO Pemerintah Daerah Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 adalah pendapatan yang sudah menjadi hak yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2018 dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Gunungkidul kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Realisasi Pendapatan - LO

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	54.650.246.793,00
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	33.932.642.817,34
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.108.750.327,05
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	118.245.707.932,84
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	221.937.347.870,23
2	Pendapatan Transfer	
2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	20.375.691.123,00
2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.330.959.941,00
2.1.3	Dana Alokasi Umum	938.221.136.000,00
2.1.4	Dana Alokasi Khusus	303.863.880.056,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.264.791.667.120,00
2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	
2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00
2.2.2	Dana Penyesuaian	117.574.520.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	117.574.520.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
2.3	Transfer Pemerintah Propinsi	
2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil pajak	93.671.431.175,46
2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	93.671.431.175,46
3	Bantuan Keuangan Propinsi	
3.1	Bantuan Keuangan	1.729.852.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan Propinsi	1.729.852.000,00
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
4.1	Pendapatan Hibah	162.648.549.079,10
4.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00
4.3	Pendapatan Lainnya - LO	9.000.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	171.648.549.079,10
	Jumlah Pendapatan	1.871.353.367.244,79

1. 1. Pendapatan Asli Daerah

Rp221.937.347.870,23

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Rp54.650.246.793,00

Pendapatan Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, dan BPHTB dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No	Nama Pajak Daerah	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	674.820.241,00
2	Pajak Restoran	6.076.089.063,00
3	Pajak Hiburan	167.413.450,00
4	Pajak Reklame	914.474.112,00
5	Pajak Penerangan Jalan	14.529.155.157,00
6	Pajak Parkir	41.698.275,00
7	Pajak Air Tanah	399.656.929,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.560.923.300,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama Pajak Daerah	Realisasi (Rp)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	23.735.677.790,00
10	BPHTB	6.550.338.476,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		54.650.246.793,00

Pajak Hotel

Rp674.820.241,00

Pendapatan Pajak Hotel meliputi Pajak Hotel dan Pajak losmen dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pajak Hotel	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	508.716.741,00
2	Pajak Losmen	166.103.500,00
Jumlah Pendapatan Pajak Hotel		674.820.241,00

Pajak Restoran

Rp6.076.089.063,00

Pendapatan Pajak Restoran meliputi Pajak Katering dan Rumah Makan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Pajak Restoran

No	Nama Pajak Restoran	Realisasi (Rp)
1	Pajak Katering	5.375.412.301,00
2	Pajak Rumah Makan	700.676.762,00
Jumlah Pendapatan Restoran		6.076.089.063,00

Pajak Hiburan

Rp167.413.450,00

Pendapatan Pajak Hiburan meliputi balap kendaraan bermotor, pusat kebugaran, kolam renang/kendaraan wisata, karaoke, permainan anak-anak/jenis hiburan, pertandingan olahraga, pameran dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Pajak Hiburan

No	Nama Pajak Hiburan	Realisasi (Rp)
1	Balap kendaraan bermotor	4.300.000,00
2	Pusat kebugaran	170.000,00
3	Kolam renang/kendaraan wisata	69.699.450,00
4	Karaoke	75.783.000,00
5	Permainan anak-anak/jenis hiburan	10.761.000,00
6	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	6.700.000,00
Jumlah Pendapatan Pajak Hiburan		167.413.450,00

Pajak Reklame

Rp914.474.112,00

Pendapatan Pajak Reklame meliputi reklame papan/billboard/video tron/mega tron, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame neon box, reklame baliho, reklame bando, reklame shopsign dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Pendapatan Pajak Reklame

No	Nama Pajak Reklame	Realisasi (Rp)
1	Reklame papan/billboard/video tron, mega tron	849.792.033,00
2	Reklame Kain	61.682.079,00
3	Reklame Neon Box	3.000.000,00
Jumlah Pendapatan Pajak Reklame		914.474.112,00

Pajak Penerangan Jalan

Rp14.529.155.157,00

Pada tahun anggaran 2018, Pendapatan pajak yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

No	Nama Pajak Penerangan Jalan	Realisasi (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.529.155.157,00
Jumlah Pendapatan Pajak Penerangan Jalan		14.529.155.157,00

Pajak Parkir

Rp41.698.275,00

Adapun pendapatan pajak yang berasal dari Pajak Parkir pada tahun 2018 berasal dari pajak parkir dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Pajak Parkir

No	Nama Pajak Parkir	Realisasi (Rp)
1	Pajak Parkir	41.698.275,00
Jumlah Pendapatan Pajak Parkir		41.698.275,00

Pajak Air Tanah

Rp399.656.929,00

Pendapatan pajak yang berasal dari Pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Pajak Air Tanah

No	Nama Pajak Air Tanah	Realisasi (Rp)
1	Pajak Air Tanah	399.656.929,00
Jumlah Pendapatan Pajak Air Tanah		399.656.929,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rp1.560.923.300,00

Adapun Pendapatan pajak yang berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Realisasi (Rp)
1	Batu Kapur	1.560.923.300,00
Jumlah Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		1.560.923.300,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pajak Bumi dan Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB - P2)

Rp23.735.677.790,00

Pendapatan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan PBB P2

No	Nama PBB P2	Realisasi (Rp)
1	PBB P2	23.735.677.790,00
Jumlah Pendapatan PBB P2		23.735.677.790,00

Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Rp6.550.338.476,00

Adapun Pendapatan pajak yang berasal dari Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan BPHTB

No	Nama Pajak BPHTB	Realisasi (Rp)
1	BPHTB	6.550.338.476,00
Jumlah Pendapatan Pajak BPHTB		6.550.338.476,00

1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Rp33.144.993.567,34

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah meliputi Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Nama Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	180.261.450,00
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	578.678.900,00
c.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	678.459.500,00
d.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.485.630.800,00
e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	522.381.000,00
f.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	906.864.695,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Umum		4.352.276.345,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.236.335.912,34
b.	Retribusi Tempat Pelelangan	451.719.745,00
c.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.157.959.500,00
c.	Retribusi Terminal	50.025.400,00
d.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa	39.468.750,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)
e.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.860.554.075,00
f.	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	401.499.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Usaha		28.197.562.382,34
3.	Retribusi Perijinan Tertentu	
a.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.341.964.090,00
b.	Retribusi Ijin Trayek	40.840.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu		1.382.804.090,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		33.932.642.817,34

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rp180.261.450,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah yang meliputi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan Retribusi Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian dan Pangan dengan rincian sebagai berikut :

RincianRetribusi Pelayanan Kesehatan

No	Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (PKL) pada Dinas Kesehatan	180.261.450,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan		180.261.450,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Rp578.678.900,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	391.647.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	187.031.900,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		578.678.900,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Rp678.459.500,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi (Rp)
1	Dinas Perhubungan	678.459.500,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		678.459.500,00

Retribusi Pelayanan Pasar

Rp1.485.630.800,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Pelayanan Pasar

No	Nama Kemantren Pasar	Realisasi (Rp)
1	Wonosari	393.375.900,00
2	Playen	280.148.100,00
3	Paliyan	97.356.300,00
4	Semin	170.405.600,00
5	Semanu	280.255.400,00
6	Ponjong	86.558.800,00
7	Rongkop	107.317.600,00
8	Nglipar	70.213.100,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar		1.485.630.800,00

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Rp522.381.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi (Rp)
1	Dinas Perhubungan	522.381.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		522.381.000,00

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Rp906.864.695,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Komunikasi dan Informasi dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informasi	906.864.695,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		906.864.695,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rp2.236.335.912,34

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata, BKAD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	125.432.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	395.896.000,00
3	Dinas Pariwisata	107.970.473,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.340.248.039,34
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	185.782.000,00
6	Dinas Pertanian dan Pangan	40.288.000,00
7	Dinas Perhubungan	40.719.400,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		2.236.335.912,34

Retribusi Tempat Pelelangan

Rp451.719.745,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan merupakan penerimaan retribusi pelelangan ikan yang dikelola di Dinas Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Tempat Pelelangan

No	Nama Tempat Pelelangan Ikan	Realisasi (Rp)
1	TPI Sadeng	154.229.075,00
2	TPI Nampu- Wedi Ombo	-
3	TPI Siung	8.001.843,75
4	TPI Ngandong - Sundak	5.609.875,00
5	TPI Drini	31.220.618,75
6	TPI Baron	97.974.600,00
7	TPI Ngrenehan	83.446.212,50
8	TPI Gesing	71.237.520,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan		451.719.745,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rp1.157.959.500,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Retribusi Tempat Khusus Parkir

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi (Rp)
1	Dinas Perhubungan	693.565.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	464.394.500,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir		1.157.959.500,00

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Rp39.468.750,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No	Nama Penginapan	Realisasi (Rp)
1	Penginapan Kukup	39.468.750,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan		39.468.750,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Rp23.860.554.075,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

No	Nama Pos Tempat Rekreasi	Realisasi (Rp)
1	Pos Baron	6.941.688.000,00
2	Pos Baron Malam	1.121.969.000,00
3	Pos Ngestirejo	327.930.500,00
4	Pos Sepanjang, Kemadang	22.743.000,00
5	Pos JJLS	5.055.824.000,00
6	Pos JJLS Malam	950.826.500,00
7	Pos Tepus	1.942.123.000,00
8	Pos Tepus Malam	507.718.000,00
9	Pos Wediombo	927.693.000,00
10	Pos Wediombo Malam	195.322.500,00
11	Pos Balong	13.558.500,00
13	Pos Ngrehen	376.834.500,00
14	Pos Ngrehen Malam	66.703.500,00
15	Pos Pulegundes	1.721.419.000,00
16	Pos Pulegundes Malam	402.087.500,00
17	Pos Siung	608.350.500,00
18	Pos Siung Malam	120.438.000,00
19	Pos Gunung Gambar	9.041.200,00
20	Gua Cerme	6.666.800,00
21	Pos Nglangeran	283.622.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama Pos Tempat Rekreasi	Realisasi (Rp)
22	Pos Bleberan	164.554.000,00
23	Pos Kalisuci	50.523.000,00
24	Pos Bejiharjo	1.082.781.500,00
25	Pos Pantai Ngedan	41.458.500,00
26	Pos Watu Gupit (Giri Jati)	505.422.000,00
27	Pos Watu Gupit (Giri Cahyo)	19.908.000,00
28	Pos Banjarejo	121.999.000,00
29	Pos Sriten	22.594.500,00
30	Retribusi Kios Baron	13.912.750,00
31	Retribusi Los Baron	14.240.200,00
32	Retribusi Kios Kukup	6.598.000,00
33	Retribusi Los Kukup	5.251.400,00
34	Premi Asuransi Jasa Raharja	208.752.225,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		23.860.554.075,00

Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Rp401.499.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan dengan perincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Produk Usaha Daerah

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pertanian dan Pangan	94.878.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	306.621.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah		401.499.000,00

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Rp1.341.964.090,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan penerimaan retribusi yang dikelola oleh DPMPT dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

No	Retribusi IMB	Realisasi (Rp)
1	Retribusi IMB (dikelola DPMPT)	1.341.964.090,00
Jumlah Pendapatan Retribusi IMB		1.341.964.090,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Retribusi Ijin Trayek

Rp40.840.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Trayek merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Retribusi Ijin Trayek

No	Nama Retribusi	Realisasi (Rp)
1	Ijin Trayek Tetap	40.840.000,00
Jumlah Retribusi Ijin Trayek		40.840.000,00

1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp15.108.750.327,05

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah diakui sebagai penambah ekuitas dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	BANK BPD DIY	10.485.487.739,05
2	Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah	3.972.470.853,50
3	Perusahaan Daerah Air Minum	635.985.788,06
4	BUKP	14.805.946,44
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.108.750.327,05

1. 1. 4. Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Rp118.245.707.932,84

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga , Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda, Pendapatan dari Pemusnahan Arsip, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan BLUD serta Lain-lain PAD Sah lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	3.246.460.977,00
2	Pendapatan Bunga	10.855.781.874,50
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	814.676.650,75
4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	699.329.329,77



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi (Rp)
5	Pendapatan Denda Pajak	225.657.528,00
6	Pendapatan Denda Retribusi	699.126.100,00
7	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	171.970.141,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	94.594.663,00
9	Pendapatan dari Pemusnahan Arsip	10.927.000,00
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	163.108.771,53
11	Pendapatan BLUD	101.117.211.333,00
12	Lain-lain PAD Sah lainnya	146.863.564,29
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		118.245.707.932,84

Penerimaan Jasa Giro

Rp3.246.460.977,00

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro kas daerah dan jasa giro bendahara dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	3.215.406.092,00
2	Jasa Giro Bendahara	31.054.885,00
Jumlah Penerimaan Jasa Giro		3.246.460.977,00

Pendapatan Bunga

Rp10.855.781.874,50

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan pendapatan bunga deposito dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bunga Deposito	10.855.781.875,50
Jumlah Pendapatan Bunga		10.855.781.875,50

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Rp814.676.650,75

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Rp699.329.329,77

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan selama Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan Denda Pajak

Rp225.657.528,00

Realisasi Pendapatan Denda Pajak merupakan Pendapatan Denda Pajak Hotel, Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Hiburan, Pendapatan Denda Pajak Parkir, Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah dan Pendapatan Denda Pajak PBB, dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.448.210,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	30.247.067,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	2.141.126,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	870.780,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	445.908,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.502.435,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam	8.707.258,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	179.294.744,00
Jumlah Pedapatan Denda Pajak		225.657.528,00

Pendapatan Denda Retribusi

Rp699.126.100,00

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	650.630.000,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	44.790.700,00
3	Pendapatan Denda Pemakaian Kekayaan Daerah	840.000,00
4	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	2.865.400,00
Jumlah Pedapatan Bunga		699.126.100,00

Pendapatan dari Pengembalian

Rp94.594.663,00

Realisasi Pendapatan dari pengembalian pada tahun anggaran 2018 berasal dari Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda

Rp171.970.141,00

Realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda pada tahun anggaran 2018 berasal dari hasil operasi atas penegakan Peraturan Daerah

Pendapatan dari Pemusnahan Arsip

Rp10.927.000,00

Realisasi Pendapatan dari pemusnahan arsip berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas hasil pemusnahan arsip pada tahun anggaran 2018.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Rp163.108.771,53

Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah berasal dari Sewa Aset Daerah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pendapatan BLUD

Rp101.117.211.333,00

Realisasi Pendapatan dari Pendapatan BLUD berasal dari Jasa pelayanan umum di UPT. Puskesmas dan jasa layanan umum di RSUD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan jasa layanan umum di UPT Puskesmas	44.891.132.268,00
2	Pelayanan jasa layanan umum di RSUD	56.226.079.065,00
Jumlah Pedapatan BLUD		101.117.211.333,00

Lain-lain PAD Sah lainnya

Rp146.863.564,29

Realisasi Lain-lain PAD Sah Lainnya berasal dari Dana Pembinaan dan Jasa Produksi di BUKP

1. 2. Pendapatan Transfer

Rp1.477.767.470.295,46

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	20.375.691.123,00
1.1.1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.606.026.112,00
1.1.2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	14.769.665.011,00
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.330.959.941,00
1.2.1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	43.549.909,00
1.2.3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	701.234.591,00
1.2.4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.584.686.000,00
1.2.5	Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara	1.489.441,00
1.3	Dana Alokasi Umum	938.221.136.000,00
1.4	Dana Alokasi Khusus	303.863.880.056,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.264.791.667.120,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	
2.1	Dana Penyesuaian (Dana Desa)	117.574.520.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		117.574.520.000,00
3	Transfer Pemerintah Propinsi	
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	93.671.431.175,46
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi		93.671.431.175,46
4	Bantuan Keuangan	
4:01	Bantuan Keuangan Provinsi	1.729.852.000,00
Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan		1.729.852.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.477.767.470.295,46



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Rp171.648.549.079,10

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan yang sah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2018 berasal dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya dan tidak ada Pendapatan Dana Darurat dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah - LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Hibah	162.648.549.079,10
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00
3	Pendapatan Lainnya	9.000.000.000,00
Jumlah Lain-lain yang sah		171.648.549.079,10

Pendapatan Hibah

Rp162.648.549.079,10

Pendapatan Hibah pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Hibah

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Hibah pada Disdikpora	72.548.800.282,00
2	Pendapatan Hibah pada Dinkes	5.951.410.027,10
3	Pendapatan Hibah pada RSUD	16.888.850,00
4	Pendapatan Hibah pada DISNAKER	442.084.000,00
5	Pendapatan Hibah pada DP3AKBPMD	1.220.874.920,00
6	Pendapatan Hibah pada DLH	100.000.000,00
7	Pendapatan Hibah pada DUKCAPIL	860.000,00
8	Pendapatan Hibah pada DINAS KOPERASI	731.845.000,00
9	Pendapatan Hibah pada BKPPD	3.385.000,00
10	Pendapatan Hibah pada BPBD	1.487.821.000,00
11	Pendapatan Hibah pada KEC WONOSARI	3.385.000,00
12	Pendapatan Hibah pada KEC. PANGGANG	90.000.000,00
13	Pendapatan Hibah pada KEC. PONJONG	1.680.000,00
14	Pendapatan Hibah pada KEC. PATUK	860.000,00
15	Pendapatan Hibah pada PPKD	80.048.655.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah		162.648.549.079,10

Pendapatan Dana Darurat

Rp0,00

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak ada pendapatan dana darurat

Pendapatan Lainnya

Rp9.000.000.000,00

Pendapatan lainnya tersebut berasal dari Dana Insentif Daerah bagi Pemerintah Kabupaten



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2. BEBAN

Rp1.648.114.652.692,52

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2018.

Beban terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain - lain dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Beban

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Pegawai	821.759.507.450,00
2	Beban Persediaan	128.773.184.253,00
3	Beban Jasa	257.928.312.898,00
4	Beban Pemeliharaan	21.063.582.479,00
5	Beban Perjalanan Dinas	40.838.292.362,00
6	Beban Bunga	0,00
7	Beban Subsidi	0,00
8	Beban Hibah	0,00
9	Beban Bantuan Sosial	762.100.000,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	138.103.249.996,69
11	Beban Penyisihan Piutang	8.617.264.328,83
12	Beban Kerugian Investasi Non Permanen	0,00
13	Beban Transfer	230.269.158.925,00
14	Beban Penghapusan Aset	0,00
15	Beban Dana BOS	0,00
Jumlah Beban Operasi		1.648.114.652.692,52

2.1.1. Beban Pegawai

Rp821.759.507.450,00

Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Beban tersebut dibayarkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	766.202.764.282,00
2	Beban Tambahan Penghasilan	45.360.479.713,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH	6.249.000.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.037.549.600,00
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.270.789.855,00
6	Uang Lembur	638.924.000,00
Jumlah Beban Pegawai		821.759.507.450,00

2.1.2. Beban Barang Persediaan

Rp128.773.184.253,00

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2018 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Persediaan Tahun 2018 per obyek beban adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan per Obyek Beban

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	16.402.718.492,39
2	Beban Persediaan Bahan/Material	42.868.229.521,14
3	Beban Persediaan Cetak	8.561.920.104,38
4	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.756.563.634,09
Jumlah Beban Persediaan		128.589.431.752,00

2.1.3. Beban Jasa

Rp257.928.312.898,00

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2018 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Jasa Tahun 2018 per obyek beban adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Jasa per Obyek Beban

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Dokumentasi	173.619.100,00
2	Beban Dokumen/administrasi tender	8.950.000,00
3	Beban Dekorasi	563.410.178,00
4	Beban Jasa bahan baku bangunan	6.301.745.057,00
5	Beban Jasa Hadiah lomba/Cinderamata	962.753.600,00
6	Beban Jasa Papan Nama	89.767.500,00
7	Beban Jasa Perlengkapan Upacara	62.648.950,00
8	Beban Persediaan Gordin	26.699.000,00
No	Uraian	Jumlah (Rp)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

9	Beban Jasa Kantor	111.197.985.405,00
10	Beban Premi Asuransi	98.614.665,00
11	Beban Jasa Penggandaan	11.084.025.682,00
12	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.988.457.736,00
13	Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.821.861.400,00
14	Beban Sewa Eskavator	130.090.360,00
15	Beban Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.579.762.445,00
16	Beban Makanan dan Minuman	37.758.897.507,00
17	Beban Jasa Konsultasi	2.477.288.750,00
18	Beban Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.978.150.000,00
19	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	19.599.136.700,00
20	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	60.000.000,00
21	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	6.590.837.830,00
22	Beban Honorarium Non Pegawai	6.394.542.500,00
23	Beban Honorarium PNS	18.535.078.750,00
24	Beban Honorarium Non PNS	9.260.404.000,00
25	Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.405.249.500,00
26	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	2.431.620.493,00
27	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	299.000.000,00
28	Beban Lain-lain	47.715.790,00
Jumlah Beban Jasa		257.928.312.898,00

2.1.3. Beban Pemeliharaan

Rp21.063.582.479,00

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 sebesar Rp21,063,582,479,00 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2018 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018 per obyek beban adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan per Obyek Beban

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	8.566.617.534,00
2	Beban Pemeliharaan	12.496.964.945,00
Jumlah Beban		21.063.582.479,00

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Rp8.566.617.534,00

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 terdiri dari Beban Service, Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Beban Jasa KIR, Beban Pajak Kendaraan Bermotor, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Service	2.804.454.682,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.273.251.282,00
3	Beban Jasa KIR	4.021.170,00
4	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	484.890.400,00
Jumlah Beban		8.566.617.534,00

Beban Pemeliharaan

Rp12.496.964.945,00

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 terdiri dari Beban pemeliharaan peralatan kantor, Beban pemeliharaan perlengkapan kantor, Beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan serta Beban pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban pemeliharaan peralatan kantor	2.622.285.243,00
2	Beban pemeliharaan perlengkapan kantor	1.659.558.391,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.703.966.813,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.367.926.378,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	143.228.120,00
Jumlah Beban		12.496.964.945,00

2.1.4. Beban Perjalanan Dinas

Rp40.838.292.362,00

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2018 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018 per obyek beban adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas per Obyek Beban

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.087.652.500,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.431.339.862,00
3	Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.319.300.000,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		40.838.292.362,00

2.1.5. Beban Bunga

Rp0,00

Tidak ada realisasi Beban Bunga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2018 .

2.1.6. Beban Subsidi

Rp0,00

Realisasi Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1.7. Beban Hibah

Rp0,00

Realisasi Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 adalah merupakan Beban Hibah yang diberikan kepada Kelompok Organisasi Kemasyarakatan.

2.1.8. Beban Bantuan Sosial

Rp762.100.000,00

Tidak ada realisasi Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 yang diberikan kepada Kelompok Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

2.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp138.103.249.996,69

Realisasi Beban Penyusutan terdiri dari Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per Obyek Beban

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	
1.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50.135.003.588,68
1.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.062.011.699,83
1.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.041.636.420,39
1.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap		134.238.651.708,90
2	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	2.781.147.814,82
Jumlah Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		2.781.147.814,82
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN		137.019.799.523,72

2.1.10. Beban Transfer

230.269.158.925,00

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Beban Transfer

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.129.902.000,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.301.980.775,00
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	218.654.845.150,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik)	1.082.431.000,00
Jumlah Beban Transfer		230.269.158.925,00

2.1.11. Beban Penyisihan Piutang

Rp8.617.264.328,83

Beban Lain-lain berupa realisasi Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang per Obyek Beban

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	8.480.309.234,48
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	41.389.067,15
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75.508.791,77
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	20.057.235,43
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG		8.617.264.328,83

4. Jumlah Surplus/Defisit dari Operasional

Rp223.238.714.552,27

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2018 mengalami Surplus, merupakan selisih antara Pendapatan dan Beban dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Surplus/Defisit dari Operasi

PENDAPATAN	
PAD	221.937.347.870,23
Transfer Dana Perimbangan	1.477.767.470.295,46
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	171.648.549.079,10
JUMLAH PENDAPATAN	1.871.353.367.244,79
BEBAN	
Beban	1.648.114.652.692,52
JUMLAH BEBAN	1.648.114.652.692,52
JUMLAH SURPLUS DARI OPERASIONAL	223.238.714.552,27



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(Rp584.419.095,00)

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 mengalami Defisit dari kegiatan non operasional, merupakan selisih antara Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	364.848.461,00
2	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(949.267.556,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional		(584.419.095,00)

5.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Rp364.848.461,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2018 merupakan penerimaan yang berasal dari selisih Nilai Buku Aset Tetap yang dijual dengan nilai pembayaran yang diterima.

5.2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Rp0,00

Surplus Penyelesaian Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (carrying value) dari kewajiban tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018.

5.3. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

(Rp949.267.556,00)

Defisit Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2018 merupakan penerimaan yang berasal dari selisih Nilai Buku Aset Tetap yang dijual dengan nilai pembayaran yang diterima berasal dari penjualan bangunan.

5.4. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Rp0,00

Defisit Penyelesaian Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (carrying value) dari kewajiban tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 tidak ada penyelesaian kewajiban jangka panjang

5.5. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Rp0,00

Tidak ada kegiatan non operasional lainnya di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018, sehingga Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

6. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa

Rp222.654.295.457,27

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa merupakan selisih antara jumlah Surplus/Defisit dari Operasi dan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Jumlah
1	Surplus dari Operasi	223.238.714.552,27
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(584.419.095,00)
Surplus Sebelum Pos Luar Biasa		222.654.295.457,27

7. **Pos Luar Biasa** **Rp4.918.073.465,00**

Beban Luar Biasa pada tahun 2018 merupakan beban dana bencana alam yang ada di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

8. **Surplus/Defisit Laporan Operasional** **Rp217.736.221.992,27**

Surplus Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 berasal dari Surplus Sebelum Pos Luar Biasa dikurangi dengan Pos Luar Biasa sehingga Surplus Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Surplus/Defisit LO

No	Uraian	Jumlah
1	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	222.654.295.457,27
2	Pos Luar Biasa	4.918.073.465,00
Surplus/ Defisit LO		217.736.221.992,27

Surplus tersebut akan menambah Ekuitas per 31 Desember 2018.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

F. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi keluar dan masuknya Kas, baik dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran.

Arus Kas dalam Laporan Arus Kas dibedakan dalam 4 jenis Arus yaitu Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1.1. Arus Masuk Kas **Rp1.849.679.490.478,73**

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari penerimaan :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Penerimaan Pajak Daerah	51.139.136.488,00	43.686.045.795,82
b. Penerimaan Retribusi Daerah	34.040.470.491,00	34.279.779.242,00
c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg. Dipisahkan	14.373.326.016,87	13.088.999.290,33
d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.216.607.458,31	178.288.424.562,56
e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	20.375.691.123,00	26.468.644.452,00
f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.330.959.941,00	2.344.005.472,00
g. Penerimaan Dana Alokasi Umum	938.221.136.000,00	938.221.136.000,00
h. Penerimaan Dana Alokasi khusus	303.863.880.056,00	283.708.648.102,00
i. Penerimaan Dana Otonomi Daerah	0,00	0,00
j. Penerimaan Dana Penyesuaian	117.574.520.000,00	160.667.997.000,00
k. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil pajak	95.691.354.387,93	89.029.917.919,39
l. Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
m. Penerimaan Bantuan Keuangan	1.729.852.000,00	18.240.217.899,00
n. Penerimaan Hibah	135.122.556.516,62	5.170.592.350,00
o. Penerimaan Dana Insentif Daerah	9.000.000.000,00	51.884.216.000,00
p. Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
q. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
r. Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
JUMLAH	1.849.679.490.478,73	1.845.078.624.085,10

1.2. Arus Keluar Kas **Rp1.467.471.409.895,00**

Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Pembayaran Pegawai	862.800.267.530,00	845.856.903.059,50
b. Pembayaran Barang	348.479.175.300,00	347.304.478.779,88
c. Pembayaran Bunga	0,00	0,00
d. Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
e. Pembayaran Hibah	19.599.136.700,00	22.234.698.095,00
f. Pembayaran Bantuan Sosial	762.100.000,00	0,00
g. Pembayaran Bantuan Keuangan	219.837.276.150,00	235.850.041.400,00
h. Pembayaran Tidak Terduga	4.918.073.465,00	2.636.676.819,00
i. Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.517.308.000,00	4.119.172.000,00
j. Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.558.072.750,00	5.378.424.225,00
k. Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
l. Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
JUMLAH	1.467.471.409.895,00	1.463.380.394.378,38

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi **Rp382.208.080.583,73**
(Jumlah 1.1 - 1.2)

2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas Investasi adalah perolehan atau pelepasan investasi jangka panjang - (aktiva tetap + penyertaan modal pemerintah daerah)

2.1. Arus Masuk Kas **Rp894.982.661,00**

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
b. Penjualan atas Tanah	0,00	757.927.000,00
c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	149.555.798,00	27.000.000,00
d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan	745.426.863,00	737.981.000,00
e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
f. Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
g. Penjualan Aset lainnya	0,00	0,00
h. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
JUMLAH	894.982.661,00	1.522.908.000,00

2.2. Arus Keluar Kas **Rp326.335.916.710,65**

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari Belanja Modal selama tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
b. Perolehan Tanah	43.883.631.085,00	37.594.740.572,00
c. Perolehan Peralatan dan Mesin	54.993.328.841,50	66.558.569.367,92
d. Perolehan Gedung dan Bangunan	88.672.482.347,21	113.023.915.402,60
e. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	116.825.871.316,94	164.806.828.414,86
f. Perolehan Aset tetap Lainnya	460.603.120,00	14.861.190.157,25
g. Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
h. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.500.000.000,00	18.500.000.000,00
i. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
JUMLAH	326.335.916.710,65	415.345.243.914,63

2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi **(Rp325.440.934.049,65)**
(Jumlah 2.1 - 2.2)

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana dari hutang, penerimaan kembali pinjaman, pembayaran pokok pinjaman dan pemberian pinjaman.

3.1. Arus Masuk Kas **Rp0,00**

Arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
b. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
c. Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
d. Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
e. Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

f. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
g. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
h. Penerimaan Kembali Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00	91.743,00
JUMLAH	0,00	91.743,00

3.2. Arus Keluar Kas **Rp37.645.533,00**

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
d. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
e. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
f. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	37.645.533,00	0,00
g. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
h. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
i. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	1.014.934.185,00
JUMLAH	37.645.533,00	1.014.934.185,00

3.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan **(Rp37.645.533,00)** (Jumlah 3.1 - 3.2)

4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris dengan rincian arus masuk dan keluar kas sebagai berikut :

4.1. Arus Masuk Kas **Rp162.879.486.985,87**

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris terdiri dari :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	155.110.486.985,87	154.200.250.109,15
BOSNAS	0,00	0,00
BOSNAS Sekolah Swasta dan SLB	0,00	9.134.360.000,00
Hibah Pihak Ketiga (CSR)	0,00	161.625.000,00
Hibah APBN untuk Sekolah Negeri dan Swasta	0,00	9.335.020.800,00
Uang Persediaan	7.769.000.000,00	6.854.822.600,00
JUMLAH	162.879.486.985,87	179.686.078.509,15

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp155.110.486.985,87 terdiri dari :

1. Potongan PPh 21	Rp	33.925.275.250,00
2. Potongan PPh 22	Rp	1.547.764.307,00
3. Potongan PPh 23	Rp	1.393.721.811,00
4. Potongan PPh 4 (2)	Rp	4.857.630.042,00
5. Potongan PPN	Rp	31.173.703.988,87
6. Taperum	Rp	724.103.000,00
7. Iuran Wajib Pegawai	Rp	39.510.424.260,00
8. Jaminan Kesehatan	Rp	41.977.864.327,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sedangkan Uang Persediaan selama tahun 2018 sebesar Rp7.769.000.000, merupakan penerbitan SP2D UP untuk SKPD sebagai berikut :

1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp1.599.000.000,00
2. DINAS KESEHATAN	Rp270.000.000,00
3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp1.005.000.000,00
4. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp250.000.000,00
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp100.000.000,00
6. DINAS SOSIAL	Rp100.000.000,00
7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp100.000.000,00
8. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp120.000.000,00
9. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Rp100.000.000,00
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp100.000.000,00
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp125.000.000,00
12. DINAS PERHUBUNGAN	Rp100.000.000,00
13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp100.000.000,00
14. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp100.000.000,00
15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Rp100.000.000,00
16. DINAS KEBUDAYAAN	Rp100.000.000,00
17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp100.000.000,00
18. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp100.000.000,00
19. DINAS PARIWISATA	Rp125.000.000,00
20. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Rp150.000.000,00
21. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp100.000.000,00
22. INSPEKTORAT DAERAH	Rp100.000.000,00
23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp120.000.000,00
24. PPKD	Rp0,00
25. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp350.000.000,00
26. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	Rp225.000.000,00
27. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp100.000.000,00
28. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Rp0,00
29. SEKRETARIAT DAERAH	Rp600.000.000,00
30. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp0,00
31. SEKRETARIAT DPRD	Rp600.000.000,00
32. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp100.000.000,00
33. KECAMATAN WONOSARI	Rp35.000.000,00
34. KECAMATAN PALIYAN	Rp35.000.000,00
35. KECAMATAN PANGGANG	Rp35.000.000,00
36. KECAMATAN TEPUS	Rp35.000.000,00
37. KECAMATAN RONGKOP	Rp35.000.000,00
38. KECAMATAN SEMANU	Rp35.000.000,00
39. KECAMATAN PONJONG	Rp35.000.000,00
40. KECAMATAN KARANGMOJO	Rp35.000.000,00
41. KECAMATAN PLAYEN	Rp35.000.000,00
42. KECAMATAN NGLIPAR	Rp35.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

43. KECAMATAN NGAWEN	Rp35.000.000,00
44. KECAMATAN SEMIN	Rp35.000.000,00
45. KECAMATAN PATUK	Rp35.000.000,00
46. KECAMATAN SAPTOSARI	Rp35.000.000,00
47. KECAMATAN GEDANGSARI	Rp35.000.000,00
48. KECAMATAN GIRISUBO	Rp35.000.000,00
49. KECAMATAN TANJUNGSARI	Rp35.000.000,00
50. KECAMATAN PURWOSARI	Rp35.000.000,00

JUMLAH

Rp 7.769.000.000

4.2. Arus Keluar Kas

Rp162.879.486.985,87

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	155.110.486.985,87	152.993.350.140,15
BOSNAS	0,00	0,00
BOSNAS Sekolah Swasta dan SLB	0,00	9.134.360.000,00
Hibah Pihak Ketiga (CSR)	0,00	161.625.000,00
Hibah APBN untuk Sekolah Negeri dan Swasta	0,00	9.335.020.800,00
Uang Persediaan	7.769.000.000,00	6.854.822.600,00
JUMLAH	162.879.486.985,87	178.479.178.540,15

4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Rp0,00

(Jumlah 4.1 - 4.2)

Saldo akhir kas sebesar Rp226.758.354.207,16 , dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas	56.729.501.001,08	(31.932.048.680,91)
Saldo Awal Kas di BUD	169.708.918.225,08	201.137.080.407,99
Saldo Akhir Kas Daerah + Kas di Bend. Pengeluaran	226.438.419.226,16	169.205.031.727,08
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	319.934.981,00	503.886.498,00
SALDO AKHIR KAS	226.758.354.207,16	169.708.918.225,08

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Saldo Akhir Kas terdiri dari :		
Saldo Akhir Kas di BUD	153.790.941.119,71	19.976.760.919,92
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	280.073.825,47	10.609.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	319.934.981,00	503.886.498,00
Setara Kas	50.000.000.000,00	134.000.000.000,00
Saldo Akhis Kas BOS	4.800.897.563,00	2.919.261.240,38
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Wonosari	8.424.460.339,36	795.196.381,36
Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	9.141.887.378,62	11.503.204.185,42
Kelebihan setor IWP TA. 2017 ke Kas Negara	159.000,00	
Jumlah	226.758.354.207,16	169.708.918.225,08

Saldo akhir kas di BUD No. Rekening A/C 002.111.000038 sebesar Rp153.790.941.119,71, termasuk di dalamnya utang PFK Tahun 2016 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- Utang PFK (PPh Ps. 21 Tahun 2016)	83.850.975,00
- Utang PFK (PPh Ps. 21 Tahun 2017)	1.206.899.969,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2018

Sebagaimana disyaratkan dalam Pernyataan SAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 58, maka pada bagian ini disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan SAP lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian laporan keuangan sebelumnya.

6.1. INFORMASI TAMBAHAN

6.1.1. DANA NON APBD YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

a. Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Program yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan dan urusan bersama Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 4.769.500.000,00 atau terserap 79,49 % yaitu Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri/ Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan/ Pasar Rakyat yang dibangun/ direvitalisasi berupa pembangunan Pasar Rakyat Legundi.

b. Dana APBD DIY (Dana Keistimewaan)

Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer.

Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kegiatan dalam satu tahun anggaran dan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lain baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Program yang dilaksanakan melalui dana keistimewaan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh 4 (empat) Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Kebudayaan dari anggaran sebesar Rp33.468.913.750,00 dan terealisasi sebesar Rp31.833.514.618,00 atau terserap 95,11 %.

Adapun rincian anggaran dan realisasi dana keistimewaan (Danais) sebagai berikut :

**Tabel 6.1. Laporan Realisasi Danais
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018**

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan (Nama Program)
1.	Bagian Organisasi Setda Gunungkidul	200.000.000,00	194.043.400,00	5.956.600,00	Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah
2.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.800.806.500,00	1.550.109.600,00	250.696.900,00	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
3.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	239.710.600,00	187.458.400,00	52.252.200,00	Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
4.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.296.899.500,00	1.274.290.500,00	22.609.000,00	Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
5.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.500.000.000,00	3.373.413.020,00	126.586.980,00	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
6.	Dinas Pekerjaan Umum, PRKP	13.065.105.300,00	12.999.100.500,00	66.004.800,00	Program : Pengelolaan Taman Budaya
7.	Dinas Kebudayaan	1.000.099.850,00	912.860.500,00	87.239.350,00	Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
8.	Dinas Kebudayaan	1.079.072.000,00	926.396.500,00	152.675.500,00	Program Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya
9.	Dinas Kebudayaan	9.737.220.000,00	8.962.723.198,00	774.496.802,00	Program Pembinaan dan Pengembangan Adat Dan Seni
10.	Dinas Kebudayaan	1.550.000.000,00	1.453.119.000,00	96.881.000,00	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
JUMLAH		33.468.913.750,00	31.833.514.618,00	1.635.399.132,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Danais Bagian Organisasi Setda Gunungkidul

Bagian Organisasi Setda Gunungkidul selain mengelola dana APBD Kabupaten Gunungkidul, juga mengelola Dana Keistimewaan Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bagian Organisasi Setda Gunungkidul adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Biro Organisasi Setda DIY. Dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 untuk 1 program 1 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp194.043.400,00 (97,02%) dan efisiensi sebesar Rp5.956.400,00 (2,98%), yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 6.2. Laporan Realisasi Danais
Bagian Organisasi Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018**

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)
1	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH				
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kab. Gunungkidul	200.000.000,00	194.043.400,00	97,02	5.956.600,00

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Honorarium PNS			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93.600.000,00	93.600.000,00	100,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	100,00
	Jumlah	94.350.000,00	94.350.000,00	100,00
2.	Honorarium Non PNS			
	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Jumlah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja Pegawai	100.350.000,00	100.350.000,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b. Belanja Barang dan Jasa:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2.387.000,00	2.387.000,00	100,00
2	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	6.629.600,00	88,39
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.183.000,00	3.183.000,00	100,00
4	Belanja Makanan dan Minuman	10.100.000,00	8.850.000,00	87,62
5	Belanja Perjalanan Dinas	26.880.000,00	24.388.800,00	90,73
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.600.000,00	48.255.000,00	97,29
	Jumlah	99.650.000,00	93.693.400,00	94,02

Output dari kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Kajian (Naskah Akademis) tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pemerintah Kalurahan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pemerintah Kapanewon.

Secara umum pelaksanaan kegiatan, kinerja dan output dapat dicapai dengan baik dan tidak ada kendala bahkan dapat melakukan efisiensi 2,98%

2. Danais Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selain mengelola dana APBD Kabupaten Gunungkidul juga mengelola Danais Urusan Tata Ruang dan Pertanahan dari Pemerintah DIY. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah DIY dengan anggaran sebesar Rp6.837.416.600,00 untuk 4 (empat) program 6 (enam) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp6.385.271.520,00 (93,38) % dan efisiensi sebesar Rp452.145.080,00 (6,62%), yang dirinci sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 6.3. Laporan Realisasi Danais

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)
1	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	1.800.806.500,00	1.550.109.600,00	86,08	250.696.900,00
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.800.806.500,00	1.550.109.600,00	86,08	250.696.900,00
2	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	239.710.600,00	187.458.400,00	78,20	52.252.200,00
	Penyiapan bahan Pertimbangan Tehnis Ijin Penggunaan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	112.690.000,00	95.606.000,00	84,84	17.084.000,00
	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan tanah Desa	127.020.600,00	91.852.400,00	72,31	35.168.200,00
3	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	1.296.899.500,00	1.274.290.500,00	98,26	22.609.000,00
	Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	649.336.500,00	627.118.500	96,58	22.218.000,00
	Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	647.563.000,00	647.172.000,00	99,94	391.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	3.500.000.000,00	3.373.413.020,00	96,38	126.586.980,00
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu	3.500.000.000,00	3.373.413.020,00	96,38	126.586.980,00
	JUMLAH	6.837.416.600,00	6.385.271.520,00	93,39	452.145.080,00

3. Danais Dinas Pekerjaan Umum, PRKP

Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul selain mengelola dana APBD Kabupaten Gunungkidul, juga mengelola Dana Keistimewaan Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

DPUPRKP adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Dinas Kebudayaan DIY Dengan anggaran sebesar Rp13.065.105.300,00 untuk 1 program 1 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp12.999.100.500 (99,49%) dan efisiensi sebesar Rp66.004.800 (0,51%), Output dari kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Gunungkidul adalah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yaitu Bangunan Gedung Kantor Taman Budaya di Desa Piyaman, Wonosari. Secara umum pelaksanaan kegiatan, kinerja dan output dapat dicapai dengan baik dan tidak ada kendala.

4. Danais Dinas Kebudayaan

Disamping mengelola dana APBD Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kebudayaan juga mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dinas Kebudayaan Gunungkidul adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Dinas Kebudayaan DIY. dengan anggaran sebesar Rp13.366.391.850,00 untuk 4 program 12 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp12.255.099.198,00 (91,69 %) dan efisiensi sebesar Rp1.111.292.652,00 (8,31%), yang dirinci sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 6.4. Laporan Realisasi Danais

Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)
1	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN				
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	645.000.000,00	587.772.500,00	91,13	57.227.500,00
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	355.099.850,00	325.088.000,00	91,55	30.011.850,00
2	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA				
	Pengembangan Cagar budaya dan Warisan Budaya	1.079.072.000,00	926.396.500,00	85,85	152.675.500,00
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DAN SENI				
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	4.219.505.000,00	3.799.078.000,00	90,04	420.427.000,00
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	73.500.000,00	59.285.000,00	80,66	14.215.000,00
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	200.000.000,00	199.649.000,00	99,82	351.000,00
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	224.960.000,00	218.760.000,00	97,24	6.200.000,00
	Gelar Budaya Jogja	1.205.680.000,00	1.135.415.000,00	94,17	70.265.000,00
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	793.815.000,00	669.922.198,00	84,39	123.892.802,00
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	230.110.000,00	199.846.000,00	86,85	30.264.000,00
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	2.289.000.000,00	2.196.498.000,00	95,96	92.502.000,00
	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	500.650.000,00	484.270.000,00	96,73	16.380.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4	PROGRAM PELESTARIAN TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.550.000.000,00	1.453.119.000,00	93,75	96.881.000,00
	JUMLAH	13.366.391.850,00	12.255.099.198,00	91,69	1.111.292.652,00

Anggaran tidak terserap seluruhnya karena adanya sisa lelang pada pengadaan Gamelan, efisiensi anggaran untuk tiket perjalanan dinas pada kegiatan publikasi seni dan budaya daerah, dan tidak terserap habis karena bersamaan dengan even yang lain.

c. Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul

Bantuan Keuangan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

Pada tahun Anggaran 2018, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan dan Bantuan Keuangan sebesar Rp2.184.852.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.610.731.450,00 atau terserap 73,72 %. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bantuan Keuangan sebagai berikut :

**Tabel 6.5. Laporan Dana Bantuan Keuangan
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018**

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum, PRKP	455.000.000,00	0,00	455.000.000,00	Memakai dana APBD
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.159.452.000,00	1.157.831.000,00	1.620.550,00	Cor Blok Jalan di 12 lokasi Jalan Desa
3.	Dinas Sosial	167.900.000,00	167.900.000,00	0,00	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH
4.	Dinas Kesehatan	402.500.000,00	285.000.000,00	117.500.000,00	Jambanisasi 114 unit
JUMLAH		2.184.852.000,00	1.610.731.450,00	574.120.550,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Dinas Pekerjaan Umum, PRKP

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul menerima Bantuan Keuangan senilai Rp455.000.000,00 yang tidak direalisasi seluruhnya karena menggunakan dana APBD.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul menerima Bantuan Keuangan senilai Rp1.159.452.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.157.831.450,00 atau terserap 99,86 % dipergunakan Cor Blok Jalan di 12 (dua belas) lokasi Jalan Desa dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6.6. Laporan Dana Bantuan Keuangan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018**

No	Nama Desa	Bantuan Keuangan Anggaran	Bantuan Keuangan Realisasi	Keterangan
1	Desa Balong, Kec. Girisubo	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.495.350,00	Corblok jalan di desa Balong dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
2	Desa Girisekar, Kec. Panggang	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.495.350,00	Corblok jalan di desa Girisekar dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
3	Desa Hargomulyo, Kec. Gedangsari	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.472.800,00	Corblok jalan di desa Hargomulyo dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
4	Desa Jetis, Kec. Saptosari	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.495.350,00	Corblok jalan di desa Jetis dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
5	Desa Kepek, Kec. Saptosari	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.495.350,00	Corblok jalan di desa Kepek dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
6	Desa Krambilsawit, Kec. Saptosari	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.472.800,00	Corblok jalan di desa Krambilsawit dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
7	Desa Mertelu, Kec. Gedangsari	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.495.350,00	Corblok jalan di desa Mertelu dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
8	Desa Ngalang, Kec. Gedangsari	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.472.800,00	Corblok jalan di desa Ngalang dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
9	Desa Ngloro, Kec. Saptosari	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.495.350,00	Corblok jalan di desa Ngloro dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

10	Desa Planjan, Kec. Saptosari	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.495.350,00	Corblok jalan di desa Planjan dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
11	Desa Sampang, Kec. Gedangsari	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.472.800,00	Corblok jalan di desa Sampang dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
12	Desa Serut, Kec. Gedangsari	Rp. 96.621.000,00	Rp. 96.472.800,00	Corblok jalan di desa Serut dengan panjang 450 m dan lebar 140 cm (2 x 70 cm)
JUMLAH		Rp. 1.159.452.000,00	Rp. 1.157.831.450,00	

3. Dinas Sosial

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul menerima Bantuan Keuangan senilai Rp167.900.000,00 yang terealisasi seluruhnya yang dipergunakan untuk 73 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam bentuk bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif masing-masing sebesar Rp2.300.000,00. Bantuan tersebut telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan usaha sesuai dengan RAB yang telah diusulkan. Adapun rincian penerima bantuan sebagai berikut :

**Tabel 6.7. Laporan Dana Bantuan Keuangan
Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018**

No	Nama Desa	Bantuan Keuangan (Rp)	Keterangan
1.	Desa Hargomulyo, Desa Mertelu, Desa Sampang, Desa Tegalrejo, Desa Ngalang dan Desa Serut Kecamatan Gedangsari	50.600.000,00	Untuk 6 Desa sebanyak 22 KPM
2.	Desa Jetis, Desa Kanigoro, Desa Kepek, Desa Krambilsawit, Desa Monggol dan Desa Ngloro Kecamatan Saptosari	75.900.000,00	Untuk 6 Desa sebanyak 33 KPM
3.	Desa Pringombo, Desa Botodayaan, Desa Melikan, Desa Pucanganom, Desa Semugih, Desa Karangwuni dan Desa Petir Kecamatan Rongkop	41.400.000,00	Untuk 7 Desa sebanyak 18 KPM
JUMLAH		167.900.000,00	19 Desa 73 KPM



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4. Dinas Kesehatan

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul menerima Bantuan Keuangan senilai Rp402.500.000,00 yang terealisasi Rp285.000.000,00 atau terserap 70,81 % yang dipergunakan untuk Jambanisasi 114 unit yang tersebar di 7 Desa. Adapun rincian penerima bantuan sebagai berikut :

**Tabel 6.8. Laporan Dana Bantuan Keuangan
Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018**

No.	Nama Desa	Jumlah Bantuan (Rp)	Keterangan
1	Desa Hargomulyo, Gedangsari	20.000.000,00	8 (delapan) orang Penerima Bantuan Jambanisasi
2	Desa Mertelu, Gedangsari	40.000.000,00	16 (enam belas) orang Penerima Bantuan Jambanisasi
3	Desa Watugajah, Gedangsari	7.500.000,00	3 (tiga) orang Penerima Bantuan Jambanisasi
4	Desa Serut, Gedangsari	32.500.000,00	13 (tiga belas) orang Penerima Bantuan Jambanisasi
5	Desa Ngalang, Gedangsari	60.000.000,00	24 (dua puluh empat) orang Penerima Bantuan Jambanisasi
6	Desa Tegalrejo Gedangsari	122.500.000,00	49 (empat puluh sembilan) orang Penerima Bantuan Jambanisasi
7	Desa Sampang Gedangsari	2.500.000,00	1 (satu) orang Penerima Bantuan Jambanisasi
	JUMLAH	285.000.000,00	114 ang penerima Bantuan Jambanisasi

d. Dana BOSNAS

Berdasarkan SP2D dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2018 menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp. 64.314.120.000,00 dengan klasifikasi seperti dalam tabel berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 6.9. Alokasi Dana BOS
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018

No.	Nama Satuan Pendidikan Penerima Hibah	Alokasi BOS Triwulan I (Rp)	Alokasi BOS Triwulan II (Rp)	Alokasi BOS Triwulan III (Rp)	Alokasi BOS Triwulan IV (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Sekolah Swasta					
1.	SD. Swasta	883.360.000,00	1.769.600.000,00	884.320.000,00	945.760.000,00	4.483.040.000,00
2.	SMP Swasta	896.200.000,00	1.755.000.000,00	919.400.000,00	930.000.000,00	4.500.600.000,00
	Jumlah					
B.	Sekolah Negeri					
1.	SD. Negeri	7.252.320.000,00	14.492.160.000,00	7.279.360.000,00	7.226.240.000,00	36.250.080.000,00
2.	SMP Negeri	3.821.600.000,00	7.631.200.000,00	3.806.200.000,00	3.821.400.000,00	19.080.400.000,00
	Jumlah					
	JUMLAH TOTAL	12.853.480.000,00	25.647.960.000,00	12.889.280.000,00	12.923.400.000,00	64.314.120.000,00

Dari total anggaran Rp64.314.120.000,00 tersebut senilai Rp8.983.640.000,00 diperuntukkan dan dikelola oleh sekolah swasta, sedangkan untuk SD dan SMP Negeri BOS senilai Rp. 55.330.480.000,00 dan sisa dana Tahun 2017 senilai Rp. 2.919.261.242,00 pada tahun anggaran 2018 anggarannya sudah dituangkan dalam APBD.

Mekanisme penyaluran dana dari Pemerintah Propinsi menerbitkan SP2D dan langsung ditransfer ke masing-masing satuan pendidikan. Pengelolaan dana BOS dikelola oleh Tim Manajemen BOS SKPD.

Berikut kami sajikan anggaran dan realisasinya dana BOS untuk Sekolah Negeri sebagaimana dalam tabel berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**Tabel 6.10. Anggaran dan Realisasi Dana BOS
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018**

No	Satdik Negeri	Sisa Kas Saldo Awal 2017 - Koreksi	Penerimaan Dana BOS	Realisasi Belanja	Pengembalian Dana (STS)	Bunga Bank/ Jasa Giro	Administrasi Bank/ Pajak Jasa Bank	Saldo Akhir 2018
1	SD Negeri	1,390,771,261.00	36,250,080,000.00	34,920,995,825.00	206,778,485.00	25,758,172.00	5,082,715.00	2,533,752,408.00
2	SMP Negeri	1,528,489,981.00	19,080,400,000.00	18,335,424,829.00	49,800,000.00	56,128,697.00	12,648,694.00	2,267,145,155.00
	JUMLAH	2,919,261,242.00	55,330,480,000.00	53,256,420,654.00	256,578,485.00	81,886,869.00	17,731,409.00	4,800,897,563.00

Dari realisasi Dana BOS Tahun Anggaran 2018 terdapat saldo kas sebesar Rp 4.800.897.563,00 yang berada di masing-masing sekolah. Adapun daftar rincian saldo kas tersebut sebagai berikut:

**Tabel 6.11. Daftar rincian saldo kas Dana BOS
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018**

No.	Sekolah	Sisa Kas
1	SD Karangrejek II	2,764,924.00
2	SD Wonosari VI	21,536,602.00
3	SD Piyaman I	3,138,420.00
4	SD Wonosari II	6,387,469.00
5	SD Wonosari IV	15,434,977.00
6	SD Wonosari I	2,881,490.00
7	SD Karangtengah III	8,233,588.00
8	SD Karangtengah Baru	17,286,168.00
9	SD Piyaman II	8,714,131.00
10	SD Gari III	7,317,401.00
11	SD Jeruksari	11,405,948.00
12	SD Piyaman III	6,185,913.00
13	SD Wonosari Baru	19,627,684.00
14	SD Duwet	7,375,458.00
15	SD Mulo I	14,000,631.00
16	SD Jambe	6,137,148.00
17	SD Soka	4,300,707.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
18	SD Gari I	7,107,716.00
19	SD Baleharjo	8,910,303.00
20	SD Kamal	17,347,125.00
21	SD Kajar	7,612,875.00
22	SD Karangtengah IV	11,917,533.00
23	SD Gari II	2,452,696.00
24	SD Seneng	6,786,243.00
25	SD Siraman I	8,642,403.00
26	SD Siraman II	10,371,785.00
27	SD Siraman III	5,295,825.00
28	SD Karangrejek I	9,875,613.00
29	SD Mulo II	6,288,463.00
30	SD Mulo Baru	8,089,168.00
31	SD Selang	11,431,609.00
32	SD Singkar	11,507,166.00
33	SD Tepus I	12,228,715.00
34	SD Tepus II	4,310,360.00
35	SD Sumberwungu II	6,381,287.00
36	SD Bantalwatu	3,043,545.00
37	SD Gupakan II	14,062.00
38	SD Giripanggung	3,867,137.00
39	SD Banjarsari	2,325,615.00
40	SD Sumberwungu I	4,073,710.00
41	SD Ploso	3,290,526.00
42	SD Widoro	2,456,473.00
43	SD Gupakan I	1,824,534.00
44	SD Sidoharjo	1,136,869.00
45	SD Puleireng	4,629,464.00
46	SD Bintaos	20,006,124.00
47	SD Pudak	3,882,132.00
48	SD Purwodadi	10,969,111.00
49	SD Belik	5,522,803.00
50	SD Gesing	4,030,492.00
51	SD Kropak	19,624,955.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
52	SD Purwodadi I	6,794,012.00
53	SD Tepus IV	3,406,773.00
54	SD Rejosari	2,782,489.00
55	SD Kemadang	3,535,664.00
56	SD Kanigoro	6,571,053.00
57	SD Gebang	3,480,591.00
58	SD Kemiri I	3,597,142.00
59	SD Panggang	4,359,789.00
60	SD Jaten	3,021,060.00
61	SD Kemiri II	7,863,671.00
62	SD Ngestiharjo	14,714,024.00
63	SD Banjarharjo	3,121,856.00
64	SD Gatak	3,159,546.00
65	SD Hargosari	2,245,401.00
66	SD Mendang	10,062,124.00
67	SD Mentel I	5,060,318.00
68	SD Mentel II	405,508.00
69	SD Semin II	13,475,044.00
70	SD Semin IV	417,212.00
71	SD Sumberejo	2,362,034.00
72	SD Bulurejo II	2,385,913.00
73	SD Semin I	14,411,459.00
74	SD Payaman II	3,118,699.00
75	SD Karangsari	4,617,298.00
76	SD Semin III	3,248,393.00
77	SD Rejosari III	383,672.00
78	SD Keringan	8,276,166.00
79	SD Rejosari II	2,500,864.00
80	SD Ngadipiro	3,052,443.00
81	SD Sumber	3,067,185.00
82	SD Candirejo I	637,403.00
83	SD Candirejo II	3,869,906.00
84	SD Ngentak	3,675,683.00
85	SD Widoro	15,498,517.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
86	SD Logantung I	1,946,857.00
87	SD Logantung II	8,295,879.00
88	SD Bendung II	2,983,695.00
89	SD Prebutan	2,495,052.00
90	SD Tambran I	13,305,248.00
91	SD Tambran II	3,019,856.00
92	SD Bendung I	4,657,862.00
93	SD Klampok	3,209,375.00
94	SD Ngepoh	7,996,045.00
95	SD Sedono	6,556,524.00
96	SD Bulurejo I	4,187,903.00
97	SD Dilem	0,00
98	SD Ngeposari	1,265,135.00
99	SD Ngeposari II	4,216,663.00
100	SD Jragum	1,550,216.00
101	SD Tunggak nongko	3,101,184.00
102	SD Semanu III	10,496,564.00
103	SD Semanu IV	10,635,921.00
104	SD Pragak	4,952,578.00
105	SD Mijahan I	5,373,833.00
106	SD Mijahan II	6,095,637.00
107	SD Kuwon	5,570,179.00
108	SD Jetis	3,931,343.00
109	SD Gunungkunir I	3,510,444.00
110	SD Gunungkunir II	6,436,257.00
111	SD Cuwelo I	4,491,089.00
112	SD Cuwelo II	1,193,559.00
113	SD Jati	3,636,089.00
114	SD Plebengan	5,658,428.00
115	SD Dayakan II	9,591,085.00
116	SD Ngenep	6,311,135.00
117	SD Kangkung	496,008.00
118	SD Srepeng	11,313,574.00
119	SD Kwangen	9,716,888.00
120	SD Dadapayu I	6,899,774.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
121	SD Pacarejo II	3,531,874.00
122	SD Dadapayu II	4,509,039.00
123	SD Gunungsari	3,923,174.00
124	SD Dengok	2,798,016.00
125	SD Nitikan	5,785,874.00
126	SD Jasem	3,083,546.00
127	SD Wediwutah	3,586,681.00
128	SD Semanu	2,648,498.00
129	SD Jetis I	1,517,039.00
130	SD Trowono II	4,830,048.00
131	SD Planjan II	9,530,408.00
132	SD Kepek I	1,349,672.00
133	SD Kepek II	7,301,438.00
134	SD Monggol II	5,906,473.00
135	SD Pucung	27,977,287.00
136	SD Trowono III	5,478,800.00
137	SD Planjan I	7,751,375.00
138	SD Monggol I	5,015,785.00
139	SD Kanigoro I	9,409,417.00
140	SD Kanigoro II	3,658,520.00
141	SD Gedangklutuk	7,766,575.00
142	SD Ngloro	6,606,908.00
143	SD Sawah	8,796,000.00
144	SD Bibis	4,087,005.00
145	SD Jetis II	4,532,652.00
146	SD Krambilsawit	355,030.00
147	SD Bohol	4,965,020.00
148	SD Pakel I	4,211,000.00
149	SD Pakel II	8,185,979.00
150	SD Botodayakan	1,818,155.00
151	SD Yuyang	948,669.00
152	SD Petir I	5,486,090.00
153	SD Petir II	7,688,435.00
154	SD Petir III	1,709,677.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
155	SD Pucanganom I	3,885,390.00
156	SD Pucanganom II	4,157,580.00
157	SD Baran I	5,374,721.00
158	SD Kerdonmiri I	3,136,444.00
159	SD Baran II	3,443,787.00
160	SD Kerdonmiri II	6,113,838.00
161	SD Karangwuni I	763,451.00
162	SD Melikan	3,002,548.00
163	SD Kenteng	4,070,123.00
164	SD Banombo	7,422,849.00
165	SD Karangwuni II	4,349,565.00
166	SD Kropak	3,715,603.00
167	SD Cabe	4,026,793.00
168	SD Kendal	4,918,152.00
169	SD Giriasih	7,814,068.00
170	SD Nanas	11,408,580.00
171	SD Petoyan II	7,027,680.00
172	SD Petoyan I	3,604,166.00
173	SD Giripurwo	4,888,757.00
174	SD Giritirto	3,600,350.00
175	SD Klampok	8,405,254.00
176	SD Karangnongko I	6,567,171.00
177	SD Karangnongko III	1,444,985.00
178	SD Karangtengah II	17,180,385.00
179	SD Karangtengah I	4,916,291.00
180	SD Giricahyo	4,272,794.00
181	SD Karangnongko II	5,594,479.00
182	SD Sendang	4,792,058.00
183	SD Sawahan	5,113,112.00
184	SD Sawur	12,335,052.00
185	SD Bedoyo	14,107,146.00
186	SD Tambakromo I	6,950,818.00
187	SD Tambakromo II	5,113,586.00
188	SD Tambakromo III	7,748,196.00
189	SD Jatisari	14,432,899.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
190	SD Surodadi I	13,273,477.00
191	SD Kenteng I	5,362,902.00
192	SD Kenteng II	306,561.00
193	SD Klumpit	5,316,437.00
194	SD Karangasem	6,120,253.00
195	SD Tegalrejo	3,731,700.00
196	SD Trengguno	5,674,888.00
197	SD Tegalrejo Baru	9,780,760.00
198	SD Asemblulang	3,189,491.00
199	SD Ngabean	12,426,647.00
200	SD Surubendo	4,653,990.00
201	SD Nongkosepet	5,923,842.00
202	SD Gombang I	10,241,729.00
203	SD Gombang II	2,655,668.00
204	SD Ponjong I	4,127.00
205	SD Ponjong IV	498,375.00
206	SD Mendak	12,688,138.00
207	SD Umbulrejo	11,677,973.00
208	SD Ponjong II	3,927,974.00
209	SD Ponjong III	8,924,080.00
210	SD Genjahan II	5,649,209.00
211	SD Sumbergiri	8,765,400.00
212	SD Genjahan I	4,572,455.00
213	SD Genjahan III	6,187,298.00
214	SD Surodadi II	5,043,381.00
215	SD Sunggingan	10,132,362.00
216	SD Playen I	1,730,985.00
217	SD Playen VI	5,441,453.00
218	SD Playen IV	3,441,376.00
219	SD Ngunut	3,676,317.00
220	SD Playen III	12,381,698.00
221	SD Ngawu	3,012,441.00
222	SD Bleberan	3,696,363.00
223	SD Sawahan	5,364,140.00
224	SD Dengok II	7,757,510.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
225	SD Siyono I	6,448,306.00
226	SD Mendongan	6,402,553.00
227	SD Siyono III	3,782,029.00
228	SD Weroharjo	4,024,863.00
229	SD Logandeng	3,592,457.00
230	SD Plembon	4,576,156.00
231	SD Gading Asri	26,862,851.00
232	SD Dengok I	6,867,047.00
233	SD Ngleri	11,999,661.00
234	SD Teguhan	5,154,675.00
235	SD Banaran I	4,107,708.00
236	SD Banaran III	5,592,446.00
237	SD Getas I	7,155,937.00
238	SD Getas II	5,323,791.00
239	SD Wonolagi	402,808.00
240	SD Playen V	3,232,644.00
241	SD Bulu	9,364,083.00
242	SD Plembutan I	5,536,156.00
243	SD Plembutan Asri	3,804,876.00
244	SD Banyusoco I	5,248,070.00
245	SD Banyusoco II	3,796,690.00
246	SD Bunder I	9,221,991.00
247	SD Bunder II	5,569,335.00
248	SD Bunder III	4,956,319.00
249	SD Sendangsari	10,200,714.00
250	SD Nglegi I	5,534,471.00
251	SD Nglegi II	4,769,200.00
252	SD Klepu	9,148,679.00
253	SD Terbah II	6,214,743.00
254	SD Sidomulyo	17,197,725.00
255	SD Panjatan	2,042,103.00
256	SD Baran	7,426,911.00
257	SD Pugeran	3,674,651.00
258	SD Beji	3,244,416.00
259	SD Terbah I	3,478,964.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
260	SD Belang	3,000,477.00
261	SD Semoya	4,586,419.00
262	SD Patuk I	1,684,218.00
263	SD Patuk II	12,697,476.00
264	SD Doga	4,084,839.00
265	SD Sokasari	16,521,265.00
266	SD Ngoro-oro	13,303,375.00
267	SD Nglanggeran	4,732,824.00
268	SD Pengkok	2,005,559.00
269	SD Waduk	2,487,718.00
270	SD Panggang III	4,913,796.00
271	SD Panggang II	6,068,338.00
272	SD Banyumeneng	12,335,251.00
273	SD Bibal	7,020,949.00
274	SD Legundi I	5,864,505.00
275	SD Girimulyo	6,853,683.00
276	SD Wiloso II	5,196,452.00
277	SD Wiloso I	8,608,709.00
278	SD Girisekar	11,461,508.00
279	SD Girikarto	9,161,285.00
280	SD Sawah	5,735,079.00
281	SD Panggang I	18,233,104.00
282	SD Legundi II	5,545,047.00
283	SD Pejaten	6,566,542.00
284	SD Sawah III	16,810,380.00
285	SD Girisuko	5,737,214.00
286	SD Temuireng II	4,160,017.00
287	SD Turunan	9,836,762.00
288	SD Pacar	3,387,609.00
289	SD Temuireng I	7,715,998.00
290	SD Paliyan II	2,515,610.00
291	SD Paliyan IV	3,558,406.00
292	SD Paliyan I	163,192.00
293	SD Paliyan V	2,889,092.00
294	SD Giring	5,010,256.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
295	SD Paliyan III	2,726,982.00
296	SD Pelemgede	5,812,176.00
297	SD Trowono I	3,460,355.00
298	SD Karangasem	4,078,577.00
299	SD Mulusan	10,086,849.00
300	SD Sodo	9,001,106.00
301	SD Pampang I	8,597,555.00
302	SD Pampang II	3,362,095.00
303	SD Karangmojo II	5,744,207.00
304	SD Gentungan	6,711,099.00
305	SD Sendowo I	7,427,375.00
306	SD Katongan II	3,981,330.00
307	SD Gajasari	3,686,572.00
308	SD Nglipar I	8,074,087.00
309	SD Nglipar II	3,325,894.00
310	SD Kwarasan	5,739,783.00
311	SD Sumberjo	3,964,374.00
312	SD Sigerung	7,841,439.00
313	SD Natah	5,389,972.00
314	SD Gentungan III	3,871,953.00
315	SD Pilangrejo	5,636,551.00
316	SD Sendowo III	3,107,991.00
317	SD Glompong	4,453,218.00
318	SD Sendowo II	9,943,557.00
319	SD Karangsari	6,006,335.00
320	SD Katongan III	3,978,856.00
321	SD Klayar	3,281,123.00
322	SD Candi III	6,133,301.00
323	SD Katongan I	3,823,349.00
324	SD Bendo	7,042,661.00
325	SD Daguran	3,040,434.00
326	SD Watusigar I	1,552,178.00
327	SD Watusigar II	3,398,650.00
328	SD Ngawen I	9,663,576.00
329	SD Ngawen II	6,220,715.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
330	SD Ngawen III	3,476,486.00
331	SD Pagerjuran	3,338,780.00
332	SD Ngampon	3,557,365.00
333	SD Purwareja	1,263,479.00
334	SD Jurangjero	2,321,413.00
335	SD Gunung Gambar	5,598,403.00
336	SD Sambeng I	205,708.00
337	SD Sambeng II	3,325,553.00
338	SD Tobong	2,939,141.00
339	SD Sambirejo	2,800,885.00
340	SD Ngawen IV	5,320,505.00
341	SD Beji	6,683,279.00
342	SD Tancep I	666,156.00
343	SD Tancep II	4,099,637.00
344	SD Karangmojo IV	3,471,144.00
345	SD Karangmojo II	4,911,763.00
346	SD Karangmojo V	7,164,219.00
347	SD Ngawis	3,605,418.00
348	SD Tlogowareng	3,972,600.00
349	SD Ngagel	3,768,932.00
350	SD Karangmojo III	5,915,443.00
351	SD Karangmojo I	14,973,817.00
352	SD Gedangan	18,098,053.00
353	SD Gedangan I	4,506,548.00
354	SD Pangkah	11,270,505.00
355	SD Karangwetan	4,183,041.00
356	SD Candi II	4,147,371.00
357	SD Candi I	3,184,958.00
358	SD Candi Baru I	4,680,064.00
359	SD Candi Baru II	8,038,432.00
360	SD Sokoliman I	5,023,081.00
361	SD Karanganom I	3,000,373.00
362	SD Karanganom II	4,966,036.00
363	SD Wiladeg	2,529,044.00
364	SD Bendungan II	3,835,220.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
365	SD Bendungan III	3,803,430.00
366	SD Bendungan I	4,212,922.00
367	SD Grogol I	4,376,857.00
368	SD Grogol IV	4,843,683.00
369	SD Gelaran I	11,404,213.00
370	SD Gelaran II	4,036,997.00
371	SD Banyubening III	4,419,228.00
372	SD Banyubening I	5,844,149.00
373	SD Gelaran III	6,626,558.00
374	SD Pengkol	4,522,734.00
375	SD Slametan	2,452,515.00
376	SD Karangduwet I	3,028,638.00
377	SD Karangduwet III	9,236,943.00
378	SD Jetis	9,550,588.00
379	SD Balong	1,928,101.00
380	SD Jepitu I	1,906,826.00
381	SD Nglindur	7,341,575.00
382	SD Rongkop	3,001,500.00
383	SD Tileng I	3,459,574.00
384	SD Tileng II	310,651.00
385	SD Pucung	3,630,700.00
386	SD Songbanyu I	3,345,234.00
387	SD Songbanyu II	5,922,366.00
388	SD Kandri	4,477,010.00
389	SD Balong III	7,861,505.00
390	SD Jepitu III	4,291,223.00
391	SD Tileng III	3,321,572.00
392	SD Wotawati	971,860.00
393	SD Tegalrejo	3,045,108.00
394	SD Joho	4,261,963.00
395	SD Gabugan	3,002,200.00
396	SD Prengguk I	3,173,587.00
397	SD Prengguk II	4,788,912.00
398	SD Tegalrejo	2,876,883.00
399	SD Tengklík	17,008,402.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
400	SD Gupit	7,234,283.00
401	SD Candi	10,307,292.00
402	SD Gedangan I	3,662,261.00
403	SD Gedangan II	2,187,688.00
404	SD Hargomulyo I	2,709,578.00
405	SD Hargomulyo II	9,583,739.00
406	SD Ngalang-alang Ombo	3,439,530.00
407	SD Serut	15,604,441.00
408	SD Serut Baru	1,667,501.00
409	SD Watugajah	1,738,596.00
410	SD Mertelu	10,078,032.00
411	SD Mertelu Baru	3,443,235.00
412	SD Guyangan	13,555,868.00
413	SD Ngalang I	3,421,667.00
414	SD Ngalang II	22,238,566.00
415	SD Karanganyar	17,593,789.00
416	SD Buyutan	3,874,067.00
417	SD Karangpelem	0,00
418	SD Sampang	3,909,687.00
419	SD Kedung Bolong	4,890,144.00
420	SD Pondok	16,968,010.00
421	SMP 1 WONOSARI	62,796,121.00
422	SMP 2 WONOSARI	88,154,597.00
423	SMP 3 WONOSARI	35,860,007.00
424	SMP 4 WONOSARI	195,835,367.00
425	SMP 1 PATUK	28,949,171.00
426	SMP 2 PATUK	10,558,859.00
427	SMP 3 PATUK	11,603,492.00
428	SMP N 4 PATUK	1,038,582.00
429	SMP 1 SAPTOSARI	1,262,342.00
430	SMP 2 SAPTOSARI	41,578,019.00
431	SMP 1 TEPUS	63,083,250.00
432	SMP 2 TEPUS	3,220,831.00
433	SMP 3 TEPUS	14,417,814.00
434	SMP 1 TANJUNGSARI	40,109,569.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
435	SMP 2 TANJUNGSARI	14,649,811.00
436	SMP 1 PLAYEN	89,875,194.00
437	SMP 2 PLAYEN	60,789,213.00
438	SMP 3 PLAYEN	52,664,101.00
439	SMP 4 PLAYEN	43,094,958.00
440	SMP 1 NGAWEN	119,109,461.00
441	SMP 3 NGAWEN	2,343,949.00
442	SMP 1 GEDANGSARI	37,230,248.00
443	SMP 2 GEDANGSARI	57,063,746.00
444	SMP 3 GEDANGSARI	41,689,324.00
445	SMP 1 PONJONG	95,975,901.00
446	SMP 2 PONJONG	47,463,743.00
447	SMP 3 PONJONG	48,323,016.00
448	SMP 4 PONJONG	9,789,211.00
449	SMP 1 PALIYAN	93,082,608.00
450	SMP 2 PALIYAN	14,665,825.00
451	SMP 1 KARANGMOJO	57,302,344.00
452	SMP 2 KARANGMOJO	48,175,280.00
453	SMP 3 KARANGMOJO	6,637,671.00
454	SMP 1 PANGGANG	35,820,928.00
455	SMP 2 PANGGANG	25,663,884.00
456	SMP 1 PURWOSARI	34,899,960.00
457	SMP 1 RONGKOP	29,688,586.00
458	SMP 5 PANGGANG	3,205,996.00
459	SMP 1 GIRISUBO	22,619,822.00
460	SMP 1 SEMANU	27,056,290.00
461	SMP 2 SEMANU	3,226,527.00
462	SMP 3 SEMANU	53,483,818.00
463	SMP 1 SEMIN	23,783,876.00
464	SMP 2 SEMIN	38,790,982.00
465	SMP 3 SEMIN	6,797,467.00
466	SMP 1 NGLIPAR	149,680,843.00
467	SMP 2 NGLIPAR	92,137,599.00
468	SMP 3 NGLIPAR	13,372,655.00
469	SMP 4 NGAWEN	10,177,754.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sekolah	Sisa Kas
470	SMP 3 SAPTOSARI	51,245,483.00
471	SMP 3 PANGGANG	4,087,485.00
472	SMP 4 PANGGANG	13,223,171.00
473	SMP 2 PURWOSARI	30,208,587.00
474	SMP 3 GIRISUBO	12,770,428.00
475	SMP 4 SEMIN	6,634,047.00
476	SMP 5 NGAWEN	4,610,136.00
477	SMP 5 PATUK	106,577.00
478	SMP 2 GIRISUBO	5,509,933.00
479	SMP 4 NGLIPAR	9,198,852.00
480	SMP 2 RONGKOP	1,287,992.00
481	SMP 3 TANJUNGSARI	19,461,852.00
	JUMLAH	4,800,897,563.00

e. Dana APBN

1. Dinas Pendidikan dan Olahraga

Pada Tahun 2018 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menerima hibah uang dan barang dari dana APBN senilai Rp.12.096.087.200,00 dan teralisasi Rp12.095239.178,00.

Secara klasifikasi dapat kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 6.12 Realisasi Dana APBN Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian Kegiatan	Pendapatan Hibah (Rp)	Realisasi Hibah(Rp)	Sisa Dana (Rp)
1.	Hibah Uang- Untuk Kegiatan/ Belanja Barang dan Jasa	782.300.000,00	782.300.000,00	0,00
2.	Hibah Barang - Berupa Pekerjaan Fisik ke Sekolah Swasta	4.444.928.500,00	4.444.928.500,00	0,00
3.	Pembangunan Fisik Gedung dan Meubelair	1.791.384.000,00	1.791.326.978,00	57.022,00
4.	Peningkatan Nilai - Rehab/Renovasi Gedung	4.032.450.000,00	4.031.659.000,00	791.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.	Peralatan Laboratorium	806.716.700,00	806.716.700,00	0,00
6.	Sarana Teknologi Informasi (TI)	58.308.000,00	58.308.000,00	0,00
7.	Alat Kesenian	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
JUMLAH		12.096.087.200,00	12.095.239.178,00	848.022,00

Adapun rincian masing-masing realisasi dana APBN Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Hibah Uang - Untuk Kegiatan/Belanja Barang dan Jasa

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menerima Hibah Uang sebesar Rp782.300.000,00 yang diterima oleh 129 (seratus dua puluh Sembilan) Sekolah Dasar Negeri dan 36 (tiga puluh enam) Sekolah Dasar Swasta untuk pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Implementasi Sekolah Dasar dan 9 (Sembilan) Dasar Sekolah Negeri untuk kegiatan Sekolah Model Sekolah dasar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.13 Realisasi Dana APBN berupa Hibah Uang Tahun Anggaran 2018

No	Uraian Kegiatan	Pendapatan Hibah (Rp)	Realisasi Hibah (Rp)	Sisa Hibah (Rp)
1	Pendampingan implementasi K. 13 2018 SD (Negeri dan Swasta)	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00
2	Sekolah Model 2018 SD	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
3	Program Keprofesian Berkelanjutan SMP 2018	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00
	JUMLAH	782.300.000,00	782.300.000,00	0,00

b. Hibah Barang - Berupa Pekerjaan Fisik ke Sekolah Swasta

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menerima Hibah berupa barang senilai Rp4.444.928.500,00 di 18 (delapan belas) SMP Swasta di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**Tabel 6.14 Realisasi Dana APBN
berupa Hibah Barang Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Pendapatan Hibah (Rp)	Realisasi Hibah (Rp)	Sisa Hibah (Rp)
1	Lab Komputer SMP Muh. 1 Gedangsari	233.420.900,00	233.420.900,00	0,00
2	Lab Komputer SMP Pembangunan Karangmojo	233.420.900,00	233.420.900,00	0,00
3	Lab Komputer SMP Muh. 2 Nglipar	233.420.900,00	233.420.900,00	0,00
4	Lab Komputer SMP Muh. Ponjong	233.420.900,00	233.420.900,00	0,00
5	Lab Komputer SMP Muh. 1 Wonosari	233.420.900,00	233.420.900,00	0,00
6	Rehabilitasi Gedung SMP Ekakapti Karangmojo	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
7	Rehab RKB SMP Muh 1 Gedangsari	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
8	Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Muh. Playen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
9	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Muh. 2 Gedangsari	291.100.000,00	291.100.000,00	0,00
10	Pembangunan Gedung Perpustakaan SMP Muh. 2 Wonosari	291.100.000,00	291.100.000,00	0,00
11	Pembangunan Lab. Komputer SMP Muh. Al Mujahidin	262.047.000,00	262.047.000,00	0,00
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Muh. 1 Wonosari	359.114.000,00	359.114.000,00	0,00
13	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Muh. Semin	179.557.000,00	179.557.000,00	0,00
14	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Muh. Bogor Playen	153.871.000,00	153.871.000,00	0,00
15	Pembangunan Perpustakaan SDII Waladun Sholihun Playen	153.871.000,00	153.871.000,00	0,00
16	Rehabilitasi Ruang Belajar SD Muh. Karangtengah Wonosari	396.329.000,00	396.329.000,00	0,00
17	Rehabilitasi Ruang Belajar SD Muh. Kuwon Ponjong	311.118.000,00	311.118.000,00	0,00
18	Rehabilitasi Ruang Belajar SD Muh. Sidorejo Semin	429.717.000,00	429.717.000,00	0,00
	JUMLAH	4.444.928.500 ,00	4.444.928.500 ,00	0,00

c. Pembangunan Fisik Gedung dan Meubelair

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menerima Hibah untuk pembangunan fisik Gedung dan Meubelair sebesar Rp1.791.384.000,00 terealisasi Rp1.791.326.978,00 sisa hibah Rp57.022,00 yang tersebar di 3 (tiga) SMP Negeri dan 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**Tabel 6.14 Realisasi Dana APBN
berupa Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Pendapatan Hibah (Rp)	Realisasi Hibah (Rp)	Sisa Hibah (Rp)
1	Pembangunan Gedung Pertemuan (Tambah Lantai 2) SMP N 1 Wonosari	952.283.000,00	952.225.978,00	57.022,00
2	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP N 1 Semanu	327.488.000,00	327.488.000	0,00
3	Pembangunan Musholla SMP N 2 Tepus	50.000.000,00	50.000.000	0,00
4	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD N Baran I Rongkop	153.871.000,00	153.871.000	0,00
5	Pembangunan Perpustakaan SD N Ponjong I Ponjong	153.871.000,00	153.871.000	0,00
6	Pembangunan Perpustakaan SD N Tepus IV Tepus	153.871.000,00	153.871.000	0,00
	JUMLAH	1.791.384.000,00	1.791.326.978,00	57.022,00

d. Peningkatan Nilai - Rehab/Renovasi Gedung

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menerima hibah peningkatan nilai Rehab/Renovasi Gedung sebesar Rp4.032.450.000,00 terealisasi Rp4.031.659.000,00 sisa hibah Rp791.000,00 yang tersebar di 6 (enam) SMP Negeri dan 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6.15 Realisasi Dana APBN
berupa Peningkatan Nilai Gedung Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Pendapatan Hibah (Rp)	Realisasi Hibah (Rp)	Sisa Hibah (Rp)
1	Renovasi Kantor Guru SMP N 2 Wonosari	960.020.000 ,00	959.710.000,00	310.000,00
2	Renovasi Gedung Pertemuan SMP N 1 Karangmojo	952.283.000,00	951.802.000,00	481.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP N 1 Semanu	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan SMP N 1 Tanjungsari	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5	Rehab Lab. IPA SMP N 2 Karangmojo	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6	Rehabilitasi Gedung SMP N 2 Semanu	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
7	Rehabilitasi Ruang Belajar SD N Kajar	237.026.000,00	237.026.000,00	0,00
8	Rehabilitasi Ruang Belajar SD N Bendung II Semin	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00
9	Rehabilitasi Ruang Belajar SD N Gabungan Girisubo	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
10	Rehabilitasi Ruang Belajar SD N Jepitu I Girisubo	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00
11	Rehabilitasi Ruang Belajar SD N Mentel I Tanjungsari	313.121.000,00	313.121.000,00	0,00
	JUMLAH	4.032.450.000,00	4.031.659.000,00	791.000,00

e. Peralatan Laboratorium

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menerima Hibah peralatan komputer sebesar Rp806.716.700,00 terealisasi seluruhnya yang tersebar di 16 (enam) SMP Negeri dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6.16 Realisasi Dana APBN
berupa Peralatan Laboratorium Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Pendapatan Hibah (Rp)	Realisasi Hibah (Rp)	Sisa Hibah (Rp)
1	Lab Komputer SMP N 1 Ngawen	233.420.900,00	233.420.900,00	0,00
2	Lab Komputer SMP N 1 Semanu	233.420.900,00	233.420.900,00	0,00
3	Lab Komputer SMP N 2 Wonosari	233.420.900,00	233.420.900,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4	Peralatan IPA SMP N 1 Paliyan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
5	Peralatan IPA SMP N 3 Panggang	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
6	Peralatan IPA SMP N 1 Ponjong	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
7	Peralatan IPA SMP N 2 Semanu	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
8	Peralatan IPA SMP N 3 Semanu	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
9	Peralatan IPA SMP N 1 Wonosari	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
10	Peralatan Matematika SMP N 1 Karangmojo	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00
11	Peralatan Matematika SMP N 4 Ngawen	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00
12	Peralatan Matematika SMP N 1 Nglipar	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00
13	Peralatan Matematika SMP N 1 Patuk	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00
14	Peralatan Matematika SMP N 3 Playen	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00
15	Peralatan Matematika SMP N 1 Saptosari	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00
16	Peralatan Matematika SMP N 1 Wonosari	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00
	JUMLAH	806.716.700,00	806.716.700,00	0,00

f. Sarana Teknologi Informasi (TI)

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menerima Hibah sarana Teknologi Informasi sebesar Rp58.308.000,00 terealisasi seluruhnya yang terdapat di 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri Pampang 2 Paliyan dan Sekolah Dasar Negeri Mulusan Paliyan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

g. Alat Kesenian

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menerima Hibah berupa alat kesenian sebesar Rp180.000.000,00 terealisasi seluruhnya yang terdapat di 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SD Negeri Baran 1 Rongkop dan SD Negeri Jatis Semanu dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6.16 Realisasi Dana APBN
berupa Peralatan Laboratorium Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Pendapatan Hibah (Rp)	Realisasi Hibah (Rp)	Sisa Hibah (Rp)
1	Pengadaan Alat Kesenian SD Negeri Baran I Rongkop	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
2	Pengadaan Alat Kesenian SD Negeri Jetis Semanu	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
	JUMLAH	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00

e. Pihak ke III

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima dana dari Pihak ke III (CSR) ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul senilai Rp922.613.470,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. BPD DIY senilai Rp815.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 6.17. Program CSR Tahun 2018
BPD DIY Kantor Cabang Wonosari**

No.	BIDANG	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
1.	Pendidikan	30.000.000,00	30.000.000	Beasiswa SMA/SMK untuk 2 semester, per semester Rp.15.000.000
		75.000.000,00	75.000.000	SPM Dikdas



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.	Sosial & Ekonomi	100.000.000,00	100.000.000	Sumur bor lokasi Patuk & Nglipar, @ Rp.50.000.000
		160.000.000,00	160.000.000	Bedah Rumah lokasi Kec. Wonosari, Playen & Tepus, @ Rp.16.000.000
		100.000.000,00	100.000.000	Revitalisasi Pasar Argosari
		25.000.000,00	25.000.000	Pembangunan Atap Taman kuliner
3.	Pariwisata	75.000.000,00		Gapura Selamat Datang
			17.000.000	- Pantai Gesing
			17.000.000	- Pantai Krakal
			16.000.000	- Pantai Kukup
			25.000.000	- Pantai Baron
		250.000.000,00	250.000.000	Revitalisasi Bunderan Siyono
JUMLAH		815.000.000	815.000.000	

2. PT. BRI Syariah Yogyakarta senilai Rp 100.000.000,00 yaitu berupa bantuan 4 unit motor sampah roda 3 (viar) pada Dinas Lingkungan Hidup.
3. BCA cabang Wonosari ke Disdikpora senilai Rp 7.613.470,00 berupa buku umum pada SMP Negeri 1 Semanu.

6.1.2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 302/KEP/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disebutkan bahwa dalam hal Persetujuan Bersama antara Pemerintah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah akhir bulan September 2018, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Terhadap tambahan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung hanya diperkenankan untuk hal-hal yang bersifat wajib mengikat, pelayanan public dan pendanaan yang sudah ditentukan peruntukannya (*earmarking*) sebagaimana tertuang dalam Evaluasi Gubernur dimaksud. Tambahan belanja dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Berikut perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 302/KEP/2018 :

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		
		APBD MURNI	PERUBAHAN PERBUP KE5 (TINDAK LANJUT EVALUASI GUB)	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	4
1.	PENDAPATAN	1.716.742.745.689,30	1.786.050.668.379,01	69.307.922.689,71
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	208.747.851.213,37	217.393.391.371,08	8.645.540.157,71
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	41.388.250.000,00	47.137.026.586,00	5.748.776.586,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	36.061.984.696,00	36.747.368.399,00	685.383.703,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.626.002.400,00	14.370.184.563,64	(255.817.836,36)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.671.614.117,37	119.138.811.822,44	2.467.197.705,07
1.2.	Dana Perimbangan	1.297.211.891.000,00	1.298.814.083.208,00	1.602.192.208,00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.589.808.000,00	29.192.000.208,00	1.602.192.208,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	938.221.136.000,00	938.221.136.000,00	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	322.400.947.000,00	322.400.947.000,00	-
1.2.4.	Dana Insentif Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1	2	3	4	4
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	210.783.003.475,93	269.843.193.799,93	59.060.190.324,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	62.780.263.324,00	58.280.263.324,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	87.521.058.475,93	87.521.058.475,93	-
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	118.761.945.000,00	117.574.520.000,00	(1.187.425.000,00)
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.967.352.000,00	1.967.352.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.716.742.745.689,30	1.786.050.668.379,01	69.307.922.689,71
2.	BELANJA DAERAH	1.814.778.220.496,95	1.932.931.190.127,09	118.152.969.630,14
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.128.995.929.606,95	1.163.618.584.175,09	34.622.654.568,14
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	867.313.854.241,95	843.564.091.071,48	(23.749.763.170,47)
2.1.4.	BELANJA HIBAH	23.364.375.000,00	23.364.375.000,00	-
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	907.900.000,00	907.900.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA	9.136.446.675,00	11.605.279.400,00	2.468.832.725,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROPINSI, KAB/KOTA, PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	219.827.641.150,00	219.940.216.150,00	112.575.000,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.353.612.540,00	64.236.722.553,61	54.883.110.013,61
2.2.	BELANJA LANGSUNG	685.782.290.890,00	769.312.605.952,00	83.530.315.062,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.859.883.260,00	49.409.236.760,00	7.549.353.500,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	337.961.117.723,00	388.916.752.480,00	50.955.634.757,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	305.961.289.907,00	330.986.616.712,00	25.025.326.805,00
	JUMLAH BELANJA	1.814.778.220.496,95	1.932.931.190.127,09	118.152.969.630,14
	SURPLUS/(DEFISIT)	(98.035.474.807,65)	(146.880.521.748,08)	(48.845.046.940,43)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1	2	3	4	4
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	98.035.474.807,65	146.880.521.748,08	48.845.046.940,43
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	106.535.474.807,65	168.418.167.281,08	61.882.692.473,43
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	106.535.474.807,65	168.418.167.281,08	61.882.692.473,43
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.535.474.807,65	168.418.167.281,08	61.882.692.473,43
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.500.000.000,00	21.537.645.533,00	13.037.645.533,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	21.500.000.000,00	13.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	37.645.533,00	37.645.533,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.500.000.000,00	21.537.645.533,00	13.037.645.533,00
	PEMBIAYAAN NETO	98.035.474.807,65	146.880.521.748,08	48.845.046.940,43
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018. Laporan keuangan ini merupakan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 secara lengkap terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2018 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 yang kami sajikan masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk periode yang akan datang, dan semoga Allah S.W.T selalu memberikan petunjukNya. Amin.

